



PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA

tasik
maju



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2025-2029



Jalan Letnan Harun No. 1
Kota Tasikmalaya



tasikmalayakota.go.id



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
dan
WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025 - 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025 - 2029.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode Tahun 2023-2026

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, Daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kedudukan;
- b. sistematika, isi, dan uraian;
- c. tata cara perubahan RPJMD; dan
- d. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan yang memuat Visi, Misi dan program Daerah.

BAB V SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA CARA PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan daerah ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,



VINI ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT: (4/139/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi Daerah.

Tahun 2024 Kota Tasikmalaya telah mengadakan pemilihan kepala daerah dan telah terpilih Wali Kota baru. oleh karena itu penyusunan RPJMD 2025-2029 bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Wali Kota Tasikmalaya terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah, dan program perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara guna mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam pengertian lain, pembangunan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan pembangunan. Adapun tujuan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. Proses pembangunan Daerah dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah RPJMD. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih paling lama 6 bulan sejak pelantikan harus menyusun dan menetapkan RPJMD untuk waktu 5 (lima) tahun masa jabatannya.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD berperan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum,



program pembangunan Daerah, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

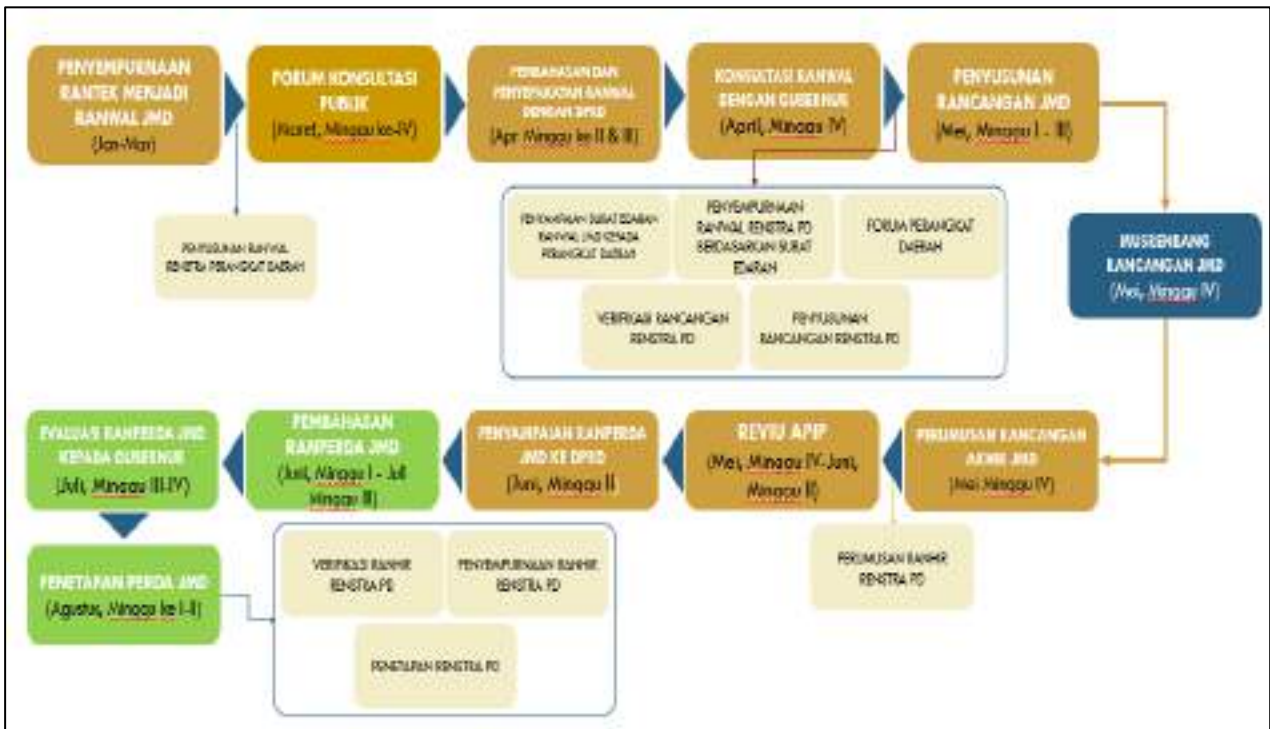
RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 sebagai bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 tidak lepas dan mengacu pada RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 serta RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan, analisis, uji publik, pembahasan bersama Perangkat Daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya. Secara umum tahapan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- 1. Persiapan Penyusunan RPJMD
- 2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. Konsultasi Publik;
 - c. Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala daerah dengan DPRD;
 - d. Konsultasi ke Gubernur.
- 3. Penyusunan Rancangan RPJMD
- 4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
- 5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
- 6. Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD
- 7. Penyusunan Ranperda RPJMD
- 8. Penyampaian Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD
- 9. Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD

Gambar 1.1.

Tahapan dan Jadwal Penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029



Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025.

Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah,



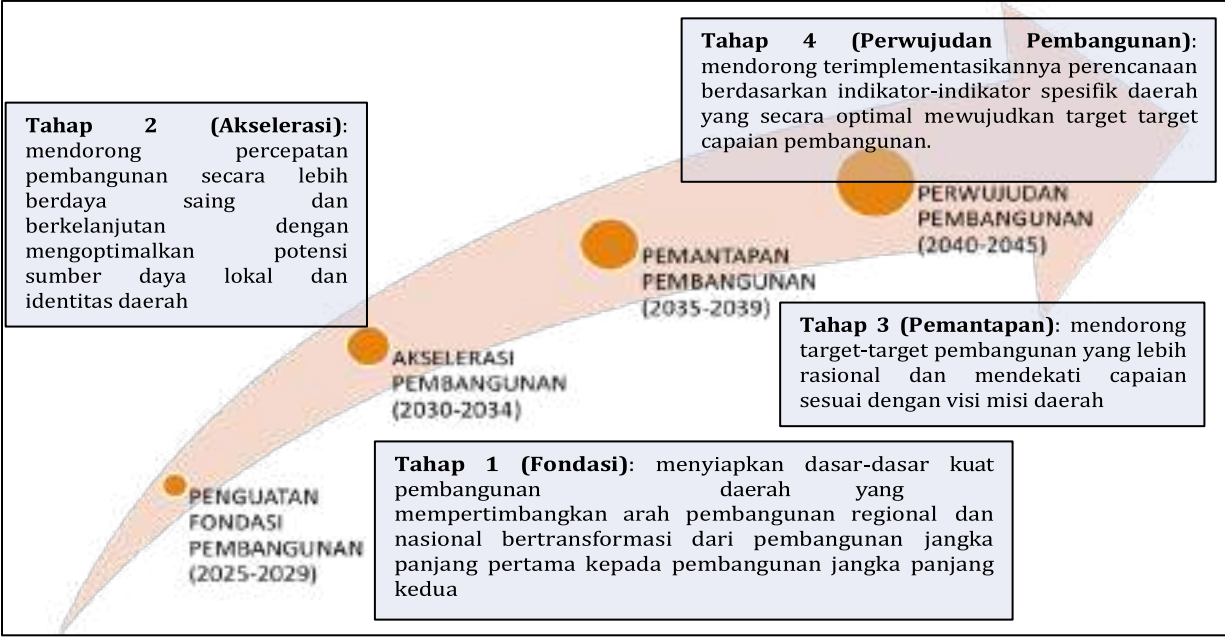
RPJMD memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis dan politis sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh Masyarakat;
2. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
5. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi;
6. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian Pembangunan;
7. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran.

Dalam upaya mewujudkan keberlangsungan pembangunan, maka arahan dari dokumen RPJPD dipandang sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024, dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan tema pembangunan RPJMD, yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikasi arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas, tema tahapan pembangunan dan arahan kebijakan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2.
Tahapan Pembangunan dan Arahkan Kebijakan RPJPD Kota Tasikmalaya
Tahun 2025-2045



Sumber : RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045.

RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pertama dari lima dari tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045. Tahapan pertama RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045 adalah tahapan penguatan pondasi pembangunan, tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan Sosial;
2. Penguatan tata kelola sumber daya alam, pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten, serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif;
4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah;
5. Perlindungankebudayaan lokal dan optimalisasi tata kelola perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2025-2029 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Seiring dengan telah dilantiknya pasangan Viman alfarizi Ramdhan,ST.,MBA dan Rd. Diky Candra Negara sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikamalanya periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 maka Pemerintahan Kota Tasikmalaya menyusun dan menetapkan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029.



RPJMD ini disusun dalam rangka menjalankan dan mencapai visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2025–2029, yang selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tahapan penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun melalui pendekatan strategi penyusunan *pentahelix* atau *dynamic governance* dengan melibatkan stakeholder. Pada tahapan Konsultasi Publik dilaksanakan melalui penjangkaran masukan dan saran penyempurnaan yang berasal dari berbagai stakeholder pembangunan di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya dokumen dibahas bersama anggota DPRD Kota Tasikmalaya, dimana hasil pembahasannya dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat. Pada tahap Forum Perangkat Daerah yang membahas rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga melibatkan berbagai stakeholder dalam pembahasan program prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan rancangan, dibahas pada Forum Lintas Perangkat Daerah. Selanjutnya, pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota sebagai forum pertemuan antar pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan Kota Tasikmalaya dalam rangka membahas rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RPJMD melalui proses Review APIP dan pembahasan bersama DPRD Kota tasikmalaya, untuk kemudian dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 pada bulan Agustus 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nasional Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 –2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan



- Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3).

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

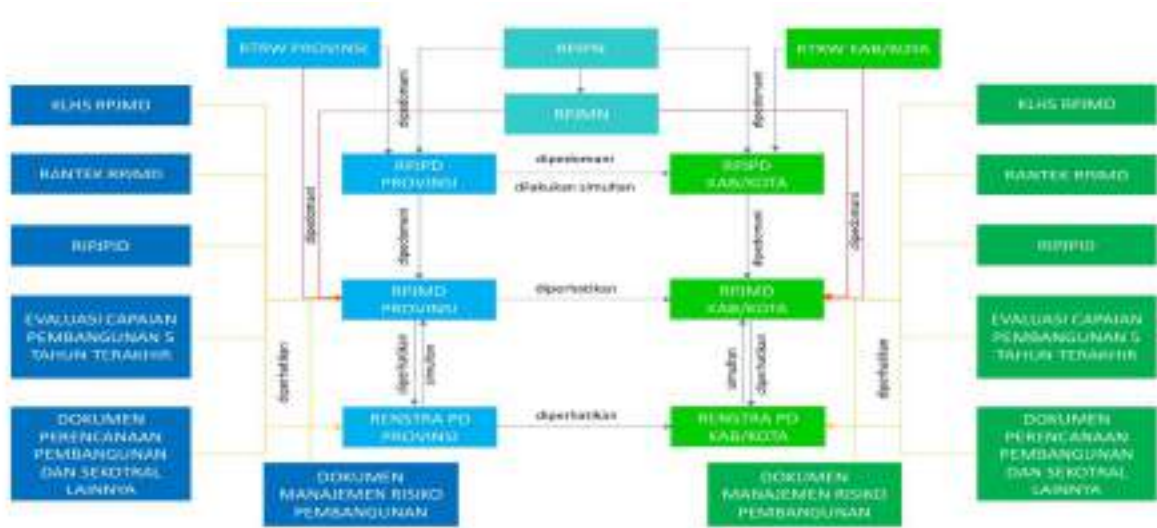
RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arahan dan amanat kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam upaya sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, penyusunannya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 tidak lepas dan mengacu pada RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-20425 serta RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1.3.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya



Sumber: *Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.*

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 2029 berpedoman pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2045 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 2029 berpedoman pada rancangan RTRW Kota Tasikmalaya 2025-2045, RTRW Provinsi Jawa Barat 2022 2042 serta RTRW Nasional 2008 2028, juga bersinergis dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra PD). Hubungan antar dokumen dapat diuraikan sebagai berikut.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya perlu memperhatikan arahan-arahan nasional yang termuat dalam RPJMN dan arahan-arahan Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam RPJMD, khususnya yang berkaitan dengan lokus wilayah dan kebijakan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di daerah. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Tasikmalaya dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

RPJMD dan RPJPD merupakan dua dokumen perencanaan pembangunan daerah yang saling terkait. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Visi, misi, dan tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan dan menyelaraskan dengan RPJPD, serta memastikan bahwa program-program pembangunan dalam RPJMD



berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

Dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045, sehingga dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Tahap I RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dimana untuk operasional perencanaan tahunannya dimuat dalam dokumen RKPD. Sehingga dalam penyusunan RKPD harus mengacu pada dokumen RPJMD. Atau dengan kata lain RPJMD memberikan arahan dan tujuan, sementara RKPD menjadi alat untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui program dan kegiatan konkret yang dilaksanakan setiap tahun. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan Renstra-PD. Renstra-PD adalah penjabaran lebih rinci dari RPJMD yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu lima tahun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selanjutnya Renstra-PD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bersifat tahunan, serta dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

Renja PD merupakan penjabaran dari RPJMD yang lebih rinci dan spesifik untuk setiap Perangkat Daerah (dinas, badan, kantor, dll.) dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Tasikmalaya dengan RTRW Kota Tasikmalaya

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahunan yang berisi visi, misi, dan program kepala daerah, dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan RTRW adalah dokumen perencanaan yang berkaitan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, meliputi penetapan fungsi-fungsi utama kawasan dan jaringan prasarana wilayah. Dalam penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan RTRW, karena RTRW memberikan arahan mengenai pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah.

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi penjabaran lebih detail dari rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045, sehingga diharapkan RPJMD akan mengarahkan program-program pembangunan yang akan dilakukan dalam periode lima tahun, dengan tetap memperhatikan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Tasikmalaya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tasikmalaya

KLHS memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD menyajikan analisis yang sistematis dan komprehensif untuk memastikan bahwa isu-isu lingkungan hidup terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. KLHS memberikan dasar untuk mengidentifikasi



potensi dampak lingkungan dari berbagai rencana pembangunan yang termuat dalam RPJMD, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2025-2029, terdapat 7 Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis Kota Tasikmalaya, yaitu:

- 1) Adanya degradasi kualitas lingkungan serta tingginya intensitas bencana alam dan kebakaran;
- 2) Belum optimalnya sistem infrastruktur permukiman terutama pengolahan limbah dan pengurangan sampah;
- 3) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
- 4) Kurangnya daya saing lokal, pemanfaatan potensi wilayah, serta produktivitas ekonomi;
- 5) Belum meratanya upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- 6) Penyelenggaraan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan demokrasi belum berjalan optimal; serta
- 7) Penerapan *Good Governance* belum berjalan maksimal.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program Pembangunan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan dan menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Memberikan gambaran tentang kerangka perekonomian daerah dan pendanaan pembangunan daerah jangka menengah;
3. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat;
5. Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 Bab, dengan uraian sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tasikmalaya secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang disajikan diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, Bab ini berisikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat catatan dan harapan terhadap pemanfaatan dokumen RPJMD ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108°08'83" – 108°24'02" Bujur Timur dan 7°10' – 7° 26'32" Lintang. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibukota provinsi Jawa Barat yaitu ± 105 Km dan dari Kota Jakarta ± 225 Km.

Kota Tasikmalaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, yang dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

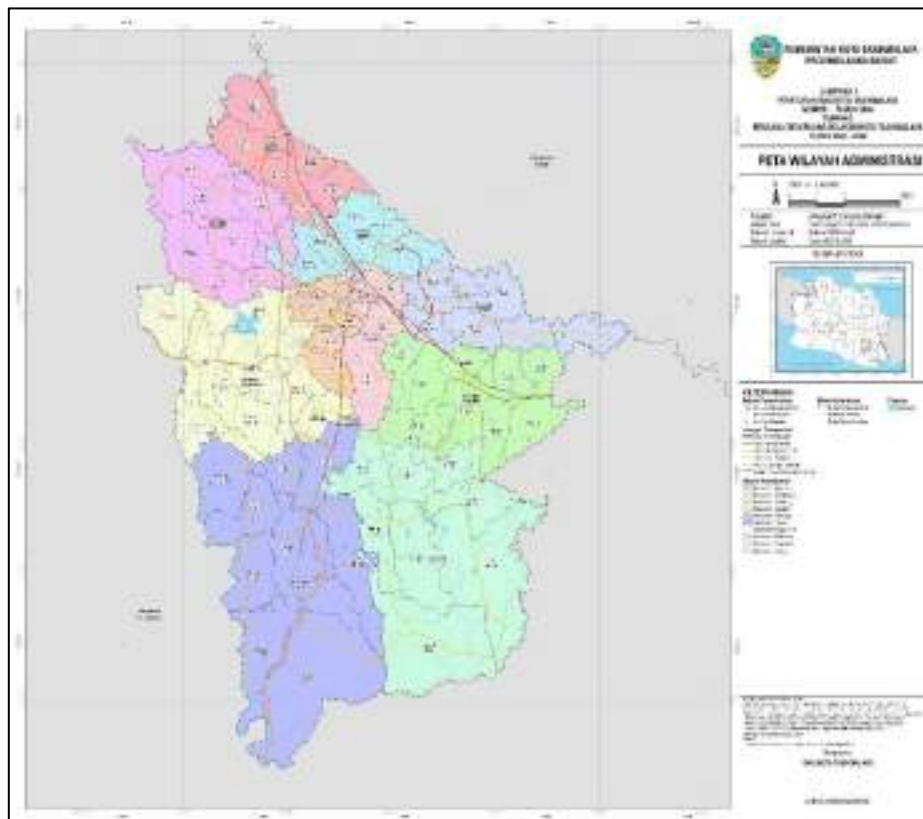
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdelinasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2017).

Adapun letak geografis Kota Tasikmalaya lebih lengkap dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 2.1.

Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Tasikmalaya



Sumber: Rancangan Perda RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045

Kota Tasikmalaya dalam Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur-Pangandaran menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam sektor perdagangan, dan jasa. Posisi geografis yang strategis sebagai penghubung antar daerah di Jawa Barat bagian selatan, dengan jalur transportasi yang menghubungkan kota-kota besar di sekitar Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Tengah, didukung oleh infrastruktur jalan yang cukup baik menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan jasa bagi daerah sekitarnya. Selain itu, Kota Tasikmalaya berperan dalam pengembangan sektor pendidikan di Jawa Barat bagian selatan. Terdapat sejumlah perguruan tinggi dan sekolah yang menarik mahasiswa dari luar daerah. Sebagai kota yang berkembang, Kota Tasikmalaya juga berperan dalam memberikan kontribusi sosial dan budaya bagi daerah-daerah sekitar.

Kota Tasikmalaya terbagi menjadi 10 kecamatan dan 69 kelurahan, untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan pembagian wilayah administrasi dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



Tabel 2.1.

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tasikmalaya

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelurahan
1	32.78.01	Cihideung	Argasari	36			Kota Baru
2			Cilembang	37			Margabakti
3			Nagarawangi	38			Setiajaya
4			Tugujaya	39			Setianagara
5			Tuguraja	40			Setiaratu
6			Yudanagara	41	32.78.07	Tamansari	Mugarsari
7	32.78.02	Cipedes	Cipedes	42			Mulyasari
8			Nagarasari	43			Setiamulya
9			Panglayungan	44			Setiawargi
10			Sukamanah	45			Sukahurip
11	32.78.03	Tawang	Cikalang	46			Sumelap
12			Empangsari	47	32.78.08	Mangkubumi	Tamanjaya
13			Kahuripan	48			Tamansari
14			Lengkongsari	49			Cigantang
15			Tawangsari	50			Cipari
16	32.78.04	Indihiang	Indihiang	51			Cipawitra
17			Panyingkiran	52	32.78.09	Bungursari	Karikil
18			Parakannyasag	53			Linggajaya
19			Sirnagalih	54			Mangkubumi
20			Sukamaju Kaler	55			Sambongjaya
21			Sukamaju Kidul	56			Sambongpari
22	32.78.05	Kawalu	Cibeuti	57	32.78.10	Purbaratu	Bantarsari
23			Cilamajang	58			Bungursari
24			Gunung Gede	59			Cibunigeulis
25			Gunung Tandala	60			Sukajaya
26			Karanganyar	61			Sukalaksana
27			Karsamenak	62			Sukamulya
28			Leuwiliang	63			Sukarindik
29			Talagasari	64	32.78.10	Purbaratu	Purbaratu
30			Tanjung	65			Singkup
31			Urug	66			Sukaasih
32	32.78.06	Cibeureum	Awipari	67			Sukajaya
33			Ciakar	68			Sukamenak
34			Ciherang	69			Sukanagara
35			Kersanagara				

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2025.

2.1.1.1.1. Potensi Sumber Daya Alam

1. Kehutanan

Kota Tasikmalaya mempunyai hutan negara (hutan produksi) seluas 319 hektar dan hutan rakyat seluas 1.565 hektar yang berperan penting dari segi lingkungan, ekonomi serta sosial budaya. Sektor kehutanan bukan merupakan

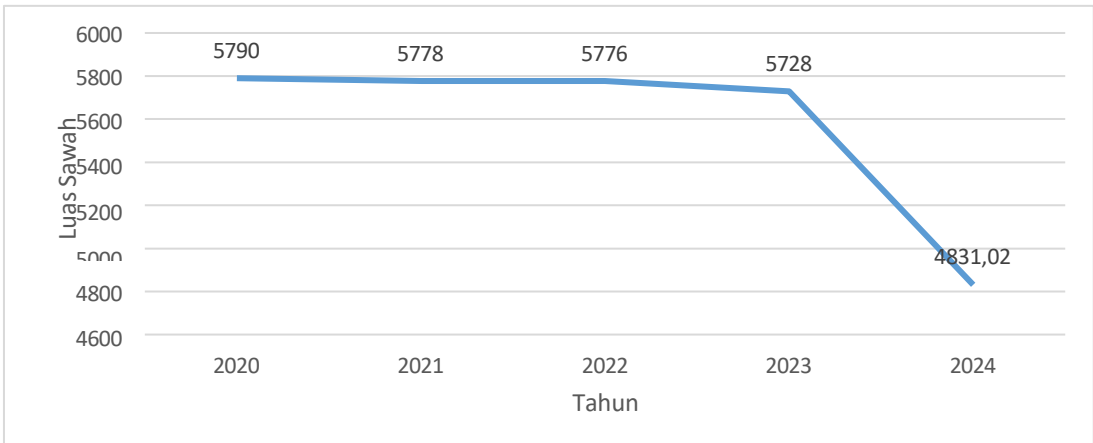
kewenangan kabupaten kota, sehingga Hutan produksi ini dikelola oleh Perum Perhutani Tasikmalaya.

2. Pertanian

Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan lahan pertanian di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 seluas 11.297,66 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 4.831,02 Ha dan lahan bukan sawah seluas 6467 Ha, dengan rasio persentase antara luas lahan sawah dan luas lahan bukan sawah sebesar 42,76 persen dan 57,24 persen.

Perkembangan luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Pada tahun 2020 lahan sawah seluas 5.790 Ha menjadi 4.831,02 Ha pada tahun 2024, sehingga berkurang 958,98 Ha atau 16,56 persen, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.2.
Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025.

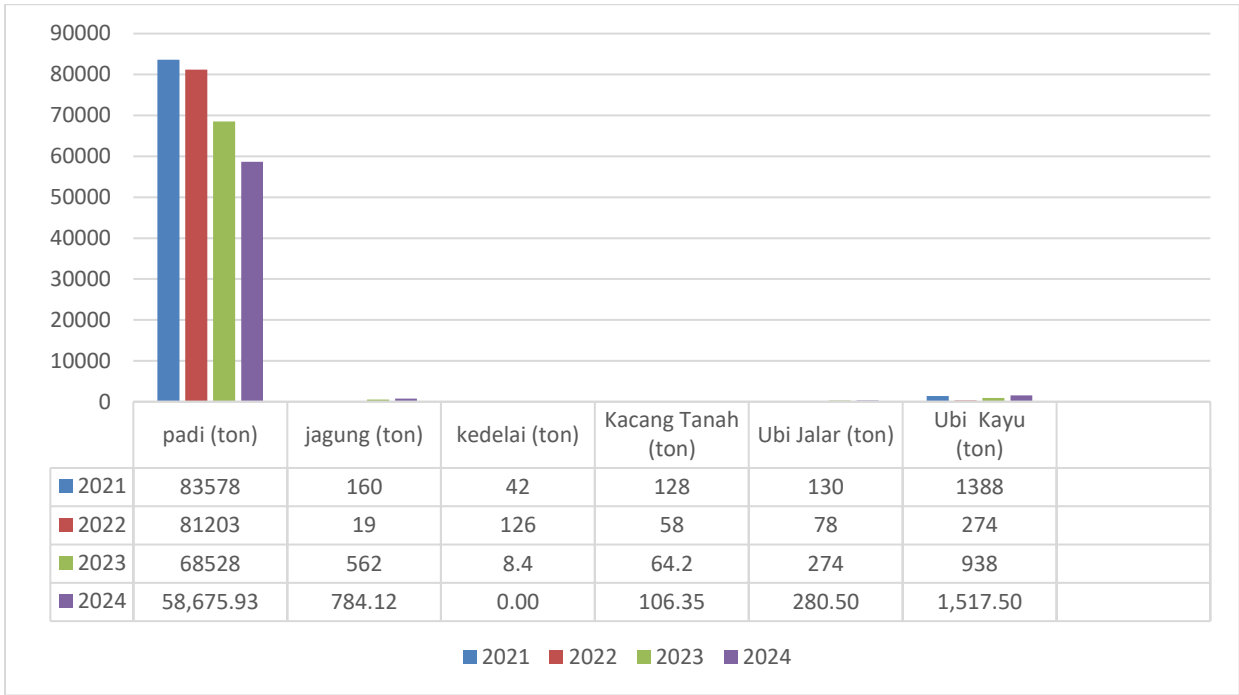
Dalam rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 direncanakan memiliki kawasan pertanian seluas 2.762 Ha yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan serta kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan seluas 1.242 Ha, kawasan peternakan seluas 44 Ha, dan kawasan perkebunan seluas 1.476 Ha. Dari luas kawasan pertanian tanaman pangan akan ditetapkan Luas Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 855 Ha untuk melindungi dan menjamin kawasan dan lahan pertanian secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

Padi merupakan produk unggulan pertanian Kota Tasikmalaya, berdasarkan data lima tahun terakhir, produksi padi berfluktuasi dan belum dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk Kota Tasikmalaya. Produksi beras baru memenuhi 48,8 persen dari total kebutuhan. Penurunan produksi padi disebabkan oleh alih fungsi lahan, produktivitas lahan, dan perubahan iklim. Produktivitas padi pada tahun 2024 mencapai 6,15 ton/hektar. Produktivitas lahan sangat dipengaruhi oleh penggunaan pupuk kimiawi atau pupuk anorganik secara terus menerus dalam waktu lama.

Pada tahun 2024 produksi padi mencapai 58.675,93 ton, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi padi terus menurun, hal ini perlu menjadi perhatian karena merupakan komoditas utama. Produksi padi ini masih mendominasi produksi tanaman pangan di Kota Tasikmalaya dibandingkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3.

Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025.

Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikultura sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas tanaman hortikultura sayuran terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Sementara komoditas tanaman hortikultura buah-buahan terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis.

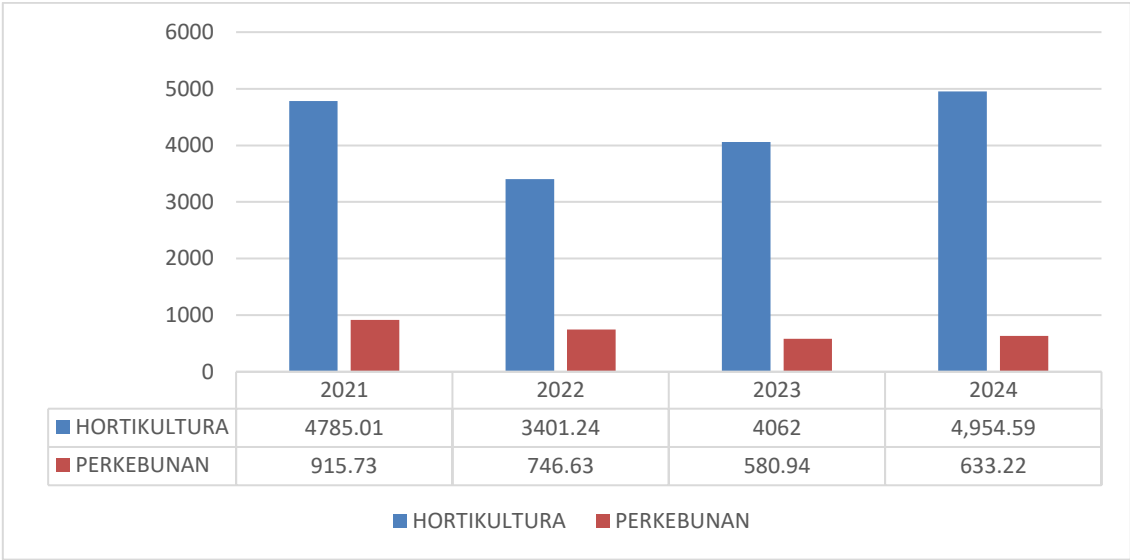
Tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Beberapa komoditas tanaman hortikultura yang memang berkarakter tahan terhadap kemarau yang cukup panjang dapat memproduksi lebih maksimal seperti cabe rawit, tomat, jamur, mangga, durian dan manggis. Sementara komoditas tanaman hortikultura yang kurang tahan terhadap cuaca panas/kering dan memerlukan asupan air yang cukup seperti: cabe besar, salak, rambutan dan papaya. Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sub sektor hortikultura berpotensi untuk terus dikembangkan dan dipertahankan serta ditingkatkan dukungan sarana/prasarana serta pembinaan petaninya.

Tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau. Produksi tanaman hortikultura terus menurun sampai tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4.

Produksi Hortikultura dan Perkebunan di Kota Tasikmalaya

Tahun 2021-2024 (Ton)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025.

Berdasarkan data tersebut, untuk meningkatkan produktivitas sub sektor perkebunan maka diperlukan perhatian khusus dan evaluasi faktor-faktor penurunan, serta strategi revitalisasi melalui bantuan bibit unggul, teknologi tepat guna, atau perbaikan manajemen lahan.

Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak sapi, kerbau, kuda kambing dan domba serta unggas seperti ayam, itik dan puyuh. Selain itu terdapat produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu. Populasi ternak komoditas sapi, kerbau dan kuda dalam 3 tahun terakhir mengalami tren penurunan. Komoditas kambing dan domba cenderung stabil dengan sedikit kenaikan dan berpotensi untuk pengembangan peternakan rakyat.

Populasi unggas cenderung stabil dan mengalami sedikit peningkatan. Populasi ayam ras petelur menunjukkan pertumbuhan konsisten dan mendukung untuk produksi telur. Ayam ras pedaging berada di level tinggi dan stabil yang sangat penting dalam mendukung pasokan daging ayam. Populasi puyuh naik cukup signifikan, hal ini berpeluang untuk diversifikasi produksi telur/daging unggas.

Tabel 2.2.

Perkembangan Populasi Ternak di Kota Tasikmalaya

Tahun 2021 – 2024

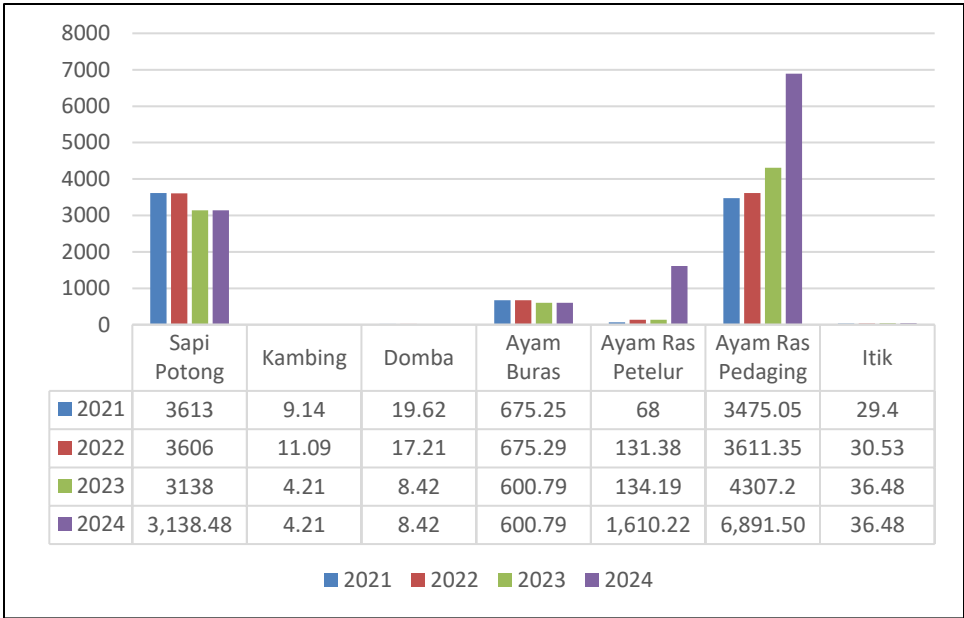
Komoditas (ekor)	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	2.911	2.878	2.774	2.686
Sapi Perah	212	210	202	202
Kerbau	680	680	680	671
Kuda	445	443	442	442
Kambing	3.156	3.304	3.313	3.355
Domba	13.119	13.297	13.279	13.394
Babi	-	-	-	-
Ayam Buras	731.221	731.601	731.293	738.793
Ayam Ras Petelur	136.080	142.080	144.090	151.890
Ayam Ras Pedaging	1.090.762	1.093.762	1.095.145	1.095.145
Itik	46.729	46.729	46.279	46.849
Puyuh	29.859	33.859	33.859	34.859

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025

Kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2024 sejumlah 1 kasus menurun dari tahun 2023 dengan 5 kasus. Pada tahun 2024 penyakit hewan menular yang terjadi adalah penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada 11 ekor sapi. Sementara pada tahun 2023 kasus penyakit hewan menular yang terjadi adalah PMK 47 ekor sapi dan LSD (Lumpy Skin Diseases) pada 32 ekor sapi.

Sementara produksi daging dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi daging di Kota Tasikmalaya didominasi daging sapi potong dan daging ayam ras. Produksi daging ayam ras lebih banyak daripada produksi daging sapi dan trennya terus meningkat selama 3 tahun terakhir seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5.
Perkembangan Produksi Daging di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 – 2024

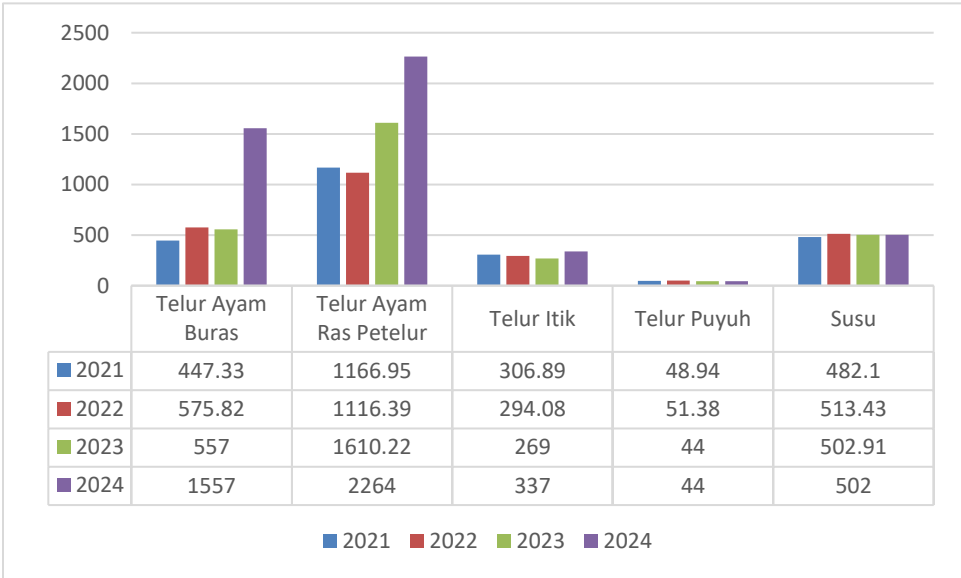


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025.

Daging ayam ras pedaging dan ayam ras petelur menunjukkan lonjakan signifikan, khususnya pada tahun 2024. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar, efisiensi produksi, atau kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan. daging sapi potong, kambing, dan domba mengalami penurunan produksi selama 2021–2023 dan stagnan di 2024, mengindikasikan tantangan di sektor peternakan ruminansia, mungkin terkait biaya pakan, iklim, atau daya saing. daging ayam buras dan itik relatif stabil, namun produksi cenderung stagnan tanpa ada lonjakan berarti.

Produksi Telur Ayam Ras Petelur menunjukkan pertumbuhan tertinggi sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, sementara produksi Telur Ayam Buras cukup stabil namun perlu dijaga agar penurunan tidak berlanjut. Produksi Telur Itik dan Puyuh mengalami tren penurunan berkelanjutan, sehingga memerlukan intervensi atau perbaikan kebijakan budidaya. Untuk produksi Susu cukup stabil. Berikut produksi telur dan susu di Kota Tasikmalaya.

Gambar 2.6.
Perkembangan Produksi Telur di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 – 2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025.

Pengembangan budidaya ayam ras harus lebih fokus karena menunjukkan potensi besar terhadap peningkatan produksi dan suplai protein hewani. Sementara itu, revitalisasi ternak ruminansia, perlu dukungan kebijakan atau insentif untuk peternak sapi, kambing, dan domba agar tren penurunan tidak berlanjut. Selain itu diversifikasi budidaya komoditas ternak khususnya ayam buras dan itik dengan mempertimbangkan peningkatan peran ayam buras dan itik sebagai alternatif protein.

Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan menjaga kualitas lahan pertanian, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah merintis aplikasi pupuk organik dalam budidaya pertanian. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah merintis pola budidaya pertanian perkotaan atau urban farming dengan metode budidaya tanaman secara hidroponik, tanaman buah dalam pot (Tabulampot) dan budidaya ikan dalam ember (budikdamber).

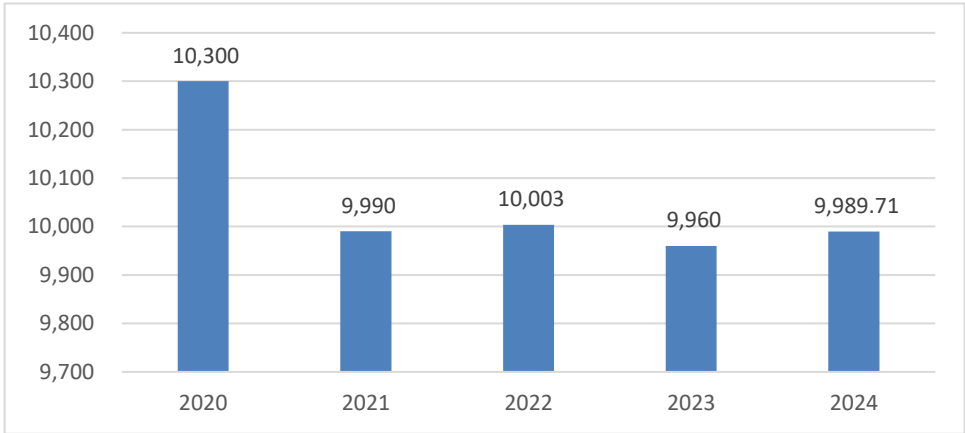
3. Perikanan Budidaya

Pada tahun 2024 areal perikanan budidaya seluas 692,28 hektar yang terdiri dari kolam pembenihan 19,49 hektar, kolam pembesaran 621,23 hektar, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 hektar, dan kolam air deras 0,14 hektar.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan tren yang terus menurun. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya sebesar 10.300 ton terus turun sampai tahun 2024 mencapai 9.989,71 ton. Produktivitas area perikanan budidaya pada tahun 2024 mencapai 14,43 ton/hektar.

Gambar 2.7.

Produksi Perikanan Budidaya di Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2025

Penurunan produksi perikanan disebabkan oleh perubahan iklim dan mayoritas pembudidaya ikan masih menerapkan teknik budidaya tradisional. Sementara angka konsumsi ikan perkapita penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2023 masih cukup rendah yaitu 23,41 kg/kapita/tahun dibandingkan dengan penduduk Provinsi Jawa Barat secara umum yang telah mencapai 37,01 kg/kapita/tahun.

4. Pariwisata

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya masuk kedalam Rencana Pembangunan untuk KPPP Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya. KPPP (Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi) adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan. Rencana Pembangunan pada KPPP untuk Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya Kota Tasikmalaya meliputi kriya kelom geulis, payung geulis, dan bordir.

Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami pertambahan yang cukup besar, tahun 2020 wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 30 orang meningkat pada tahun 2024 menjadi 816 orang.

Tabel 2.3.

Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total (Orang)
	Mancanegara	Domestik	
2020	39	344.384	344.423
2021	6	483.563	483.569
2022	30	642.098	642.128
2023	691	642.171	642.862
2024	816	642.793	643.609

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2025.

2.1.1.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) merupakan kapasitas lingkungan hidup untuk menyokong kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, serta menjaga

keseimbangan di antara keduanya. Sementara, Daya Tampung Lingkungan Hidup (DTLH) menggambarkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Ruang lingkup DDDTLH meliputi 5 focal area yaitu air, lahan, laut, udara, dan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tasikmalaya 2025-2029, kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Daya Dukung Air

Luas DAS Citanduy yang melalui Kota Tasikmalaya adalah 11.241,34 Ha dan DAS Ciwulan seluas 7.180,38 hektar. Dengan mengasumsikan ketersediaan air di Kota Tasikmalaya diperoleh dari debit DAS dengan perbandingan luas DAS yang melalui Kota Tasikmalaya dengan luas total DAS, diperoleh ketersediaan air total untuk pada DAS Citanduy sebesar 191.483,34 m³/tahun dan DAS Ciwulan sebesar 117.221,16 m³/tahun. Setelah dilakukan analisis, diperoleh total ketersediaan air di Kota Tasikmalaya adalah 308.704,50 ribu m³/tahun.

Kebutuhan air domestik berdasarkan PermenLH No. 17 Tahun 2009 adalah sebesar 800 m³/kapita/tahun. Sementara itu, ditinjau dari ketentuan pada SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan DDDT Air Nasional, kebutuhan air untuk lahan akan mempertimbangkan jenis lahan pertanian dengan mengikuti rasio sawah : perkebunan : kebun campuran : tegalan/ladang sebesar 4 : 1,5 : 1,5 : 1. Berikut asumsi yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air lahan (KLHK, 2019). Diperoleh daya dukung air meliputi total ketersediaan, kebutuhan air (domestik dan lahan), serta selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebagai berikut.

Tabel 2.4.

Hasil Perhitungan Daya Dukung Air Tahun 2022, 2025 dan 2029

Daya Dukung Air	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2029
Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	308.704,50 ribu		
Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	705.487,92 ribu	733.890,32 ribu	760.271,12 ribu
1) Domestik	586.325,60 ribu	614.728,00 ribu	641.108,80 ribu
2) Lahan	119.162,32 ribu		
Selisih (m ³ /tahun)	-396.773,82 ribu	-425.186,02 ribu	-451.566,82 ribu

Sumber: KLHS RPMD Kota Tasikmalaya 2025-2029.

Secara umum, total kebutuhan air di Kota Tasikmalaya telah melampaui total ketersediaan airnya. Hal tersebut terlihat melalui nilai selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air yang menunjukkan angka negatif pada kondisi aktual di tahun 2022, dan diperkirakan terus membesar hingga tahun 2029. Maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, daya dukung air di Kota Tasikmalaya berstatus sudah terlampaui.

Gambar 2.8.

Status Daya Dukung Air Tahun 2022



Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Kondisi daya dukung air eksisting juga dianalisis secara spasial untuk memetakan daerah yang daya dukung airnya terlampaui dan belum terlampaui. Diketahui sebesar 84 persen wilayah atau seluas 15.501,74 hektar Kota Tasikmalaya telah terlampaui daya dukung airnya. Tingginya jumlah penduduk di beberapa area serta kebutuhan air untuk lahan pertanian yang luas menjadi penyebab terlampauinya daya dukung air di Kota Tasikmalaya. Diperlukan strategi untuk memenuhi kebutuhan air seperti bekerja sama dengan wilayah lain yang dapat bertindak sebagai pemasok air, atau membuat PDAM untuk memperluas cakupan air perpipaan.

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dianalisis dengan menghitung selisih antara ketersediaan pangan, berupa nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari produksi pertanian pangan yang dihasilkan, dengan kebutuhan pangan, berupa standar kebutuhan AKG seluruh penduduk tiap tahunnya. Analisis ketersediaan pangan dilakukan dengan menghitung jumlah energi yang dihasilkan dari produktivitas pangan. Berikut merupakan konversi energi pangan.

Tabel 2.5.

Konversi Energi per 100 gram Bahan Pangan

No.	Jenis Bahan Pangan	Energi (per 100 gr)
1	Beras	360
2	Ubi kayu	146
3	Ubi jalar	123
4	Kentang	83
5	Sukun tua (sukun)	108
6	Tepung cassava	342
7	Tepung terigu	376
8	Tepung sagu	240
9	Tepung ubi jalar	367
10	Jagung kuning	361
11	Tepung sukun	302

Sumber: KLHS RPMD Kota Tasikmalaya 2025-2029



Adapun produksi energi yang dihasilkan dari bahan pangan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.

Produksi Energi dari Bahan Pangan Kota Tasikmalaya Tahun 2022

No.	Jenis Bahan Pangan	Produksi (Ton)	Produksi (100 gram)	Energi Total (kkal)
1	Beras	51.987	519.870.000	187.153.200
2	Kacang Tanah	58	580.000	317.840.000
3	Ubi Kayu	535	5.350.000	781.100.000
4	Ubi Jalar	78	780.000	95.940.000
5	Jagung	19	190.000	106.970.000
6	Kedelai	126	1.260.000	480.060.000
TOTAL				188.935.110.000

Sumber: KLHS RPMD Kota Tasikmalaya 2025-2029

Berdasarkan konversi tersebut, diketahui total ketersediaan pangan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah sebesar 188.935,11 juta kkal/tahun. Penentuan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan kebutuhan energi individu, yang diwakili oleh standar AKG sebesar 2.150 kkal/kapita/hari.

Daya dukung meliputi total ketersediaan pangan, kebutuhan pangan, serta selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Ketersediaan Pangan, Kebutuhan Pangan Serta Selisih antara Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan

Daya Dukung Pangan	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2029
Ketersediaan Pangan (juta kkal/tahun)	188.935,11		
Kebutuhan Pangan (juta kkal/tahun)	575.148,77	603.009,75	628.887,66
Selisih (m ³ /tahun)	-386.204,25	-414.074,63	-439.952,55

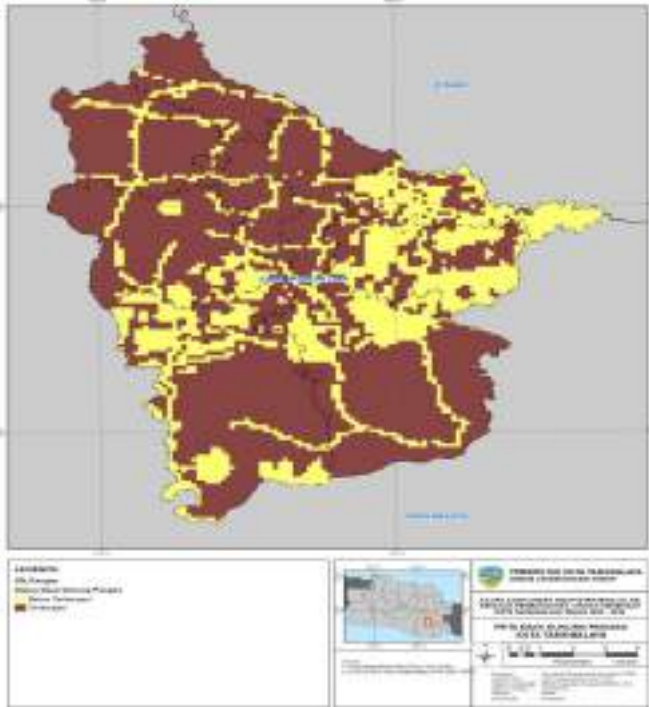
Sumber: KLHS RPMD Kota Tasikmalaya 2025-2029

Secara umum, total kebutuhan pangan di Kota Tasikmalaya telah melampaui total ketersediaan pangannya. Hal tersebut terlihat melalui nilai selisih antara ketersediaan dan kebutuhannya yang menunjukkan angka negatif pada kondisi aktual di tahun 2022, dan diperkirakan terus membesar hingga tahun 2029. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, daya dukung pangan di Kota Tasikmalaya berstatus sudah terlampaui.

Kondisi daya dukung pangan eksisting juga dianalisis secara spasial untuk memetakan daerah yang daya dukung pangannya terlampaui dan belum terlampaui. Sebesar 12.761 hektar atau 69 persen dari total luas wilayah berstatus telah terlampaui daya dukung pangannya, sedangkan sisanya seluas 5.661 hektar atau 31 persen luas wilayah berstatus belum terlampaui.

Gambar 2.9.

Status Daya Dukung Pangan Tahun 2022



Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

2.1.1.1.3. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Konsumsi Listrik Per Kapita

Pada tahun 2023, PLN Rayon Kota Tasikmalaya mampu memproduksi energi listrik sebanyak 593.862.603 kWh. Jumlah energi listrik yang terjual mencapai 489.291.096 kWh.

Tabel 2.8.

Statistik Kelistrikan Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Uraian	Volume
Daya Terpasang	379.090.320 kWh
Produksi Listrik	593.862.603 kWh
Listrik Terjual	489.291.096 kWh
Dipakai Sendiri	6.071.045 kWh
Susut/Hilang	44.263.278 kWh

Sumber: PT. PLN (Persero) Kota Tasikmalaya, 2023.

Data penggunaan listrik Kota Tasikmalaya untuk tahun 2023 menggambarkan kapasitas terpasang sebesar 379.090.320 kWh, dengan produksi total mencapai 593.862.603 kWh. Dari produksi tersebut, 489.291.096 kWh berhasil terjual, sedangkan penggunaan internal adalah 6.071.045 kWh. Angka susut atau kehilangan listrik, yang mungkin mencerminkan kerugian teknis atau non-teknis, tercatat pada 44.263.278 kWh. Adapun beberapa Rumah tangga yang masih belum teraliri listrik di wilayah Kota Tasikmalaya berjumlah 1.431 rumah atau Kepala Keluarga untuk data sementara dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.9.

Daftar Rumah Tangga (KK) Belum Berlistrik Tahun 2024

Kecamatan / Kelurahan		Jumlah KK Belum Berlistrik	Kecamatan / Kelurahan		Jumlah KK Belum Berlistrik
Kecamatan Bungursari		0	Kecamatan Kawalu		80
1	Kelurahan Bantarsari	0	1	Kelurahan Cibeuti	67
2	Kelurahan Bungursari	0	2	Kelurahan Cilamajang	13
3	Kelurahan Cibunigeulis	0	3	Kelurahan Gununggede	0
4	Kelurahan Sukajaya	0	4	Kelurahan Gunungtandala	0
5	Kelurahan Sukalaksana	0	5	Kelurahan Karanganyar	0
6	Kelurahan Sukamulya	0	6	Kelurahan Karsamenak	0
7	Kelurahan Sukarindik	0	7	Kelurahan Leuwiliang	0
			8	Kelurahan Talagasari	0
			9	Kelurahan Tanjung	0
			10	Kelurahan Urug	0
Kecamatan Cibeureum		62	Kecamatan Mangkubumi		342
1	Kelurahan Awipari	0	1	Kelurahan Cigantang	106
2	Kelurahan Ciakar	61	2	Kelurahan Cipari	120
3	Kelurahan Ciherang	1	3	Kelurahan Cipawitra	73
4	Kelurahan Kersanagara	0	4	Kelurahan Karikil	43
5	Kelurahan Kotabaru	0	5	Kelurahan Linggajaya	0
6	Kelurahan Margabakti	0	6	Kelurahan Mangkubumi	0
7	Kelurahan Setiajaya	0	7	Kelurahan Sambongjaya	0
8	Kelurahan Setianagara	0	8	Kelurahan Sambongpari	0
9	Kelurahan Setiaratu	0			
Kecamatan Cihideung		0	Kecamatan Purbaratu		96
1	Kelurahan Argasari	0	1	Kelurahan Purbaratu	42
2	Kelurahan Cilembang	0	2	Kelurahan Singkup	14
3	Kelurahan Nagarawangi	0	3	Kelurahan Sukaasih	18
4	Kelurahan Tugujaya	0	4	Kelurahan Sukajaya	0
5	Kelurahan Tuguraja	0	5	Kelurahan Sukamenak	0
6	Kelurahan Yudanagara	0	6	Kelurahan Sukanagara	22
Kecamatan Cipedes		0	Kecamatan Tamansari		851
1	Kelurahan Cipedes	0	1	Kelurahan Mugarsari	1
2	Kelurahan Panglayungan	0	2	Kelurahan Mulyasari	0
3	Kelurahan Nagarasari	0	3	Kelurahan Setiamulya	125
4	Kelurahan Sukamanah	0	4	Kelurahan Setiawargi	308
			5	Kelurahan Sukahurip	128
Kecamatan Indihiang		0	6	Kelurahan Sumelap	73
1	Kelurahan Indihiang	0	7	Kelurahan Tamanjaya	136
2	Kelurahan Panyingkiran	0	8	Kelurahan Tamansari	80



Kecamatan / Kelurahan		Jumlah KK Belum Berlistrik	Kecamatan / Kelurahan		Jumlah KK Belum Berlistrik
3	Kelurahan Parakannyasag	0	Kecamatan Tawang		0
4	Kelurahan Sirnagalih	0	1	Kelurahan Cikalang	0
5	Kelurahan Sukamajukaler	0	2	Kelurahan Empangsari	0
6	Kelurahan Sukamajukidul	0	3	Kelurahan Kahuripan	0
			4	Kelurahan Lengkonsari	0
			5	Kelurahan Tawang Sari	0
Jumlah					1.431

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jabar Wilayah VI Tasikmalaya, 2025.

b. Akses Air Minum

Capaian akses air minum dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10.

Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi KK berakses Air Minum	KK	101.454	102.512	-*	-*	-*
Capaian KK berakses Air Minum	%	56,23	56,81	101,59	57,57	69,93

Ket : * = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2025.

c. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11.

IKP Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Tahun	IKP (poin)
1	2020	58,82
2	2021	63,12
3	2022	55,38
4	2023	72,71
5	2024	74,37

Sumber:Badan Ketahanan Pangan, 2021-2025.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off poin IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.



Tabel 2.12.

Kelompok IKP Menurut Kabupaten Kota dan Provinsi

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

Capaian IKP Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sudah baik kecuali capaian tahun 2022. Namun seiring waktu IKP Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dan masuk kelompok 6. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki ketahanan pangan paling baik, walaupun produksi pangan lebih kecil dibanding kebutuhan, namun ketersediaan pangan terjamin. Demikian juga prevalensi balita stunting dan persentase penduduk hidup miskin berhasil diturunkan, namun akses air bersih mengalami peningkatan.

d. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah persentase penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah persentase penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. PoU merupakan indikator penting untuk mengukur jumlah penduduk yang kekurangan pangan. PoU dihitung berdasarkan kebutuhan kalori individu yang disesuaikan dengan jenis kelamin, usia, tinggi dan berat badan, serta tingkat aktivitas. Faktor yang mempengaruhi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah tingkat pendapatan, harga pangan, ketersediaan pangan, pengetahuan gizi, jumlah penduduk, kemiskinan, produksi pangan yang rendah dan inflasi.

Berikut disajikan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/PoU Kabupaten/Kota di Jawa Barat rentang Tahun 2020-2024.

Tabel 2.13.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/PoU Kabupaten/Kota
di Jawa Barat rentang Tahun 2020-2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	4,06	4,73	7,03	5,30	5,68
2	Sukabumi	4,89	4,81	7,42	5,98	5,82
3	Cianjur	4,75	6,2	9,54	7,02	5,37
4	Bandung	5,07	5,53	8,3	5,19	5,80
5	Garut	4,06	5	7,74	5,76	5,02
6	Tasikmalaya	5,64	7,12	10,45	8,65	9,95
7	Ciamis	5,11	5,87	6,74	6,10	5,78
8	Kuningan	3,51	3,73	6,63	6,43	5,83
9	Cirebon	5,41	6,19	9,04	7,28	5,65
10	Majalengka	4,17	4,94	9,88	7,90	5,95
11	Sumedang	4,01	5,09	7,43	5,55	5,43

No.	Nama Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
12	Indramayu	4,28	3,97	5,99	5,40	5,46
13	Subang	4,81	4,16	7,06	6,23	6,19
14	Purwakarta	4,08	3,45	6,72	5,07	5,84
15	Karawang	3,79	4,8	6,73	5,93	5,10
16	Bekasi	2,26	2,38	4,3	4,36	4,60
17	Bandung Barat	5,07	6,04	7,81	7,48	6,25
18	Pangandaran	4,39	4,32	5,77	6,04	5,22
19	Kota Bogor	2,95	3,08	5,35	4,86	7,98
20	Kota Sukabumi	3,65	4,9	8,46	5,23	5,57
21	Kota Bandung	2,82	2,92	4,55	3,64	5,48
22	Kota Cirebon	4,52	5,71	7,97	6,85	6,56
23	Kota Bekasi	1,33	1,79	3,33	2,27	4,88
24	Kota Depok	1,26	1,55	2,15	1,99	4,52
25	Kota Cimahi	2,66	3,23	4,63	2,98	5,43
26	Kota Tasikmalaya	4,17	5,35	7,92	5,14	5,31
27	Kota Banjar	3,93	5,93	6,4	5,55	5,13
28	Jawa Barat	3,9	4,44	6,75	5,50	5,99

Sumber data : BPS, Susenas Maret 2021-2025

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/PoU Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Hal ini terkait dampak pandemi Covid-19 yang kemudian mengganggu perekonomian, daya beli dan distribusi pangan. Pada akhirnya pandemi ini menyebabkan krisis ekonomi, inflasi pangan, atau distribusi yang belum pulih sepenuhnya. Namun Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/PoU Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 turun di angka 5,14% yang mencerminkan keberhasilan pemulihan ekonomi lokal, intervensi kebijakan pangan, atau program bantuan sosial.

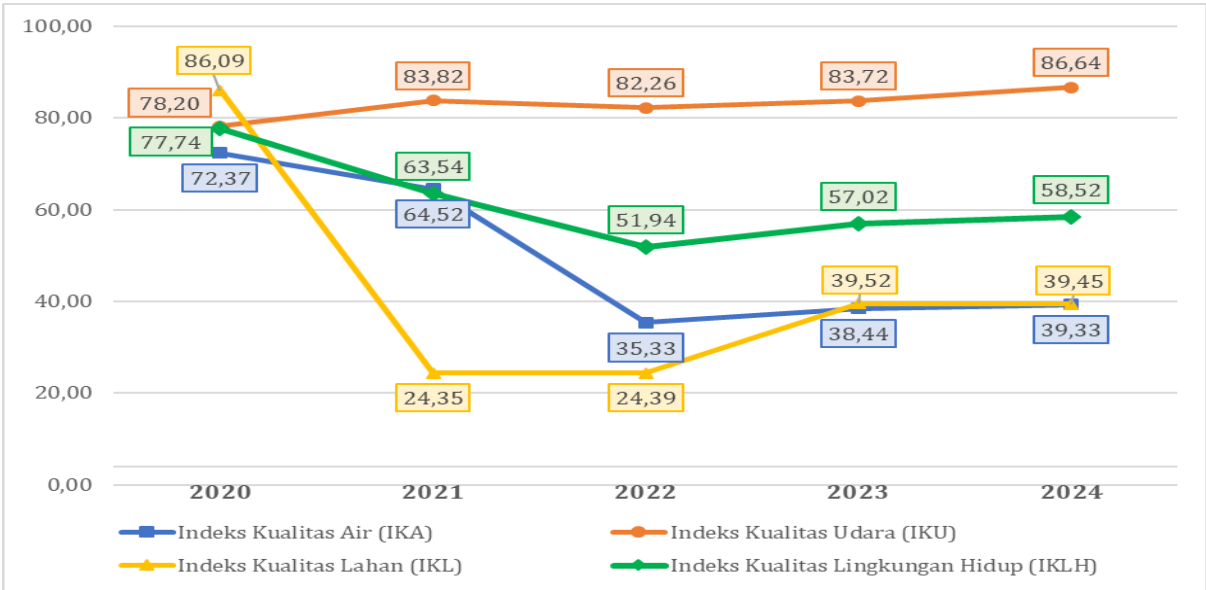
Namun angka Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ini kembali mengalami kenaikan di tahun 2024 di angka 5,31 persen. Hal ini disebabkan diantaranya karena garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan yang artinya pengeluaran masyarakat Kota Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan mengalami kenaikan. Garis kemiskinan tidak terlepas dari inflasi yang terjadi di Kota Tasikmalaya, dan pemenuhan barang-barang makanan dan non makanan pun mengalami kenaikan. Selain itu, walaupun PDRB per kapita Kota Tasikmalaya, yang merepresentasikan rata-rata “pendapatan” yang diperoleh satu individu terus mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat.

2.1.1.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami perubahan formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diberlakukan mulai pada tahun 2022. Adapun perubahan perhitungan tersebut mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2022 sehingga mengalami penurunan. Selanjutnya dengan formulasi perhitungan baru, pada tahun 2022-2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dan dalam klasifikasi Sedang (nilai IKLH berada diantara 50-70).

Gambar 2.10.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Air di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan kualitas yang disebabkan perbedaan rumus perhitungan IKA, yaitu pada tahun 2020-2021 tanpa menyertakan faktor koreksi, sehingga menimbulkan penurunan nilai IKA di tahun 2022. Di tahun 2023-2024 nilai IKA mengalami kenaikan akan tetapi masih dalam kategori kurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Tasikmalaya sudah menurun, sehingga perlu bersungguh-sungguh dalam pengelolaan air buangan (limbah), baik dari rumah tangga maupun dari industri. Selain itu juga ada beberapa sungai yang status mutu airnya cemar berat, di antaranya Sungai Cilamajang Hulu, Cilamajang Tengah, Ciloseh Tengah, Cikalang Tengah, Sungai Cimulu Hilir, dan beberapa sungai lainnya yang berada di lokasi pusat perdagangan dan jasa di Kota Tasikmalaya.

Indeks Kualitas Udara di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif, namun secara umum kualitas udara di Kota Tasikmalaya berada pada kondisi baik. Indeks Kualitas Udara ini berdasarkan pada pengambilan sampel di lokasi perumahan/permukiman, industri, transportasi, dan kawasan komersil. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) atau *Air Quality Indeks* (AQI) Kota Tasikmalaya secara umum berada pada nilai 86,64 poin yang berarti memiliki kualitas baik. Selain itu, hal ini disebabkan karena secara kumulatif daerah yang memiliki aktivitas cukup tinggi masih terpusat di beberapa titik, sehingga masih banyak wilayah yang kondisi udaranya baik.

Indeks Kualitas Lahan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun 2020 sebesar 86,09 poin menjadi 39,45 poin (kategori Kurang) pada tahun 2024. Hal ini disebabkan ada perbedaan konstanta dalam proses perhitungan berdasarkan tutupan hutan primer, sedangkan untuk hutan primer tidak berada di wilayah Kota Tasikmalaya.

Limbah domestik berkontribusi cukup besar pada pencemaran sungai di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut selaras dengan belum terpenuhinya akses layanan air limbah untuk seluruh masyarakat. Upaya pemenuhan layanan air limbah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terlihat dari



capaian Kepala Keluarga (KK) berakses SPALD yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai pada Tahun 2024. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14.
Capaian KK yang berakses SPALD Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi rumah tangga bersanitasi	KK	109.242	—*	—*	—*	—*
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	60,54	—*	—*	—*	—*
Realisasi KK berakses SPALD	KK	—*	110.423	111.348	113.317	114.527
Capaian KK berakses SPALD	%	—*	61,2	61,71	62,8	63,47

Ket : * = Perubahan indikator
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2025.

Capaian akses air limbah domestik diatas, terdiri dari akses aman dan akses layak. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2023 baru mencapai 8.822 Rumah Tangga atau 4,7 persen (sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2028).

Timbulan sampah di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 122.229,45. ton/tahun atau 334,875 ton/hari, sedangkan capaian pengelolaan sampah yaitu sebesar 105.284,45 ton/tahun atau 288,45 ton/hari. Dengan demikian capaian pengelolaan sampah mencapai 86,13 persen dari timbulan sampah keseluruhan pada tahun 2024. Tabel berikut ini memperlihatkan capaian pengelolaan sampah selama tahun 2020-2024 menunjukan peningkatan mulai dari 71,45 persen di tahun 2020 sampai pada 86,14 persen di tahun 2024.

Tabel 2.15.
Pengelolaan Persampahan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengelolaan Sampah	%	71,45	77,86	81,77	82,17	86,14
2	Persentase Penanganan Sampah	%	60,93	61,23	65,11	65,21	68,84
3	Persentase Pengurangan Sampah	%	10,52	12,53	16,66	16,96	17,49

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025.

Dari tabel di atas diketahui bahwa selama periode 2020 – 2024 capaian penanganan sampah, pengurangan sampah, bahkan pengelolaan sampah secara keseluruhan, menunjukan kenaikan, namun tingkat capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat capaian ini, di antaranya untuk penanganan sampah adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah baik kuantitas maupun kualitasnya, kurangnya SDM, dan belum adanya teknologi pengolahan sampah modern di TPA Ciangir.

Sedangkan untuk pengurangan sampah, capaian yang masih di bawah target ini di antaranya disebabkan belum adanya sarana dan prasana pengelolaan sampah di hulu yang memadai, tempat pengelolaan sampah khususnya TPS3R yang belum merata dan hanya ada 3 bangunan di Kota Tasikmalaya. Selain itu beberapa bank sampah banyak yang kurang aktif



dikarenakan SDM yang belum memadai serta kurangnya kesadaran tentang pemilahan sampah khususnya sampah rumah tangga. Selain itu penyebab lainnya adalah karena hingga saat ini pengurangan sampah atau pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya, belum menjadi pola hidup atau kebiasaan pada masyarakat Kota Tasikmalaya, sehingga capaian pengurangan sampah masih rendah dan belum bisa mencapai target.

Namun demikian, upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk mengatasi tingginya volume sampah yang dihasilkan. Upaya-upaya ini mencakup kebijakan dan program yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah:

- 1. Regulasi dan Kebijakan:
Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menjadi landasan hukum pengelolaan sampah, yaitu :
 - a. Peraturan Derah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya;
 - b. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dengan tujuan mengurangi timbulan sampah plastik.
- 2. Program Pengurangan Sampah, Pemerintah Kota Tasikmalaya mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti pengomposan sampah organik dan daur ulang sampah anorganik diantaranya melalui :
 - a. Sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah;
 - b. Pembentukan dan optimalisasi bank sampah dan TPS3R. Dalam rangka optimalisasi pengurangan sampah, telah dikembangkan gerakan 3R melalui kegiatan bank sampah yang dimulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan dibentuknya bank sampah di setiap kelurahan melalui anggaran Dana Kelurahan, sehingga sampai dengan tahun 2024 jumlah bank sampah, baik bank sampah induk maupun unit, serta TPS3R bertambah menjadi 69 unit. Secara lebih jelas jumlah bank sampah diperlihatkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.16.

Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2024

Jenis Bank Sampah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Bank Sampah Induk	1	1	1	1
Bank Sampah Unit	16	21	28	65
TPS3R	2	2	2	3
Jumlah	19	24	31	69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2025.

- c. Optimalisasi TPS3R (jumlah TPS3R = 3 unit);
 - d. Menggalakan pengolahan sampah organik melalui Budidaya Maggot.
- 3. Program penanganan sampah, melalui peningkatan kapasitas dan infrastruktur persampahan, diantaranya :

a. Penyediaan sarana dan prasarana sampah.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya, diikuti oleh jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mendukung agar tidak terjadi penumpukan sampah. Penyebab kondisi penumpukan sampah pada beberapa wilayah dikarenakan sistem pengangkutan sampah kurang efektif dan efisien. Jenis dan jumlah sarana pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17.

Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2024

No.	Jenis	Kondisi		Jumlah
		Layak	Rusak	
1	Dump Truck	24	4	28
2	Arm roll	10	-	10
3	Truck Engkel	2	-	2
4	Pick Up	2	-	2
5	Motor Roda 3	25	-	25
6	Kontainer Amroll	25	35	60
	TOTAL	88	39	127

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2025.

Selain sarana pengangkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat untuk operasional di TPA. Berikut sarana alat berat di TPA Ciangir yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.18.

Sarana Alat Berat Persampahan di TPA Ciangir Tahun 2024

No.	Jenis	Kondisi		Jumlah
		Layak	Rusak	
1	Excavator	2	-	2
2	Bulldozer	1	2	3
	TOTAL	3	2	5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2025.

b. Optimalisasi pengelolaan TPA Ciangir

TPA Ciangir yang memiliki luas ± 13 Ha, sampai dengan tahun 2024 pengelolaanya menggunakan sistem *open dumping*. Pada tahun 2025 TPA Ciangir mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaannya. Menindaklanjuti sanksi tersebut, saat ini TPA Ciangir telah merubah pengelolaan dari sistem *open dumping* menjadi *controlled landfill*, dan beberapa rekomendasi yang ditargetkan dapat dipenuhi pada tahun 2025 yaitu penyusunan dokumen lingkungan, pembangunan jembatan timbang, pembangunan IPAL air lindi, pengajuan dokumen operasional IPAL, serta mengalokasikan anggaran operasional IPAL.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran serta masih kurang optimalnya peran serta Masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penegakan peraturan daerah dan melibatkan masyarakat secara aktif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

2.1.1.1.5. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Gas rumah kaca (GRK) adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari dalamnya. Menurut Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim terdapat 6 (enam) jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu: CO₂ (karbon dioksida), CH₄ (metana), N₂O (dinitrogenoksida), HFC (hidro fluoro karbon), PFC (per fluoro karbon), dan SF₆ (sulfurheksa florida).

Nilai penurunan GRK untuk Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sebesar 31,59437 Ton CO₂eq terus meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 401,96937 Ton CO₂eq. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 penurunan GRK tidak mengalami perubahan. Nilai tersebut merupakan nilai dari kategori energi berupa transportasi, sedangkan untuk kategori lainnya belum dilakukan perhitungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.19.
Capaian Pembangunan Rendah Karbon Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Tahun	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)
2020	56,62437
2021	401,96937
2022	401,96937
2023	401,96937
2024	413,78127

Sumber: AKSARA, 2024 (Data diolah).

b. Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan dokumen hasil kajian risiko bencana di Provinsi Jawa Barat 2016-2020 dijelaskan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki skor 119 atau termasuk klasifikasi kelas sedang. Berikut penjelasan mengenai jenis bencana yang ada di Kota Tasikmalaya:

1. Banjir Bandang

Lokasi risiko banjir bandang berada di sekitar alur Sungai serta di bagian Barat, Selatan dan Utara Kota Tasikmalaya. Tingkat indeks risiko kebencanaan banjir bandang di Kota Tasikmalaya adalah sedang hingga tinggi.

2. Banjir

Lokasi risiko banjir cakupannya cukup luas dimulai dari utara hingga ke pusat kota dan sebagian wilayah selatan. Tingkat Indeks rawan bencana banjir di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

3. Risiko Cuaca Ekstirm

Lokasi risiko cuaca ekstrim mencakup seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Tingkat Indeks rawan bencana risiko cuaca ekstrim di Kota Tasikmalaya sedang-tinggi.

4. Epidemii dan Wabah Penyakit

Lokasi epidemi dan wabah penyakit berada di sekitar area terbangun di Kota Tasikmalaya. Tingkat indeks risiko kebencanaan epidemi dan wabah penyakit di Kota Tasikmalaya adalah rendah.

5. Gempa

Potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya diantaranya bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar, dan rawan gerakan tanah skala menengah. Intensitas suatu guncangan gempa bumi dalam suatu peristiwa gempa bumi di suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Kajian potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019, terdapat beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Zona Potensi Bencana Gempa Bumi dan Ikutan I, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lereng kipas bawah Gunung Galunggung dan kipas lahar gunungapi tua berupa lembah alur sungai. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah adalah 0,68 g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI;
- 2) Zona Potensi Bencana Gempa Bumi dan Ikutan II, meliputi 50 persen wilayah Kecamatan Indihiang, 65 persen wilayah Kecamatan Cipedes, 60 persen wilayah Kecamatan Tawang, 75 persen wilayah Kecamatan Cihideung, 45 persen wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50 persen wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lereng kipas tengah Gunung Galunggung dan lereng kipas bawah Gunung Galunggung serta perbukitan bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10°-15° hingga landai. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah adalah 0,49 g;
- 3) Zona Potensi Bencana Gempa Bumi dan Ikutan III, meliputi 50 persen wilayah Kecamatan Indihiang, 35 persen wilayah Kecamatan Cipedes, 40 persen wilayah Kecamatan Tawang, 25 persen wilayah Kecamatan Cihideung, 40 persen wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25 persen wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibeureum dan kipas tengah Gunung Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah adalah 0,35g.

6. Bahaya Gunung Api

Gunung api yang paling dekat dengan Kota Tasikmalaya adalah Gunung Galunggung yang terletak sekitar 10 Km dari pusat kota, gunung ini merupakan gunung api tipe A yang masih aktif, letusan terakhir terjadi pada tahun 1982 yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Adapun lokasi risiko bahaya gunung api berada di wilayah utara Kota Tasikmalaya yang meyusuri aliran sungai. Tingkat indeks risiko bahaya gunung api di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga sedang.

7. Tanah Longsor

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal di



atas 45°. Sungai- sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, hal ini menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuh tanah penutup, jatuhnya bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di Kota Tasikmalaya dapat terjadi di bukit-bukit/ gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik sehingga memiliki potensiterjadinya gerakan tanah yang sangat besar dengan jenis jatuhnya atau runtuh bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunung api sebagai bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Galunggung, Jawa Barat berskala 1:50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983) diantaranya berupa lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi, terlenda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi, dan terlenda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu, gunung api ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun, zona potensi terlenda aliran awan panas, lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlenda aliran lahar hujan.

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Lokasi risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan berada di wilayah Selatan Kota Tasikmalaya terutama daerah yang berbukit dan kering. Tingkat indeks risiko kebakaran hutan dan lahan di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

9. Kekeringan

Lokasi risiko bahaya kekeringan berada di seluruh Kota Tasikmalaya terutama daerah yang berbukit di wilayah selatan. Tingkat indeks risiko kekeringan di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

Indeks Risiko Bencana Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.20.

Indeks Risiko Bencana di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	119,2 poin (Sedang)	117,37 poin (Sedang)	114,69 poin (Sedang)	106,93 poin (Sedang)	97,13 poin (Sedang)
Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi	21,6 poin (Tinggi)	20,49 poin (Tinggi)	19,65 poin (Tinggi)	16,1 poin (Tinggi)	13,46 poin (Sedang)
Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	36 poin (Tinggi)	34,16 poin (Tinggi)	32,75 poin (Tinggi)	26,83 poin (Tinggi)	22,43 poin (Sedang)
Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor	12 poin (Sedang)	11,39 poin (Sedang)	10,93 poin (Sedang)	8,94 poin (Sedang)	7,48 poin (Sedang)
Indeks Risiko Bencana Kekeringan	36 poin (Tinggi)	34,16 poin (Tinggi)	32,75 poin (Tinggi)	26,83 poin (Tinggi)	22,43 poin (Sedang)
Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	13,6 poin (Tinggi)	12,9 poin (Tinggi)	12,37 poin (Tinggi)	10,14 poin (Tinggi)	8,47 poin (Sedang)

Sumber: BNPB, 2025.

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar 0,34 yang berangsur-angsur naik pada tahun 2023 sebesar 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai IKD mendekati angka 1, maka kemampuan dalam mengantisipasi bencana semakin tinggi, demikian pula sebaliknya, semakin mendekati angka 0 maka semakin rendah kemampuan dalam mengantisipasi bencana.

Tabel 2.21.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai (poin)	N/A	0,34	0,35	0,43	0,52

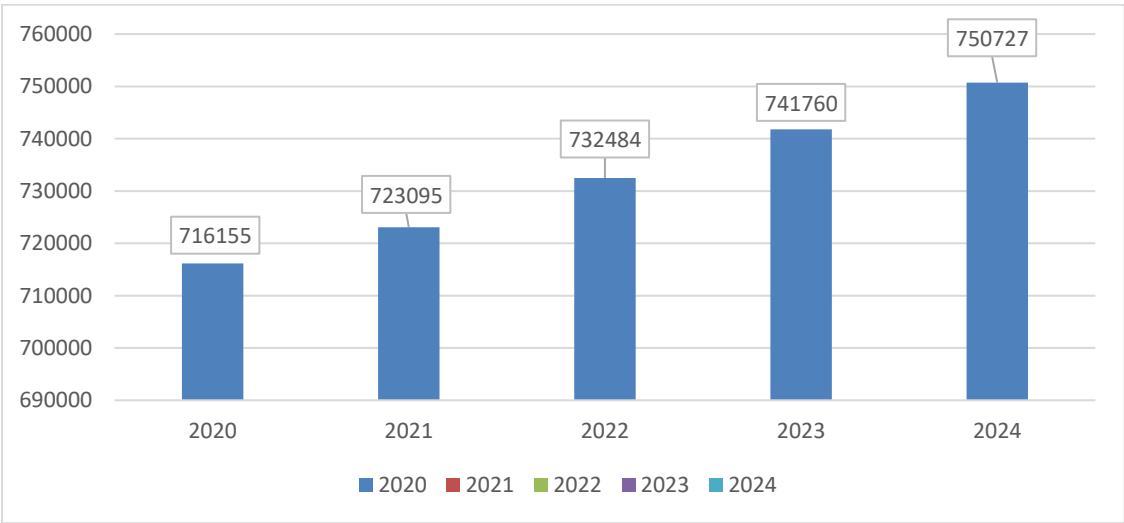
Sumber: BPBD, 2024.

2.1.1.2. Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya Tahun 2024, Kota Tasikmalaya memiliki penduduk sebesar 750.727 jiwa.

Gambar 2.11.

Jumlah Penduduk Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

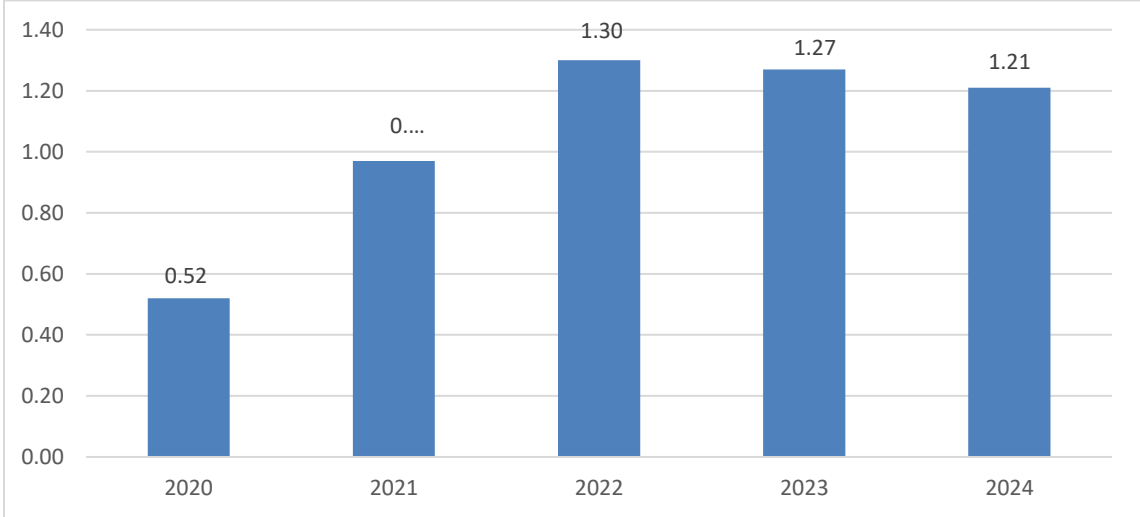


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2025.

Berkaitan dengan demografi, jumlah penduduk yang perlu diperhatikan adalah laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 2.12.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2025.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung fluktuatif, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,05 persen dalam rentang tahun 2020-2024, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mengalami penurunan. Laju Pertumbuhan tertinggi mencapai 1,30 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.22.

Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya

Kecamatan	Penduduk				Persentase Penduduk				Kepadatan Penduduk			
	(ribu jiwa)				(%)				(per km2)			
Tahun	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kawalu	97,59	98,64	99,51	100,46	13,48	13,45	13,42	13,61	2.305	2.372	2.393	2.523
Tamansari	78,25	79,62	80,87	82,20	10,81	10,86	10,9	11,03	2.115	2.166	2.200	2.312
Cibeureum	69,06	69,69	70,19	70,74	9,54	9,5	9,46	9,64	3.755	3.745	3.771	3.993
Purbaratu	44,85	45,42	45,92	46,45	6,2	6,19	6,19	6,17	3.551	3.735	3.776	3.910
Tawang	60,81	61,61	62,31	63,05	8,4	8,4	8,4	8,47	8.801	8.929	9,03	9.463
Cihideung	72,73	73,69	74,52	75,41	10,05	10,05	10,05	9,78	13.345	13.521	13.672	13.839
Mangkubumi	98,81	99,96	100,92	101,97	13,65	13,63	13,61	13,5	4.119	4.135	4.176	4.306
Indihiang	58,39	59,36	60,24	61,18	8,07	8,09	8,12	8,12	5.377	5.451	5.532	5.746
Bungursari	61,55	63,09	64,54	66,07	8,5	8,6	8,7	8,55	3.493	3.591	3.673	3.749
Cipedes	81,88	82,39	82,75	83,17	11,31	11,23	11,16	11,13	9.057	9.114	9.154	9.493
Kota Tasikmalaya	723,92	732,48	741,76	750,70	100	100	100	100	3.930	4.005	4.050	4.209

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

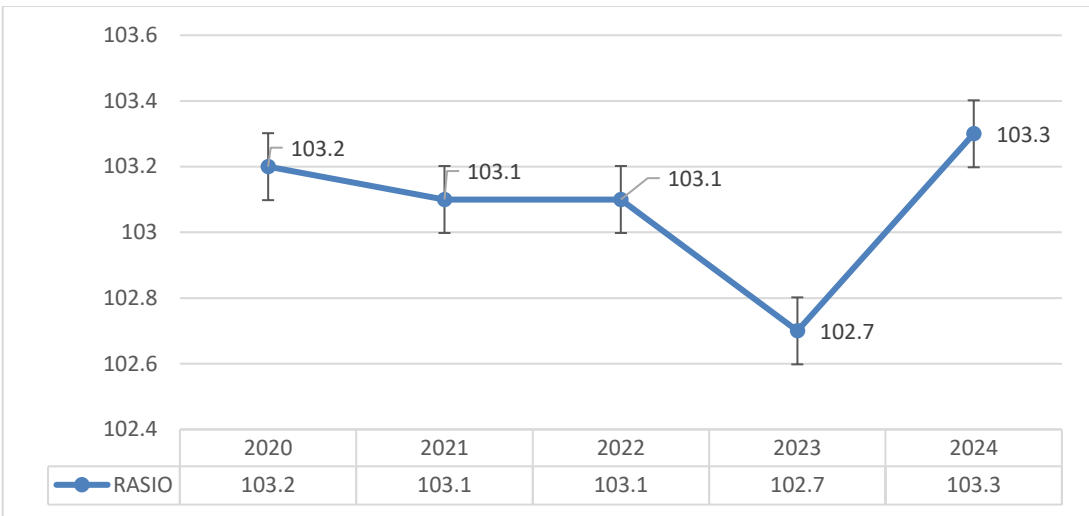
Kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 4.209 jiwa/km2 dengan Kecamatan Cihideung menjadi wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 13.839 jiwa/ km2, dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 2.312 jiwa/ km2. Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk, Kecamatan Kawalu adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Tasikmalaya yaitu 104.944 jiwa di tahun 2024 (13,61 persen) dari total jumlah penduduk Kota Tasikmalaya).

Rasio penduduk adalah perbandingan antara dua atau lebih kelompok penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Rasio ini bisa digunakan untuk

berbagai keperluan, seperti membandingkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (rasio jenis kelamin), adapun Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Gambar 2.13.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2025.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

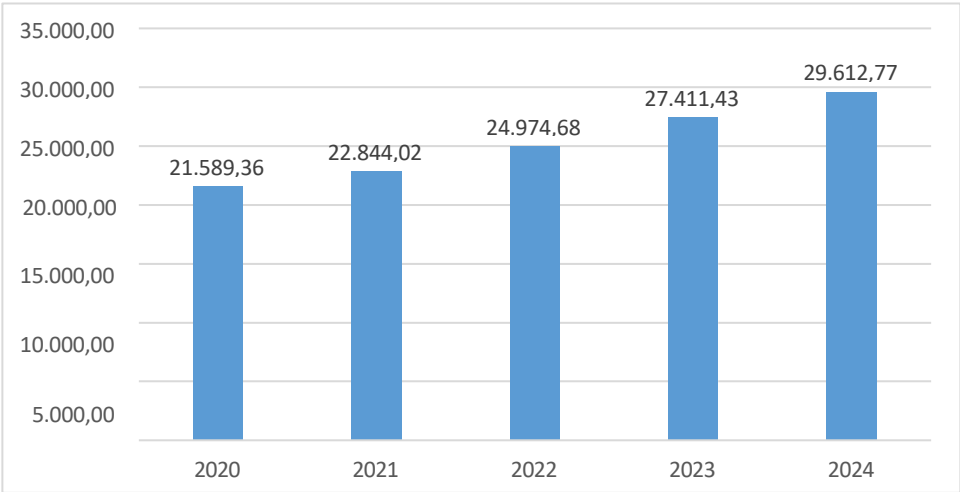
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Pengukuran terhadap PDRB dapat dilakukan dengan mengacu pada harga berlaku (PDRB ADHB) ataupun pada harga konstan (PDRB ADHK). Pengukuran dengan menggunakan harga berlaku didasarkan pada harga barang dan jasa di tahun pengukuran tersebut dilakukan, sedangkan pengukuran dengan harga konstan didasarkan pada harga tahun tertentu sebagai acuan. Oleh karenanya, pengukuran PDRB dengan harga konstan dapat memberikan gambaran perubahan output ekonomi yang lebih akurat karena telah mengoreksi faktor inflasi terhadap harga dari tahun ke tahun dengan mengacu pada harga di tahun dasar tertentu. Berdasarkan data BPS, nilai PDRB Kota Tasikmalaya berdasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2020 hingga 2024 dapat disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.14.

Nilai PDRB ADHB Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

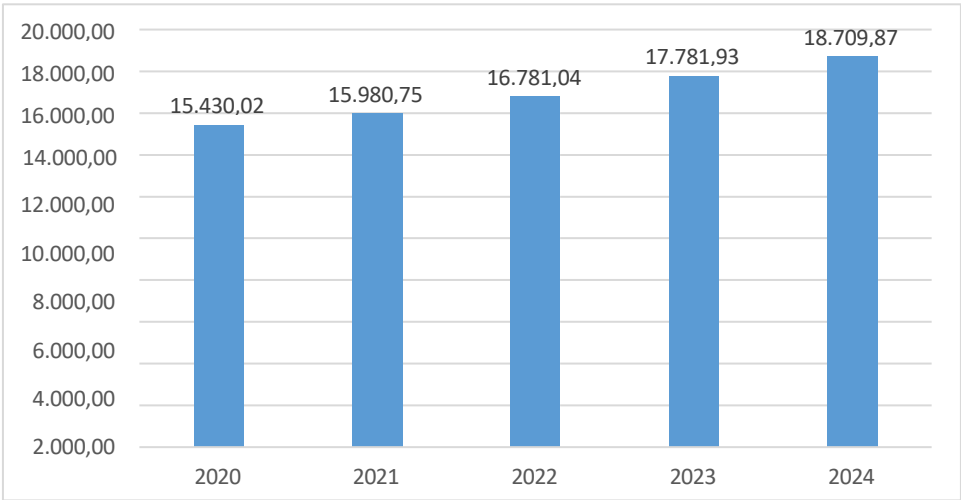


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2025.

Berdasarkan grafik, juga dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, nilai PDRB hampir secara konsisten mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2023, nilai PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) di Kota Tasikmalaya mencapai Rp.27.411 Miliar, yang merupakan PDRB ADHB terbesar keempat di Priangan Timur dan berkontribusi sebesar 1,04 persen dari total PDRB Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2024 PDRB ADHB mengalami kenaikan mencapai Rp.29.612 Milyar.

Gambar 2.15.

Nilai PDRB ADHK Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

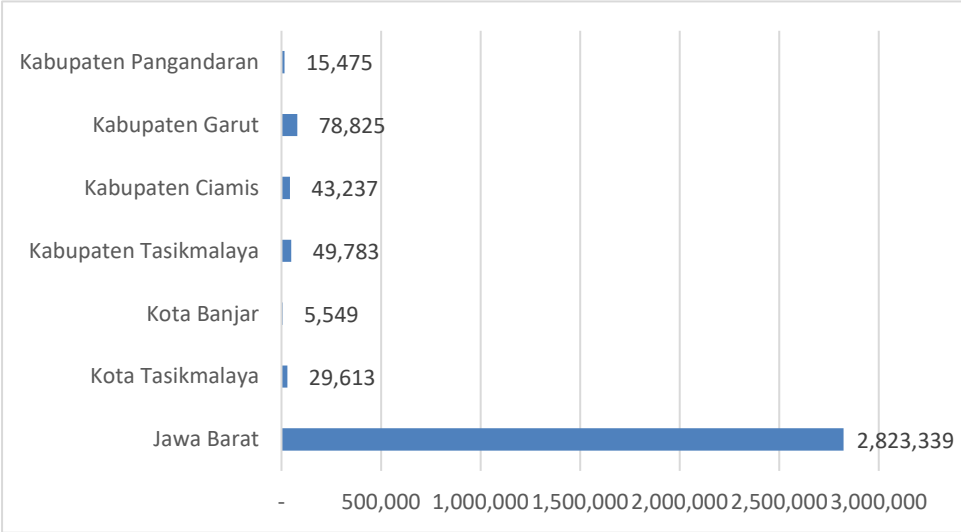


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Berdasarkan grafik, juga dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, nilai PDRB hampir secara konsisten mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2023, nilai PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) di Kota Tasikmalaya mencapai Rp.17.781 Miliar, sedangkan pada tahun 2024 PDRB ADHK mengalami kenaikan mencapai Rp.18.709 Milyar.

Gambar 2.16.

Nilai PDRB ADHK Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025.

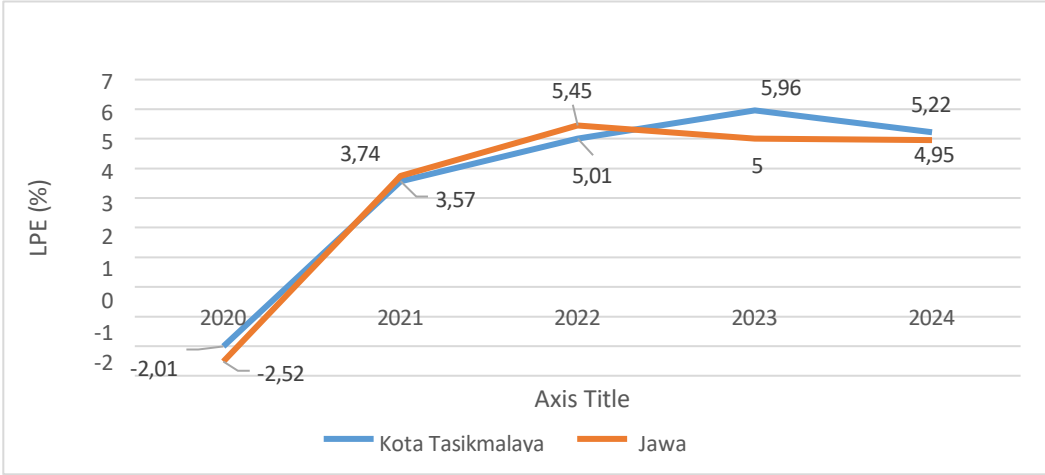
Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHK Kota Tasikmalaya berada diklasifikasi menengah di wilayah priangan timur, dimana Kota Tasikmalaya berada di atas Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar. Namun, PDRB ADHK Kota Tasikmalaya berada di bawah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut.

2.1.2.2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. LPE Kota Tasikmalaya pada kurun waktu 2020-2024 disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.17.

Perkembangan LPE Kota Tasikmalaya 2020-2024



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

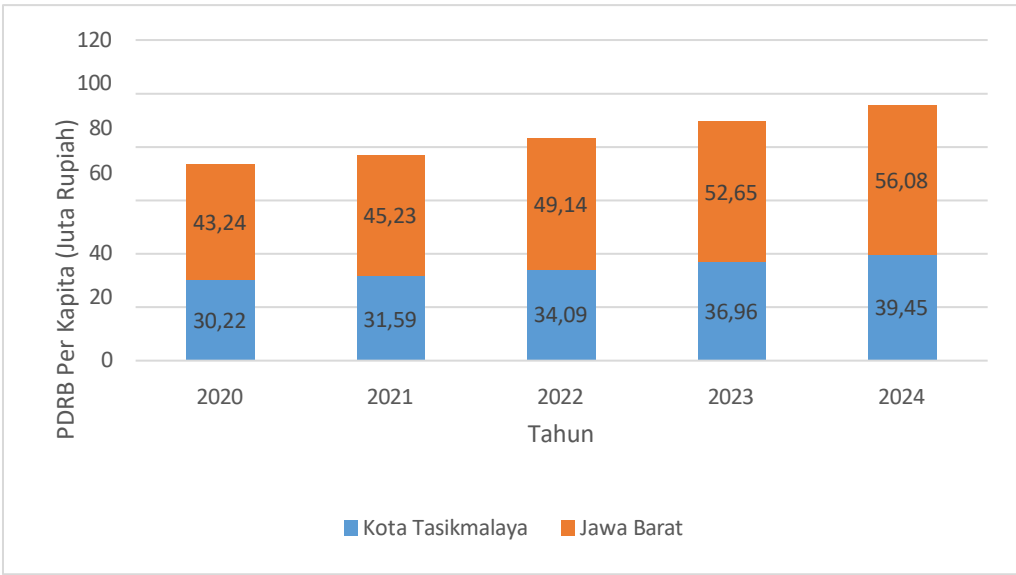
Berdasarkan data tersebut, LPE Kota Tasikmalaya dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024 berada di atas LPE Provinsi Jawa Barat. LPE Kota Tasikmalaya tahun 2024 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023, capaian ini sama dengan kondisi LPE Jawa Barat yang mengalami penurunan.

2.1.2.3. PDRB per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merepresentasikan rata-rata “pendapatan” yang diperoleh satu individu dari keseluruhan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Oleh karenanya, PDRB per kapita umumnya digunakan sebagai pendekatan untuk mengindikasikan standar hidup di wilayah tertentu. Data PDRB per kapita Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku dibandingkan dengan PDRB Jawa Barat disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.18.

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tasikmalaya 2020 - 2024



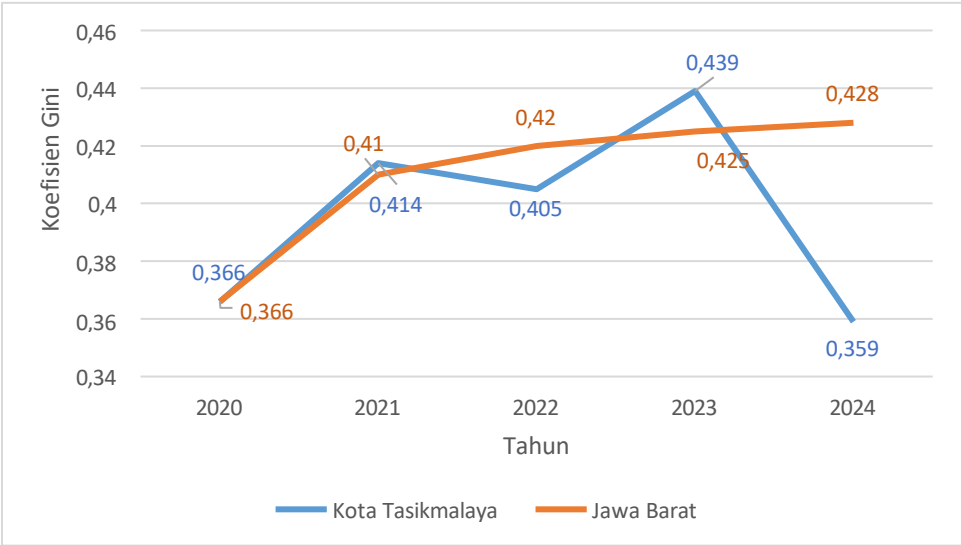
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat. Secara umum, PDRB per kapita terus mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat terjadinya *pandemic COVID-19*. PDRB per kapita dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami kenaikan. Peningkatan PDRB Perkapita ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian di Kota Tasikmalaya semakin membaik.

2.1.2.4. Indeks Gini

Indeks atau Koefisien Gini memberikan gambaran distribusi pendapatan antara individu di dalam wilayah tertentu, yang mengindikasikan ketimpangan di wilayah tersebut. Indeks gini diukur dalam skala 0-1, di mana 0 merepresentasikan kesetaraan distribusi pendapatan yang sempurna, sedangkan 1 merepresentasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna. Koefisien gini Kota Tasikmalaya disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.19.
Indeks Gini Kota Tasikmalaya 2020-2024



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

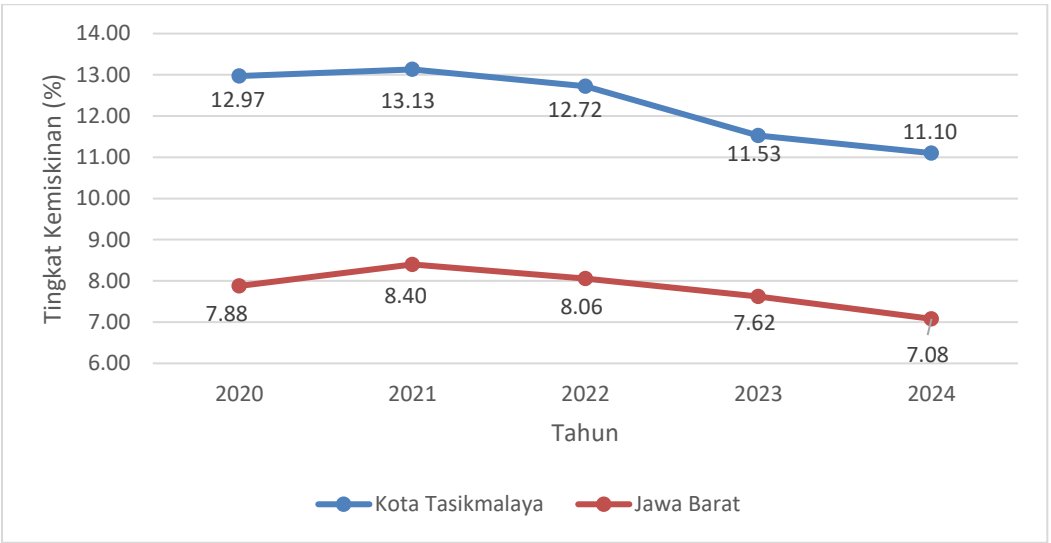
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai indeks Gini di Kota Tasikmalaya cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, secara umum nilai koefisien Gini di tingkat kota masih lebih rendah sedikit dibandingkan dengan tingkat provinsi. Jika dirata-ratakan, indeks Gini Kota Tasikmalaya selama 5 tahun adalah sebesar 0,396, sedangkan indeks Gini Provinsi Jawa Barat pada periode yang sama adalah sebesar 0,409. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan antar individu di Kota Tasikmalaya sedikit lebih terdistribusi secara merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan di tingkat provinsi, walaupun secara umum menunjukkan distribusi yang masih timpang dan secara historis cenderung menunjukkan peningkatan ketimpangan.

2.1.2.5. Kemiskinan

Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami lonjakan besar pada tahun 2008, di mana persentase penduduk miskin meningkat menjadi 26,08 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 9,30 persen. Sejak lonjakan tersebut, angka kemiskinan di kota Tasikmalaya konsisten berada di atas tingkat kemiskinan provinsi yang sejak tahun 2005 cenderung terus mengalami penurunan. Meskipun demikian, angka kemiskinan di tingkat kota memiliki tren penurunan yang signifikan pasca lonjakan tahun 2008, dari angka 26,08 persen menjadi 11,10 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.20.

Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2020- 2024



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

Indikator makro kemiskinan Kota Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23.

Indikator Makro Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	470.150	480.341	498.711	537.497	565.377
Penduduk Miskin (orang)	86.130	89.460	87.130	79.370	76.710
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	12,97	13,13	12,72	11,53	11,10
Kedalaman Kemiskinan (%) (P1)	1,75	2,42	2,34	1,62	1,35
Keparahan Kemiskinan (%) (P2)	0,39	0,69	0,65	0,32	0,26

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

Garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun artinya pengeluaran masyarakat Kota Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan tidak terlepas dari inflasi yang terjadi di Kota Tasikmalaya, dan pemenuhan barang-barang makanan dan non makanan pun mengalami kenaikan.

Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 2,42 persen. Hal ini menunjukkan semakin besar potensi ekonomi atau dana yang dibutuhkan untuk menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2022 P1 kembali turun menjadi 2,34 persen. Hal ini menggambarkan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, dan pada tahun 2023 serta 2024 kedalaman kemiskinan berada pada angka 1,62 persen serta 1,35 persen, hal ini menunjukkan bahawa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan.

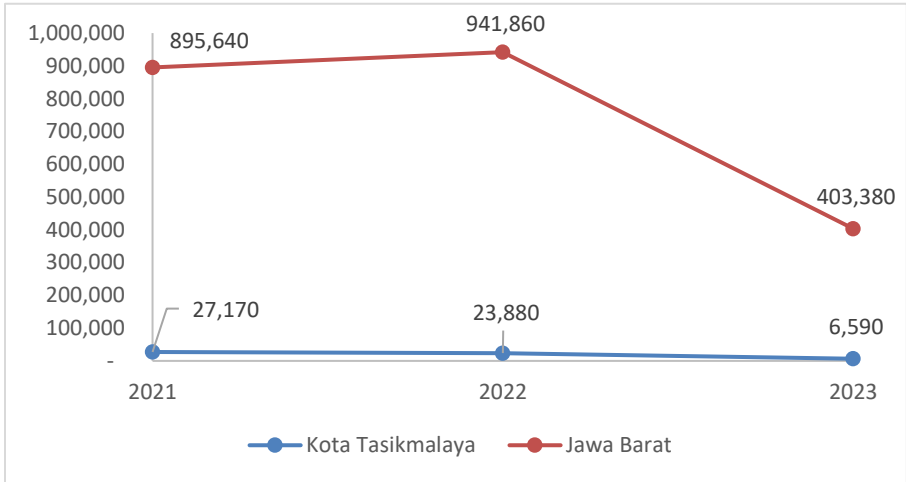
Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tasikmalaya pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun terjadi kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,69. Hal ini mengindikasikan semakin besarnya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Pada tahun 2022 terjadi penurunan P2 sebesar 0,04 persen menjadi 0,65 persen, hal ini menggambarkan keparahan kondisi diantara penduduk miskin kembali merapat atau tidak terlalu senggang, dan pada tahun 2023 serta 2024 P2 berada pada angka 0,32 persen serta 0,26

persen, hal ini menunjukkan bahwa keparahan kondisi diantara penduduk miskin semakin merapat atau gap diantara penduduk miskin semakin mengecil.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah Garis Kemiskinan. Berikut perkembangan kemiskinan ekstrem di Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2021-2023.

Gambar 2.21.

Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem



Ket : Tahun 2021 dan 2022 : Estimasi dihitung oleh BPS. Tahun 2023 : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah Garis Kemiskinan. Berikut perkembangan kemiskinan ekstrem di Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2021-2023.

Pemerintah Kota Tasikmalaya Tasikmalaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan telah menerapkan 3 (tiga) strategi, yakni (1). Mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan pendidikan, kesehatan, sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Keshatan, Dinas Sosial; (2). Meningkatkan pendapatan, melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan yang dilaksakan oleh Dinas KUKM Perindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata; (3). Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, pembangunan SPAM dan SPAL D yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya melaksanakan berbagai kebijakan, diantaranya: (1). Melakukan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas Perangkat Daerah terkait; (2). Mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk program penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah; (3). Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2025 terbit Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang mengamanatkan bahwa Bupati/ Wali Kota harus mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/ kota, hal tersebut

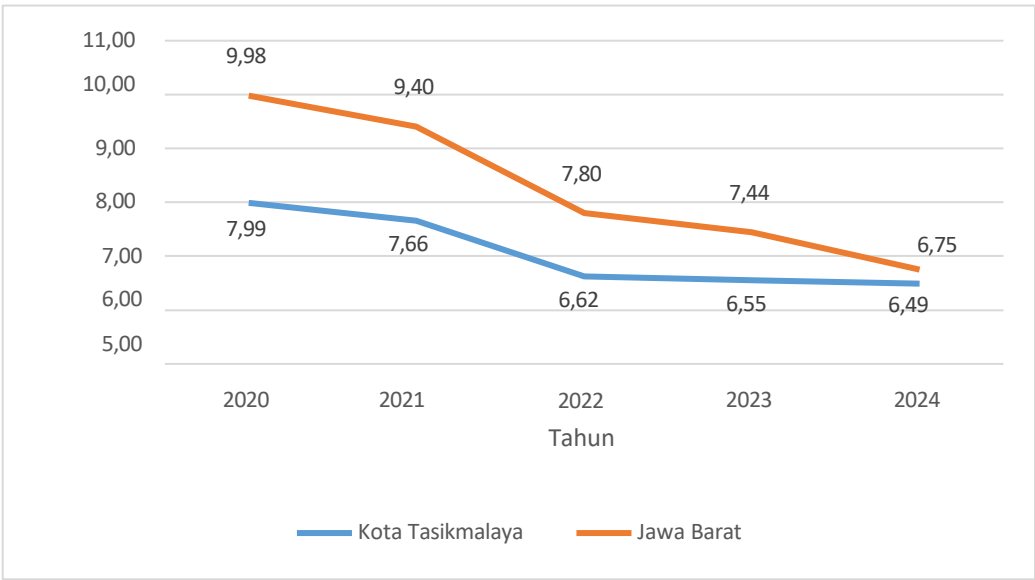
telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui penyediaan lahan dan penyediaan anggaran untuk perencanaan serta perizinan program tersebut.

2.1.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang berstatus sebagai penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka mencakup penduduk yang tidak memiliki dan tidak mencari pekerjaan, penduduk yang tidak memiliki tetapi sedang mencari pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki tetapi belum memulai pekerjaan. TPT Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 2.22.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

2.1.2.7. Pembangunan Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Pada Tabel berikut digambarkan kondisi IPM di di Kota Tasikmalaya beserta komponennya, yaitu Umur Harapan Hidup (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun), Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), serta Pengeluaran per Kapita. Jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, angka IPM Kota Tasikmalaya cenderung lebih tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, IPM Tasikmalaya meningkat selama kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2.24.

IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2023

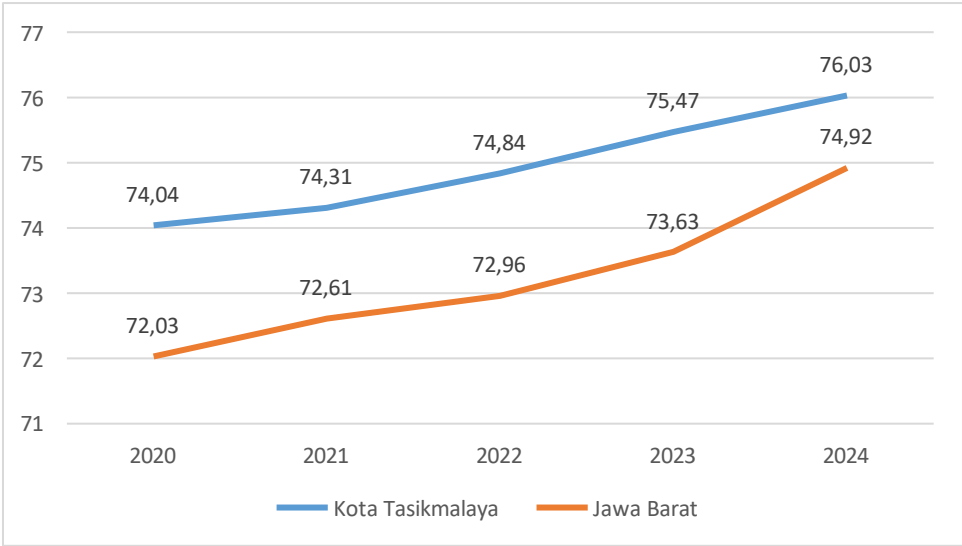
Tahun	IPM Kota Tasikmalaya	Umur Harapan Hidup/UHH (tahun)	Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp)
2020	74,04	74,34	13,45	9,33	10.263,00
2021	74,31	74,52	13,46	9,52	10.213,00
2022	74,84	74,80	13,47	9,53	10.578,00
2023	75,47	75,08	13,49	9,54	11.063,00
2024	76,03	75,31	13,50	9,63	11.431,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024 (diolah).

Capaian IPM Kota Tasikmalaya berada di atas Jawa Barat, sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.23.

Perbandingan IPM Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2019 – 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya tahun 2024 mencapai 76,03 meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya (75,47). Selama 2020– 2024, IPM Kota Tasikmalaya rata-rata meningkat sebesar 0,49 poin per tahun. Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Kota Tasikmalaya tahun 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami percepatan pertumbuhan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 1,64 persen dibanding tahun sebelumnya 0,37 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,94 persen dibanding tahun sebelumnya 0,10 persen. Sementara itu untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 0,15 persen menjadi 0,07 persen Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,33 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,58 persen.

Apabila ditinjau dari capaian komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota-kota di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya berada pada urutan terendah. Untuk Pengeluaran Ril Per Kapita Kota Tasikmalaya berada di angka 11.431 ribu rupiah/orang/tahun. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah berada di 9,63



tahun dan Usia Harapan Hidup mencapai 75,08 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Perbandingan Komponen IPM Kota Tasikmalaya
dengan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kota	Pengeluaran Ril Per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	Rata Lama Sekolah (Tahun)	Usia Harapan Hidup (Tahun)
1	Bogor	13.154	10,71	75,80
2	Sukabumi	12.252	10,38	75,11
3	Bandung	18.795	11,07	75,83
4	Cirebon	12.869	10,53	75,48
5	Bekasi	16.775	11,79	76,14
6	Depok	16.640	11,59	75,82
7	Cimahi	13.278	11,52	75,55
8	Tasikmalaya	11.431	9,63	75,31
9	Banjar	11.811	8,83	74,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025 (diolah).

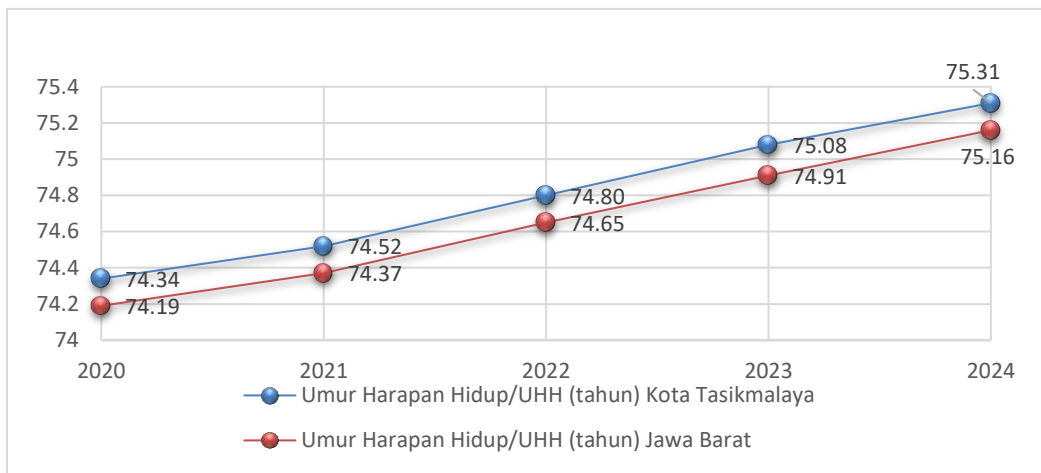
2.1.2.8. Kesehatan untuk Semua

Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator kesehatan, salah satunya adalah indeks kesehatan, dimana komponen indeks kesehatan meliputi:

- 1. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
- 2. Persentase balita yang diimunisasi dasar lengkap
- 3. Persentase balita yang memiliki gizi normal
- 4. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Faktor-faktor yang memperngaruhi UHH diantaranya adalah faktor kesehatan yaitu tingkat kelahiran dan kematian, pelayanan kesehatan, dan gizi buruk. Selain faktor kesehatan, UHH juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial.

Gambar 2.24.
Perbandingan UHH Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya (Long Form SP 2020), 2025.

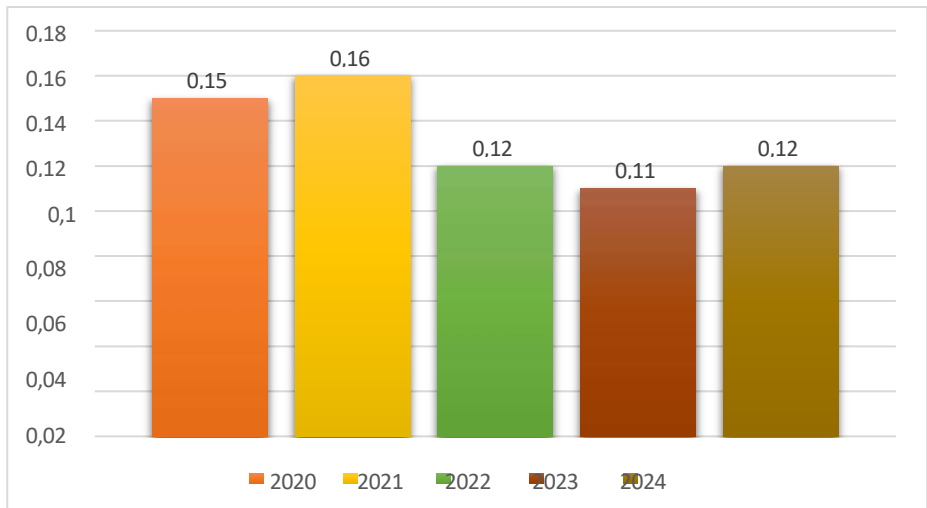
UHH di Kota Tasikmalaya dipengaruhi kondisi lingkungan yang belum memenuhi sanitasi aman, belum optimalnya akses terhadap air bersih dan air minum layak, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tingginya angka penyakit menular dan tidak menular. Indikator lain yang dapat menggambarkan atau mengukur derajat kesehatan masyarakat selain UHH adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat adalah indeks yang menggambarkan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan, serta dilaksanakan oleh setiap keluarga. Indikator Keluarga sehat terdiri dari perhitungan 12 (dua belas) indikator yaitu:

1. Keluarga Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Berikut gambaran IKS Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 2.25.

Indeks Keluarga Sehat Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS lebih dari 0,8 sesuai dengan pedoman Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan. Capaian IKS Kota Tasikmalaya mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023 karena adanya indikator yang tidak terpenuhi dari 12 (dua belas) indikator tersebut, yakni indikator ke 9 (Sembilan) atau anggota keluarga tidak ada yang merokok, namun demikian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024 sebesar 0,1 poin.

Selain UHH dan IKS, hal lain yang mempengaruhi dengan derajat kesehatan masyarakat adalah perkembangan penyakit menular dan tidak menular. Berikut adalah perkembangan kasus penyakit menular dan tidak menular di Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024.

Tabel 2.26.

Perkembangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2020-2024

No.	Jenis Penyakit	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PENYAKIT MENULAR					
	Bersumber Binatang					
1	Malaria	3	10	1	9	6
2	Berdarah Dengue (DBD)	1.409	909	1.855	353	1.782
3	Filariasis	-	3	1	1	6
	Penyakit Menular Langsung					
4	Diare	9.884	12.238	10.852	17.174	17.845
5	Pneumonia	1.150	1.024	1.344	1.711	2.249
6	Kusta	5	7	12	5	8
7	Tuberkulosis Paru	1.041	1.476	2.875	4.747	4.625
8	HIV	96	99	111	145	169
	Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)					
9	Difteri	1	-	-	2	-
10	Campak	-	-	31	276	32
	PENYAKIT TIDAK MENULAR					
11	Diabetes	8.906	9.729	9.729	9.729	11.782
12	Hipertensi	206.084	215.761	215.661	215.661	55.999
13	Orang Dengan Gangguan Jiwa	928	955	961	1.033	1.067

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025.

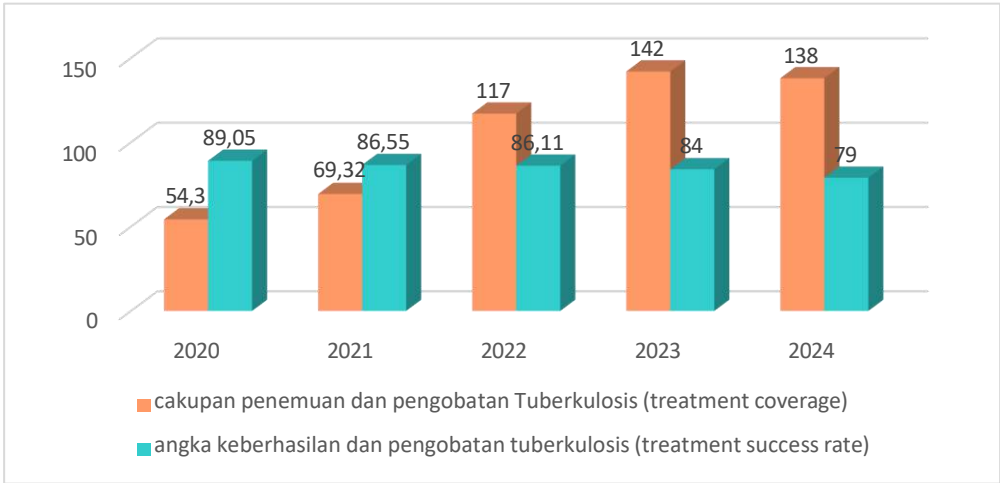
Salah satu penyakit yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia adalah Tuberkulosis Paru. Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit

menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TB secara berkesinambungan. Pada tahun 2024 target Terduga TB sebanyak 16.296 orang, capaian penemuan terduga sebanyak 16.575 orang (120 persen), target penemuan kasus TB sebanyak 3.353 orang, capaian penemuan kasus TB sebanyak 4.625 orang (138 persen), target keberhasilan pengobatan TB sebesar 90 persen, dengan capaian sebesar 79 persen sampai dengan bulan Desember 2024, angka keberhasilan capaian belum mencapai target karena *cut off* perhitungan keberhasilan kasus jatuh pada bulan Maret tahun berikutnya.

Jumlah penemuan kasus tuberkulosis semakin meningkat dari tahun ke tahun karena adanya screening untuk kelompok rentan resiko, melalui program *Active Case Finding (ACF)* dari Kementerian Kesehatan untuk kabupaten/kota, yakni screening ke sekolah dan pesantren, koordinasi lintas sektor dengan stakeholder kesehatan, kolaborasi penemuan kasus dengan klinik-klinik. Kegiatan investigasi kontak sudah aktif di fasilitas pelayanan kesehatan, Peningkatan jumlah kasus tuberkulosis paru dipengaruhi faktor PHBS yang belum sepenuhnya diterapkan, dan kontak dengan penderita tuberkulosis.

Gambar 2.26.

Angka Keberhasilan dan Cakupan Penemuan TB Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 (Data diolah).

Dalam upaya pengendalian penyakit menular di Kota Tasikmalaya, perhatian khusus terus diberikan terhadap tiga penyakit prioritas, yaitu HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria. Ketiganya termasuk dalam agenda pembangunan kesehatan nasional karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan beban sistem kesehatan.

HIV/AIDS

Hingga tahun 2024, kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, tervatat sbanyak 169 kasus yang ditanganani pada tahun 2024, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 145 kasus.

Tabel 2.27.

Jumlah kasus HIV/AIDS 5 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	96
2	2021	99
3	2022	145
4	2023	145
5	2024	169

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 (Data diolah).



Terdapat peningkatan jumlah temuan kasus HIV dari kalangan usia produktif, terutama melalui penularan hubungan seksual tidak aman dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti:

- 1. Peningkatan layanan konseling dan tes HIV (VCT)
- 2. Penyediaan layanan terapi antiretroviral (ARV) di fasilitas kesehatan
- 3. Penguatan kerja sama lintas sektor dan LSM dalam edukasi dan penjangkauan kelompok risiko tinggi.

Tuberkulosis (TBC)

Kota Tasikmalaya masih menghadapi tantangan dalam eliminasi TBC. Angka notifikasi kasus TBC menunjukkan bahwa transmisi penyakit ini masih berlangsung di komunitas. Jumlah penderita Tuberkulosis (TB) di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 adalah 1.476 kasus, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 2.874 kasus, mengalami peningkatan sebesar 92,2 persen, dan tahun 2024 sebesar 4066 Kasus. Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1. Peningkatan deteksi dini melalui skrining aktif di komunitas (Active Case Finding) ;
- 2. Perluasan akses terhadap pemeriksaan dahak dan tes cepat molekuler (TCM) ;
- 3. Penguatan sistem pelaporan dan penelusuran kontak erat pasien TBC;
- 4. Dukungan terapi dengan pendekatan DOTS (Directly Observed Treatment Short-course).

Malaria

Kota Tasikmalaya termasuk daerah dengan kasus malaria yang sangat rendah atau sporadis. Namun demikian, kewaspadaan tetap dijaga terutama untuk kasus imported malaria dari daerah endemis. Strategi pencegahan dilakukan melalui:

- 1. Pemeriksaan mikroskopis dan RDT (Rapid Diagnostic Test) untuk kasus demam;
- 2. Peningkatan surveilans dan pelatihan tenaga kesehatan;
- 3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan kelambu dan pencegahan gigitan nyamuk.

Indikator makro kesehatan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat lainnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting. Berikut gambaran perkembangan AKI, AKB, prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.28.

Perkembangan AKI, AKB, Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	162,25	303,87	180,15	192,22	181
2.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	6,15	8,5	7,67	7,87	8,49
3.	Prevalensi Stunting (persen)*	20,10	14,81	12,62	10,75	10,85
4.	Prevalensi Stunting (persen)**	24,75	28,90	22,40	27,10	19,60
5.	Cakupan Kepesertaan JKN	77,99	79,40	94,42	101,74	102,28

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 (Data diolah).
Ket * berdasarkan EPPGM Kota Tasikmalaya.
** berdasarkan SSGI.

Angka Kematian Ibu mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal tersebut juga terjadi pada Angka Kematian Bayi. Faktor penyebab tingginya angka kematian bayi di kota Tasikmalaya pada tahun 2022 hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu disebabkan oleh BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, sepsis, kelainan kongenital, icterus, pneumonia, diare, DBD dan Covid-19. Angka Kematian ibu di kota Tasikmalaya disebabkan oleh dua faktor yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Kematian ibu yang terjadi karena faktor penyebab langsung yaitu karena perdarahan, sedangkan kematian ibu yang terjadi karena faktor penyebab tidak langsung karena PEB (preeklamsi berat)/eklamsi, DSS (Dengue shock Syndrome), Covid-19, infeksi, Splenomegali, HIV, Jantung, dan edema paru. Masalah yang menyebabkan timbulnya faktor-faktor tersebut, yaitu masih adanya pelayanan kesehatan yang tidak maksimal terhadap bayi baru lahir, ibu hamil dan bersalin.

Prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya dari faktor 1). ekonomi, masih tingginya angka kemiskinan di kota tasikmalaya sebesar 11,10%, Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil bisa mempengaruhi pola konsumsi gizi keluarga. Harga bahan pangan bergizi meningkat, sehingga keluarga kesulitan memberikan asupan nutrisi yang cukup untuk anak-anak; 2). Kesehatan ibu dan anak yakni kurangnya akses ibu hamil ke layanan kesehatan, Rendahnya kesadaran ibu terhadap pentingnya asupan gizi sejak kehamilan dan masa menyusui; 3). Sanitasi dan akses air bersih, yakni lingkungan yang kurang sehat dapat menyebabkan infeksi berulang pada anak, yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, masih adanya rumah tangga dengan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit yang berkontribusi pada stunting; 4). Perilaku masyarakat, yakni pola asuh yang kurang tepat, misalnya pemberian MPASI yang tidak sesuai standar gizi, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan anak 5). Kualitas dan akses pelayanan kesehatan, yakni akses ke layanan kesehatan yang merata masih menjadi tantangan karena tidak semua balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan yang optimal di posyandu atau puskesmas.

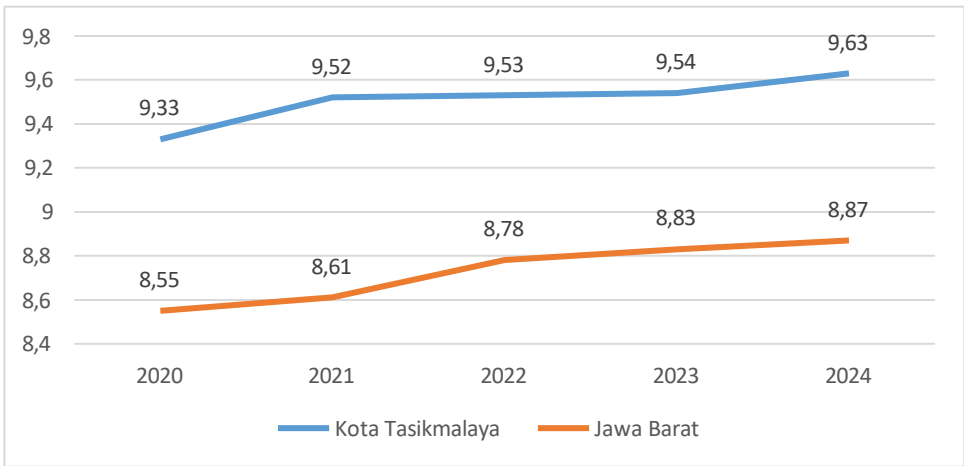
2.1.2.9. Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahun, yang menunjukkan perbaikan dalam akses pendidikan. Pada tahun 2020 capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Tasikmalaya sebesar 9,33 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,63 tahun pada tahun 2024 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya telah bersekolah selama 9,63 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga setingkat dengan kelas I SMA. Kota Tasikmalaya memiliki nilai RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,87 tahun, hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan yang relatif lebih baik, seperti dukungan program pendidikan dan fasilitas pendidikan. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.27.

Rata- Rata Lama Sekolah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



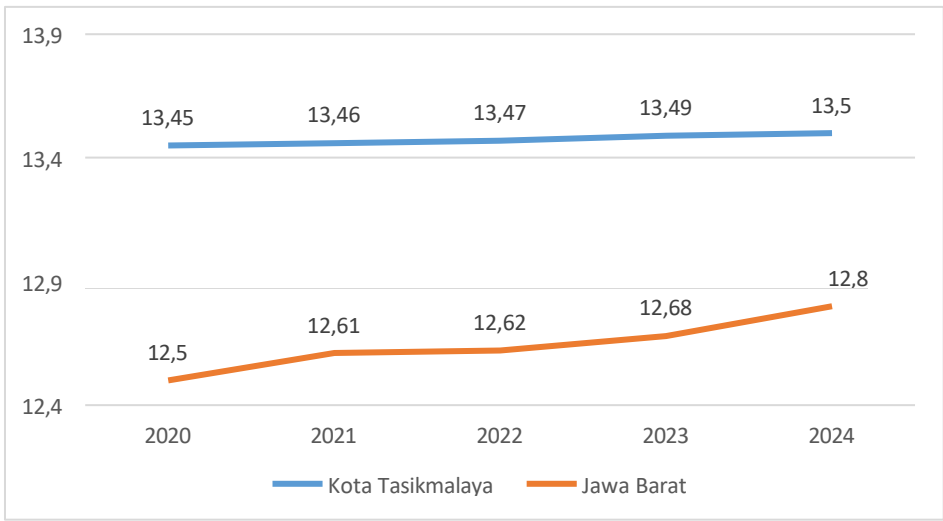
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024 (diolah)

B. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 adalah 13,44 dan meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2024 mencapai angka 13,50 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma Satu (D1) atau Diploma 2 (D2) . Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.28.

Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2023 (diolah)

Gambaran Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota di Jawa Barat tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 2.29.

Perbandingan Capaian HLS dan RLS Kota di Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kota di Jawa Barat	HLS	RLS
1.	Provinsi Jawa Barat	12,80	8,87
2.	Kota Bogor	13,51	10,71
3.	Kota Sukabumi	13,62	10,38
4.	Kota Bandung	14,25	11,07
5.	Kota Cirebon	13,17	10,53
6.	Kota Bekasi	14,14	11,79
7.	Kota Depok	14,11	11,59
8.	Kota Cimahi	13,85	11,32
9.	Kota Tasikmalaya	13,50	9,63
10.	Kota Banjar	13,28	8,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tasikmalaya sebesar 13,50 sedangkan Provinsi sebesar 12,80 akan tetapi dibandingkan dengan 9 Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya berada di peringkat ketiga dari bawah di atas Kota Banjar dan Kota Cirebon.

C. Angka Partisipasi Kasar

Indikator yang menggambarkan kualitas pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK didefinisikan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Capaian APK PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	51,18	40,48	40,82	42,53	42,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025.

Pada tahun 2020 APK PAUD di angka 51,18 terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 10,70 di angka 40,48 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan terbatasnya akses Pendidikan Anak Usia Dini dan faktor ekonomi keluarga, sehingga terdapat anak usia PAUD yang tidak bersekolah. Namun demikian, sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya keadaan sosial ekonomi. Hal yang positif akan tetapi angka ini masih jauh untuk mendorong masyarakat untuk partisipasi masuk sekolah PAUD dan meningkatkan akses pendidikan PAUD.

Tabel 2.31.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	100,66	99,28	101,67	101,60	n/a
SMP/MTs	94,29	103,13	87,80	93,84	n/a

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

APK pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MI/Paket B mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini untuk jejang SD menjadi positif dikarenakan partisipasi masyarakat sudah membaik dan akses pendidikan SD/MI sudah relatif baik. Sedangkan untuk jejang pendidikan SMP/MI/Paket B masih kurang Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya perubahan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru yang menghambat akses sekolah di beberapa wilayah di sebabkan tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh, dan adanya kebijakan pendidikan untuk pemerataan sarana prasaran pendidikan.

D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B
Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Paket A	94,75	94,79	97,86	97,94	n/a
SMP/MTs/Paket B	81,13	84,84	84,13	84,71	n/a

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

APM SD/MI/Paket A Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 di angka 94,75 pada tahun 2021 ada kenaikan sebesar 0,04 sehingga nilai naik menjadi 94,79 akan tetapi pada tahun 2022 ada kenaikan yang cukup tinggi sebesar 7,55 dan tahun 2023 naik lagi sebesar 0,8 sehingga nilai tahun 2022 sebesar 97,86 dan tahun 2023 97,94. Ini menunjukkan hal yang positif namun masih ada usia penduduk 7-12 belum sekolah ada juga usia jenjang SD/MI yang sudah masuk di jejang SMP/MTs. Sedangkan APM SMP/MTs/Paket B Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 di angka 81,13 tahun 2022 sebesar 84,84 naik sebesar 3,71 dan tahun 2023 turun sebesar 0,71 di angka 84,13 dan naik lagi sebesar 0,58 sehingga di tahun 2024 angkanya 84,71. Ini menunjukkan angka yang fluktuasi namun masih ada usia penduduk 13-15 yang belum sekolah dan ada juga usia jenjang SMP/MTs yang masih di sekolah di jejang SD/MI atau sudah masuk jejang SMA/SMK/MA. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya perubahan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru yang menghambat akses sekolah di beberapa wilayah di sebabkan tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh, dan adanya kebijakan pendidikan untuk pemerataan sarana prasaran pendidikan.

E. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Patisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan 13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia (7-12) dan usia (13-15). Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) ntuk dua kelompok usia (7-12 tahun dan 13-15 tahun) di Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.33.

Angka partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah			
	Kota Tasikmalaya		Provinsi Jawa Barat	
	7-12	13-15	7-12	13-15
2020	99,61	95,40	99,66	95,45
2021	99,53	98,88	99,50	95,09
2022	98,70	95,26	99,39	95,27
2023	98,72	97,02	99,40	95,75
2024	97,77	96,47	99,46	95,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan, partisipasi sekolah untuk usia 7-12 tahun (SD/MI sederajat) sudah sangat tinggi, dengan angka di atas 99,53 persen pada tahun 2021 namun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 97,77 persen dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat relatif stabil di atas 99 persen namun sedikit fluktuatif. Sementara itu, partisipasi sekolah usia 13-15 tahun (SMP/MTs sederajat) sempat melonjak tinggi hingga 98,88 persen di tahun 2021, namun kembali fluktuatif dan sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 96,47 persen. Secara umum APS usia 13-15 di Kota Tasikmalaya masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Penurunan lebih besar pada APS 13-15 tahun dibanding APS 7-12 tahun menunjukkan bahwa tantangan utama ada di tingkat SMP, kemungkinan karena faktor ekonomi dan transisi dari SD ke SMP. sehingga perlu upaya berkelanjutan misalnya dengan bantuan pendidikan, peningkatan fasilitas SMP, serta kebijakan yang mempermudah transisi siswa dari SD ke SMP.

F. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain itu, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Pada tahun 2024, ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar untuk tingkat SD/MI mengalami pengurangan, hal ini disebabkan terjadinya penggabungan beberapa sekolah. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs mengalami penambahan sekolah baru untuk SMP Swasta. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.

Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No	Tahun	SD/MI					SMP/MTs				
		SD		Jumlah SD	MI	Jumlah SD & MI	SMP		Jumlah SMP	MTs	Jumlah SMP & MTs
		Negeri	Swasta				Negeri	Swasta			
1	2020	199	32	231	55	286	21	76	97	55	152
2	2021	199	33	232	55	287	21	60	81	51	132
3	2022	193	36	229	55	284	21	65	86	55	141
4	2023	189	37	226	56	282	21	69	90	55	145
5	2024	189	38	227	55	282	21	67	88	55	143

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025.



Tabel 2.35.

Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
2020	3.234	63.475	2.398	1: 19,60	1: 26,50
2021	3.188	62.421	2.025	1: 19,58	1: 30,82
2022	3.330	62.469	2.443	1: 18,76	1: 25,57
2023	3.454	75.360	2.422	1: 21,82	1: 31,11
2024	2.867	62.671	2.390	1: 21,86	1: 26,22

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2020 di Kota Tasikmalaya mengalami perbaikan yang signifikan yang ditunjukan dengan jumlah guru yang bertambah sehingga rasio murid dengan guru selama periode tersebut mengalami penurunan sampai pada posisi mendekati standar 1 : 28 ditunjukkan dengan rasio 1 : 21,82. Dengan demikian rasio guru dan murid Sekolah Dasar di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel- murid pada tahun 2023 sebesar 1 : 31,11 sudah di atas standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukkan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel. Rasio guru dengan murid berada pada posisi 1 : 23,80. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 15 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2023 sebesar 1 : 37,22 hal ini masih di atas standar yaitu 1 : 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 2.36.

Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP di Kota Tasikmalaya

Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
2020	1.764	28.571	1.970	1: 17,2	1: 23,8
2021	1.777	28.739	1.057	1: 16,17	1: 27,19
2022	1.843	28.357	980	1: 15,39	1: 28,94
2023	1.890	44.994	1.209	1: 23,80	1: 37,22
2024	1.783	29.073	1.235	1 : 16,31	1 : 23,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025.

Selain pendidikan formal yang dilaksanakan juga dilaksanakan pendidikan non formal diantaranya pendidikan kesetaraan. Berikut data murid program kesetaraan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021-2024.



Tabel 2.37.

Jumlah Murid Program Paket A, B dan C di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021- 2024

No.	Kecamatan	2021			2022			2023			2024		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
1	Cihideung	10	84	271	17	86	287	11	40	311	-	117	337
2	Cipedes	-	81	217	-	83	228	2	11	261	-	69	248
3	Tawang	10	39	105	20	53	98	7	28	126	21	74	130
4	Indihiang	1	39	95	0	31	93		21	87	-	41	91
5	Kawalu	8	114	296	18	104	260	5	24	313	17	96	215
6	Cibeureum	-	98	281	4	57	244	6	10	294	7	89	278
7	Tamansari	1	241	464	20	201	486	6	69	816	22	321	680
8	Mangkubumi	2	90	248	5	116	282	1	48	387	6	177	380
9	Bungursari	3	45	137	7	71	182	3	10	242	10	103	211
10	Purbaratu	11	146	315	16	155	305	20	86	387	78	202	337
Kota Tasikmalaya		46	977	2.429	107	957	2.465	61	347	3.224	161	1.289	2.907

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025.

G. Angka Literasi/Numerasi

Literasi secara umum adalah kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Numerasi adalah kemampuan dalam menggunakan angka dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah istilah yang umum digunakan dalam konteks pendidikan, seperti dalam literasi dan numerasi

Dalam konteks Rapor Pendidikan, literasi dan numerasi mengacu pada kemampuan dasar siswa dalam membaca dan berhitung yang menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, menilai kemampuan ini sebagai indikator utama dalam Rapor Pendidikan, karena keduanya merupakan fondasi penting untuk pembelajaran di semua mata pelajaran. Data Capaian Literasi/Numerasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Tasikmalaya dari tahun 2022 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38.

Capaian Literasi/Numerasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2025

Tahun	Capaian			
	Sekolah Dasar		Sekolah Menengah Pertama	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
2022	68,96	44,28	70,80	45,96
2023	77,85	62,80	75,46	51,82
2024	83,40	74,64	80,43	75,39
2025	81,56	79,96	83,54	80,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Capaian Literasi Sekolah Dasar dari tahun 2023 ke 2024 ada kenaikan 5,5 % tetapi penurunan pada tahun 2025 sebesar 1,84% sehingga dinas

pendidikan bisa meningkatkan lagi caipainya. Sedangkan capaian literasi Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2023 ada kenaikan pada tahun 2024 sebesar 4,97 % dan ada kenaikan lagi pada tahun 2025 sebesar 3,11% ini menandakan capaian literasi di Kota Tasikmalaya sangat baik.

Capaian Numerasi Sekolah Dasar dari tahun 2023 ke 2024 ada kenaikan 11,84 % dan ada kenaikan lagi pada tahun 2025 sebesar 5,32%. Sedangkan capaian literasi Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2023 ada kenaikan pada tahun 2024 sebesar 23,57 % dan ada kenaikan lagi pada tahun 2025 sebesar 4,68% ini menandakan capaian literasi di Kota Tasikmalaya sangat baik.

H. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi merupakan salah satu hal paling penting dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, oleh karena itu penyediaan pelayanan terbaik untuk akses literasi sangat diperlukan. Indikator untuk melihat perkembangan pembangunan literasi yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1), Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2), Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4), Perpustakaan ber-SNP (UPLM5), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6), Anggota Perpustakaan (UPLM7). Pengukuran IPLM dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI dan mulai dihitung pada tahun 2021 dan menghasilkan nilai IPLM pada tahun 2022, Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 79,68 poin dan berada di atas posisi Jawa Barat sebesar 72,73 poin. Pada tahun 2024, IPLM di seluruh Kota Kabupaten dan Provinsi di Indonesia mengalami penurunan, namun demikian IPLM Kota Tasikmalaya masih di atas provinsi Jawa Barat dengan nilai 78,90 poin dan provinsi Jawa Barat sebesar 72,60 poin.

Tabel 2.39.
IPLM Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat
Tahun 2022-2024

Tahun	IPLM Kota Tasikmalaya	IPLM Jawa Barat
2022	79,68	72,73
2023	76,45	60,02
2024	78,90	72,60

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025.

I. Indeks Literasi Digital

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dan kembali dilaksanakan di tahun 2024 menghasilkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2024 mencapai 43,34 poin sedikit meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 0,16 poin.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia terdiri dari Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia, mencakup:

a. Infrastruktur dan Ekosistem

Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggaris bawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital. Terbentuk dari 3 subpilar, yaitu:

- 1) Akses dan Adopsi Teknologi Digital;
- 2) Ekosistem Pembelajaran;
- 3) Digitalisasi Pemerintah.

b. Keterampilan Digital

Keterampilan digital adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi (UNESCO, 2018). Pilar ini terbentuk dari 3 subpillar, yaitu:

- 1) Komplementaritas;
- 2) Pengenalan TIK;
- 3) Keamanan.

c. Pemberdayaan

Kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini merepresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan tingkat keterampilan digital yang ditujukan dengan keterlibatan individu dalam aktivitas digital. Pilar ini menyoroti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan peranan sharing economy dalam proses digitalisasi. Pilar ini terbentuk dari 2 subpillar, mengacu pada dimensi people-participatory yang dapat mencerminkan pengembangan digital skill dan diperoleh dari tingkat intensitas aktivitas digital responden dalam menggunakan layanan keuangan, e-commerce, marketplace, media sosial, dan platform e-learning sesuai dengan peran penggunaannya. Kedua subpillar terdiri dari: Pengguna/Konsumen dan Penyedia/Penjual.

d. Pekerjaan

Pilar pekerjaan berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, dimana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru. Pilar pekerjaan terdiri dari 2 subpillar, yaitu:

- 1) Permintaan
- 2) Penawaran

Adapun Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia jika dibandingkan antara Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40.

Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia

No.	IMDI Pilar	Nasional			Prov. Jawa Barat			Kota Tasikmalaya		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	IMDI	37,80	43,18	43,34	43,28	44,99	46,66	47,56	48,08	45,77
1.	Infrastruktur & Ekosistem	40,24	57,09	52,70	49,48	64,73	62,51	49,69	63,82	61,45
2.	Keterampilan Digital	49,35	56,59	58,25	50,11	55,48	60,28	60,96	64,60	63,00
3.	Pemberdayaan	22,06	26,19	25,66	26,52	26,29	27,10	31,19	28,10	23,53
4.	Pekerjaan	40,35	32,14	38,09	48,64	33,42	37,33	49,15	34,75	35,75

Sumber: Puslitbang Aptika IKP, BPSDM Kominfo, 2025.

Penurunan IMDI Kota Tasikmalaya disebabkan oleh menurunnya pemberdayaan digital yaitu partisipasi dan pemanfaatan layanan digital publik serta sedikit melemahnya infrastruktur dan keterampilan digital. sehingga dibutuhkan upaya pelatihan atau perluasan akses digital dan fasilitasi program literasi lanjutan, termasuk keamanan digital, perlindungan data, serta transformasi digital sektor informal.

2.1.2.10. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial adaptif berarti perlindungan sosial yang mempunyai kapasitas luas serta adaptif dalam melindungi orang dari kerentanan. Hal tersebut mencakup perlindungan risiko untuk individu, keluarga, ataupun dalam skala masif. Berbeda dengan perlindungan sosial reguler, perlindungan sosial adaptif lebih berfungsi optimal dalam kondisi normal dan memiliki fungsi yang adaptif saat keadaan darurat.

Program perlindungan sosial pada hakekatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Indonesia telah memiliki Program perlindungan sosial yang bervariasi, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kartu Pra Kerja, Program Bidikmisi Anak Usia Sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Usaha Usia Kerja/Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pelatihan UMKM, Subsidi energi listrik dan gas 3 kg, BPJS Ketenagakerjaan, Asistensi dan Rehabilitasi Lanjut Usia, bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (RTLH/BSPS) dan lain sebagainya. Data Data Perlindungan Sosial yang Adaptif di Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024 di Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 2.41.

Data Perlindungan Sosial yang Adaptif di Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Jenis Perlindungan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga	37.034	35.820	40.400	74.160	70.873
2	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Peserta	563.681	312.546	396.491	452.666	460.471
3	Bantuan pangan Non Tunai (BPNT)	Keluarga	75.452	109.068	145.010	119.917	130.966
4	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kelompok	Tidak ada	9	6	9	6

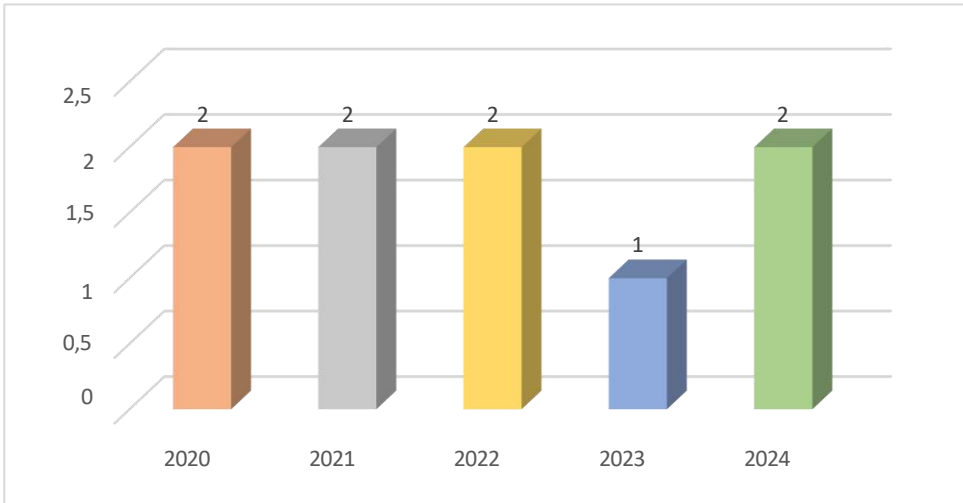
Sumber : Dinas Kota Tasikmalaya Tahun 2025 (data diolah).

2.1.2.11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Kerukunan umat beragama di Kota Tasikmalaya tergambar dengan banyaknya koordinasi antar umat beragama diantaranya melalui rapat korodinasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, sebagaimana data di bawah ini:

Gambar 2.29.
Jumlah Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama
Tahun 2020-2024

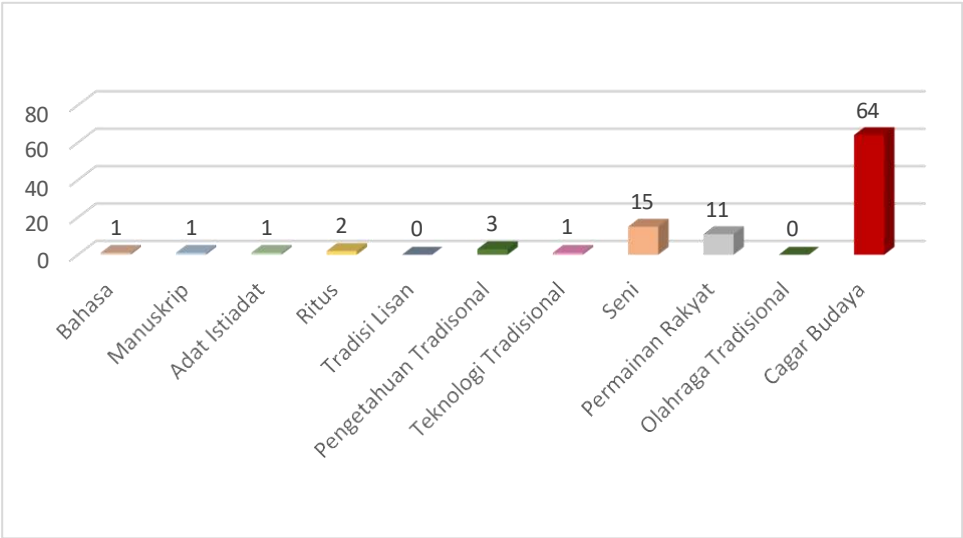


Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025.

B. Kebudayaan

Kebudayaan daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah kota. Upaya pelestarian kebudayaan Kota Tasikmalaya dilakukan melalui pemajuan kebudayaan daerah, yakni meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kota Tasikmalaya memiliki berbagai jenis objek pemajuan kebudayaan daerah kota dan cagar budaya yang tersaji dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.30.
Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya



Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, 2024 (data diolah).

Adapun capaian pelaksanaan urusan kebudayaan pada tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.42.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	57	57,97	61	63,77	63,73	64,65	68,63	68,69
2	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	%	20	20,23	20	20,33	-	-	-	-
3	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	50	50	50	50	25	25	0	0
4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	34	35,38	40	40	46,15	46,15	0	0
5	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	-	-	-	-	63,73	64,65	68,63	68,69
6	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	-	-	-	-	25	25,43	25	25

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2024.

Perlindungan terhadap cagar budaya terdata di Kota Tasikmalaya dilakukan melalui pelestarian cagar budaya terdata dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.43.

Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cagar Budaya Yang Terdata	Buah	65	65	65	65
2	Jumlah Cagar Budaya Terdata Yang Dilestarikan	Buah	23	26	30	30
3	Jumlah Grup Kesenian Yang Dibina	Buah	35	35	44	44

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2025.

Tabel 2.44.

Objek Diduga Cagar Budaya Terdata sampai dengan Tahun 2024

No.	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat
1	Tugu Peta	Jl. Veteran
2	Tugu 0 Km	Jl.Dr. Sukarjo
3	Makam Gn. Subang	Cilamajang Kota Tasikmalaya Jawa Barat
4	Komplek Makam SyehTubagus Abdullah	Sukaasih
5	Mesjid H. Bakri	H. Mustopa



No.	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat
6	Makam Gn Saena	Citamiang
7	Makam Eyang CakraNingrat	Ciseeng Babakan Arsi
8	Punden Berundak, Gunung Pa Jahim	Leuwiliang, Kawalu
9	Makam H Hasan	Babakan Peundeuy
10	Makam Dalem Patuakan	Tanjung Kota Tasikmalaya Jawa Barat
11	Makam Eyang Patinggi	Leuwiliang
12	Makam Dalem Kutawaringin	Lewiliang
13	Situs Lingga Yoni	Lintasan Mangkubumi Indihiang
14	Tugu Istiwa	Citamiang
15	Makam Nyimas Saena	Tanjung
16	Makam Sakarembong	Jl. Bantar, bantarsari Kota tasikmalaya
17	Makam Eyang Jiwaraga	Kp Nagrog
18	Makam Eyang Prabudilaya	Kota Tasikmalaya Jawa Barat
19	Makam Syekh Abdul Gharib	Cibeas Kota Tasikmalaya
20	Makam Eyang Cakraningrat	Ciseeng Babakn Arsi Kota Tasikmalaya Jawa Barat
21	Makam Dalem Darpanangga	Asta Cibeuti, Kec.Kawalu
22	Makam Dalem Kutawaringin	Lewiliang Kota Tasikmalaya Jawa Barat
23	Makam HM Bakri	Tanjung, Kec. Kawalu
24	Makam Dalem Patuakan	Tanjung Kota Tasikmalaya
25	Makam Prabudilaya	Kota Tasikmalaya
26	Makam Jiwaraga	Kp. Nagrog Kota Tasikmalaya

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2025.

2.1.2.12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Kualitas Anak

Kota Tasikmalaya berupaya mewujudkan pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. KLA diwujudkan melalui pemenuhan 5 klaster, yaitu: (1) Hak Sipil dan Kebebasan; klaster (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; klaster (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; klaster (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; klaster (5) Perlindungan Khusus. Poin terpenting dari proses pengembangan KLA, yaitu adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk mewujudkan pemenuhan Hak-hak anak dengan di dukung oleh pemangku kebijakan di Kecamatan dan Kelurahan, serta koordinasi di antara para

stakeholder pemenuhan hak-hak anak dan pemangku kebijakan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Berikut capaian KLA di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel 2.45.

Tingkat Capaian KLA Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Capaian KLA (poin)	Tidak dilaksanakan karena Covid 19	756	382,1	430	563,28

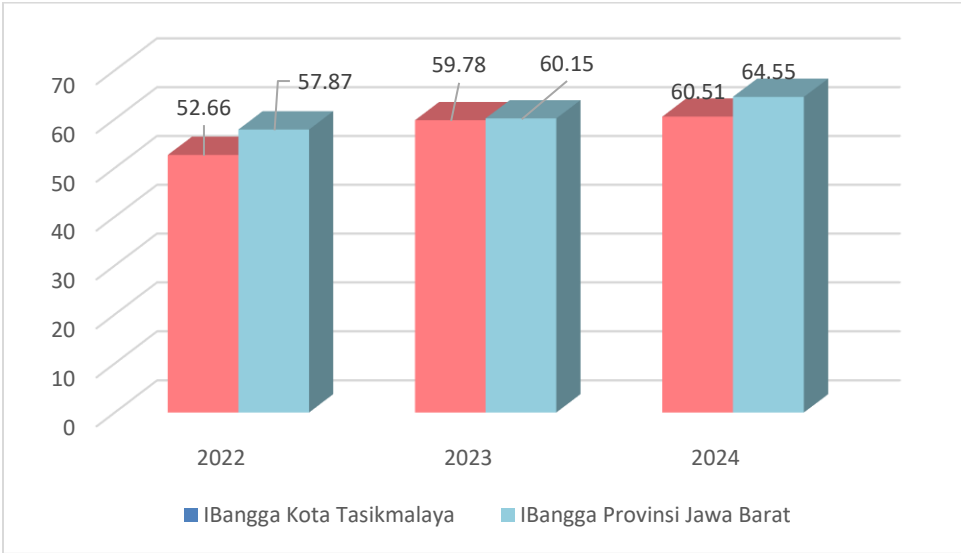
Sumber: Dinas PPKBP3A, 2025 (Data diolah), Tahun 2025.

B. Kualitas Keluarga

Kualitas rata-rata keluarga pada suatu daerah dapat dilihat dengan angka Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga). Konsep pembangunan keluarga ini dicanangkan oleh Bappenas untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020, Indeks Pembangunan Keluarga terdiri dari 3 dimensi yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat tahun 2022-2024 dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 2.31.

Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2022-2024



Sumber: Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025.

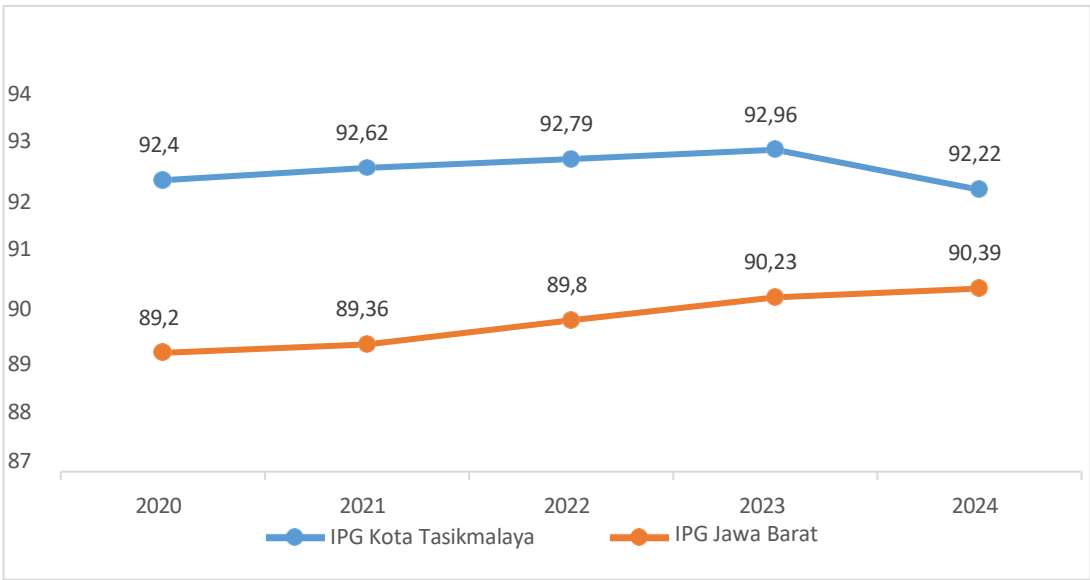
Nilai IBangga Kota Tasikmalaya tahun 2023 yang terdiri dari dimensi kententeraman sebesar 58,09 poin, dimensi kemandirian sebesar 50,67 poin, dan dimensi kebahagiaan sebesar 70,57 poin. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dimensi yang harus ditingkatkan adalah dimensi kemandirian yang diukur oleh indikator makanan beragam, memiliki penghasilan, tidak ada anggota keluarga sakit/disabilitas, memiliki tabungan, akses media online, anak 7-18 tahun tidak putus sekolah, dan memiliki rumah yang layak. Namun demikian, kedua dimensi lainnya juga perlu ditingkatkan agar kualitas keluarga di Kota Tasikmalaya terus meningkat. Pada tahun 2024, nilai dari dimensi kententeraman sebesar 60,87 poin, dimensi kemandirian sebesar 49,92 poin, dan dimensi kebahagiaan sebesar 70,75 poin.

C. Pemberdayaan Perempuan

Gender merupakan suatu perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat dan bersifat dinamis. Kesetaraan gender merupakan hak yang harus didapatkan laki laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Indikator yang digunakan untuk melihat capaian Pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IPG Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dan telah melampaui Provinsi Jawa Barat, hal ini menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kota Tasikmalaya. Berikut IPG Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat menurut Kabupaten/ Kota (UHH Hasil SP 2010).

Gambar 2.32.

IPG Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2020-2024

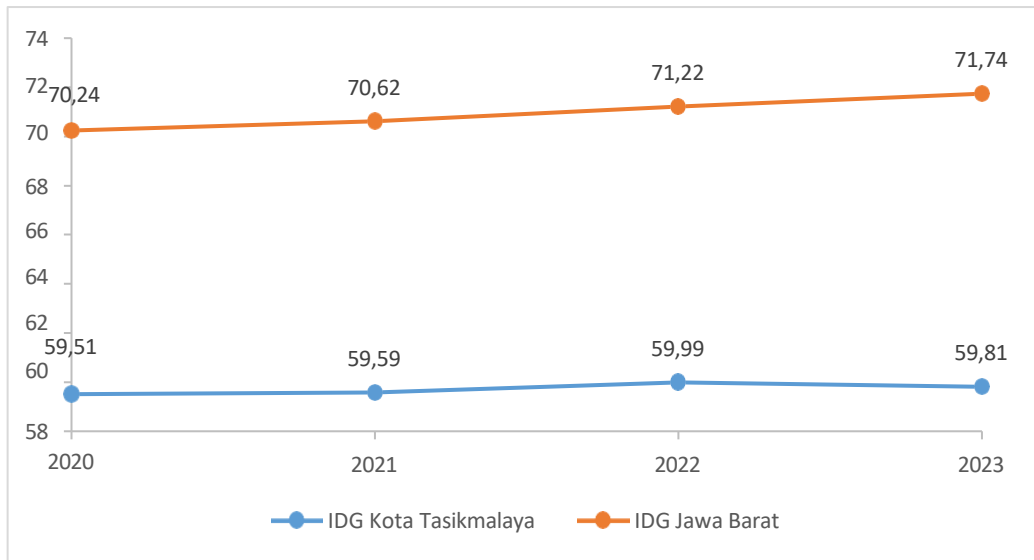


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024.

Indikator lainnya yang mengukur kesetaraan dan keadilan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dilihat dari perkembangan tahun 2020-2023 menunjukkan tren meningkat namun masih di bawah angka Provinsi Jawa Barat. Peningkatan IDG di Kota Tasikmalaya diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan dan keterlibatan perempuan sebagai anggota legislatif.

Gambar 2.33.

IDG Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2020-2023

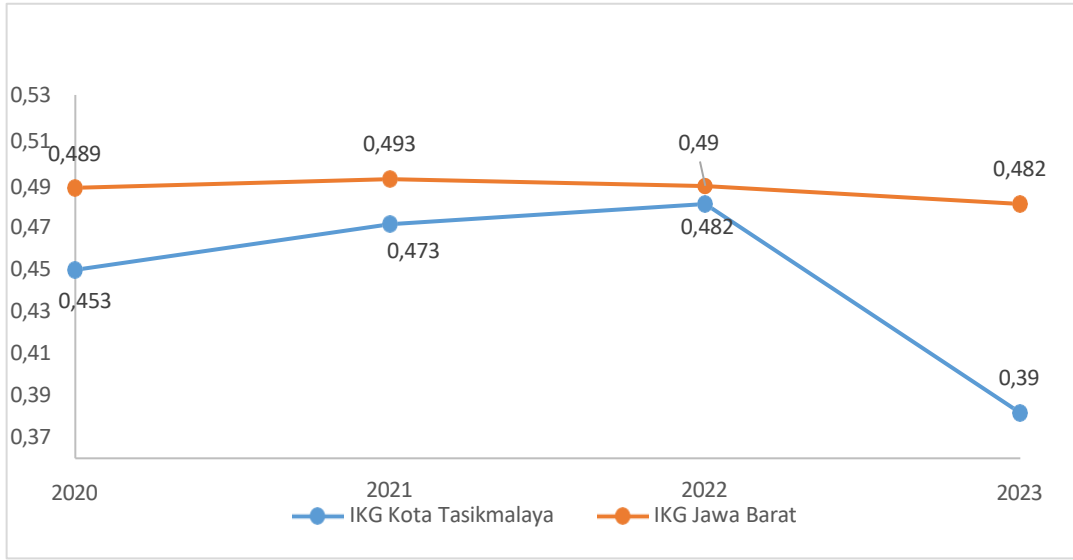


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengacu pada perhitungan Gender Empowerment Measurement (GEM) di tingkat global, dan terdapat perubahan indikator menjadi Gender Inequality Index (GII) yang diimplementasikan di Indonesia dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Capaian IDG dan IPG berkorelasi terhadap perhitungan Pembangunan gender, yakni IPG rendah menunjukkan ketimpangan atau IKG yang semakin tinggi. Perkembangan IKG Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dan tahun 2023 tercatat sebesar 0,390, atau ketimpangan meningkat sebesar 0,092 dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.34.

IKG Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024.

2.1.2.13. Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, serta pembinaan terhadap atlet di berbagai cabang olahraga di Kota Tasikmalaya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan persentase pembinaan organisasi kepemudaan serta persentase prestasi olahraga Kota Tasikmalaya di tingkat provinsi.



Tabel 2.46.

Persentase Pembinaan OKP dan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi

Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase OKP yang dibina	28,57	30,77	31,87	34,07
2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	60	85,71	52,38	53,66

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2025.

Perolehan medali atlet berbagai cabang olahraga di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.47.

Perolehan Medali Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024

No.	Tingkat Kejuaraan	2021			2022			2023			2024		
		Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
1.	Provinsi	17	13	19	42	32	35	42	33	42	27	18	29
2.	Nasional	17	10	13	5	3	2	8	5	9	34	29	19
3.	Internasional	2	2	2	0	0	1	14	8	10	1	1	1
	Jumlah	36	25	34	47	35	38	64	46	61	62	48	49

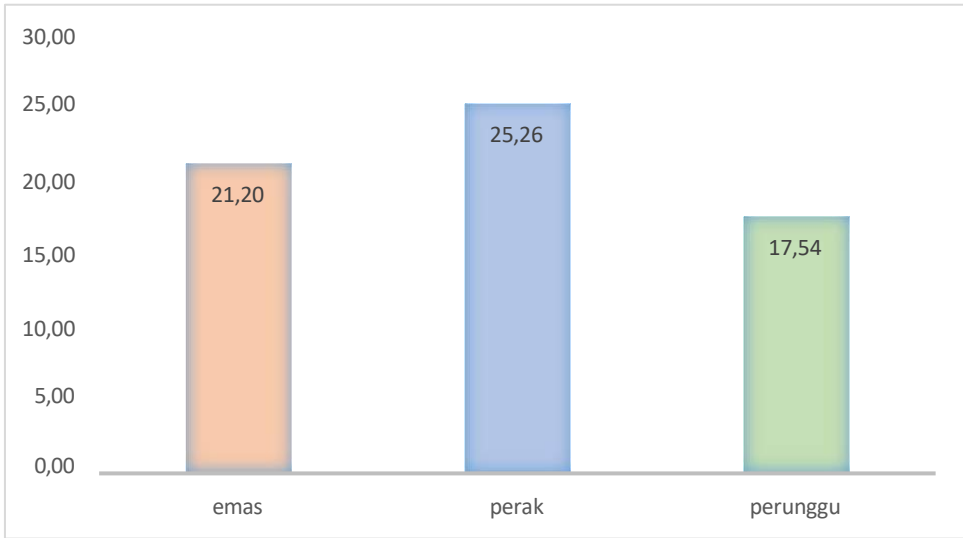
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2025.

Dengan persentase kenaikan perolehan medali dari tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Gambar 2.35.

Rata-Rata Perentase Kenaikan Perolehan Medali Kota Tasikmalaya

Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2025

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

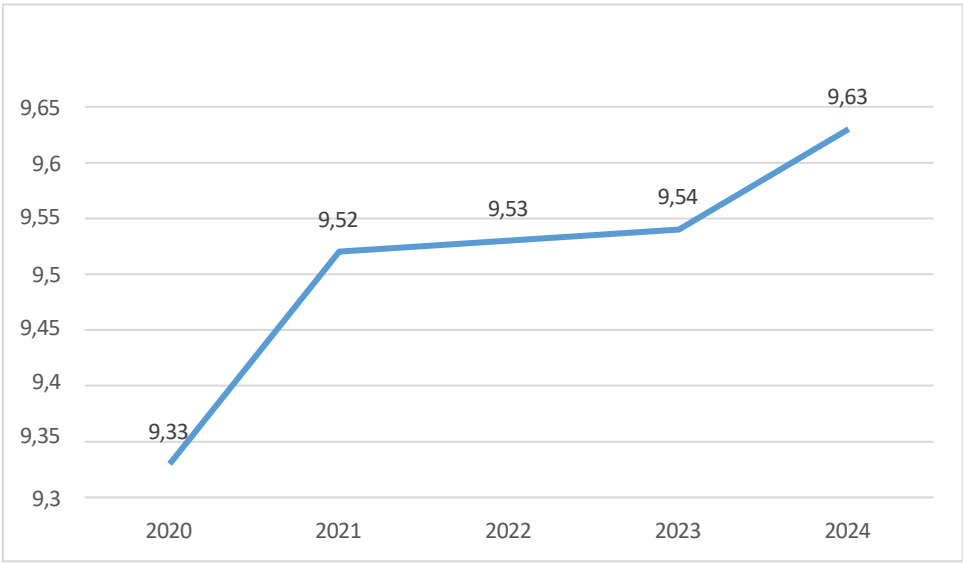
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 hingga 2024 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 9,13 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,54 tahun pada tahun 2023 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 15 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,63 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA.

Gambar 2.36.

Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah

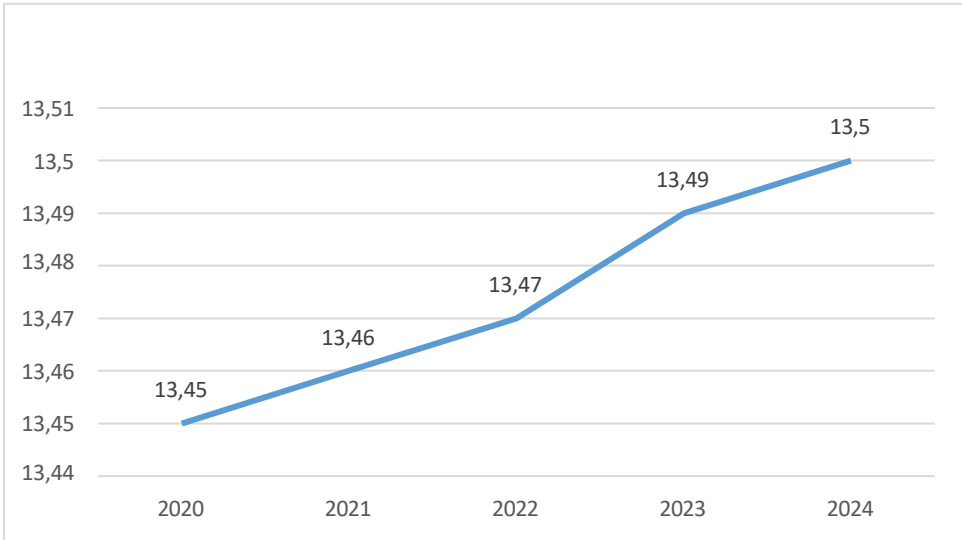


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

B. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 adalah 13,44 dan meningkat hingga pada tahun 2024 angka HLS ada pada angka 13,50 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.37.
Capaian Harapan Lama Sekolah

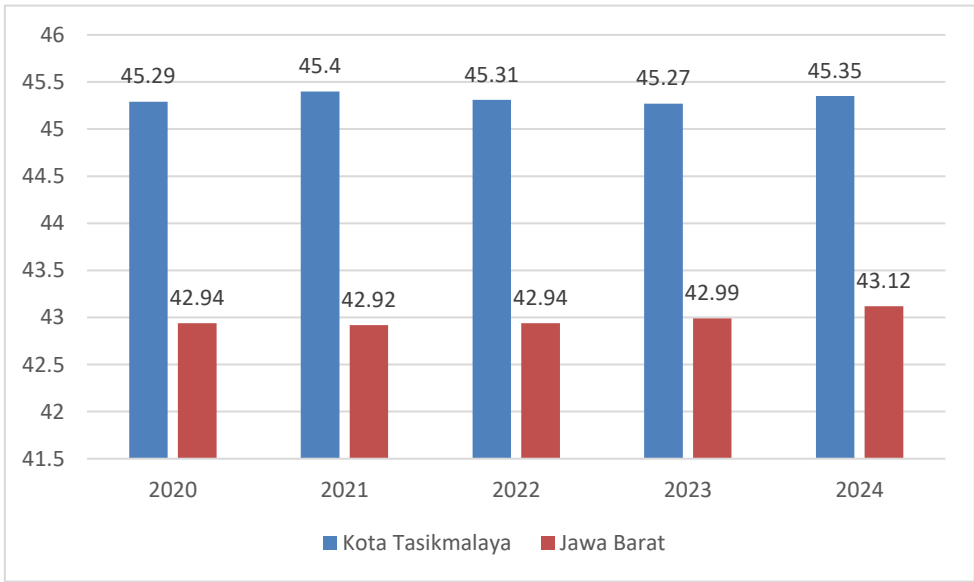


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

C. Angka Ketergantungan Penduduk

Kota Tasikmalaya yang memiliki jumlah penduduk besar, tentunya akan semakin memiliki daya saing SDM yang baik jika rasio ketergantungannya rendah. Jika dilihat tren dalam beberapa tahun terakhir, angka ketergantungan Kota Tasikmalaya berkisar antara 45,29-45,4 lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Barat berkisar antara 42,92-43,12. Pada tahun 2024, angka ketergantungannya sebesar 45,35, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Gambar 2.38.
Angka Ketergantungan Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Jawa Barat, 2025.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industry pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri

pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Peranan kategori Industri Pengolahan di Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2020 perannya terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya sebesar 14,13 persen, terus menurun hingga pada tahun 2024 menjadi 13,41 persen.

Meskipun demikian, peranan kategori industri pengolahan masih berada di urutan ketiga terbesar penyumbang PDRB Kota Tasikmalaya. Pertumbuhan kategori Industri Pengolahan selama lima tahun terakhir cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 mengalami kontraksi (-1,94), kemudian pada tahun 2021 dan 2024 mengalami percepatan pertumbuhan.

Tabel 2.48.

Pertumbuhan PDRB Kota Tasikmalaya Kategori Industri Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	21.589,36	22.844,02	24.974,68	27.411,43	29.612,77
PDRB Kategori Industri Pengolahan ADHB (Miliar Rupiah)	3.051,33	3.159,59	3.450,78	3.669,23	3.971,11
Peranan Kategori Industri Pengolahan (%)	14,13	13,83	13,82	13,39	13,41
Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan	-1,94	1,91	5,39	3,35	5,46

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Industri pengolahan di Kota Tasikmalaya digerakkan oleh Industri Kecil Menengah (IKM). Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Selain mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. IKM Kota Tasikmalaya terus tumbuh baik unit industri maupun penyerapan tenaga kerja. Mengacu dari data NIB yang dikeluarkan oleh DPMPSTP dan IUI Dinas KUKM Perindag, unit industri Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mampu tumbuh 183,5 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan unit industri ini dipacu adanya self declare sertifikasi halal dari Kementerian Agama.

B. Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minum

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi:

- 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan
- 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum

Merujuk pada hasil analisis tipologi Klassen berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap Provinsi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi ekonomi yang menjadi unggulan di Kota Tasikmalaya. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya cenderung signifikan dibandingkan dengan kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat secara umum. Selain itu, sektor ini juga memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi di Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan pertumbuhannya di tingkat provinsi. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga menjadi Sektor Ekonomi unggulan Kota Tasikmalaya terhadap Priangan Timur.



Tahun 2024, kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kota Tasikmalaya sebesar 1,85 triliun rupiah atau 6,26 persen. Peranannya terhadap PDRB relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan tumbuhnya usaha kuliner di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.49.

Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makanan dan Minum Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	21.589,36	22.844,02	24.974,68	27.411,43	29.612,77
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rupiah)	1.148,59	1.209,65	1.440,33	1.650,45	1.854,29
Peranan (%)	5,32	5,3	5,77	6,02	6,26
Laju Pertumbuhan	-3,59	2,39	14,03	9,26	7,67

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Peningkatan kebutuhan penyediaan akomodasi dan makan minum akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kunjungan wisatawan ke Kota Tasikmalaya.

C. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Menurut klasifikasi industri, di Kota Tasikmalaya terdapat 22 jenis industri. Data Tahun 2024 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan jumlah perusahaan yang terlibat dalam industri pengolahan di Kota Tasikmalaya berjumlah 9.736 perusahaan. Tenaga Kerja yang terserap di sektor industri pengolahan mencapai 17.058 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.87.559,29 miliar. Industri kreatif mendominasi industri pengolahan yang ada di Kota Tasikmalaya dari aspek jumlah perusahaan (98,8%), serapan tenaga kerja (98,2%) dan nilai investasi (98,9%). Industri kreatif yang ada di Kota Tasikmalaya ada di sub sektor kuliner, kriya dan fesyen.

Tabel 2.50.

Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Kreatif

Menurut Klasifikasi Industri di Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi
Kuliner	Makanan	8.017	12.097	61.383.114.000
	Minuman	568	868	16.489.315.000
Kriya	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	42	192	835.000.000
	Tekstil	56	453	361.500.000
	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	306	547	2.480.060.000
Fesyen	Pakaian Jadi	633	2.591	5.840.600.000
Jumlah		9.622	16.748	86.589.589.000

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Total perusahaan ekonomi kreatif di Tasikmalaya mencapai 9.622 usaha, dengan 16.748 tenaga kerja dan total investasi sebesar Rp86,59 miliar. Mayoritas usaha berskala mikro dan kecil, terlihat dari jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dibandingkan jumlah perusahaan. Nilai investasi terbesar berada di sektor kuliner, menunjukkan daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya.

Ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam subsektor kuliner dan kriya. Subsektor kuliner merupakan yang paling dominan dalam ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya, baik dari jumlah perusahaan, tenaga kerja, maupun nilai investasi. Industri makanan mendominasi industri kreatif dengan 8.017 perusahaan yang menyerap 12.097 tenaga kerja, dan nilai investasi mencapai Rp61,38 miliar. Industri minuman memiliki skala lebih kecil, dengan 568 perusahaan, 868 tenaga kerja, dan investasi sebesar Rp16,49 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman memiliki daya tarik investasi tinggi serta menjadi sektor utama dalam perekonomian kreatif Tasikmalaya.

Industri kriya, yang mencakup barang berbahan kulit, tekstil, kayu, dan anyaman, memiliki jumlah usaha yang lebih sedikit dibandingkan kuliner, tetapi tetap berkontribusi pada ekonomi lokal. Industri Kulit dan alas kaki menunjukkan skala kecil dengan 42 perusahaan dan 192 tenaga kerja, tetapi memiliki nilai investasi tinggi mencapai Rp835 juta, menunjukkan kemungkinan produk bernilai tinggi atau berbasis ekspor. Industri tekstil memiliki lebih banyak tenaga kerja (453 orang) tetapi nilai investasi lebih kecil (Rp361,5 juta), yang mungkin menunjukkan usaha skala mikro atau kecil dengan margin keuntungan lebih rendah. Industri barang dari kayu, bambu, dan rotan juga cukup signifikan, dengan 306 perusahaan, 547 tenaga kerja, dan investasi Rp2,48 miliar. Ini menunjukkan bahwa kerajinan berbahan alami masih memiliki pasar dan peluang untuk berkembang.

Subsektor fesyen merupakan ekonomi dengan peluang besar. Industri pakaian jadi menjadi sektor yang cukup berkembang dengan 633 perusahaan, menyerap 2.591 tenaga kerja, dan memiliki nilai investasi sebesar Rp5,84 miliar. Walaupun kontribusi investasi lebih kecil dibandingkan kuliner, industri fesyen memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, terutama dengan pemasaran digital dan tren fesyen lokal yang semakin diminati.

Ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh sektor kuliner, diikuti oleh kriya dan fesyen. Meskipun banyak usaha masih dalam skala kecil, peluang untuk berkembang tetap besar, terutama dengan dukungan inovasi digital, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta akses pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu bersinergi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif ini agar lebih berdaya saing.

D. Rasio Kewirausahaan

Potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya cukup besar baik dari jumlah koperasi, pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Sampai dengan tahun 2023, jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 641 buah koperasi dengan jumlah anggota koperasi 97.948 orang.

Koperasi berkualitas merupakan koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dinilai dari koperasi aktif (yang melaksanakan RAT) yang meningkat volume usaha dan assetnya. Koperasi berkualitas di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 baru mencapai 45 koperasi atau 37,50 persen dari koperasi yang melaksanakan RAT Tahun 2023. Berikut adalah sebaran koperasi yang berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023.



Tabel 2.51.

Sebaran Koperasi Berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan Rat				Jumlah Koperasi Berkualitas
		RAT	Volume Usaha	Aset	Jumlah	
1	CIHIDEUNG	18	26,031,453,764.22	40,431,812,498.24	66,463,266,262.46	10
2	CIPEDES	11	18,763,921,419.85	46,895,142,327.94	65,659,063,747.79	6
3	TAWANG	31	70,216,373,760.47	99,737,786,506.54	169,954,160,267.01	10
4	INDIHIANG	17	14,219,252,158.85	20,907,144,696.11	35,126,396,854.96	8
5	KAWALU	1	738,872,000.00	1,110,711,890.00	1,849,583,890.00	0
6	CIBEUREUM	9	7,371,648,757.00	11,307,333,741.13	18,678,982,498.13	2
7	TAMANSARI	10	3,928,291,659.00	7,971,482,604.00	11,899,774,263.00	6
8	MANGKUBUMI	9	25,773,394,581.00	38,268,630,035.97	64,042,024,616.97	5
9	BUNGURSARI	6	7,733,406,200.35	11,442,784,901.32	19,176,191,101.67	1
10	PURBARATU	5	1,979,298,743.00	3,124,266,906.00	5,103,565,649.00	3
JUMLAH		117	176,755,913,043.74	281,197,096,107.25	457,953,009,150.99	51

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, Keragaan Koperasi Semester Pertama 2024.

Pada tahun 2023 koperasi yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 207 koperasi bertambah 10 koperasi dari tahun 2022 yang sebanyak 197 koperasi. Hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mencapai 11,2 persen.

Usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya, didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 17.512 pelaku usaha meningkat tajam dari data tahun 2022 yang mencapai 6.370 pelaku usaha. Hal ini terjadi karena adanya program self declare sertifikasi halal dari Kemeterian Agama RI untuk pelaku usaha mikro yang mana kehalalan produk didasari pada pernyataan pelaku usaha kemudian diverifikasi oleh pendamping PPH dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, maupun perguruan tinggi (BPJPH 2021). Program self declare sertifikasi halal hanya mensyaratkan usaha mikro untuk mempunyai izin. Berbeda dengan program sertifikasi halal reguler, sertifikasi halal membutuhkan pengujian kehalalan produk oleh LPH. Hal ini menyebabkan pelaku usaha mikro berbondong-bondong mengajukan izin yang dapat dilakukan secara online. Menurut data OSS Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya sebanyak 17.512 unit usaha.

Usaha mikro di Kota Tasikmalaya menyerap tenaga kerja cukup banyak. Pada tahun 2023 usaha mikro menyerap tenaga kerja sebanyak 16.562 orang yang terdiri dari 13.791 orang laki-laki dan 2.771 orang perempuan. Artinya usaha mikro ini mampu membayar buruh tetap dalam melaksanakan usahanya. Kalau jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja akan membentuk rasio kewirausahaan. Pada tahun 2023 dengan angkatan kerja sebanyak 369.778 maka rasio kewirausahaan di Kota Tasikmalaya mencapai 4,47 persen.

Pengembangan lapangan usaha unggulan dan potensial Kota Tasikmalaya perlu terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi

mendatang. Untuk itu pengembangan lapangan usaha unggulan dan potensial serta pembangunan pada umumnya harus memperhatikan dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan harus berkelanjutan dengan menciptakan keseimbangan antara aktivitas manusia dan alam.

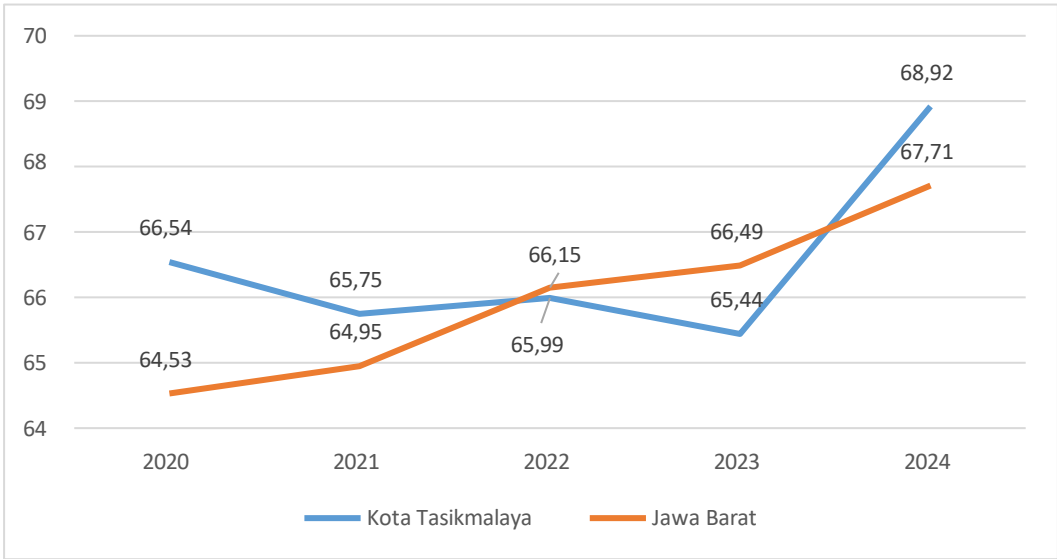
Saat ini proses pengembangan usaha mikro baik sektor industri maupun pertanian dan perikanan di Kota Tasikmalaya masih menghasilkan limbah yang belum tertangani dengan baik, juga masih banyak menggunakan bahan anorganik dalam proses produksi yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 573.652 orang meningkat sebesar 8.559 orang dari tahun 2023. Dari 573.652 orang penduduk usia kerja ini, sebanyak 395.357 orang (68,92 persen) merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya sebesar 178.295 (31,08 persen) tergolong bukan angkatan kerja. Memperhatikan komposisi angkatan kerja Kota Tasikmalaya, sebagian besar didominasi oleh penduduk bekerja dengan persentase 93,51 persen atau 369.713 orang terdiri dari 228.642 orang laki-laki dan 141.071 orang perempuan. Sisanya adalah pengangguran dengan persentase sebesar 6,49 persen

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Tasikmalaya selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun. Penurunan TPAK Kota Tasikmalaya didorong oleh belum pulihnya ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan.

Gambar 2.39.
TPAK Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

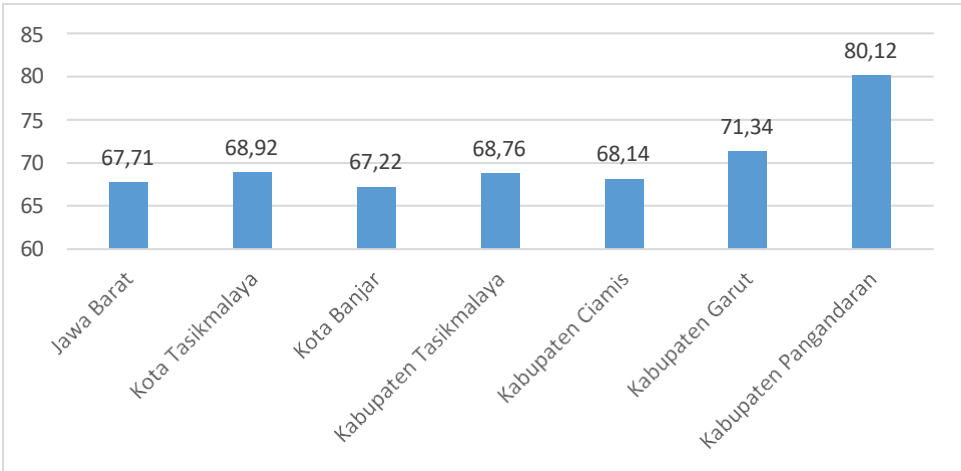


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025.

Apabila dibandingkan dengan capaian TPAK dengan provinsi Jawa Barat dan daeral lainnya di priangan timur, maka dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.40.

Perbandingan TPAK Kota Tasikmalaya dengan Kab/Kota
se-Priangan Timur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada tahun 2023 mencapai 80,63 persen, sedangkan TPAK perempuan adalah 49,94 persen. Perkembangan TPAK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

Tahun	TPAK Laki-Laki(%)	TPAK Perempuan(%)
2020	79,58	55,65
2021	79,84	51,65
2022	83,72	48,25
2023	80,63	49,94
2024	*-	*-

Ket *- : Belum Rilis.

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Pada tahun 2023 sebagian besar pekerja di Kota Tasikmalaya bekerja di sektor jasa sebanyak 217.125 orang (62,84 persen), kemudian di sektor manufaktur sebanyak 111.506 orang (32,27 persen) serta sisanya sebanyak 16.913 orang (4,89 persen) bekerja di sektor pertanian. Produktivitas tenaga kerja sektor industri/manufaktur Rp.32,91 juta/orang/tahun dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa sebesar Rp.82,53 juta/orang/tahun.

Pada tahun 2024 dari 369.713 penduduk yang bekerja, didominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 196.861 orang disusul lulusan sekolah menengah atas sebanyak 124.757 orang dan 48.095 orang lulusan perguruan tinggi. Dominasi lapangan pekerjaan utama di sektor jasa dan manufaktur sangat rentan terhadap kondisi ekonomi apalagi dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Peningkatan kualitas pekerja dan pencari kerja merupakan pekerjaan rumah yang berat, salahsatunya disebabkan oleh belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah Kota Tasikmalaya ataupun perguruan tinggi lokal yang mempunyai program vokasi. Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja atau pencari kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan 58 LPK

(Lembaga Pendidikan dan Latihan) yang ada di Kota Tasikmalaya. Selain itu menjaga stabilitas ekonomi untuk menciptakan kondusifitas usaha mikro dan kecil sangatlah penting supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 2.53.

Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			< Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Perguruan Tinggi
Angkatan Kerja	Bekerja	2022	167.830	111.226	45.043
		2023	165.473	121.921	58.150
		2024	196.861	124.757	48.095
	Pengangguran	2022	5.767	14.692	2.505
		2023	8.797	13.420	NA*
		2024	6.380	12.786	6478
	Jumlah Angkatan Kerja	2022	173.597	125.918	47.548
		2023	174.270	135.341	NA*
		2024	203.241	137.543	54573
	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	2022	96,17	88,33	94,73
		2023	94,95	90,08	NA*
		2024	96,04	90,7	88,13
Bukan Angkatan Kerja		2022	113.405	54.727	10.777
		2023	115.513	64.854	14.948
		2024	110.726	56.362	11.107
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		2022	59,1	69,7	81,52
		2023	60,14	67,6	NA*
		2024	63,13	70,9	83,1

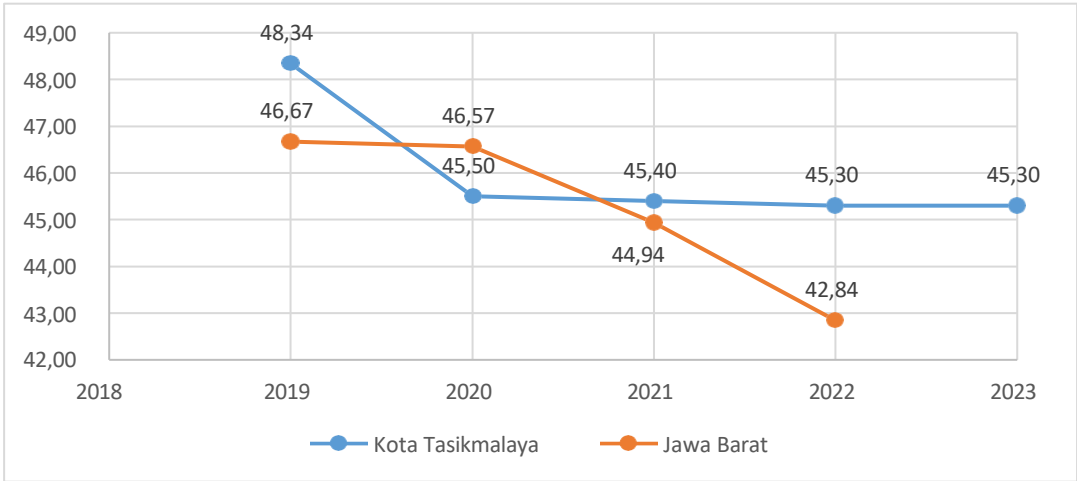
Keterangan:
 NA* = Data tidak dapat ditampilkan karena nilai Relative Standard Error (RSE) terlalu tinggi.

F. Ketergantungan Penduduk

Kota Tasikmalaya yang memiliki jumlah penduduk besar, tentunya akan semakin memiliki daya saing SDM yang baik jika rasio ketergantungannya rendah. Jika dilihat tren dalam beberapa tahun terakhir, angka ketergantungan Kota Tasikmalaya cenderung membaik dan masih di bawah angka nasional. Pada tahun 2023, angka ketergantungannya sebesar 45,30, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Gambar 2.41.

Angka Ketergantungan Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

G. Indeks Inovasi Daerah

Pemerintah Kota Tasikmalaya pun telah aktif dalam mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Tercatat bahwa Indeks Inovasi Kota Tasikmalaya terus naik dari tahun 2021-2024 sebesar 12,95, seperti tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.54.

Indeks Inovasi Kota Tasikmalaya 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi	36,43 (inovatif)	38,70 (inovatif)	46,70 (inovatif)	49,38 (inovatif)

Sumber: BRIN, 2025

Inovasi yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya mendapatkan apresiasi baik lokal, Provinsi dan Nasional. Berikut inovasi yang mendapatkan penghargaan.

Tabel 2.55.

Inovasi yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya mendapatkan apresiasi baik/ mendapatkan penghargaan

No.	Nama Inovasi	Ruang Lingkup Inovasi	Tahun	Peringkat	Tingkat
1	PROTASIK Ver. 2.0 (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmlaya Versi 2.0)	Pengelolaan Aset Tanah	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
2	GENTING (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting)	Kesehatan (stunting)	2024	Juara III Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
3	Aplikasi Golden 1000, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya	Kesehatan Anak	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
4	Box Sampah Pintar Berbasis AI dan IoT, Universitas Siliwangi	Persampahan	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
5	Vertical Sealer Sederhana	UMKM	2024	Juara II Lomba TTG Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat



No.	Nama Inovasi	Ruang Lingkup Inovasi	Tahun	Peringkat	Tingkat
6	Kompos Juara: Recycle Faecal Waste Menggunakan Smart Machine Compost Sebagai Solusi Alternatif Penanganan Limbah Terpadu di UPTD Singkup	Sanitasi (Limbah Domestik)	2022	Top 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
7	Layar Kusumah (Layanan Antar Sampai Ke Rumah)	Sosial	2022	Terbaik 15 Besar Program <i>Integrated Sustainabilitiy Movement (I-SIM) for Cities</i> 2022	Nasional

Sumber: Bappelitbangda, Data Diolah 2025.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada prinsipnya terdapat tiga pilar namun, dengan menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan kedepan di tingkat kabupaten/kota maka Indeks Ekonomi Hijau yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah “Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi” artinya untuk tingkatan kabupaten/kota cukup diukur sampai dengan pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi. Terkait pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat kabupaten/kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tersebut sudah tergambarkan pada indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan kabupaten/kota sebagai turunan indikator juga dari provinsi.

Pada tahun 2024 Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi mencapai 58,46 poin yang diklasifikasi dalam kategori Baik Tier 1. Nilai indikator pembentuk Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi adalah:

Tabel 2.56.
Produktivitas Akuakultur dan Padi

No.	Indikator	Capaian	
		2023	2024
1	Produktivitas Akuakultur (ton/ha)	14,82	14,44
2	Produktivitas Padi	5,19	6,15
3	Produktivitas Tenaga Kerja Industri (Rp/Kapita)	32.906.121,64	69.214.433,60
4	Produktivitas Tenaga Kerja Jasa (Rp/Kapita)	82.527.576,28	85.581.354,59
5	PDRB Perkapita (US Dollar D)	2.393,92	2.556

Sumber: Bappelitbangda, Data Diolah 2025.



B. Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Kota Tasikmalaya, meskipun bukan kota pesisir, memiliki potensi perikanan, pariwisata berbasis air, serta pengelolaan limbah yang berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi biru.

1) Potensi Perikanan

Kota Tasikmalaya memiliki potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Areal perikanan budidaya seluas 692,27 Ha, yang terdiri dari kolam pembenihan seluas 19,49 Ha, kolam pembesaran seluas 621,23 Ha, sawah irigasi untuk minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras seluas 0,14 Ha. Berikut adalah jumlah rumah tangga dan produksi perikanan budidaya.

Tabel 2.57.

Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga		Produksi	
	Kolam	Sawah	Kolam	Sawah
Kawalu	1.652	16	1.484,74	45,92
Tamansari	1.477	215	564,27	43,12
Cibeureum	1.826	25	1.280,11	43,74
Purbaratu	1.597	110	1.016,21	190,12
Tawang	393		190,85	
Cihideung	209		97,13	
Mangkubumi	1.262	1	1.369,01	20,85
Indihiang	1.047	19	1.070,43	74,71
Bungursari	1.276	110	1.560,28	229,29
Cipedes	999		708,95	
Kota Tasikmalaya	11.738	496	9.341,98	647,75

Sumber: BPS Tahun 2025.

Rumah tangga perikanan budidaya di Kota Tasikmalaya bergabung ke dalam 434 kelompok pembudidaya ikan, 16 poklahsar, 3 pokmaswas, serta 17 kelompok lainnya, dengan total anggota kelompok 6.117 orang. Hal ini menunjukkan belum semua rumah tangga perikanan budidaya tergabung dan kelompok perikanan.

Perikanan budidaya di Kota Tasikmalaya didominasi oleh sistem budidaya ikan di kolam, baik dari jumlah rumah tangga maupun produksi. Dari total 12.234 rumah tangga yang bergerak dalam perikanan budidaya, mayoritas (95,95%) menggunakan kolam, sementara hanya 4,05% yang memanfaatkan sawah untuk budidaya ikan. Total produksi perikanan budidaya Tahun 2024 mencapai 9.989,73 ton. Produksi ikan dari budidaya ikan di kolam sebesar 9.341,98 ton (93,51%) dari total produksi, dan di sawah sebesar 647,75 ton (6,49%).

Produktivitas per rumah tangga perikanan budidaya di kolam mencapai 796 kg/tahun sementara di sawah mencapai 1.306 kg/tahun. Walaupun kolam merupakan metode utama yang digunakan dalam budidaya ikan di Kota



Tasikmalaya namun berbudidaya ikan di sawah ternyata memiliki produktivitas lebih tinggi (1,3 ton per rumah tangga) dibandingkan yang menggunakan kolam (0,8 ton per rumah tangga).

Produktivitas perikanan budidaya di kolam mencapai 14,57 ton/ hektar, sementara di sawah mencapai 12,59 ton/hektar. Produktivitas total perikanan budidaya tahun 2024 mencapai 14,43 ton/ hektar. Areal perikanan tangkap di Kota Tasikmalaya berupa situ dan sungai seluas 7.698,8 hektar yang terdiri dari Situ Gede seluas 47 hektar, Situ Cibeureum seluas 10 hektar, Situ Cipajaran seluas 6 hektar, Situ Malingping seluas 2 hektar, Situ Cicangri seluas 2,5 hektar dan Sungai dengan luas total 7.631,30 hektar. Berikut adalah data rumah tangga dan produksi perikanan tangkap di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.58.

Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya, Tahun 2023 dan 2024

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga		Produksi	
	2023	2024	2023	2024
Kawalu	4	4	3,97	3,97
Tamansari	53	53	20,43	20,43
Cibeureum	12	12	11,92	11,92
Purbaratu	-	-	-	-
Tawang	-	-	-	-
Cihideung	-	-	-	-
Mangkubumi	73	73	46,83	46,83
Indihiang	-	-	-	-
Bungursari	17	17	16,89	16,89
Cipedes	-	-	-	-
Kota Tasikmalaya	159	159	100,04	100,04

Sumber: BPS Tahun 2025.

Efisiensi produksi juga relatif sama, karena jumlah rumah tangga perikanan tidak berubah, namun produksi sedikit meningkat. Faktor yang mungkin mempengaruhi stagnasi ini bisa mencakup ketersediaan ikan, kondisi lingkungan perairan, teknologi yang digunakan, atau kebijakan perikanan yang berlaku. Produktivitas per rumah tangga perikanan tangkap tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 0,6 ton/tahun. Produktivitas areal perikanan tangkap tahun 2024 mencapai 0,01 ton per ha. Infrastruktur pendukung ekonomi biru di sektor perikanan berupa:

- 1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
- 2. UPTD Pengembangan Produksi Ikan
 - Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
 - 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Tantangan utama perikanan budidaya di Kota Tasikmalaya adalah alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta harga pakan ikan yang terus meningkat serta peningkatan konsumsi ikan yang belum optimal baru mencapai 43,95 kg/kapita/tahun.

2) Potensi Pariwisata Berbasis Air

Sektor wisata di Kota Tasikmalaya juga memiliki kaitan dengan ekonomi biru melalui wisata air, yang meliputi:

- 1. Wisata Alam: Arung jeram di Sungai Ciwulan dan Citanduy, serta wisata situ seperti Situ Gede dan Curug Tonjong.

2. Wisata Rekreasi: Teejay Waterpark, Kolam Renang Asia, Mangkubumi Water Park, Ma'arif Garden, dan Mutiara Aboh.

Wisata air dapat menjadi sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti pengelolaan limbah wisata dan pencemaran air masih perlu diatasi.

3) Pengelolaan Limbah dan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih menghadapi tantangan besar. Dengan masih tingginya timbunan sampah yang mencapai 319,11 ton/hari pada tahun 2022, baru terkelola sekitar 253,18 ton/hari (81,77%). Di lain pihak TPA Ciangir yang memiliki luas 6,5 hektar membutuhkan perluasan hingga 9,9 hektar untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat.

Hal yang menjadi masalah adalah TPA Ciangir masih menggunakan sistem open dumping, yang berisiko mencemari lingkungan serta keterbatasan SDM, dan infrastruktur pengelolaan limbah.

Infrastruktur pendukung ekonomi biru dalam pengelolaan sampah meliputi sarana pengangkutan sampah berupa 28 unit dump truck dengan kondisi 9 baik, 6 layak, 13 rusak; 13 unit arm roll dengan kondisi 1 baik, 8 layak, 4 rusak; 27 unit motor roda tiga dengan kondisi 11 baik, 6 layak, 10 rusak serta 1 TPA di Ciangir, yang sudah melebihi kapasitas. Infrastruktur pengelolaan limbah masih terbatas dan membutuhkan peningkatan kapasitas, diperlukan inovasi dalam pengolahan limbah untuk mendukung konsep circular economy.

Pemerintah sudah berupaya menjalankan Gerakan 3R dengan sistem bank sampah di tingkat RW hingga kecamatan, serta kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.

Ekonomi biru di Kota Tasikmalaya memiliki potensi besar, terutama di sektor perikanan dan pengelolaan limbah. Namun, tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta keterbatasan infrastruktur harus segera diatasi melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Pemerintah Kota Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE di Kota Tasikmalaya meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang ditunjukkan dengan Indeks SPBE Kota Tasikmalaya yang terus mengalami peningkatan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penerapan manajemen SPBE meliputi penerapan manajemen resiko, keamanan informasi, data, aset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Kota Tasikmalaya memiliki layanan SPBE, yang terdiri dari:

- a. Layanan administrasi, yang meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja organisasi.
- b. Layanan publik yang meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan bidang pendidikan, layanan bidang komunikasi dan layanan administrasi kelurahan.

Pada tahun 2024 Indeks SPBE Kota Tasikmalaya mencapai 3,96 poin



dengan predikat Sangat Baik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2021 sampai tahun 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59.

Indeks SPBE Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Nilai SPBE				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	-	2,68 (B)	2,80 (B)	3,25 (B)	3,96 (SB)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025.

Sebagai wujud komitmen terhadap keamanan informasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan menerapkan kontrol-kontrol keamanan yang mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis serta Prosedur Keamanan SPBE. Langkah ini selaras dengan salah satu misi BSSN Tahun 2020–2024, yaitu menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien demi terwujudnya kedaulatan keamanan siber nasional dan tatakelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah Indeks KAMI Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024 :

Tabel 2.60.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	31,2	33,33	45,74	48,21	45,74

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan signifikan dalam indeks KAMI dari tahun 2020 hingga 2023 meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2024, nilai indeks masih mencerminkan kematangan pengelolaan keamanan informasi di tingkat daerah. Peningkatan kualitas SDM, pemutakhiran teknologi, dan penguatan kebijakan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan peningkatan indeks KAMI.

Berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor, BPS melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2024. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Berikut adalah nilai IPS Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024 :

Tabel 2.61.
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Poin)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	0	0	2,92 (Baik)	2,47 (Baik)	3,01 (Baik)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,01 dengan predikat “Baik”. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, terutama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mengalami penurunan.

Nilai IPS sebesar 3,01 menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan statistik sektoral Kota Tasikmalaya telah memasuki tahap awal kematangan (initial maturity). Meskipun demikian, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan, khususnya pada aspek-aspek strategis seperti integrasi data antar perangkat daerah, pelatihan SDM statistik sektoral, serta peningkatan kualitas metadata dan interoperabilitas sistem.

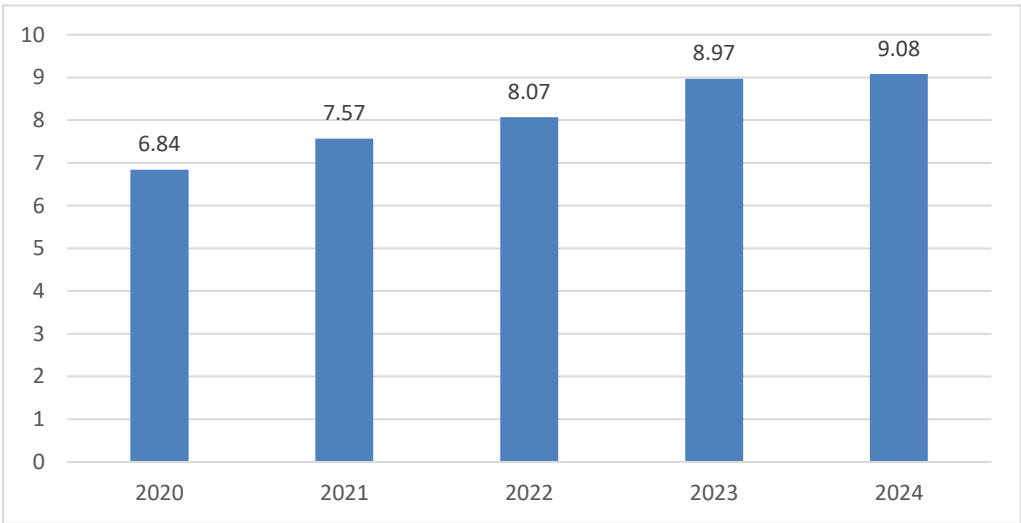
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Gambaran umum investasi di Kota Tasikmalaya dapat diilustrasikan dengan meninjau salah satu komponen PDRB pengeluaran yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun dengan meninjau penanaman modal langsung yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Komponen PMTB merepresentasikan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan produksi. Berdasarkan data BPS, besaran nilai PMTB Kota Tasikmalaya disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.42.

Nilai PMTB dalam PDRB Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2021-2025.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa komponen PMTB dalam PDRB Pengeluaran Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan secara

nominal dalam kurun waktu tersebut, di mana pada tahun 2020 nilai komponen PMTB yang tercatat adalah sebesar Rp26,84 triliun, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp9,04 triliun. Adapun dari segi penanaman modal, pencapaian Kota Tasikmalaya dalam lima tahun ke belakang diketahui cenderung meningkat dengan pengecualian pada tahun 2020. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.62.
Realisasi Investasi Kota Tasikmalaya

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (dalam miliar rupiah)	422,6	1.630	4.777,36	18.702	2.138

Sumber: DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2025.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor Kota Tasikmalaya terus mengalami defisit sepanjang Tahun 2020-2024. Berdasarkan data Net Ekspor Barang dan Jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku selama periode 2020-2024, terlihat bahwa nilai net ekspor selalu negatif, yang berarti impor barang dan jasa lebih besar dibandingkan ekspor. Tren Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya selama kurun Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63.
Tren Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya selama kurun
Tahun 2020-2024

Tahun	Net Ekspor (Miliar Rupiah)
2020	-3.959,49
2021	-3.498,48
2022	-3.578,72
2023	-4.377,90
2024	-4.296,72

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

Pada Tahun 2020, defisit net ekspor berada di angka Rp.-3.959,49 miliar. Tahun 2021 mengalami sedikit perbaikan dengan penurunan defisit menjadi Rp.-3.498,48 miliar, kemungkinan karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, pada Tahun 2022, defisit kembali meningkat menjadi Rp.-3.578,72 miliar, menunjukkan adanya kenaikan impor atau stagnasi ekspor. Tahun 2023 mencatat defisit tertinggi dalam periode ini, yaitu sebesar Rp. - 4.377,90 miliar, yang bisa disebabkan oleh peningkatan konsumsi barang impor atau penurunan daya saing ekspor daerah. Tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dengan defisit sebesar Rp.-4.296,72 miliar, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan 2020-2022.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan defisit net ekspor ini diantaranya adalah Kota Tasikmalaya masih bergantung pada barang atau jasa dari luar daerah atau luar negeri, produk lokal Kota Tasikmalaya belum mampu bersaing baik dari segi harga maupun kualitas serta kurangnya fasilitas pendukung ekspor seperti promosi dan infrastruktur perdagangan. Defisit net ekspor yang terus berlangsung bisa mengurangi kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB, karena lebih banyak uang yang keluar daripada yang masuk. Selain itu meningkatnya ketergantungan pada barang impor bisa berdampak pada industri lokal yang kurang berkembang serta daya beli masyarakat dapat terpengaruh jika harga barang impor naik akibat nilai tukar atau kebijakan perdagangan.

Mempertimbangkan hal ini maka Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa melalui pengembangan industri lokal, inovasi produk, dan peningkatan kualitas produk lokal, mendorong substitusi impor dengan mengembangkan produk-produk pengganti barang impor yang bisa diproduksi di dalam daerah, meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan, agribisnis, dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi ekspor serta meningkatkan akses pasar ekspor dengan menjalin kerja sama dengan daerah atau negara lain. Dengan demikian diperlukan strategi penguatan industri lokal dan peningkatan daya saing produk Kota Tasikmalaya agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, dan akses informasi, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kualitas dan efektivitas infrastruktur suatu daerah, digunakan Indeks Infrastruktur dalam menilai perkembangan serta dampak infrastruktur terhadap perekonomian dan kehidupan sosial.

Lebih lanjut, indeks infrastruktur memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk Kota Tasikmalaya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa kaitan utama antara indeks infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

a. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas

Indeks kemantapan jalan yang tinggi menunjukkan kondisi jalan yang baik, yang memperlancar distribusi barang dan jasa. Jalan yang mantap mengurangi biaya logistik, meningkatkan efisiensi bisnis, serta menarik investasi dari luar daerah.

b. Daya Tarik Investasi

Indeks kualitas infrastruktur yang tinggi mencerminkan ketersediaan fasilitas dasar seperti tersedianya akses transportasi yang memadai, layanan air bersih, dan pengelolaan air limbah yang memadai. Infrastruktur yang baik menarik investor karena mengurangi biaya operasional serta meningkatkan efisiensi produksi.

c. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Infrastruktur yang baik, meningkatkan akses layanan publik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja karena mereka memiliki akses lebih baik ke tempat kerja, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

d. Mendorong Sektor Pariwisata dan Perdagangan

Tasikmalaya memiliki potensi pariwisata dan perdagangan yang besar. Kemantapan jalan dan ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan wisata yang baik dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi.

Secara keseluruhan, semakin tinggi indeks infrastruktur suatu daerah, semakin besar peluang pertumbuhan ekonominya. Infrastruktur yang memadai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis, investasi, dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indeks Infrastruktur di Kota Tasikmalaya berada dalam kondisi BAIK, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan kualitas dan capaian air minum dan sanitasi rumah tangga, serta akses internet rumah tangga.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

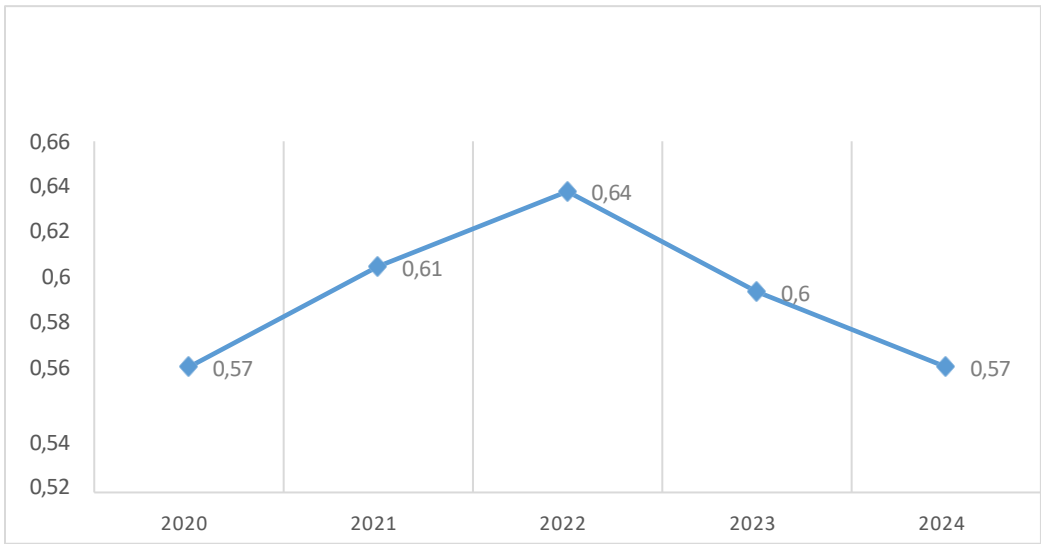
A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2022 hanya sekitar 1,3% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah sebesar 3%.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami fluaktif, akan tetapi pada tahun 2020 berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisor Kinerja pajak daerah Kota Tasikmalaya terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 0,57%, adapun rata-rata tax ratio kab/ kota di Indonesia pada 2020 berada pada angka 0,32 %, hal ini menunjukan kinerja pajak daerah Kota Tasikmalaya relatif tinggi dibandingkan dengan rata rata keseluruhan Kab/ Kota yang ada di Indonesia. Perkembangan selama 5 tahun data dilihat pada diagram pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.43.

Perkembangan Rasio pajak daerah terhadap PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) Kota Tasikmalaya dari 2020-2024



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah).

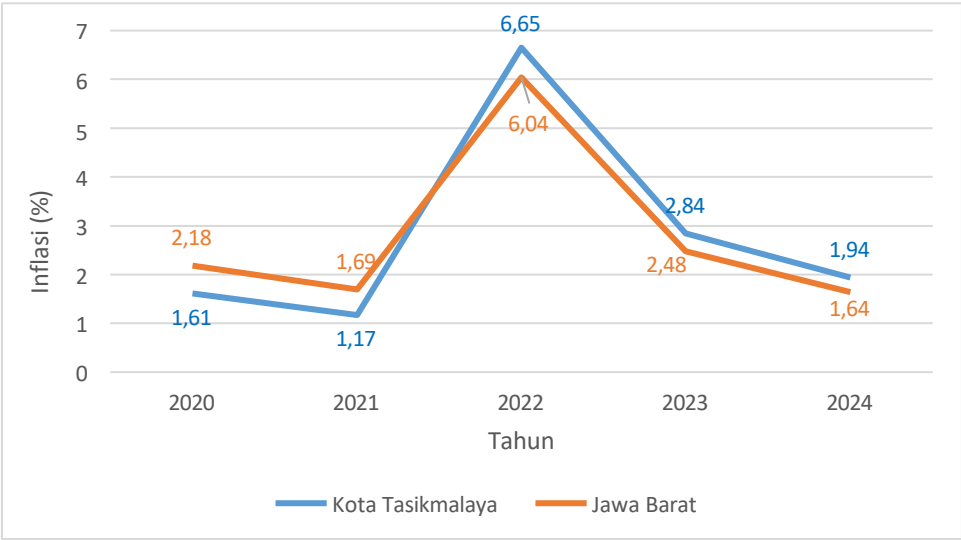
Rata rata lima tahun rasio pajak daerah Kota Tasikmalaya terhadap PDRB Kota tasikmalaya adalah 0,60%. Untuk meningkatkan rasio pajak daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan beberapa strategi, seperti meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah, meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pajak, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

B. Tingkat Inflasi

Perkembangan laju inflasi Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.44.

Perkembangan Laju Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2020-2025

Grafik tersebut menunjukkan bahwa laju inflasi cenderung fluktuatif. Jika disandingkan seperti pada grafik, pola fluktuasi yang terjadi di tingkat kota memiliki sedikit kemiripan dengan pola fluktuasi yang terjadi di tingkat provinsi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa jika laju inflasi di kedua tingkatan tersebut dirata-ratakan selama kurun waktu 5 tahun menjadi sebuah laju inflasi tahunan, keduanya tidak menunjukkan perbedaan yang besar.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

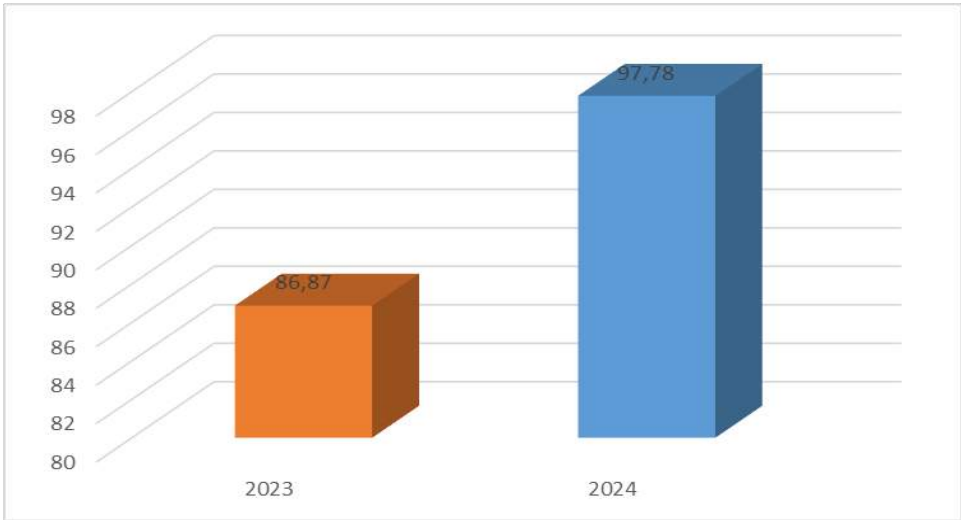
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan dan tanggap terhadap peran publik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan penyusunan regulasi, baik dari sisi koordinasi, peningkatan kualitas SDM, dan pengelolaan data base peraturan perundang-undangan. Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi. Variabel yang diukur dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah 1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi; 2) Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) pusat yang berkualitas; 3) Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu; 4) Penataan Database Peraturan Perundang-undangan. Berikut Indeks Reformasi Hukum Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 dan 2024.

Gambar 2.45.

Indeks Reformasi Hukum Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2024



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2024

Nilai capaian indeks Reformasi Hukum (IRH) pada tahun 2023 tercatat sebesar 86,87 poin dengan predikat A (Sangat Baik) dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan 10, 91 poin sehingga IRH mencapai 97,78 poin dengan predikat AA (Istimewa).

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan manajemen SPBE yang komprehensif melalui: penerapan manajemen resiko, keamanan informasi, manajemen data dan aset TIK, peningkatan kompetensi SDM, manajemen pengetahuan dan perubahan, serta penguatan layanan SPBE. Jenis layanan SPBE yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari layanan administrasi dan layanan publik.

- a. Layanan administrasi, meliputi layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, serta kinerja organisasi.
- b. Layanan publik, meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, data terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pendidikan dan komunikasi serta administrasi kelurahan.

Capaian Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2024 mencapai nilai 3,96 poin dengan predikat Sangat Baik, menunjukkan kemajuan besar dalam transformasi digital Pemerintah Kota Tasikmalaya dan konsisten peningkatan dari tahun ke tahun. Dan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance melalui teknologi informasi. Berikut ini Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2021 sampai tahun 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64.

Indeks SPBE Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Nilai SPBE				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	-	2,68 (B)	2,80 (B)	3,25 (B)	3,96 (SB)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025.

C. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merujuk pada beragam layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Pelayanan publik meliputi proses, ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas layanan yang memengaruhi kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Memahami esensi pelayanan publik menjadi penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, serta responsivitas instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara. Pelayanan publik di Kota Tasikmalaya terus mengalami perbaikan, hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.65.

Indeks Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Nilai IPP				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,63	3,67	4,18	3,47	4,40

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah).

IPP Kota Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2022, namun menurun di tahun 2023, dan kembali meningkat di tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan publik seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi dalam layanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

D. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk mengamankan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. SAKIP berfungsi sebagai alat penilaian kinerja yang mendorong transparansi dan pertanggungjawaban dari kinerja serta fungsi Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat. Ini tercermin dalam laporan yang disampaikan, menjadi salah satu bentuk keterbukaan atas pencapaian dan pelaksanaan tugas.

Tabel 2.66.

Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Nilai SAKIP				
	2020	2021	2022	2023	2024
SAKIP	70,84 (BB)	71,63 (BB)	70,73 (BB)	71,82 (BB)	71,11 (BB)

Sumber: Setda Kota Tasikmalaya, 2025.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya dievaluasi berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target pembangunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau SAKIP Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 dan 2022 dimana terjadi penurunan. Penilaian SAKIP pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan terdapat komponen penilaian yang dihilangkan, dari 5 (lima) komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja, menjadi 4 (empat) komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Konsep tersebut merupakan tiga pilar utama dalam membangun negara yang kuat, adil, dan demokratis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang ketiga konsep tersebut. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Hukum ini harus dapat melindungi hak-hak asasi manusia, menghukum pelanggaran hukum, dan menjamin kepastian hukum. Keamanan nasional yang tangguh adalah kemampuan negara untuk melindungi keamanan dan keselamatan warga negara, serta menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Keamanan nasional ini harus dapat diwujudkan melalui kerja sama antara lembaga keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Demokrasi substansional adalah demokrasi yang tidak hanya berfokus pada proses demokratis, tetapi juga pada hasil yang dicapai. Demokrasi ini harus dapat menjamin partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, serta menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi warga negara.

Dengan demikian, ketiga konsep tersebut saling terkait dan harus diwujudkan secara simultan untuk mencapai tujuan negara yang kuat, adil, dan demokratis. Terdapat 3 indikator dari Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial adalah sebagai berikut :

- 1. Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah program yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah.

Tabel 2.67.
Indeks Survey Penilaian Integritas Kota Tasikmalaya
Tahun 2023-2024

Tahun	Indeks Survey Penilaian Integritas
2023	73,70
2024	71,84

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya, 2025.

- 2. Indeks Pembangunan Hukum disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan penyusunan regulasi, baik dari sisi koordinasi, peningkatan kualitas SDM, dan pengelolaan data base peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kondisi Kota Tasikmalaya, yang digunakan dalam pengukuran adalah penanganan perkara di lingkungan Kota Tasikmalaya dan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68.

Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perkara yang ditangani	5	8	8	7	4
2.	Jumlah Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	0	34	25	25	25

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025.

- 3. Keamanan, kententraman dan ketertiban umum
Pengukuran proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian



di Area Tempat Tinggalnya (%) hanya sampai Provinsi, sesuai dengan keadaan Kota Tasikmalaya tersebut yang digunakan adalah Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.

Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus Narkoba	5	87	72	87	83
2	Kasus Pembunuhan	3	1	2	2	1
3	Kasus seksual	35	32	1	68	7
4	Kasus Penganiayaan	39	4	38	109	44
5	Kasus Pencurian	69	70	4	90	80
6	Kasus Penipuan	105	67	88	207	70
7	Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	0	1
8	Pidana Lainnya	122	120	109	0	179
Jumlah Tidak Kriminal selama 1 tahun		376	327	246	1.079	465

Sumber: Polresta Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah).

4. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Persentase Penegakan Peraturan Daerah tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.70.

Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Persentase Penurunan Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi								
	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penegakan Peraturan Daerah	90	100	111	93	100	107,52	-	-	-
Persentase Penurunan Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi	-	-	-	-	-	-	4,5	4,7	104,4

Sumber: SatpolPP Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah).

5. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indikator indeks ketentraman dan ketertiban merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur keamanan dan ketertiban suatu daerah. Pengukuran indeks ketentraman dan ketertiban Kota Tasikmalaya baru dilaksanakan tahun 2024 dengan hasil survey sebesar 67,79%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.71.

Hasil survey Indeks Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2024

	SS	S	RG	TS	STS	Jumlah Total
Jumlah Jawaban Item	1526	2108	2620	1002	556	7812
Jumlah Skor Item	7630	8432	7860	2004	556	26482
Indeks Ketentraman						
Jumlah Total Skor Item	/	Skor Tertinggi	x	100		Indeks %
26482	:	39060	x	100	=	67.79

Sumber: SatpolPP Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah).

6. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik dan Lembaga demokrasi, indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Kota Tasikmalaya tidak secara spesifik disebutkan dalam data yang saya temukan. Namun, Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kota Tasikmalaya memiliki nilai IDI yang berfluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai IDI Provinsi Jawa Barat adalah 79,72, meningkat menjadi 83,34 di tahun 2022, dan kemudian menurun menjadi 83,04 di tahun 2023.

Berkaitan dengan implelementasi nilai demorasi yaitu bagaimana Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum. Angka Partisipasi Pemilu (APP) adalah persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilu dibandingkan dengan jumlah warga negara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau jumlah pemilih yang memiliki hak pilih pada pemilu tersebut. Antusiasme masyarakat dalam memberikan suaranya pada Pemilu di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan sangat baik, hal ini terlihat dari jumlah partisipasi pemilih yang persentasenya diatas 80 persen. Berikut adalah partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kota Tasikmalaya:

Tabel 2.72.

Partisipasi Pemilu Kota Tasikmalaya

No.	Pemilu	Partisipasi Pemilih
1.	Pemilu Legislatif 2014	82,82%
2.	Pemilu Presiden 2014	81,05%
3.	Pilkada Kota Tasikmalaya 2017	81,65%
4.	Pemilu Jabar 2018	81,05%
5.	Pemilu Tahun 2019	87,49%
6.	Pemilu Legislatif Tahun 2024	86,08%
7.	Pilkada Tahun 2024	76,90%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, 2025.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Tasikmalaya memiliki skor tinggi dari Sumber Daya Manusia dan Pasar. Komponen yang belum mendapatkan nilai optimal di lingkungan pendukung dan ekosistem inovasi. Lebih rinci dapat melihat tabel berikut:

Tabel 2.73.

Komponen IDSD Kota Tasikmalaya

Komponen IDSD	Skor
Lingkungan Pendukung	3,66
Sumber Daya Manusia	3,88
Pasar	3,74
Ekosistem Inovasi	3,33

Sumber : BRIN, 2025

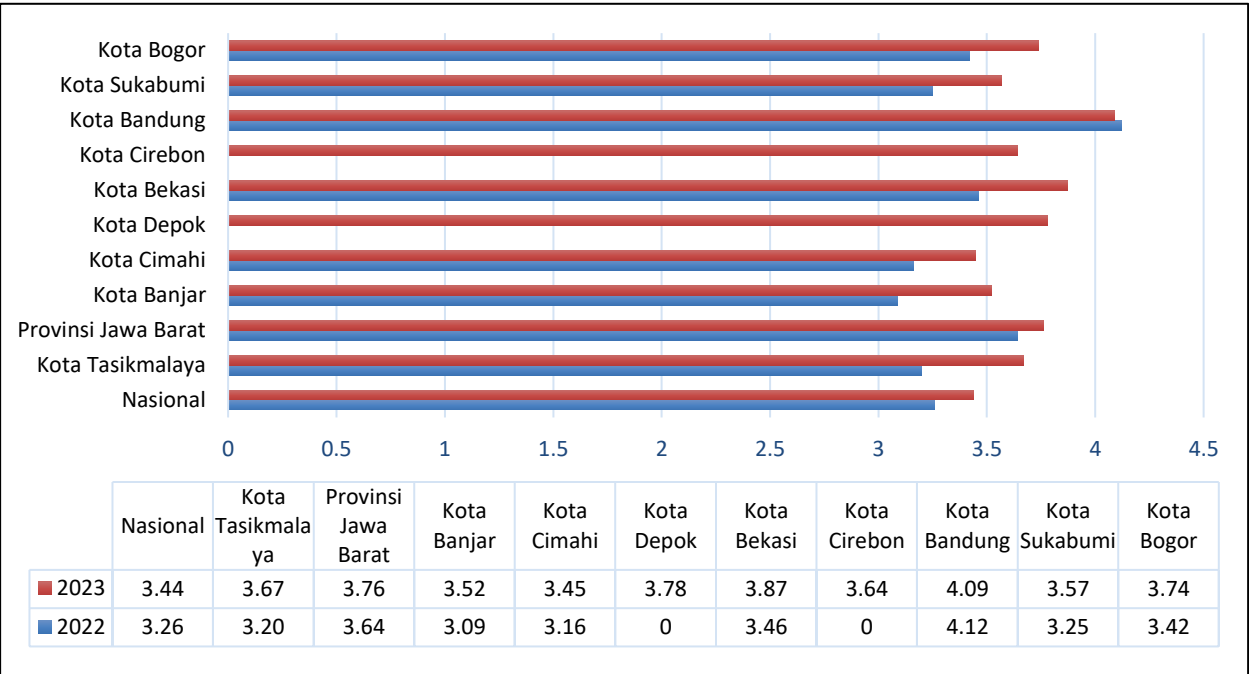
Selain itu nilai IDSD Kota Tasikmalaya jika dibandingkan dengan Nasional, dan Kota-Kota Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya memiliki nilai yang cukup baik (lihat Gambar A.). Dimana nilai IDSD Kota Tasikmalaya pada

tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional. Namun jika dibandingkan nila Provinsi Jawa Barat nilai lebih rendah. Dapat diliat dari nilai IDSD kota-kota di Jawa Barat umumnya lebih tinggi di bandingkan di Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya diperingkat ke-5 dari 9 Kota-Kota di Jawa Barat. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Tasikmalaya yang harus segera diperbaiki untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya. Dengan hasil pembahasan sebelumnya Pemerintah Kota Tasikmalaya harus meningkatkan pilar lingkungan pendukung terutama infrastruktur dan stabilitas ekonomi makro serta kapabilitas inovasi.

Namun jika melihat perkembangan IDSD Kabupaten Kota sekitar Priangan Timur, Kota Tasikmalaya lebih unggul dibandingkan dengan daerah sekitarnya (lihat Gambar B.). Hal tersebut menjadi modal bagi Kota Tasikmalaya terus menjadi pusat perdagangan di Priangan Timur.

Gambar 2.46.

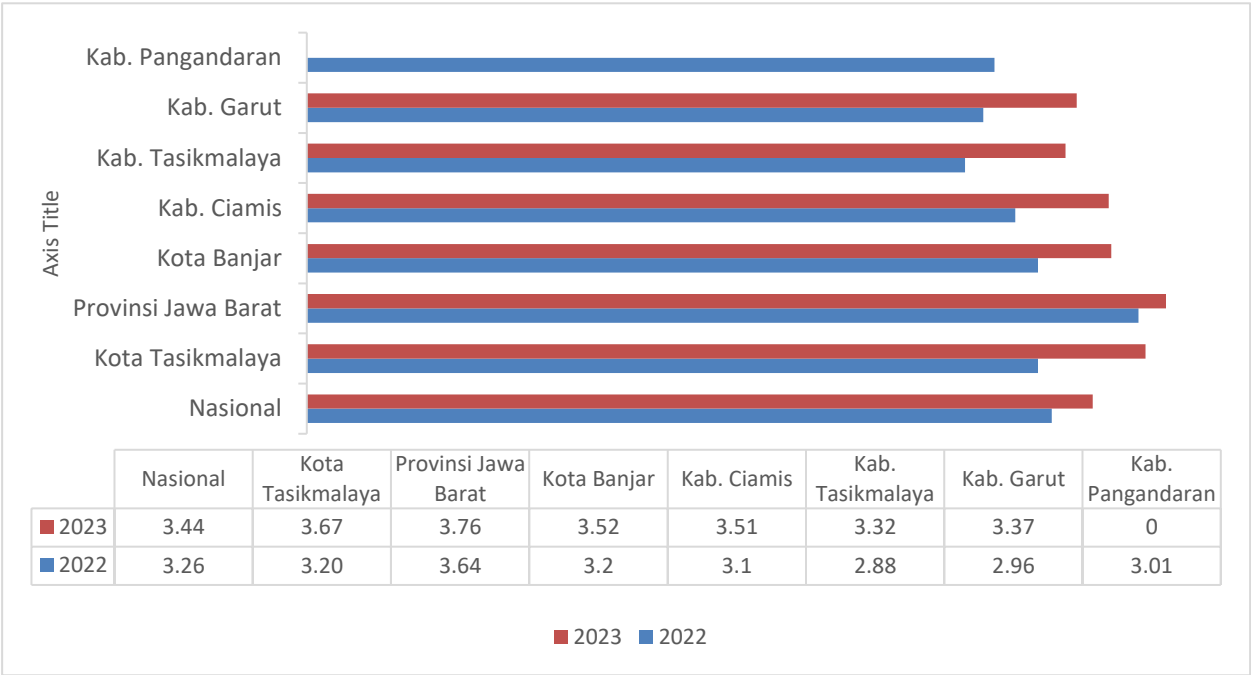
Perbandingan Nilai IDSD Kota Tasikmalaya dengan, Nasional, Jawa Barat dan Kota-Kota di Jawa Barat



Sumber : Bapelitbangda Diolah, 2025.

Gambar 2.47.

Perbandingan Nilai IDSD Kota Tasikmalaya dengan, Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Priangan Timur



Sumber : Bapelitbangda Diolah, 2025.

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

A. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah adalah hasil kerja yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kinerja ini menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, Kinerja urusan pemerintahan daerah dapat diukur dengan menggunakan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah data yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK merupakan salah satu instrumen yang wajib dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah :

1. Melengkapi target IKK sesuai tahun rencana pada RPJMD
2. Membandingkan target dan realisasi
3. Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah

Aspek Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, Aspek daya saing daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Tasikmalaya

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	%	Angka Pertumbuhan PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,5	-7,37	4,5	2,32	5	3,66
1.2.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,45	-6,23	4,68	2,97	6,97	4,35
1.3.	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	3,01	-1,94	4,38	1,91	5,74	5,39
1.4.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,05	2,24	0,07	0,28	0,1	4,54
1.5.	Laju inflasi Kota (%)	%	Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,5	1,61	2,25	1,17	2	6,65
1.6.	s Indeks Gini (point)	point	Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,41	0,366	0,4	0,414	0,39	0,412
1.7.	s Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (point)	point	Angka IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	72,05	74,04	73,25	73,04	73,95	73,83
Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
1.	Pendidikan								
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Point	Angka RLS yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,35	9,33	9,55	9,52	9,7	9,53

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	6,15	8,35	5,72	8,5	5,29	7,67
2.2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100000	162,25	202,55	145,18	303,87	128,09	180,15
2.3.	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	67,5	29,53	76,9	40,78	68,3	98,39
2.4.	Prevalensi Stunting (%)	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	20,1	17,57	19,1	14,81	18,1	12,62
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.	Pendidikan								
1.1.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	Jumlah Siswa TK/RA dibagi jumlah penduduk usia 3-6 tahun dikali 100%	-	51,18	25,52	40,48	25,77	40,82

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun jenjang SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	89,5	90,69	89,66	90,31	89,78	89,86
1.1.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun jenjang SMP/MTs/Paket B dibagi jumlah penduduk usia	89,8	86,59	89,83	86,65	89,85	84,44
1.1.4.	Tingkat Partisipasi anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Jumlah anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / jumlah anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	-	-	6,5	7,02	6,52	10,2
1.1.5.	Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100%	-	-	100	100	100	100
1.1.6.	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD	%	Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD (usia 4-6 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang PAUD(usia 4-6 tahun) x 100%	-	-	100	78,55	100	81,48
1.1.7.	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	%	Jumlah Peserta Didik Jenjang SD (usia 7-12 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang SD (usia 7-12 tahun) x 100%	-	-	100	71,4	100	73,98
1.1.8.	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	%	Jumlah Peserta Didik Jenjang SMP (usia 13-15 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang SMP (usia 13-15 tahun) x 100%	-	-	100	66,48	100	66,82

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1.9.	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	%	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/ Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Usia 7-18 tahun) x 100%	-	-	100	70,97	100	71,15
1.1.10.	Presentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter / keagamaan	%	Presentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter / keagamaan	-	-	100	100	100	100
1.1.14.	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	Jumlah Kurikulum lokal yang ditetapkan / Jumlah muatan lokal X 100	-	-	70	100	100	100
1.1.15.	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik	%	Jumlah Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik / Jumlah Seluruh Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik	-	-	51,35	53,23	51,45	45,93
1.1.16.	Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	Jumlah Prestasi Siswa Pendidikan Dasar / Jumlah Cabang Lomba X 100	-	-	30	34,78	40	40,32
1.1.17.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	102,95	97,28	-	-	-	-
1.1.18.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	112,95	109,13	-	-	-	-
1.1.19.	Angka Peserta Didik yang mengikuti pendidikan karakter	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pendidikan karakter	2.500	0	-	-	-	-
1.1.20.	Jumlah Wira usaha baru sektor Pendidikan	Orang	Jumlah Wira usaha baru sektor Pendidikan	-	-	100	100	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1.21.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	Jumlah Siswa TK/RA dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun dikali 100%	89	51,18	-	-	-	-
1.1.22.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	%	Jumlah penduduk usia 7-12 thn yang masih bersekolah dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 thn dikali 1.000	94,84	99,3	-	-	-	-
1.1.23.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	%	Jumlah penduduk usia 13-15 thn yang masih bersekolah dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 thn dikali 1.000	107,83	88,85	-	-	-	-
1.1.24.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD/MI (per 10.000)	%	Jumlah SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12) Thn dikali 10.000	39,81	37,66	-	-	-	-
1.1.25.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTs (per 10.000)	%	Jumlah SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 Thn dikali 10.00	36,26	35,06	-	-	-	-
1.1.26.	Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)	%	Jumlah guru SD/MI dibagi jumlah siswa SD/MI dikali 10.000	511,49	518,04	-	-	-	-
1.1.27.	Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)	%	Jumlah guru SMP/MTs dibagi jumlah siswa SMP/MTs dikali 10.000	727,6	687,64	-	-	-	-
1.1.28.	Rasio guru/murid per kelas rata- rata SD/MI/Paket A (per 1.000)	%	Jumlah guru SD/MI per kelas dibagi jumlah siswa SD/MI dikali 1.000	0,22	0,2	-	-	-	-
1.1.29.	Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000)	%	Jumlah guru SMP/MTs per kelas dibagi jumlah siswa SMP/MTs dikali 1.000	0,58	0,58	-	-	-	-
1.1.30.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	Jumlah ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	96,08	71,45	-	-	-	-
1.1.31.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	Jumlah ruang kelas pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	96,58	78,81	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1.32.	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI (%)	%	Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI dibagi Jumlah Seluruh APS SD/MI dikali 100%	0,01	0	-	-	-	-
1.1.33.	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs (%)	%	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs dibagi Jumlah Seluruh APS SMP/MTs dikali 100%	0,21	0	-	-	-	-
1.1.34.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	Jumlah Lulusan SD/MI dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pd tahun sebelumnya	98,09	100	-	-	-	-
1.1.35.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	Jumlah Lulusan SMP/MTs dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pd tahun sebelumnya	99,93	100	-	-	-	-
1.1.36.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD//MI ke SMP/MTs	%	Jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya kali 100%	112,66	0	-	-	-	-
1.1.37.	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus	%	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus dibagi target tahunan X 100%	100	100	-	-	-	-
1.1.38.	Persentase Wira usaha Baru sektor pendidikan yang dibina	%	Jumlah Wira usaha Baru sektor pendidikan yang dibina /target X 100%	-	-	-	-	-	-
1.1.39.	Persentase Lulusan Kesetaraan Paket A, B dan C	%	Jumlah Lulusan Kesetaraan Paket A, B dan C/ Jumlah total peserta Kesetaraan Paket A, B dan C x 100%	99	100	-	-	-	-
1.1.40.	Persentase Capaian Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten / Jumlah total Pendidik dan Tenaga Kependidikan x 100%	85	92,9	-	-	-	-
1.1.41.	Persentase pelayanan pendidikan yang dihitung	%	Jumlah pelayanan pendidikan yang diberikan/ jumlah total pelayanan x 100%	90	100	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1.42.	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP	%	Jumlah prestasi /jumlah total prestasi x 100%	30	11,54	-	-	-	-
1.1.43.	Persentase Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS	%	Jumlah Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS / Jumlah total Siswa SDN dan SMPN x 100%	97	100	-	-	-	-
1.1.44.	Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan	%	Jumlah Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan / jumlah total Kegiatan UPTD Pendidikan SKB x 100%	100	100	-	-	-	-
2.	Kesehatan								
2.1	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	%	Jumlah faskes sesuai standar terhadap jumlah seluruh faskes dikali serratus	87,5	0	91,67	100	100	77,27
2.2	Prosentase Faskes dengan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar	%	Jumlah faskes dengan layanan sesuai standar terhadap jumlah seluruh faskes x 100	95,45	0	100	100	100	100
2.3	Prosentase Faskes dengan sistem informasi kesehatan terintegrasi	%	Jumlah faskes yang menggunakan SIK terhadap seluruh faskes x 100	100	0	100	100	100	100
2.4.	Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat	%	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan jaminan Kesehatan nasional terhadap seluruh Masyarakat	90	100	95	80,31	100	95,56
2.5.	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	67,5	29,53	76,9	40,78	68,3	98,39
2.6	Prosentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin praktik	%	Jumlah nakes dengan izin praktik terhadap jumlah seluruh nakes x 100	95	0	100	40,8	100	97,3
2.7	Prosentase Faskes dengan SDMK terstandarisasi	%	Jumlah faskes dengan SDMH terstandar terhada jumlah seluruh faskes x 100	95	0	100	72,72	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.8	Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jumlah nakes yg tersertifikasi terhadap jumlah seluruh nakes x 100	95	0	100	71,34	100	98,3
2.9	Prosentase sarana kefarmasian sesuai standar	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian sesuai standar terhadap jumlah seluruh fasilitas kefarmasian x 100	90	48,57	100	84,33	100	100
2.10	Prosentase IRTP sesuai standar	%	Jumlah IRTP sesuai standar terhadap seluruh IRTP x 100	85	0	100	85	100	80
2.11	Prosentase TPM sesuai standar	%	Jumlah TPM sesuai standar terhadap jumlah seluruh TPM x 100	80	0	100	100	100	0
2.12	Prosentase Masyarakat dan lintas sektor yang bermitra	%	Jumlah LSM dan dunia usaha yang bermitra terhadap jumlah seluruh LSM dan dunia usaha x 100	-	-	10	10	10	10
2.13.	Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	Jumlah Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terhadap total rumah tangga dalam periode yang sama x 100	38	41,37	45,13	40,83	50	43,88
2.14	Prosentase UKBM yang dikembangkan	%	Jumlah UKBM yang dikembangkan terhadap jumlah seluruh UKBM x 100	-	-	10	10	10	10
2.15.	Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Realisasi capaian elemen penilaian PMKP terhadap target akreditasi (Standar KARS)	82	0	83	83	84	74,93
2.16	Capaian standar Layanan Rumah Sakit	%	Realisasi standar pelayanan rumah sakit sesuai kepatuhan SOP terhadap target (pelayanan, penunjang pelayanan dan keperawatan)	-	-	84	0	85	0
2.17	Capaian pelayanan medis sesuai dengan standar	%	Realisasi capaian indikator pelayanan medis (IGD, Rajal&Ranap) sesuai dengan SPM terhadap jumlah pelayanan medis (IGD, Rajal&Ranap)	-	-	84	0	86	0

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.18	Capaian perekaman medis sesuai standar	%	Realisasi Perekaman medis pasien sesuai standar (SPM)	-	-	77	0	80	0
2.19	Capaian rujukan yang ditangani	%	Realisasi rujukan yang ditangani (IGD+rawat jalan+penunjang) terhadap seluruh kasus rujukan yang masuk (yang ditangani dan dirujuk keluar)	-	-	100	0	100	0
2.20	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan	%	Realisasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan (survey persepsi pasien terhadap asuhan keperawatan)	-	-	80	0	82	0
2.21	Capaian profesionalitas keperawatan	%	Jumlah perawat yang mengikuti diklat profesi dibagi jumlah	-	-	72	0	74	0
2.22	Persentase Capaian implementasi Sistem Informasi Rumah sakit	%	Realisasi implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit terhadap target (22 modul)	-	-	87	0	100	0
2.23	Capaian profesionalisme ketenagaan SDM Kesehatan	%	Realisasi SDM (attitude, skill, knowledge) sesuai SKP	-	-	87	0	90	0
2.24	Cost Recovery Ratio	%	Cost Recovery adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penerimaan yang diperoleh dari pendapatan	100	71	100	100	100	98
2.25	Jumlah pasien terlayani	Orang	Jumlah pasien yang dilayani	-	-	144.189	0	144.289	
2.26	Jumlah Dokumen DED	Dok	Jumlah Dokumen DED	-	-	1	0	1	0
2.27	Jumlah Terpenuhinya Sarana & Prasarana Rumah Sakit	Paket	Jumlah Pemenuhan Sarana & Prasarana Rumah Sakit	-	-	12	0	12	0
2.28	Capaian Kesesuaian Realisasi Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran	%	Realisasi kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran	-	-	100	0	100	0
2.29	Capaian Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAP	%	Realisasi laporan keuangan tepat waktu	-	-	100	0	100	0

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.30.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	6,15	8,35	5,72	8,5	5,29	7,67
2.31	Angka Kematian Neonatal	Per 1.000 KH	Jumlah kematian bayi (0-28 hari)pada satu tahun tertentu/jumlah seluruh kelahiran x 1.000 KH	4,7	0	4,44	7,2	4,18	4,87
2.32.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x	162,25	202,55	145,18	303,87	125,09	180,15
2.33.	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak usia 2 Tahun dalam kurun waktu yang sama x 100	20,1	17,57	19,1	14,81	18,1	12,62
2.34	Prevalensi Wasting	%		8	0	7,7	5,87	7,4	5,55
2.35	Persentase ODF	%		37,68	0	71,01	10,12	100	17,31
2.36.	Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	Jumlah Capaian indikator Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular terhadap total indikator Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dalam periode dan waktu yang sama x 100	100	43,13	100	54,15	100	68,17
2.37.	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	Jumlah Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah seluruh puskesmas dalam kurun waktu yang sama x 100	100	95,45	100	95,5	100	95,45

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.38.	Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	Jumlah obat yang disediakan dan jumlah pelayanan kefarmasian dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah penyediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar yang ditetapkan pemerintah x 100	80	48,57	90	66,6	100	91,11
2.39.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja	%	Capaian pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja dalam waktu tertentu terhadap jumlah kasus gangguan kesehatan ibu, anak dan remaja yang ditemukan dalam kurun waktu yang sama x 100	100	81,62	100	0	100	0
2.40.	Persentase balita gizi buruk	%	Jumlah balita gizi buruk terhadap jumlah seluruh balita dalam kurun waktu yang sama x 100	0	1,02	0,5	0,82	0	0,52
2.41.	Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga yang memenuhi standar	%	Jumlah lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, jumlah pos Upaya kesehatan kerja informal dan jumlah pengukuran kebugaran penduduk usia > 15 tahun x 100	53	15	54,25	38,21	59,36	38,21
2.42.	Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75	%	Jumlah Puskesmas sesuai standar permenkes 75 terhadap jumlah seluruh peuskemas dalam kurun waktu yang sama x 100	90	36,37	95	77	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.43.	Persentase pemenuhan sarana dan prasaran kesehatan sesuai standar	%	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas sesuai permenkes 75 terhadap Total sarana dan prasarana puskesmas x 100	80	40,63	80	71	80	77,27
2.44.	Persentase pelayanan kesehatan keluarga	%	Persentase Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan kesehatan terhadap jumlah total keluarga dalam periode dan waktu yang sama x 100	75	100	85	75,17	100	85,24
2.45.	Persentase Penyakit menular ditangani sesuai tatalaksana standar	%	Jumlah kasus penyakit menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar terhadap kasus penyakit menular yang ditemukan x 100	100	100	100	100	100	88,55
2.46.	Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar	%	Jumlah kasus penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar terhadap kasus penyakit tidak menular yang ditemukan x 100	100	100	100	61,5	100	0
2.47.	Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi	%	Jumlah fasilitas kesehatan tahap pertama yang terakreditasi terhadap jumlah total fasilitas kesehatan tahap pertama dalam waktu yang sama x 100%	100	95,45	100	50,5	100	27,27
2.48.	Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	%	Jumlah capaian penyelenggaraan operasional puskesmas terhadap jumlah total puskesmas dalam waktu yang sama x 100%	100	100	100	95	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.49.	Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi	%	Jumlah capaian penyelenggaraan operasional labkesda dan gudang farmasi terhadap jumlah lab dan gudang farmasi x 100%	100	100	100	100	100	100
2.50.	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar	%	Jumlah Laporan Perencanaan kerja sesuai standar dibanding jumlah total laporan perencanaan kerja x 100%	100	100	100	100	100	100
2.51.	Persentase implementasi sistem informasi kesehatan	%	Jumlah puskesmas yang menerapknn SIK terhadap jumlah total puskesmas dalam waktu yang sama x 100%	100	100	100	100	100	100
2.52.	Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit	%	Jumlah standar pelayanan minimal rumah sakit yang diberikan / Jumlah standar pelayanan minimal x 100%	84	82,5	86	100	88	100
2.53.	Akreditasi Rumah Sakit	kategori	Jumah Rumah Sakit yang terakreditasi	5	5	5	9	5	9
2.54.	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit x 100%	80	0	85	82,19	90	70,83
2.55.	Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	Rata-rata Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat	-	-	100	48,9	100	86,19
2.56.	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	daya tampung rumah sakit rujukan/jumlah penduduk x 100	-	-	0,13	1,00	0,11	0,21

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.57.	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi	%	jumlah rumah sakit yang terakreditasi / jumlah seluruh rumah sakit x 100	-	-	75	75	75	64,3
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Persentase infrastruktur fisik daerah dalam kondisi baik	%	Realisasi infrastruktur fisik dalam kondisi baik (jalan+sda)/ total infrastruktur fisik (2) x 50%	44	41,03	38,75	40,78	40,5	42,32
3.2.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	Realisasi panjang jalan dalam kondisi baik/ panjang jalan menurut SK jalan 2017 x 100%	97	84,2	80	88,11	82	89,28
3.3.	Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang yang ditangani	%	Realisasi Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang yang ditangani x 100%	84	85	87	88	90	97,02
3.4.	Persentase luas sawah terairi	%	(Luas sawah kewenangan kota yang terairi /Luas Sawah Total Kewenangan Kota (1.749 Ha) *100) pada Masa Tanam II (MT. II)	-	-	75	75	80	80
3.5.	Persentase Penataan Bangunan yang ditangani	%	Persentase penataan bangunan+penataan kawasan yang ditangani/2	-	-	23,25	24,25	63,16	65,78
3.6.	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik/ Panjang Total Jaringan Irigasi x 100 % (panjang total 202 km)	66,6	79,94	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.7.	Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target	%	Jumlah Pajang Jalan yang dibangun/Target Panjang Jalan selama 5 Tahun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit)	33,55	38,25	-	-	-	-
3.8.	Capaian jumlah jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	km	Panjang jalan yang ditingkatkan/target yang ditingkatkan terhadap target (target = 200 Km)	30	8,04	-	-	-	-
3.9.	Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	km	Realisasi panjang jalan yang dipelihara secara rutin terhadap target (target = 60 km)/ thn	20	15,3	-	-	-	-
3.10.	Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	km	Realisasi Panjang bangunan pelengkap yang di rehabilitas/ dipelihara (drainase, gorong-gorong, trotoar) terhadap target (target = 30 Km) u/ 5 thn	94,34	123,43	-	-	-	-
3.11.	Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik	km	Realisasi jaringan irigasi dalam kondisi baik	134,53	161,47	-	-	-	-
3.12.	Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya	%	Realisasi Panjang Sungai yang ditangani terhadap target (2 Km)	20	5,59	-	-	-	-
3.13.	Capaian ijin pemanfaatan ruang	%	Realisasi keterangan pemanfaatan ruang yang ditangani terhadap yang diajukan	90	91	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.14.	Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	Realisasi pengawasan pemanfaatan ruang yang ditangani terhadap yang diajukan atau diadukan	96	97	97	97,15	98	98
3.15.	Capaian dokumen rencana detail tata ruang yang disusun	dokumen	Realisasi dokumen rencana detail tata ruang yang disusun	1 Dok	0	-	-	-	-
3.16.	Capaian realisasi bangunan sesuai ijin	%	Realisasi rekomendasi teknis bangunan yang ditangani terhadap yang diajukan	99,4	99,4	-	-	-	-
3.17.	Capaian pengawasan rekomendasi teknis bangunan	%	Realisasi pengawasan rekomendasi teknis bangunan yang ditangani terhadap yang diajukan atau diadukan	96	96	-	-	-	-
3.18.	Capaian pengurangan titik genangan	Lokasi	Jumlah lokasi genangan yang ditangani	2	2	-	-	-	-
3.19	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	%	Persentase sungai yang ditangani+persentase irigasi yang ditangani/2	-	-	34,95	45,67	35,53	37,5
3.20.	Persentase bangunan gedung yang ditangani	%	Jumlah bangunan gedung yang ditangani / jumlah total bangunan gedung yang menjadi kewajiban pemda (114 unit)* 100	-	-	13,16	15,79	26,32	32,45

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.21.	Prosentase Kawasan Prioritas Kota yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	%	Luas kawasan prioritas kota yang ditangani/Luas kawasan maksimal kawasan prioritas yang dilaksanakan (2 kawasan prioritas kota/45 Ha)*100	-	-	33,33	33,3	100	0
3.22.	Persentase panjang jalan yang dibangun	%	Panjang jalan yang dibangun/target (2 km)*100	-	-	50	165,45	100	219,45
3.23.	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	%	Panjang jalan yang ditingkatkan/target (20 km)*100	-	-	50	70,13	100	136,77
3.24.	Persentase panjang jalan yang direhabilitasi	%	Panjang jalan yang direhabilitasi/target (20 km)*100	-	-	50	222,88	100	125,29
3.25.	Persentase jembatan yang ditangani	%	Jumlah jembatan yang ditangani/jumlah seluruh jembatan (73 jembatan)*100	-	-	8,22	8,22	16,44	12,33
3.26.	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	%	Panjang pengelolaan dan pengembangan drainase yang ditangani/panjang jalan (450,74 km)*100	-	-	13,31	17,01	15,53	21,7
3.27.	Prosentase tersedianya dokumen rencana tata ruang wilayah daerah	%	Realisasi dokumen rencana tata ruang yang disusun/target (2dok)*100	-	-	50	50	100	100
3.28.	Persentase penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan/seluruh penyedia jasa (236 penyedia jasa)*100	-	-	42,37	42,37	100	42,37

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.29.	Persentase ijin pengawasan pemanfaatan ruang	%	Realisasi pengawasan pemanfaatan ruang yang ditangani thd yg diajukan atau diadakan	96	97	97	97,15	98	98
3.30.	Persentase KK berakses layanan air minum	%	Jumlah KK berakses Air Minum dibagi Jumlah Total KK x 100% (Jumlah total KK 180.442)	55,57	55,58	55,82	56,23	56,07	56,81
3.31.	Persentase KK yang berakses SPALD	%	Jumlah KK yang berakses SPALD dibagi Jumlah Total KK x 100% (Jumlah total KK 180.442)	60,49	60,54	61,04	61,2	61,59	61,71
3.32	persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik	%	Panjang Drainase permukiman Yang Ditangani / Target Drainase yang akan ditangani selama 5 tahun x 100% (target penanganan drainase 93.400 Km)	47,15	50,2	71,44	71,98	95,72	82,6
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1.	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	Jumlah rumah korban bencana yang ditangani dibagi jumlah rumah terdampak bencana yang ditargetkan (35 unit/tahun) x 100%	100	100	100	100	100	100
4.2.	Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	Jumlah rumah rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kotayang ditargetkan (35 unit/tahun) x 100 %	100	100	100	100	100	20

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.3.	Persentase PSU yang diverifikasi	%	Jumlah PSU perumahan yang diverifikasi dibagi Jumlah perumahan Kota Tasikmalaya (269 Perumahan) x 100%	0	0	30,11	28,62	37,55	42,01
4.4.	Persentase PSU yang diserahkan	%	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan dibagi Jumlah perumahan Kota Tasikmalaya (269 Perumahan) x 100%	0	0	17,84	18,58	21,56	23,79
4.5.	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	Realisasi kawasan kumuh yang ditangani dibagi jumlah kawasan kumuh sesuai SK (Tahun 2014 = 276,17 ha) x 100 %	98,88	98,88	99,23	99,23	100	100
4.6.	Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	Realisasi Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi dibagi total RTLH (12.504)	43,59	47,61	47,59	54,15	51,59	60,38
4.7.	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	unit	Jumlah RTLH yang ditangani (Jumlah RTLH 12.502 BDT)	1000	1043	1000	1320	1000	780
4.8.	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	%	Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan / Total Panjang Jalan Lingkungan (1.941,759 Km) x 100%	21,6	25,18	27,01	28,26	32,42	40,95
4.9.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	%	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi (air limbah rumah tangga)/Jumlah rumah tangga X 100%	64	0	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.10.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	Luas kawasan kumuh yg ditangani terhadap luas permukiman kumuh (SK Walikota)	-	-	-	-	-	-
4.11.	Capaian penanganan rumah tidak layak huni	%	Realisasi rumah tidak layak huni terhadap total RTLH (12.502 BDT)	43,25	47,61	51,25	0	59,25	60,38
4.12.	Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau	%	Realisasi Penanganan Ruang Terbuka Hijau (Pemakaman dan Pertamanan)	-	-	-	-	-	-
4.13.	Persentase penanganan kawasan kumuh	%	Realisasi penanganan kawasan kumuh terhadap target (jalan, SPAL, Drainase, Air bersih)	-	-	-	-	-	-
4.14.	Capaian realisasi penataan pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target)	kecamatan	Jumlah Kecamatan yang didata aset tanah milik Pemkot/ Jumlah Kecamatan di Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-
4.15.	Jumlah Lokasi yang didekorasi yang ditangani	Lokasi	Jumlah Lokasi yang ditata	-	-	-	-	-	-
5.	Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Persentase penanganan pelanggaran K3	%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol PP	94	100	96	100	100	100
5.2.	Persentase penanganan perlindungan masyarakat	%	Capaian perlindungan masyarakat yang ditangani	90	100	95	100	100	100
5.3.	Persentase penegakan perda	%	Jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah pelanggaran perda	86	98,54	86	98,54	90	84,78

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran (<1jam setelah pengaduan)/jumlah kejadian	85	84,61	85,5	84,61	86	85,71
5.5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	%	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan / Jumlah Pelanggaran K3 x 100%	100	100	100	100	100	100
5.6	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	%	Jumlah Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana x 100	-	-	73	73	78	40
5.7	Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	Jumlah penanganan tanggap darurat bencana dibagi jumlah Kejadian Bencana	-	-	100	100	100	100
5.8	Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	%	Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dibagi Total Kejadian	-	-	73	0	78	100
5.9.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000)	point	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,15	0,88	1,16	0,88	1,17	1,17
5.10.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000)	point	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	56,3	52,23	56,3	52,23	56,5	51,49
5.11.	Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	%	Jumlah poskamling/ jumlah kelurahan x 100%	29	22,95	30	22,95	31	1259,4
5.12.	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	%	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam	75	100	80	100	85	0
5.13.	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%)	%	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat/ Jumlah penduduk x 100%	0,00563	0,5223	0,00563	0,5223	0,00565	0,514

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.14.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	%	Capaian wilayah pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	90	95,87	95	95,87	100	96,1
5.15.	Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah	%	Realisasi pemahaman terhadap pembinaan aparatur (kecamatan dan kelurahan) dalam penegakan peraturan daerah	80	100	90	100	100	100
5.16.	Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani	%	Realisasi rekomendasi penindakan perangkat daerah yang ditangani	90	100	95	0	100	0
5.17.	Angka Kriminalitas	Point	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun/ Jumlah penduduk x 10.000	3,5	5,88	3	5,88	2,5	2,9
5.18.	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	%	Capaian bencana kebakaran kota yang dilayani	100	100	100	100	100	100
5.19.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	Realisasi patroli Satpol PP terhadap cakupan wilayah	1,5	8,76	1,8	1,8	2,1	8,76
5.20.	Persentase ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri)	%	Realisasi ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri)	100	100	100	100	100	100
5.21.	Capaian pelatihan anggota linmas	%	Realisasi pelatihan anggota linmas terhadap total anggota linmas	38	71,2	48	71,2	58	49,9
5.22.	Capaian pos siskamling aktif per RW	%	Realisasi pos siskamling per RW aktif terhadap total RW	70	94,85	85	94,85	100	94,85
5.23.	Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan	%	Realisasi penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan yang terjadi	90	100	95	100	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.24.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi	%	Jumlah aparatur damkar yang telah mengikuti diklat dibagi jumlah aparatur damkar keseluruhan	30	78,26	30	78,26	30	30,3
5.25.	Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan	%	Jumlah kegiatan pencegahan dibagi jumlah daerah rawan kebakaran yang teridentifikasi dan terdata	40	100	50	100	60	60
5.26.	Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang ditangani	%	Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dibagi jumlah kejadian kasus kebakaran	100	100	100	100	100	100
5.27.	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi layanan bencana	%	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi layanan bencana/ jumlah total masyarakat 100%	-	-	100	100	100	90
5.28.	persentase masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/ jumlah total masyarakat 100%	-	-	100	100	100	94,5
5.29.	Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	Jumlah penanganan tanggap darurat bencana dibagi jumlah Kejadian Bencana	-	-	100	100	100	100
5.30.	Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	%	Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dibagi Total Kejadian	-	-	100	100	100	100
6.	Sosial								

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.1	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	%	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk yang difasilitasi kepulangannya ke	-	-	100	0	100	0
6.2.	Persentase PSKS Aktif	Lembaga	PSKS Yang aktif/ jumlah PSKS x 100%	-	-	160	0	160	0
6.3.	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / target x 100%	74	79,9	77	79,9	80	83
6.4	Jumlah RTS miskin yang dibina	Orang	Jumlah RTS miskin yang dibina	-	-	200	200	200	0
6.5	Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Jumlah Pengaduan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditangani/ jumlah pengaduan x 100%	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	korban bencana yang menerima bantuan sosial/ jumlah korban bencana alam x 100%	-	-	100	100	100	100
6.7	Waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Tahun	Waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	-	-	1	0	1	0
6.8	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia (PMKS) Lainnya	%	Jumlah Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya/ Jumlah total PMKS x 100%	15	15	16	16	16	34
6.9	Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan	%	Jumlah PSKS yang dibina / target x 100%	100	100	100	100	100	68

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.10	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	%	Jumlah Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan/ target x 100%	100	100	100	100	100	0
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
7.	Tenaga Kerja								
7.1.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ketenagakerjaan	%	capaian ketersediaan dokumen perencanaan ketenagakerjaan	-	-	-	-	100	0
7.2	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Lulusan SMK/SMA ke atas Ditambah hasil pelaksanaan UJK Disnaker/Lembaga resmi Dibanding Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	60	23,68	100	100	100	83,19
7.3.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja yang dilatih/jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi x 100	-	-	100	100	100	83,19
7.4.	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	Jumlah wira usaha baru sektor ketenagakerjaan yang dibina	-	-	150	163	163	150
7.5.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	(Jumlah kasus yg diselesaikan melalui PB/Jumlah kasus yg dicatatkan) x 100%	-	-	100	100	100	0
7.6.	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	(Jumlah pencari kerja yg ditempatkan/Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	-	-	43,32	24,96	44,32	27

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7.7.	Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan	%	(Jumlah perusahaan yg memiliki lembaga ketenagakerjaan/Jumlah total perusahaan) x 100%	15	15,5	20	15,58	25	16,17
7.8.	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	(Jumlah kasus yg diselesaikan melalui PB/Jumlah kasus yg dicatatkan) x 100%	-	-	100	100	100	100
7.9	Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan	%	Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan yang ada	17	18,83	-	-	-	-
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
8.1.	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di bagi jumlah pengaduan x 100	100	100	100	100	100	100
8.2.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	%	Realisasi Jumlah skor dari indikator tingkatan kota layak anak	700	(tidak dilaksanakan)	800	756	-	382,1
8.3.	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	%	Jumlah OPD yang menyetorkan GAP GBS/jumlah total OPD x 100	-	-	57,89	0	63,15	0
8.4.	Persentase penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	%	Jumlah kasus perempuan yang ditangani / jumlah total kasus kekerasan perempuan x 100	-	-	100	0	100	0
8.5.	Persentase peningkatan kualitas keluarga binaan	%	Jumlah keluarga binaan yang meningkat kualitasnya/jumlah keluarga binaan x 100%	-	-	100	0	100	0

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8.6.	Persentase anak yang difasilitasi pemenuhan haknya	%	Jumlah anak yang dipenuhi haknya/jumlah anak x 100%	-	-	100	0	100	0
8.7.	Persentase kasus anak yang ditangani	%	Jumlah kasus anak yang ditangani / total kasus anak x 100	-	-	100	0	100	0
9.	Ketahanan Pangan								
9.1.	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	unit	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	-	-	3	0	6	0
9.2.	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	Persentase Angka Kecukupan Energi	-	-	88	110,6	90	111,7
9.3.	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	Persentase Angka Kecukupan Gizi	-	-	71	124,9	72	122,9
9.4.	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	(realisasi intervensi daerah rawan pangan dibagi dengan total daerah rawan pangan) dikali100%	49	0	50	66,67	51	33,33
9.5.	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	(Realisasi jumlah pangan = Jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi / Jumlah sample pangan yang diperdagangkan) dikali 100%	81	100	79	100	80	100
9.6.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	(AKE+AKP+)/2 x 100	85	121,6	-	-	-	-
9.7.	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	capaian ketersediaan Cadangan Pangan	98	100,6	-	-	-	-
9.8.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	Persentase ketersediaan informasi Pasokan + Persentase ketersediaan informasi + Persentase ketersediaan informasi akses/3	88	66,67	-	-	-	-

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
9.9.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	Persentase dari standar deviasi realiasi untuk harga dan pasokan dibagi rata-rata harga dan pasokan komoditas	-	-	-	-	-	-
9.10.	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	%	Persentase dari jumlah KWT dan KKP yang telah diintervensi dibagi jumlah KWT dan KKP	-	-	-	-	-	-
10.	Pertanahan								
10.1.	Persentase pengelolaan penatagunaan tanah	%	Jumlah Kecamatan yang didata pertanahan dibagi Jumlah Kecamatan di Kota Tasikmalaya x 100%	-	-	60	50	100	100
10.2.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	%	Jumlah Luas Lahan bersertifikat / Jumlah luas wilayah x 100%	33	62,68	-	-	-	-
10.3.	Capaian realisasi penataan pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target)	%	Jumlah Kecamatan yang didata aset tanah milik Pemkot/Jumlah Kecamatan di Kota Tasikmalaya	-	-	30	-	40	0
10.4.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	%	Jumlah kasus yang diselesaikan / Jumlah kasus yang terdaftar x 100%	100	100	-	-	-	-
10.5.	Penyelesaian izin lokasi (%)	%	Jumlah Ijin Lokasi/ Permohonan Ijin Lokasi x 100%	100	100	-	-	-	-
11.	Lingkungan Hidup								
11.1.	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	Ha	Penambahan luas RTH dalam setahun (Ha) terhadap yang ditargetkan	10,84	10,2952	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11.2.	Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani	%	Jumlah sampah yang terangkut + dikurangi dibagi total timbunan sampah	74,6	71,45	-	-	-	-
11.3	Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara	Poin	Rumus Baku (IKA/IKU)	(IKA = 45 - 65, Sedikit Memenuhi),	(IKA = 72,37, memenuhi baku mutu), (IKU = 78,20,	-	-	-	-
11.4.	Cakupan Pengendalian Lingkungan Hidup	%	Capaian Pengendalian Lingkungan Hidup (Kajian dan Pemantauan) terhadap yang Ditargetkan	100	100	-	-	-	-
11.5.	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Volume Sampah yang Dikelola terhadap Total Volume Sampah	76,46	71,45	-	-	-	-
11.6.	Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	%	Realisasi Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat terhadap yang Ditargetkan (5 tahun = 18 dok)	66,67	33,33	-	-	-	-
11.7.	Persentase Luas Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	Realisasi Luas Perlindungan dan Konservasi SDA yang Ditangani terhadap yang Ditargetkan (5 Tahun = 5.9Ha)	61,02	46,24	-	-	-	-
11.8.	Capaian Pemantauan Kualitas Lingkungan	%	Realisasi Pemantauan Kualitas Lingkungan terhadap Target	100	100	-	-	-	-
11.9.	Capaian UKM Berpotensi Pencemaran yang Ditangani	%	Realisasi Jumlah UKM yang Difasilitasi Penanganan Limbahnya terhadap Target (23 UKM dlm 5 tahun)	60,87	21,74	-	-	-	-
11.10.	Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA	%	Jumlah Volume Sampah yang Terangkut ke TPA terhadap Total Volume Sampah	60,93	60,93	-	-		

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11.11.	Capaian Pengurangan Sampah	%	Jumlah Pengurangan Sampah terhadap Total Volume Sampah	15,53	10,52	-	-		
11.12	Indek Kualitas Air	Indeks	$IKA = \sum_{i=1}^n W_i \times I_i$ W= Bobot Parameter i I = Nilai dari Parameter i	-	-	53,54 (Sedang)	65,75	53,6 (Sedang)	35,33 (Kurang)
11.13	Indek Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - (50 / 0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$	-	-	79 (Baik)	83,45	79,6 (Baik)	82,26 (Baik)
11.14.	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah	-	-	77,86	73,86	83,45	81,77
11.15.	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	%	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun terhadap Target	-	-	100	0	100	100
11.16.	Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Taman Hayati	-	-	50	50	100	100
11.17.	Capaian Luas RTH yang dikelola	Ha	Persentase Luas RTH (Bukit) yang dikelola terhadap yang ditargetkan pertahun	-	-	100	100	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11.18.	Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah	%	Persentase Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang Dibina dan Diawasi terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH dari Ijin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terhadap Total Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang dibina dan diawasi terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH dari Ijin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditargetkan (300 diakhir RPJMD)	-	-	100	68,33	100	100
11.19.	Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	Persentase jumlah Masyarakat yang dilatih atau mendapatkan penyuluhan terhadapat target	-	-	100	0	100	100
11.20.	Persentase sekolah yang memperoleh Penghargaan	%	Persentase jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan terhadap target	-	-	50	0	50	0
11.21.	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditangani	-	-	100	150	100	100
11.22.	Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah	%	Ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah terhadap sarana prasarana yang diperlukan x 100%	-	-	33,71	0	35,1	24,99
11.23.	Persentase Lokasi taman yang ditangani	%	Jumlah Lokasi taman yang ditangani dibagi jumlah taman yang dikelola Dinas Perawaskim (29 taman) x 100%	-	-	100	100	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
11.24.	Persentase Lokasi pemakaman yang ditangani	%	Jumlah Lokasi pemakaman yang ditangani dibagi jumlah pemakaman milik pemerintah (3 TPU) x 100%	-	-	100	100	100	100
12..	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
12.1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	%	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP Jumlah : /penduduk usia > 17 atau telah menikah	97	98,77	97,5	101,1	98	99,56
12.2.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	Jumlah bayi berakte /kelahiran Jumlah bayi x 100%	70	96,89	75	101,6	80	97,35
12.3.	Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim	lembar	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	200	400	210	471	210	544
12.4.	Kepemilikan KTP (orang)	Orang	Jumlah orang yang memiliki KTP	491.508	654.423	501.338	538.841	506.351	530
12.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000)	point	Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	398,2	398,59	410,7	410,3	373,2	448,6
12.6.	Ketersediaan database kependudukan skala kota		Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	tidak ada
12.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
12.8.	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	88,13
12.9.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	Realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan/jumlah penduduk x 100%	76	97,94	77	87,04	78	84
12.10.	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	Realisasi Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	67	98,45	68	100,8	69	99,11

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
12.11.	Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	Realisasi Jumlah Data Bersih SIAK Terhadap DKB	85	99,6	90	100,8	95	100
12.12.	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	Realisasi Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Terhadap Target	60	100	80	100	100	100
12.13.	Persentase Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak	%	Realisasi Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak	60	100	80	44,17	100	39,98
12.14.	Persentase Penerbitan Akta Akta Kelahiran	%	Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran	60	100	80	101,66	100	97,35
12.15.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	Realisasi Penerbitan Akta Kematian	60	0	80	100	100	100
12.16.	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	%	Realisasi Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	60	0	80	100	100	100
12.17.	Persentase penerbitan dokumen adopsi dan pengakuan anak	%	Realisasi Penerbitan Dokumen Adopsi dan Pengakuan Anak	60	0	80	100	100	100
12.18.	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Realisasi Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan	60	100	80	100	100	0
12.19.	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Realisasi Pengelolaan Profil Kependudukan	60	0	80	0	100	0
12.20.	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan	%	Realisasi Ketersediaan Sarana dan Prasana Penunjang Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Digunakan	60	100	80	100	100	0
12.21.	Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan	%	Realisasi Lembaga Yang Bekerjasama Dalam Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun)	50	75	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
12.22.	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	Jumlah Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 8 Inovasi Selama 5 Tahun)	50	100	-	-	-	-
12.23.	Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan	%	Realisasi Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun)	50	100	-	-	-	-
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
13.1.	Persentase Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	%	Jumlah Lembaga Pemberdayaan yang dibina/ Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat x 100	-	-	100	0	100	0
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
14.1.	Cakupan Layanan Keluarga Berencana	%	Jumlah layanan KB/ total PUS x 100%	66	72,36	-	63,6	-	-
14.2.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	%	Jumlah PUS KB aktif / total PUS x 100%	72,5	72,36	72,6	72,37	72,7	72,98
14.3.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	Jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun jumlah total PUS x 100%	1	1,22	-	-	-	-
14.4.	Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga	%	Jumlah peran serta masyarakat/ target x 100%	100	0	100	0	100	0
14.5	Cakupan data mikro keluarga	%	Jumlah data mikro keluarga / total data keluarga x 100%	100	100	100	96	100	83,63
15.	Perhubungan								

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
15.1.	Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum	%	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan sesuai standar keselamatan + Persentase pelayanan andalin + Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan + Persentase Pelayanan angkutan umum /4	-	-	82,34	88,03	96,48	117,61
15.2.	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan / jumlah ruas jalan kota yang ditargetkan x 100% (SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017)	-	-	50	53,57	100	55,36
15.3.	Persentase pelayanan andalin	%	Jumlah usulan Rekomendasi Andalalin /rekomendasi Andalalin yang ditetapkan x 100%	-	-	100	160	100	140
15.4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan	%	Jumlah kendaraan lulus uji terhadap kendaraan wajib uji x 100%	-	-	95,25	76,7	100	164,5
15.5.	Persentase Pelayanan angkutan umum	%	Prosentase ijin trayek aktif/ijin trayek yang dikeluarkan x 100%	-	-	84,12	61,84	85,91	110,58
15.6	Tingkat terlayani angkutan umum	%	Jumlah rata-rata cakupan indikator program pelayanan angkutan	88,45	85,72	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
15.7.	Tingkat terpenuhinya prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota	%	Realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan sesuai SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017 dengan tingkat layanan angkutan umum	47,25	65,72	-	-	-	-
15.8.	Tingkat ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dengan tingkat terlayani angkutan umum	74,23	88,86	-	-	-	-
15.9.	Capaian Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan sesuai yang ditargetkan	%	Realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan terhadap jumlah ruas jalan sesuai target (25 ruas jalan)	60	92	-	-	-	-
15.10.	Tingkat penurunan waktu antrian kendaraan pada ruas jalan pusat kota	point	VC Rasio ruas jalan pusat kota yang ditargetkan	0,212	0,123	-	-	-	-
15.11.	Tingkat terpenuhinya kualitas perlengkapan jalan yang bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota	%	Realisasi terpenuhinya kualitas perlengkapan jalan terhadap kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota	42,86	0	-	-	-	-
15.12.	Capaian kualitas layanan lalu lintas pada ruas jalan pusat kota	%	Realisasi terpenuhinya kualitas perlengkapan jalan sesuai target (lokus ruas jalan gema manasik)	83,33	91,67	-	-	-	-
16.	Komunikasi dan Informatika								
16.1.	Jumlah jaringan komunikasi (unit)			315	400	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
16.2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	Jumlah KIM /Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota x 100%	100	100	100	0	100	0
16.3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	Luas Wilayah Yang Tercoverage/ Luas Wilayah Keseluruhan x 100%	100	100	-	-	-	-
16.4.	Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak)			ada	ada	-	-	-	-
16.5.	Capaian Implementasi E- Government	%	Capaian implementasi E- Government berdasarkan Permenpan RB No 5 Tahun 2018	50	tidak ada penilaian	-	-	-	-
16.6.	Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi public	%	Realisasi Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik (pembangunan dan SPM) terhadap Target 2/3 Kota Tasik, 2/3 Jawa barat, 2/3 Nasional pulau jawa	30	37,5	40	41,68	50	54
16.7.	Persentase pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan	%	Realisasi pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan yang ditangani terhadap yang diajukan	70	100	80	0	90	0
16.8.	Capaian pembangunan infrastruktur TIK terhadap target	%	Realisasi pembangunan infrastruktur TIK terhadap target	70	94,5	-	-	-	-
16.9.	Capaian implementasi smart city	%	Realisasi Smart City Terhadap 3 (Tiga) Komponen Utama Smart City: Kelembagaan, SDM, dan Teknologi	24	62,66	-	-	-	-
16.10.	Rasio ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan	%	Realisasi ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan	50	50	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
16.11.	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	Realisasi penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terhadap target 2/3 Kota Tasik, 2/3 Jawa barat, 2/3 Nasional Pulau Jawa	100	100	-	-	-	-
16.12.	Persentase Pengelolaan Saluran Informasi	%	Jumlah Saluran Informasi yang dikelola/jumlah saluran informasi x 100%	-	-	100	100	100	100
16.13.	Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola	%	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola/jumlah total domain dan sub domain x 100%	-	-	100	100	1	1
16.15.	Capaian Predikat Indeks SPBE	poin	Hasil Evaluasi dari Permenpan RB pada Domain dan Aspek	-	-	2,7	2,68	3	0
16.16.	Jumlah titik Jaringan Intranet Pemerintah Daerah	node	Jumlah titik Jaringan Intranet Pemerintah Daerah	-	-	400	400	400	348
16.17.	Persentase Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	jumlah pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan e-gov/jumlah target x 100%	-	-	100	100	100	100
16.18.	Capaian pengelolaan pusat Data	Tier	Jumlah data yang dikelola	-	-	1	1	1	1
16.19.	Jumlah Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	sistem	Jumlah Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	-	2	2	2	2
16.20.	Jumlah data dan Informasi Elektronik	dok	Jumlah data dan Informasi Elektronik	-	-	1	1	1	0
16.21.	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	-	-	2	2	2	2

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
16.22.	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	sistem	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-	-	7	7	7	7
16.23.	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola	paket	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola	-	-	3	3	3	3
16.24.	Capaian Government Chief Information Officer (Gcio)	level	Capaian Government Chief Information Officer (Gcio)	-	-	1	1	1	0
17.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
17.1.	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/jumlah koperasi pemohon rekomendasi x 100%	-	-	100%	100%	100%	0%
17.2	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa	%	Jumlah koperasi aktif yang diawasi dan atau diperiksa/jumlah total koperasi aktif x 100%	-	-	13,51%	36,42%	13,51%	35,79%
17.3	Persentase koperasi sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat/Jumlah total KSP/USP x 100%	12	8	24,00%	27,45%	48,00%	7,00%
17.4	Persentase Bina Koperasi yang berkompeten	%	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/Jumlah SDM koperasi yang dibina x 100%	-	-	33,00%	40,00%	38,00%	0,00%
17.5.	Persentase koperasi aktif yang dibina	%	Jumlah koperasi aktif yang dibina/Jumlah total koperasi aktif x 100%	-	-	100	60,26	100	29,5
17.6	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha / Jumlah usaha mikro x 100%	-	-	65,00%	74,50%	65,00%	29,83%

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
17.7	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	Orang	Jumlah RTS miskin yang dibina	-	-	100	100	100	35
17.8	Jumlah wirausaha baru sektor perdagangan	Orang	Jumlah wirausaha baru sektor perdagangan	-	-	325	375	330	0
17.9.	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/ jumlah total usaha mkro x 100%	2	0,97	2	17	2	17
17.10.	Jumlah Koperasi yang dibina	Buah	Jumlah Koperasi yang dibina	550	90	550	182	270	0
17.11.	Persentase usaha mikro yang terakses dukungan usaha	Buah	Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha	650	250	150	1695	150	0
17.12.	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina	%	jumlah masyarakat miskin yang dibina/ target x 100%	100	25	100	100	100	0
17.13.	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	Buah	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	3	0	3	0	3	0
18.	Penanaman Modal								
18.1.	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	(Realiasi RUPM/ Jumlah tahapan dalam RUPM) x 100%	-	-	50	0	100	0
18.2.	Jumlah nilai investasi (PMDN/ PMA)	M/ Rp	Jumlah nilai investasi (PMDN/ PMA) yang masuk	200	422,6	250	1630	300	4777,36
18.3.	Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan	%	(Jumlah permohonan perijinan yg dilayani/ Jumlah total permohonan perijinan) x 100%	-	-	100	100	100	100
18.4.	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	(Jumlah investor yang dibina/ Jumlah total investor) x 100%	-	-	5	0	100	120

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
18.5.	Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP	%	(Jumlah basis data potensi investasi yg dikelola sesuai SOP/ Jumlah total basis data potensi investasi) x 100%	-	-	100	0	100	0
18.6	Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP	%	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100	100	-	-	-	-
18.7.	Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP	%	(Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/ Jumlah total data perijinan) x 100%			100	0	100	100
19.	Kepemudaan dan Olahraga								
19.1.	Persentase Organisasi pemuda terbina	%	Jumlah organisasi pemuda yang terbina/ total oraganisasi pemuda x 100%	45	58,24	-	-	-	-
19.2.	Persentase peran serta organisasi kepemudaan yang dibina	%	Jumlah peran serta organisasi kepemudaan yang dibina	26	47,25	-	-	-	-
19.3.	Persentase Pembinaan Cabor yang berprestasi propinsi	%	Jumlah cabor yang dibina / total cabor x 100%	81	25	-	-	-	-
19.4.	Persentase peningkatan sarpras Olahraga	%	Jumlah sapras yang tersedia / total sapras yang dibutuhkan x 100%	56	58	-	-	-	-
19.5.	Persentase OKP yang dibina	%	Jumlah OKP yang dibina / Jumlah OKP x 100	-	-	28	28,57	30	30,77
19.6.	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga * 100	-	-	75	60	83	85,71

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
20.	Statistik								
20.1.	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	Realisasi terpenuhinya data dan informasi statistik sektoral terhadap target	100	100	-	100	-	100
20.2.	Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu	%	Realisasi pengelolaan basis data statistik terpadu yang terealisasi terhadap target	100	100	100	100	100	100
21	Persandian								
21.1.	Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	Realisasi pengamanan informasi perangkat daerah terhadap total aplikasi perangkat daerah	30	31,2	-	33,33	-	-
21.2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	Realisasi perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi terhadap target	30	37,8	-	-	-	-
21.3.	Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah/ Jumlah total area x 100%	-	-	50	33,33	60	63,34
21.4.	Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Area	Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	8	0	8	0
21.5.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan/Perwal	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kota	-	-	2	0	2	0
21.6.	Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jenis	Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	3	0	3	0

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
21.7.	Persentase jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani	%	jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani/jumlah total insiden x 100%	-	-	100	100	100	100
22.	Kebudayaan								
22.1.	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah	%	Jumlah kelompok seni budaya yang dibina / total kelompok seni budaya x 100%	70	71,01	-	-	-	-
22.2.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/ total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya x 100%	40	68	-	-	-	-
22.3.	Persentase pembinaan dan pengembangan terhadap grup kesenian	%	Jumlah grup kesenian yang dibina / total grup kesenian x 100%	20	30,64	-	-	-	-
22.4.	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100	-	-	57	57,97	61	63,77
22.5.	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	%	Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100	-	-	20	20,23	20	20,23
22.6.	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100%	-	-	50	50	50	50
22.7	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	cagar budaya yang dipelihara / target cagar budaya yang akan dilestarikan x 100	-	-	34	35,38	40	40
23.	Perpustakaan								

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
23.1.	Kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	32	34,28	35	0	37	0
23.2.	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	Jumlah penambahan pengunjung tahun berkenaan : Total pengunjung tahun lalu X 100%	0	0	14	71,52	17	51,39
23.3.	Persentase peningkatan koleksi buku	%	Jumlah penambahan buku yang dikoleksi tahun berkenaan : Total koleksi buku tahun lalu X 100%	4	6,86	-	-	-	-
23.4.	Persentase pembinaan perpustakaan	%	Jumlah perpustakaan yang dibina : Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina X 100%	-	-	5,53	5,53	5,53	5,53
23.5.	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan : Jumlah naskah kuno yang ditargetkan untuk dilestarikan X 100%	-	-	50	50	50	50
24.	Kearsipan								
24.1.	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	poin	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	-	-	2	2	2	2,47
24.2.	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai hasil audit kearsipan internal minimal kategori cukup (CC) (Nilai > 50 - 60) : Jumlah Perangkat Daerah Seluruhnya X 100%	-	-	62,16	63,89	70,27	55,56

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1.	Capaian produksi perikanan budidaya	Ton	Angka produksi perikanan budidaya	10.300	9.951	10.000	9.990,39	10.100	10.003
1.2.	Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	%	Realisasi pembangunan kawasan minapolitan terhadap target	40	32,65	40	53,88	50	69,28
1.3.	Jumlah Wira usaha Baru Sektor Perikanan	Orang	Jumlah Wira usaha baru sektor perikanan yang dibina	-	-	150	150	198	196
1.4.	Jumlah RTS Miskin Perikanan yang dibina	Orang	Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina	75	80	75	75	75	75
1.5.	Capaian produksi hasil perikanan	Ton	Capaian produksi hasil perikanan	197.24	312,7	197	0	199	333,1
2	Pariwisata								
2.1.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan	287.049	344	638.000	483.569	642.000	642.128
2.2.	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	objek pariwisata dipelihara /objek pariwisata terdaftar di RIPPDA) x 100%	-	-	51	55,1	55	56
2.3.	Jumlah Wira Usaha Baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha Pariwisata	Orang	Jumlah Wira Usaha Baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha Parawisata	100	-	150	150	192	192
2.4.	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	Orang	jumlah subsektor jasa dan usaha pariwisata yang dibina/ jumlah seluruh sub sektor jasa dan usaha pariwisata) x 100%	-	-	41	46,15	52	46,15

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Pertanian								
3.1.	Persentase peningkatan populasi ternak	%	Realisasi peningkatan populasi ternak dari tahun sebelumnya	2	2,15	1	-1,59	1	0,67
3.2.	Capaian Produksi Tanaman Pangan	Ton	Angka produksi tanaman pangan	93000	71518	73400	85384	74100	82019
3.3.	Capaian produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Angka produksi hortikultura dan perkebunan	-	-	4950	5834	5000	4146
3.4.	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	-	-	198	199	252	251
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Kwintal/hektar		-	-	63	62,9	64	62,68
3.6.	Capaian produksi Hasil peternakan	Ton	Angka produksi hasil peternakan (daging, telur, susu)	-	-	8000	10347	8300	10634
3.7	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	Persentase pengendalian keshatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dilayani	-	-	100	100	100	100
3.8	Jumlah laporan pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim	Dokumen	Jumlah laporan pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim	-	-	4	4	4	4
3.9.	Jumlah Wira usaha Baru Sektor Pertanian	Orang	Jumlah Wira usaha Baru Sektor Pertanian yang Dibina	-	-	300	0	300	370
3.10.	Jumlah RTS Miskin Bidang Pertanian yang dibina	Orang	Jumlah petani miskin yang dibina	126	126	225	0	225	245
3.11.	Persentase produksi tanaman pangan	%	Jumlah penambahan produksi tanaman pangan tahun berkenaan/ total produksi tanaman pangan tahun lalu x 100%	2	0	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.12.	Persentase produksi hortikultura dan Perkebunan	persen	Jumlah penambahan produksi hortikultura dan perkebunan tahun berkenaan/ total produksi hortikultura dan perkebunan tahun lalu x 100%	1	0	-	-	-	-
3.13.	Jumlah Gapoktan yang dibina	Buah	Jumlah Gapoktan yang dibina	64	64	-	-	-	-
3.14.	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	%	Realisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan yang dilayani	100	100	-	-	-	-
3.15.	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	Jumlah penambahan kelompok tani yang naik kelas/total jumlah kelompok tani	-	-	30	4,35	30	38
3.16.	Capaian peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan		Realisasi peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan	5	38,67	-	-	-	-
4.	Perdagangan								
4.1	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran Perusahaan	%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100%	-	-	100	100	100	100
4.2	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100%	-	-	100	80	100	80
4.3	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil	%	Jumlah bapokting yang harganya stabil/Jumlah total bapokting x 100%	-	-	72	54,5	89	34,5
4.4	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	Jumlah pelaku usaha yg berorientasi ekspor/Jumlah total pelaku usaha x 100%	-	-	3	1	4	0,47

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.5	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100%	70	80,89	88	109	94	88,9
4.6	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya	%	Jumlah peningkatan penggunaan produk unggulan/ Jumlah penggunaan	-	-	76	88,9	80	66,7
4.7.	Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik	%	Jumlah wajib ukur dalam kondisi baik/ total wajib ukur x 100%	100	100	-	-	-	-
4.8.	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	-	-	-	-	-	-
4.9.	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	%	Jumlah pelaku peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor/ total pelaku usaha berorientasi ekspor x 100%	1	0	-	-	-	-
4.10.	Persentase Pelaku usaha yang dibina	%	Jumlah pelaku usaha yang dibina/ target x100%	100	76,33	-	-	-	-
4.11.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang dibina / target x 100%	100	100	-	-	-	-
4.12.	Persentase Pasar yang dibina	%	Jumlah pasar yang dibina/ target x 100%	100	100	-	-	-	-
4.13.	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	Jumlah peningkatan omset pelaku usaha/ omset pelaku usahax 100%	0	0	5	-6,64	5	2,97
4.14.	Nilai ekspor bersih	US\$	Jumlah nilai ekspor bersih	0	0	41.000.000	31.459.428	42.000.000	19,85
5.	Perindustrian								
5.1	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industry	%	Jumlah realisasi sasaran RPIK/ Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100%	-	-	5	50	10	92,31

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.2	Jumlah wirausaha baru sektor industri	Orang	Jumlah wirausaha baru sektor industri	-	-	325	325	338	253
5.3	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industry	Orang	Jumlah RTS miskin yang dibina	-	-	550	500	550	0
5.4	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%	Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100%	-	-	100	100	100	0
5.5	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	%	Jumlah IKM yang Terdaftar/jumlah total IKM x 100%	-	-	30	1,6	40	0,78
5.6.	Persentase pertumbuhan industri	%	Jumlah pertumbuhan industri/total industri x 100%	2	3,94	2	9,4	2	43,2
6.	Transmigrasi								
6.1.	Persentase transmigran swakarsa	%		-	-	100	0	100	100
Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan									
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1.	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	Kecamatan dan kelurahan berkinerja baik/ jumlah kecamatan dan kelurahan x 100%	100	0	100	0	100	0
1.2	Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pemerintahan	%	Realisasi kebijakan yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan	-	-	100	0	100	0
1.3.	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	Realisasi Fasilitasi Penyelenggaraan Program Keagamaan(Magrib Mengaji, Tata Nilai, Tasik Bersedekah, dan Fasilitasi Keagamaan yang direncanakan	100	0	100	0	100	0
1.4.	Capaian Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	Realisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan	100	0	100	0	100	0
1.5.	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan	%	Produk hukum daerah yang diundangkan/ jumlah target x 100%	100	0	100	0	100	0
1.6	Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Perekonomian	%	Realisasi kebijakan perekonomian yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan	-	-	100	0	100	0
1.7	Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pembangunan	%	Realisasi kebijakan pembangunan yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan	-	-	100	0	100	0
1.8.	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	Perbandingan target pembangunan daerah terhadap capaian fisik dan realisasi anggaran pemerintah daerah	100	0	100	0	100	0

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.9.	Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE/ Jumlah Rencana Umum Pengadaan x 100%	100	0	100	0	100	0
1.10.	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	%	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah/ target x 100%	100	0	100	0	100	0
1.11.	Persentase IKM perangkat daerah dengan predikat baik	%	Jumlah perangkat daerah dengan IKM predikat baik/ total perangkat daerah x 100%	82,5	0	83,5	0	84,5	0
1.12.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKiP sesuai target Daerah	%	Persentase PD dengan Nilai AKIP lebih atau sama dengan target sakip daerah	60		73	0	75	0
1.13.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik dan tatalaksana Baik	%	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	84,5		84,75	0	85,5	0
1.14.	Persentase Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar yang Mengikuti Program Magrib Mengaji	%	Jumlah siswa muslim yang mengikuti program / Jumlah siswa muslim jenjang pendidikan dasar	89		90	0	90	0
1.15.	Tingkat Partisipasi Maghrib Mengaji	Ktgr	Realisasi keikutsertaan siswa sekolah (SD-Sederajat/ SMP-Sederajat/ SMA-Sederajat dalam maghrib mengaji terhadap jumlah usia (7-15)	2		2	0	2	0
1.16.	Tingkat Implementasi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius	%	Capaian implementasi tata nilai (sesuai Perda No.7 Th 2014)	70		87	0	87	0

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.17.	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Keagamaan	%	Realisasi Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Keagamaan Terhadap yang Ditargetkan	100		-	-	-	-
1.18.	Jumlah muzakki, munfiq, mushoddiq pegawai/penduduk muslim	Orang	Jumlah muzakki, munfiq, mushoddiq pegawai/penduduk muslim	200.000		-	-	-	-
1.19.	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	%	Realisasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal terhadap yang ditargetkan	100		100	0	100	0
1.20.	Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pengelolaan Keragaman Budaya	%	Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pengelolaan Keragaman Budaya terhadap target	100		-	-	-	-
1.21.	Persentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	%	Realisasi Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	100		100	0	100	0
1.22.	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	Realisasi fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti terhadap total kerjasama	100		-	-	-	-
1.23.	Persentase kinerja koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal	%	Realisasi koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal terhadap target	100		100	0	100	0
1.24.	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan	%	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh PD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri	100		100	0	100	0

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.25.	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan	%	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang ditindaklanjuti oleh PD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri	100		-	-	-	-
1.26.	Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan	%	Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan	100		100	0	100	0
1.27.	Persentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	%	Jumlah Produk Hukum yang harmonis/ sinkron dibanding dengan Peraturan Perundang Undangan	100		100	0	100	0
1.28.	Persentase penanganan masalah hukum	%	Persentase penanganan masalah hukum	100		100	0	100	0
1.29.	Persentase dokumentasi produk hukum yang dipublikasikan	%	Realisasi jumlah produk daerah dipublikasikan dibandingkan dengan jumlah seluruh produk hukum daerah yang ditetapkan	100		100	0	100	0
1.30.	Persentase pemantauan implementasi 10 hak dasar	%	Realisasi Pemantauan implementasi 10 hak dasar terhadap target (25 perusahaan)	20		20	0	20	0
1.31.	Persentase implementasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	%	Realisasi Implementasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	100		100	0	100	0
1.32.	Persentase PD yang Melaksanakan PBJ melalui ULP	%	Realisasi Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Perangkat Daerah melalui ULP	100		100	0	100	0

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.33.	Persentase penerbitan Analisis Standar Belanja, Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga tepat waktu	%	Penerbitan Analisis Standar Belanja, Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga tepat waktu	100		-	-	-	-
1.34.	Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	Jumlah PD yang menyampaikan Laporan Realisasi Pembangunan pada tgl 10 bulan berikutnya/ jumlah PD x 100	100		-	-	-	-
1.35.	Presentase Implementasi Pengendalian Pembangunan, Pengembangan Perekonomian, sosial budaya dan kemasyarakatan	%	Realisasi Implementasi Pengendalian Pembangunan, Pengembangan Perekonomian, sosial budaya dan kemasyarakatan	100		-	-	-	-
1.36.	Persentase Perangkat Daerah yang Tatalaksananya baik	%	Hasil survey	62		-	-	-	-
1.37.	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	Hasil Evaluasi	75		-	-	82	0
1.38.	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	88,35		-	-	-	-
1.39.	Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab, ABK, kompetensi manajerial dan evaluasi jabatan	%	Jumlah perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab, ABK, kompetensi manajerial dan evaluasi jabatan/ total perangkat daerah x 100%	100		100	0	100	0
1.40.	Persentase ketersediaan metode kerja dan standar kerja	%	Jumlah Regulasi Metode kerja dan standar kerja dibandingkan dengan amanat peraturan perundangan x 100	100		100	0	100	0

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.41.	Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	%	Realisasi dokumentasi kegiatan setda dan KDH, dokumentasi sejarah, penyiapan bahan KDH dan pengaduan terhadap yang ditangani	100		100	0	100	0
1.42.	Persentase Fasilitas Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	%	Persentase Fasilitas Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	-		100	0	100	0
1.43	Persentase fasilitas dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD	%	Persentase realisasi fasilitas dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD	100		100	0	100	0
1.44.	Persentase fasilitas dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	%	Persentase realisasi fasilitas dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	100		100	0	100	0
1.45.	Persentase fasilitas dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan	%	Persentase realisasi fasilitas dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan	100		100	0	100	0
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	Perencanaan Pembangunan								
1.1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	Rata-rata Persentase capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD, Renja terhadap RKPd	100	100	100	100	100	100
1.2.	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	Jumlah substansi program dalam RKPD/ Jumlah program dalam RPJMD Kota x 100%	100	100	100	100	100	100
1.3.	Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPd	%	Jumlah substansi program dalam Rencana Kerja/ Jumlah program dalam RKPd x 100%	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.4.	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	%	Jumlah usulan dalam RKPD (Hasil Musrenbang dan Reses) terhadap Total Usulan (Hasil Musrenbang dan Reses) x 100%	25	30	30	66,06	35	35
1.5.	Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	%	Jumlah capaian IKU sesuai target / total IKU x 100%	85	73,53	90	67,65	95	95
2	Keuangan								
2.1.	Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	Realisasi capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah (rata-rata capaian penilaian indikator KABID)	100	89,14	-	-	-	-
2.2.	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	Realisasi waktu penetapan Perda APBD / Target waktu penetapan Perda APBD x 100	100	100	-	-	-	-
2.3.	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	100	100	-	-	-	-
2.4.	Persentase implementasi teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	Realisasi laporan keuangan perangkat daerah menggunakan teknologi informasi terhadap total perangkat daerah	100	100	-	-	-	-
2.5.	Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	Jumlah aset milik daerah / Total nilai aset di neraca x 100	100	100	-	-	-	-
2.6.	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	%	Realisasi ketepatan waktu perencanaan keuangan (pendapatan dan belanja) seluruh perangkat daerah sesuai ketentuan	100	100	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.7.	Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	Realisasi penatausahaan pendapatan dan belanja daerah (nilai composite dari kegiatan 3 subid)	100	99,96	-	-	-	-
2.8.	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	%	Realisasi laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP terhadap total Perangkat Daerah	100	100	-	-	-	-
2.9.	Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	Realisasi integrasi teknologi informasi keuangan daerah oleh Perangkat Daerah terhadap total	100	100	-	-	-	-
2.10.	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	%	Realisasi kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan RKA Perangkat Daerah	-		-	-	-	-
2.11.	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	%	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat / Seluruh bidang tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya x 100	40	24	-	-	-	-
2.17.	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	%	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	-		WTP	WTP	WTP	WTP
2.13.	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	(Realisasi waktu penetapan Perda APBD/Target waktu penetapan Perda APBD) x 100	100	100	100	100	100	100
2.14.	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	Hasil Review Inspektorat terhadap LKPD Kota Tasikmalaya	100	100	100	100	100	100
2.15.	Persentase waktu penetapan KUA dan PPAS	%	Realisasi waktu penetapan KUA dan PPAS/ Target waktu penetapan KUA dan PPAS x 100	-	0	100	100	100	100

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.16.	Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan	%	Realisasi belanja/ target belanja yang telah ditetapkan x 100	95	0	95	96,97	95	90,21
2.17.	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	%	Laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP/ total perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
2.18.	Persentase inventarisasi aset milik daerah	%	Jumlah aset daerah yang terinventarisasi/ Total aset milik daerah x 100	100	100	100	100	100	100
2.19.	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	Jumlah peningkatan pajak dan retribusi daerah/ total pajak dan retribusi daerah x 100%	6,49	-0,39	7,01	41,68	2,37	12,94
2.20.	Persentase peningkatan pajak daerah	%	Jumlah peningkatan pajak daerah/ total pajak daerah x 100%	-34,71	-14,6	10	14,06	10	13,74
2.21.	Persentase peningkatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya	%	Jumlah peningkatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya/ total retribusi daerah dan pendapatan lainnya x 100%	67,19	13,44	4	59,35	5	8,35
2.22.	Persentase objek pajak baru terhadap yang ditargetkan		Jumlah objek pajak baru / target x 100%	20	97,58	20	209,7	20	396,36
2.23.	Persentase implementasi sistem informasi pajak daerah	%	implementasi sistem informasi pajak daerah	20	100	15	88,89	15	122,22
2.24.	Persentase penanganan wajib pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh	%	jumlah penanganan wajib pajak/ wajib pajak yang tidak patuh x 100%	20	123,88	20	146,27	20	91,04
2.25.	Capaian pajak daerah terhadap target	%	Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah /target x 100%	100	112,47	100	103,71	100	94,49

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.26	Capaian retribusi daerah dan pendapatan lainnya terhadap target	%	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya /target x 100%	100	88,31	100	96,68	100	68,11
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
3.1.	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	Realisasi Indeks Profesionalisme ASN	78	52,92	78	63,26	78	46,95
3.2.	Kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatannya	%	Realisasi apartur yang memenuhi kompetensi jabatan terhadap total aparatur	76	76,59	78	78,01	80	76,39
3.3.	Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah	%	Realisasi disiplin aparatur perangkat daerah terhadap total aparatur	99	99,79	99	99,84	99	99,85
3.4.	Capaian implementasi SIMPEG	%	Realisasi implementasi teknologi informasi kepegawaian terhadap target (pelayanan online, E-presensi, E-kinerja)	60	68,33	70	80,37	80	100
3.5.	Capaian pembinaan disiplin aparatur	%	Realisasi pembinaan disiplin seluruh aparatur terhadap target	100	95	100	100	100	90
3.6	Capaian pelayanan kepegawaian	%	Realisasi pelayanan kepegawaian terhadap target	100	94,43	100	114,37	100	100
3.7.	Capaian pembinaan jasmani aparatur	%	Realisasi pembinaan jasmani aparatur terhadap target	-	-	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.8.	Capaian pelayanan administrasi kepegawaian Bidang Pengembangan, Mutasi dan Kepangkatan	%	Realisasi pelayanan administrasi kepegawaian (Bidang Pengembangan, Mutasi dan Kepangkatan) terhadap target	-	-	-	-	-	-
3.9.	Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	%	Realisasi jumlah peserta pendidikan dan pelatihan terhadap yang ditargetkan	100	100	100	100,54	100	101,56
3.10.	Capaian pelayanan administrasi kepegawaian Bidang Pendidikan dan Pelatihan	%	Realisasi pelayanan administrasi kepegawaian (Bidang Pendidikan dan Pelatihan) terhadap yang diajukan	-	-	-	-	-	-
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan / total penelitian penelitian dan pengembangan x 100%	100	100	100	100	100	100
4.2.	Persentase Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	%	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi dibagi jumlah total yang ditargetkan x 100%	-		100	100	100	100
3	Unsur Pengawasan Pemerintahan								
3.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	%	(jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti / jumlah total rekomendasi) x 100%	-	0	75%	78%	77%	83%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.2	Nilai SAKIP Kota	%	Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan-RB	80 (BB)	83,31 (A)	73%	71%	75%	72%
3.3	Level Maturitas SPIP Kota	level	Hasil QA Maturitas SPIP dari BPKP	100	100	3	0	3	3,081
3.4	Skor PMPRB Kota	Point	Hasil Penilaian PMPRB dari Kemenpan-RB	-	-	70	0	75	86,42
3.5	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM	Unit	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM hasil penilaian Kemenpan-RB	-	-	3	0	5	0
3.6	Persentase Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur	%	(Jumlah ASN pemkot TSM yg menyampaikan / jumlah wajib lapor harta kekayaan) x 100%	-	-	100%	100%	100%	0%
3.7	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	%	(jumlah peraturan teknis yang disusun / jumlah peraturan teknis pengawasan yang harus dibuat) x 100%	-	-	100	0	100	100
3.8	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	(jumlah pengaduan yang selesai ditangani / jumlah total pengaduan) x 100%	-		100	100	100	100
3.9	Indeks Persepsi Korupsi hasil survey eksternal	Point	Hasil survey persepsi korupsi / survey penilaian integritas	-		3	2,96	3,5	1,86
3.10.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	Realisasi rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	72	70,47	-	-	-	-
3.11.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	Realisasi rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	80	87	-	-	-	-
3.12.	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	Realisasi pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100	-	-	-	-
3.13	Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP perangkat daerah terhadap total	100	100	-	-	-	-

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.14.	Tingkat capaian kapabilitas APIP	level	Hasil QA / verifikasi BPKP terhadap self Assesment kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tasikmalaya	3	2+	-	-	-	-
3.15.	Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP	%		100	100	-	-	-	-
3.16.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	%	Jumlah pengawasan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/ total pengawasan dan pengaduan masyarakat x 100%	100	100	-	-	-	-
4.	Unsur Kewilayahan								
4.1.	Persentase IKM kelurahan dalam kategori baik	%	Persentase kelurahan dengan IKM kategori baik	100		100	0	100	100
4.2.	Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan	85		90	0	95	95
4.3.	Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan	%	Realisasi ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan	85		90	0	95	95
4.4	Capaian Kinerja Kecamatan Berkategori Baik		Jumlah Kecamatan Berkategori Baik	-		100	0	100	100
4.5	Capaian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-		100	0	100	100
5.	Urusan Pemerintahan Umum								
5.1	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	%	Realisasi pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan	100	100	100	100	100	100
5.2.	Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat	%	Realisasi pendidikan politik bagi masyarakat terhadap yang ditargetkan	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Aktif	%	Jumlah Ormas yang aktif/ Jumlah Total Ormas x 100	-	-	100	63,4	100	63,4

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	TARGET KINERJA					
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.4	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	Realisasi capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditargetkan x100	-	-	100	100	100	100
5.5	Persentase Penanganan Konflik Sosial.	%	Jumlah isu potensi konflik yang ditangani/ jumlah isu potensi konflik yang ditargetkan x 100	-	-	100	100	100	100
5.6.	Capaian kualitas pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara	%	Capaian implementasi pengembangan wawasan kebangsaan (penanganan konflik sosial dan pencegahan	100	100	-	-	-	-
5.7.	Persentase capaian koordinasi kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	%	Realisasi koordinasi kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang ditangani	100	100	-	-	-	-
5.8.	Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama	%	Realisasi potensi konflik SARA yang ditangani	100	100	-	-	-	-
5.9.	Persentase capaian pembinaan kerukunan umat beragama	%	Realisasi pembinaan kerukunan umat beragama yang ditargetkan	100	100	-	-	-	-
5.10.	Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu	%	Jumlah pemilih yang aktif memilih terhadap total pemilih	-		-	-	-	-

Selanjutnya capaian IKK tahun 2023-2024 berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 sebagai berikut:

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	Angka Pertumbuhan PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	5,15	5,96	5,69	5,22

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.2	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	4,59	5,01	5,86	3,13
1.3	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	3,71	3,35	4,60	0,22
1.4	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,45	4,02	0,56	0,22
1.5	Laju inflasi Kota	%	Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,47	2,84	2,65	1,94
1.6	s Indeks Gini	poin	Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,390	0,428	0,400	0,359
1.7	s Indeks Pembangunan Manusia/ IPM	poin	Angka IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	73,95	75,47	75,65	76,03
1.7.1	s Indeks Kesehatan	poin	Indeks kesehatan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	80,88	84,74	85,02	-
1.7.2	s Indeks Pendidikan	poin	Indeks kesehatan dan dikeluarkan oleh BPS	70,04	69,27	69,33	-
1.7.3	s Indeks Daya Beli	poin	Indek daya beli yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	71,40	73,22	73,44	-
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1.	Pendidikan						
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	Angka RLS yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,76	9,54	9,55	9,63
2.	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Poin	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,6	7,87	7,87	8,04

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Poin	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	303,8	192,22	192,2	132,26
2.3	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	84	98,39	100	89,41
2.4	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	14,8	10,73	10,85	10,85
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	Urusan Pendidikan						
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	Jumlah Siswa TK/RA/KB/SPS/TPA dibagi Penduduk usia 3-6 thn X 100	25,78	42,53	42,55	42,6
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100	89,79	92,05	89,8	90,3
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100	78,65	94,22	78,66	83,57
1.4	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	%	Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100	100	100	100	100
1.5	Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	Jumlah Peserta Didik PAUD, dan Pendidikan Dasar yang terlayani SPM / Jumlah Seluruh Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Dasar x 100	72	95,73	100	98,47

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.6	Persentase Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	%	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar Bersertifikat Pendidik	51,55	38,02	51,55	44,34
1.7	Persentase PAUD Terakreditasi B	%	Jumlah PAUD Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh PAUD	35,76	63,45	35,79	88,35
1.8	Persentase SD Terakreditasi A	%	Jumlah SD Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SD	60,26	59,73	60,32	60,18
1.9	Persentase SMP Terakreditasi A	%	Jumlah SMP Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SMP	58,19	55,55	58,25	53,41
1.10	Persentase Non Formal/Kesetaraan Terakreditasi B	%	Jumlah Non Formal/kesetaraan Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh Non Formal/kesetaraan	51,85	61,9	51,9	61,9
1.11	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	Jumlah Ruang Kelas SD, SMP, PAUD dan Non Formal/Kesetaraan Kondisi Baik dibagi seluruh Ruang Kelas SD, SMP, PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	67,38	97,97	67,45	74,14
1.12	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan kurikulum dibagi Jumlah seluruh peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	100	100	100	100
1.13	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	Jumlah pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar yang bersertifikat pendidikan dibagi seluruh pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	51,45	80,43	51,55	44,34
1.14	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	Jumlah prestasi siswa Pendidikan Dasar yang diraih di tingkat provinsi dibagi Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan ke tingkat provinsi	25,03	38,21	25,05	46,15

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Urusan Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Poin	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,4	7,87	8,2	8,04
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Poin	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	303,8	192,22	286,5	132,26
2.3	Prevalensi Stunting (%)	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	14,8	10,73	16,1	10,85
2.4	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	%	Rata-rata capaian SPM Kesehatan Masyarakat	75	98,12	100	-
2.5	Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	Rata-rata capaian SPM Kesehatan Masyarakat	75	99,68	100	98,3
2.6	Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	Rata-rata capaian SPM PM dan PTM	75	96,75	100	103,13
2.7	Indeks Keluarga Sehat	%		0,35	0,12	0,12	0,12
2.8	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jumlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumlah tenaga kesehatan dikali 100	91	86,21	94	-
2.9	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	77	84,01	79,8	-
2.10	Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	Jumlah Keluarga ner-PHBS dibagi jumlah keluarga dikali 100	25,78	48,57	55	-
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik (bobot 70%) + persentase panjang drainase dalam kondisi baik (bobot 30%)	53,49	67,69	-	-
3.2	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	Persentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%)	32,86	35,32	-	-
3.3	Persentase Permukiman yang Layak Huni	%	Permukiman yang Layak Huni/ Luas Permukimanx 100%	25	27,13	-	-
3.4	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Target capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum tahun exsisting / target pertahun capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum (100%)	91,07	98,22	-	-
3.5	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi / total panjang jalan dan jembatan *100%	68,66	89,23	-	-
3.6	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	Panjang drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase	18,1	17,43	-	-
3.7	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani/ total bangunan gedung yang menjadi kewenangan pemda (114 gedung)	32,46	32,46	-	-
3.8	Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya/ Jumlah Kawasan x 100%	16,67	16,67	-	-
3.9	Persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan / jumlah badan usaha di kota tasikmalaya (236 badan usaha * 100%)	42,37	54,66	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.10	Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	Jumlah sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik / jumlah target sistem jaringan sarana prasarana permukiman akan ditangani (800 untuk 4 th)	25	27,13	-	-
3.11	Persentase KK/RT Yang berakses SPLD	%	KK/RT Yang berakses SPLD/jumlah KK/RT x 100%	61,62	62,8	-	-
3.12	Persentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	%	KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum/Jumlah KK/RT x 100%	56,67	57,57	-	-
3.13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98	98,2	-	-
3.14	Tingkat Kemantapan Jalan	%	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang / Panjang Jalan Total Kewenangan Kota Dikali 100	-	-	89.62	91.52
3.15	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang terdampak oleh irigasi	%	Luas sawah yang terdampak / luas sawah total kewenangan kota tasikmalaya (1749 Ha)	-	-	23.72	26.80
3.16	Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis	%	Jumlah Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis / Jumlah Bangunan Gedung Dikali 100	-	-	18.01	18.01
3.17	Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik + Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik /2	-	-	65.15	67.02
3.18	Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Air Minum Dan Air Limbah Domestik)	%	Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang	-	-	100.00	100.00

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana pola ruang / luas lahan yang diberikan KKPR*100 % Luas Wilayah Kota Kali 100	-	-	98.50	98.83
3.20	Persentase peningkatan jaringan jalan	%	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara / total panjang jalan kota *100%	-	-	2,25	2,99
3.21	Persentase pemilik ijin yang menerapkan ketentuan bangunan	%	Jumlah pemilik ijin yang menerapkan ketentuan ijin bangunan/jumlah bangunan berijin *100%	-	-	99,373	99,322
3.22	Persentase jasa konstruksi yang bersertifikat jasa konstruksi	%	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat / jumlah tenaga kerja jasa konstruksi keseluruhan*100%	-	-	33,66	32,43
3.23	Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh dalam kondisi baik	%	Panjang drainase lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang drainase lingkungan permukiman *100%	-	-	65,01	66,85
3.24	Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	%	Panjang jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang jalan lingkungan permukiman *100%	-	-	51,97	67,19
3.25	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Tasikmalaya * 100%	-	-	57,26	58,31
3.26	Persentase kebutuhan infrastuktur Air limbah domestik yang terpenuhi	%	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanva telah	-	-	62,05	63,14

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
			diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah Proyeksi rumah tangga di Kota Tasikmalaya*100%				
3.27	IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik	Kategori	Nilai IKM	-	-	83	83,54
3.28	Persentase kepatuhan Pemanfaatan Ruang terhadap KKPR yang telah diterbitkan	%	Luas area pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen KKPR terhadap seluruh luas lahan yang diberikan KKPR *100%	-	-	98	98
3.29	Persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal	%	Panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal / Panjang jaringan sungai*100%	-	-	23,76	25,44
3.30	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	%	Panjang jaringan irigasi kondisi baik / panjang total jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya	-	-	38,19	41,41
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
4.1	Persentase Perumahan yang Layak huni	%	Persentase PSU yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 2	25	47,22	50	75
4.2	Indeks Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan rekolasi program yang ditangani terhadap target	100	99,29	100	100
4.3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	2,42	12,69	15,11	15,57
4.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	Jumlah penanganan RTLH (didalam kawasan kumuh+diluar kawasan kumuh) dibagi total RTLH se Kota (9081 unit)	9,24	12,02	12,23	15,34

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.5	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani terhadap target	100	100	100	100
4.6	Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	%	Jumlah rumah korban relokasi program yang difasilitasi terhadap target	100	20	100	100
4.7	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	Jumlah PSU Perumahan yang dikelola terhadap target	25	50	50	75
4.8	Persentase PSU Perumahan yang Diserahterimakan	%	Jumlah PSU Perumahan yang diserahterimakan terhadap target	25	44,44	-	-
4.9	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total target kawasan kumuh yang ditangani	20	23,6	15,11	15,57
4.10	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (1.752 Unit)	8,56	16,27	-	-
4.11	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (7329 Unit)	1,36	7,76	7,76	12,66
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di Selesaikan	%	Jumlah Pengaduan Yang ditangani/Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	100	100	3	6,17
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	%	Jumlah Perda/Perkada yang Memuat sanksi yang ditegakkan/Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	93	100	4,5	4,8
5.3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota	%	Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan / Jumlah Pelanggaran K3 x 100%	100	100	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.4	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Jumlah Pelanggaran x 100%	93	100	-	-
5.5	Persentase PPNS yang di Bina	%	Jumlah PPNS yang dibina/Jumlah total PPNS x 100	100	100	-	-
5.6	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	(Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n-1 dikurangi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n) dibagi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n-1 dikali 100 %	-	-	3	6,17
5.7	Persentase penurunan pelanggar Perda dan Perkada yang memuat Sanksi		(Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikurangi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n) dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikali100%	-	-	4,5	4,8
5.8	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	Tercapainya Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0,34	0,43	0,51	0,52
5.9	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	86	100	86	70,12

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.10	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana/ seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100	100	100	-	-
5.11	Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan dan kesiapsiagaan sesuai jenis ancaman bencana/ seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100	100	100	-	-
5.12	Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	%	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100	100	100	-	-
5.13	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	%	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	86	80,27	-	-
6	Sosial						
6.1	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Data PPKS X 100	100	100	100	99,65
6.2	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Jaminan sosial/Jumlah Data DTKS X 100	78	100		
6.3	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100	100	100	100	100
6.4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS	%	Jumlah PSKS yang diberdayakan/Jumlah Data PSKS X 100	25	100	100	99,65

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.5	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Daerah Asalnya/ Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan X 100	100	100	-	-
6.6	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	Jumlah Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Jumlah Target X 100	100	100	-	-
6.7	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Jumlah PPKS yang Menerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Target X 100	100	100	100	100
6.8	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100	100	100	100	100
6.9	Persentase PSKS Aktif	%	Jumlah PSKS aktif/Target X 100	100	100		
6.10	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	Jumlah TMP yang Dikelola / Jumlah TMP X 100	100	100	100	100
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
7	Tenaga Kerja						
7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	7,35	6,55		6,49
7.2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x 100 %	54,23	80,29	54,5	65,76
7.3	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	4,98	13,25	19,7	19,8

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
7.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	4	100	5	3,04
7.5	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %	27	54,17	29	48,15
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,84	Belum Rilis	93	
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	60	Belum Rilis	60,1	
8.3	Persentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak / Jumlah Pengaduan x 100	100	100	100	100
8.4	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Poin	Realisasi Jumlah Skor dari indikator tingkatan Kota Layak Anak	758	430	-	-
8.5	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100	100	100
8.6	Persentase Capaian PUG SKPD/Lembaga/Organisasi yang Responsif Gender	%	Jumlah SKPD/Lembaga/Organisasi yang responsif gender / Jumlah SKPD/lembaga/Organisasi x 100	100	100	100	100
8.7	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	Jumlah Keluarga yang dibina / Jumlah Keluarga Sasaran x F100	100	100	100	100
8.8	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
8.9	Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	%	Jumlah Gender dan Anak yang didata/dibina / Jumlah Total Gender dan Anak yang ada x 100	100	27	100	0
8.10	Persentase Penanganan Kasus Anak	%	Jumlah Kasus yang ditangani/jumlah kasus x 100	100	100	100	100
9	Pangan						
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	91,4	92,4	91,5	95,1
9.2	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit	Jumlah infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	1	0	-	-
9.3	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	Persentase Angka Kecukupan Energi	110,7	103,9	104	106
9.4	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	Persentase Angka Kecukupan Protein	125	116,8	116,8	136,9
9.5	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani (%)	%	Jumlah kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani/Jumlah kelurahan rentan rawan pangan	15	75	15	25
9.6	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Total sampel pangan yang diawasi	100	100	100	100
10	Pertanahan						
10.1	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	100	100	-	-
10.2	Persentase PKKPR Tanah Aset Pemkot Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial	%	Jumlah tanah aset pemkot yang sesuai dengan peruntukan ruang / luas tanah aset pemkot yang diberikan PKKPR*100%	-	-	100	100
11	Lingkungan Hidup						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
11.1	Indeks Kualitas Air	Poin	$IPj=[\sqrt{(Ci/Lij)^2 M + (Ci/Lij)^2 A}]/2$	53,7	38,44	48,6	39,33
11.2	Indeks Kualitas Udara	Poin	$IKU = 100 - [(50/0,9 \times Ieu - 0,1)]$	80	83,72	81,18	86,64
11.3	Persentase Penanganan Sampah	%	Persentase capaian kinerja penanganan sampah	72	65,21	71	68,64
11.4	Persentase Pengurangan Sampah	%	Persentase capaian kinerja Pengurangan sampah	27	16,96	28	17,49
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
12.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Dokumen Pendaftaran penduduk + Dokumen pencatatan sipil/2 x 100%	94	98,76	98	98,28
12.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Jumlah Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan/jumlah lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama x 100%	100	100	100	100
12.3	Persentase PelayananPendaftaran Kependudukan	%	Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan KK/3 x 100%	98	98,57	98	101,68
12.4	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian dan Perkawinan + kepemilikan Akte lainnya/4 x 100%	93	98,96	99,07	99,03
12.5	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Jenis Sistem Informasi/Jumlah system informasi x 100%	100	100	100	100
12.6	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun/3 *100%	100	100	100	100
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
13.1	Cakupan Anggota BKB yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKB yang ber KB/Jumlah Anggota BKB x 100	82,53	85,3	83,03	67,06

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
13.2	Cakupan Anggota BKR yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKR yang ber KB/Jumlah Anggota BKR x 100	76,61	73,84	77,22	44,79
13.3	Cakupan Anggota BKL yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKL yang ber KB/Jumlah Anggota BKL x 100	74,97	67,83	75,47	42,78
13.4	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	1	1	1	1
13.5	Persentase Kebersertaan KB MKJP	Persen	Realisasi pelayanan Kb MKJP/Target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM KB) x100	100	92,92	73	72,5
13.6	Persentase Kebersertaan Un Meet Need	Persen	Unmeet need (ingin anak ditunggu (iat)+ tidak ingin anak lagi (tial)/PUS x 100	13,5	13,59	13,25	12,05
14	Perhubungan						
14.1	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	Rata-rata prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	67,23	62,37	68,63	69,14
14.2	Persentase Layanan Lalu Lintas Berkeselamatan	%	Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan / ruas jalan kota	61,07	57,14	58,93	59,46
14.3	Persentase Angkutan Lalu Lintas Berkeselamatan	%	Jumlah realisasi angkutan berkeselamatan/Jumlah angkutan yang di targetkan	77,32	67,6	78,32	78,82
15	Komunikasi Dan Informatika						
15.1	Capaian Predikat Indeks SPBE	Poin	Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	2,9	3,25	3,6	3,96
15.2	Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Bersasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang 15.3diselenggaraan oleh Komisi Informasi	80	90,14	92	94,08

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
15.3	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan SPBE yang dilakukan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan SPBE yang ada*100	60	60,71	65	62,5
15.4	Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria/indikator untuk kualifikasi predikat keterbukaan informasi dan kpomunikasi publik. Penilaian: PPID 10%, SLIP 20%, Berkala 30%, Setiap Saat 20%, Serta Merta 20%	80	90,14	100	100
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
16.1	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK/ Jumlah Koperasi Aktif x 100%	64	64,6	-	-
16.2	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/ jumlah total usaha mkro x 100%	2	5,88	5,57	3,17
16.3	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/ jumlah koperasi pemohon rekomendasi x 100%	100	0	-	-
16.4	persentase koperasi aktif	%	Jumlah Pertumbuhan koperasi aktif/ total Koperasi Aktif x100%	1	2,6	-	-
16.5	Persentase Koperasi Sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat/Jumlah total KSP/USP x 100%	6	11,2	-	-
16.6	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/Jumlah SDM koperasi yang dibina x 100%	25	30	8,28	33,33
16.7	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	Jumlah koperasi aktif yang diberdayakan/Jumlah total koperasi aktif x100%	25	26,15	-	-
16.8	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan / Jumlah usaha mikro x100%	2	1,71	-	-
16.9	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	Jumlah usaha mikro yang dibina / Jumlah usaha mikro x 100%	5	5,8	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
16.10	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	Jumlah volume usaha tahun n - tahun n-1/ Jumlah volume usaha tahun n-1 x 100%	-	-	2,5	8
17	Penanaman Modal						
17.1	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	M/Rp	Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP	1304	18702	1369	2138
17.2	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100	100	100	100
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	0	100	-	-
17.4	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100%	100	100	-	-
17.5	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	(Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor) x 100%	100	1	-	-
17.6	Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP	%	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	25	100	-	-
17.7	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	Jumlah basis data potensi penanaman modal yg dikelola sesuai SOP/Jumlah total basis data potensi investasi x 100%	75	100	100	100
18	Kepemudaan dan Olahraga						
18.1	Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi	%	Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi / jumlah OKP terdaftar x 100	2,2	2,2	40	44,44
18.2	Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi	%	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi / jumlah cabor x 100	34,15	52,38	36,59	53,66
18.3	Persentase OKP yang dibina	%	Jumlah OKP yang dibina / Jumlah OKP x 100	29,67	31,87	67,71	76,55

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
18.4	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga x 100	34,15	52,38	33,24	38,43
19	urusan Statistik						
19.1	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	Realisasi terpenuhinya data dan informasi statistik sektoral terhadap target	100	100	-	-
19.2	Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu	%	Jumlah Data Sektoral OPD yang terkumpul/Jumlah Data Sektoral OPD x 100%	100	100	-	-
19.3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Penilaian dari Badan Pusat Statistik			3	3,01
19.4	Persentase Peningkatan pengunjung web open data	%	Jumlah Pengunjung Tahun Sekarang-Jumlah Pengunjung Tahun Kemarin/Jumlah Pengunjung Tahun KemarinTahun Kemarin x 100			20	25,81
19.5	Persentase data prioritas yang tersusun	%	Jumlah Data Prioritas yang tersusun/Jumlah Daftar Data x 100			50	50
20	Urusan Persandian						
20.1	Capaian penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%	Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah terhadap total Area Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Informasi	41	48,21	-	-
20.2	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	capaian indeks Keamanan Informasi ISO 270001	41	48,21	45	45,74
20.3	Nilai kelengkapan pengamanan informasi	Poin	Nilai yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	-	-	291	295

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
20.4	Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi	Level	Nilai yang dihasilkan berdasarkan Laporan Hasil Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	-	-	3	3
21	Urusan Kebudayaan						
21.1	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	Jumlah OPK yang dilestarikan / Jumlah OPK x 100	63,73	64,65	68,63	68,69
21.2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100	63,73	64,65	-	-
21.3	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100	25	25,43	25	25
21.4	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100%	25	25	-	-
21.5	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	Cagar budaya yang dipelihara / jumlah cagar budaya terdaftar x 100	46,15	46,15	-	-
22	Urusan Perpustakaan						
22.1	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	Jumlah penambahan pengunjung pada tahun berkenaan / Jumlah pengunjung tahun lalu X 100%	0,3	0,376	-	-
22.2	Persentase pembinaan perpustakaan	%	Jumlah perpustakaan yang dibina /Jumlah Perpustakaan yang yang seharusnya dibina X 100%	4,42	0,74	-	-
22.3	Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	%	Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	38	39,84	-	-
22.4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	Jumlah Calon Naskah Kuno dan koleksi etnis nusantara yang dilestarikan /Jumlah keseluruhan naskah kuno dan koleksi etnis nusantara yang direncanakan pada akhir periode renstr x 100	23,81	0	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
22.5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	Nilai TGM yang berasal dari Perpusnas RI	-	-	69	82,09
22.6	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	Nilai IPLM yang berasal dari Perpusnas RI	-	-	76,5	72,84
22.7	Jumlah Kunjungan Masyarakat	Orang	Kunjungan Masyarakat dalam 1 tahun ke Perpustakaan Umum Daerah	-	-	20736	20741
22.8	Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi	Orang	Keterlibatan Masyarakat DalamKegiatan Sosialisasi dalam 1 tahun	-	-	530	600
23	Urusan Kearsipan						
23.1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) > 50 – 60 = CC (Cukup) e. > 30 – 50 = C (Kurang) f. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	52,43	59,03	60	62,59
23.2	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal. dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan)	44,8	61,66	62	64,82

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
			c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) > 50 – 60 = CC (Cukup) e. > 30 – 50 = C (Kurang) 0 – 30 = D (Sangat Kurang)				
23.3	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan minimal Kategori Cukup /Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan x 100	77,78	83	-	-
23.4	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	%	Total Nilai Perolehan pada Laporan Pengawasan Eksternal /Jumlah komponen pada aspek penilaian x 100	37,48	58,4	-	-
23.5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	Jumlah (60% x Nilai Pengawasan Eksternal + 40% x Nilai Pengawasan Internal)	-	-	55,14	63,93
23.6	Nilai aspek kebijakan	Nilai	Nilai aspek kebijakan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-	19,5	11,32
23.7	Nilai aspek pembinaan	Nilai	Nilai aspek pembinaan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-	13,6	15,66
23.8	Nilai aspek pengelolaan arsip statis	Nilai	Nilai aspek pengelolaan arsip statis hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-	15,9	24,52

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
23.9	Nilai aspek sumber daya kearsipan	Nilai	Nilai aspek sumber daya kearsipan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-	13	13,33
24.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat						
24.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Buah	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	69	69	69	69
24.2	Jumlah kelompok binaan PKK	Buah	Jumlah kelompok binaan PKK	861	861	861	861
24.3	Jumlah LSM (buah)	Buah	Jumlah LSM Aktif	218	218	218	218
24.4	PKK aktif	Persen	Persentase Jumlah PKK Aktif	100	100	100	100
24.5	Posyandu aktif	Unit	Jumlah Posyandu Aktif	909	909	910	910
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan						
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	10000	9960,08	10000	9989,71
1.2	Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	Jumlah produksi produk hasil olahan perikanan	300	335,497	310	373,42
1.3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	Jumlah Ikan yang Dikonsumsi dibagi jumlah penduduk	22,25	23,41	44	43,95
2	Pariwisata						
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah occupancy hotel	443505	538183	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.2	Persenatase peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	%	Objek pariwisata dipelihara/objek pariwisata terdaftar di RIPDA x 100%	59,18	60	-	-
2.3	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	Jumlah usaha pariwsata dan sub sektor ekonomi kreatif yang dibina/jumlah Jumlah usaha pariwsata dan sub sektor ekonomi kreatif	53,33	53,85	-	-
2.4	Persentase peningkatan wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan thn n-1) x 100	-	-	3,81	7,78
2.5	Persentase Peningkatan wisatawan yang Mengakses Informasi Pariwisata	%	((Jumlah akses terhadap media promosi tahun N- jumlah akses Tahun N-1) / Jumlah akses tahun N-1) x 100	-	-	13,35	13,45
2.6	Persentase kebutuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Profesional Yang Terpenuhi	%	(Jumlah jenis usaha pariwisata atau sub sektor ekraf yang dibina/ jumlah usaha pariwisata atau sub sektor ekraf) x 100	-	-	56,57	61,54
3	Pertanian						
3.1	Produksi pertanian dan perikanan	Ton	Jumlah produksi pertanian dan perikanan	112000	96189,88	-	-
3.2	Persentase peningkatan populasi ternak	%	Jumlah populasi ternak tahun n – Jumlah populasi ternak tahun n-1/jumlah populasi ternak n-1 x 100	1	0,12	-	-
3.3	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	85500	70374,6	75000	61364,4
3.4	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Jumlah Produksi Hortikultura dan Perkebunan	5900	4642,79	6000	5587,81
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	Produksi padi/luas panen hektar	62,9	62,64	62,65	61,52

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.6	Produksi Hasil Peternakan	Ton	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	10350	11212	10400	13148
3.7	Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	jumlah kejadian/kasus yang ditangani dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi	100	100	-	-
3.8	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	Jumlah area yang dapat ditanggulangi (Ha) dibagi Luas Area Terkena Bencana	75	48,87	-	-
3.9	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah kelompok tani x 100	4,5	1,14	-	-
3.10	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Izin	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	3	67	-	-
3.11	Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan	%	Jumlah sarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana yang disediakan x 100%	-	-	100	100
3.12	Persentase sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan	%	Jumlah sarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana yang disediakan x 100%	-	-	100	100
3.13	Persentase penyakit hewan yang tertanggulangi	%	jumlah penyakit hewan yang ditanggulangi / Jumlah penyakit hewan yang terjadi x 100%	-	-	100	100
3.14	Persentase bencana TPH yang terdeteksi dini dan tertanggulangi	%	Jumlah area bencana yang tertanggulangi (Ha) / Jumlah Areal Terkena Bencana x 100%	-	-	75	100
3.15	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah kelompok tani x 100	-	-	5	5,68
3.16	IKM Pelayanan Rumah Potong Hewan	Kategori (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD RPH	-	-	Baik (84)	Baik (85,19)

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.17	Persentase prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan	%	Jumlah prasarana yang dimanfaatkan/Jumlah prasarana yang disediakan x 100%	-	-	100	100
4	Perdagangan						
4.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	(PDRB sector perdagangan n – PDRB sector perdagangan n-1)/ PDRB sector Perdagangan n-1 x 100%	4,59	5,01	5,86	3,16
4.2	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor	%	(Nilai eskpor tahun n – nilai ekpor tahun n-1)/ nilai ekpor tahun n-1 x 100 %	2	56,29	2	-36,6
4.3	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100%	100	100	-	-
4.4	Persentase pasar rakyat dalam kondis baik	%	Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100%	70	80	-	-
4.5	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	Jumlah bapakting yang harganya stabil/Jumlah total bapakting x 100%	40	21,31	-	-
4.6	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	%	Jumlah peningkatan pelaku usaha produk unggulan yang mengikuti even/Jumlah UKM keseluruhan x 100%	10	3,7	-	-
4.7	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	Jumlah pelaku usaha yg berorientasi ekspor/Jumlah total pelaku usaha x 100%	1	0	-	-
4.8	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100%	80	100,08	-	-
4.9	Nilai Ekspor non migas	(Juta)US\$	Nilai ekspor tahun n - tahun n-1)/ nilai ekspor tahun n-1 x 100%	-	-	33	19,8

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.10	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	%	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik tahun n - tahun n-1 / jumlah sarana perdagangan dalam kondisi baik tahun n-1) x 100%	-	-	80	85
4.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan yang Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi hasil pemantauan x 100%	-	-	10	10
4.12	Persentase Konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu pada UPTD Metrologi Legal	%	Jumlah konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu/ jumlah konsumen yang mengajukan pelayanan x 100%	-	-	80	100
5	Perindustrian						
5.1	Persentase pertumbuhan industri	%	Jumlah pertumbuhan industri/ total industri x 100%	4	183,5	-	-
5.2	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	%	Jumlah realisasi sasaran RPIK/Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100%	5	100	-	-
5.3	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	%	Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/ jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100%	100	100	-	-
5.4	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	%	Jumlah IKM yang Terdaftar/ jumlah total IKM x 100%	5	0,6	-	-
5.5	Persentase Dokumen Perencanaan Industri yang Dimanfaatkan	%	Jumlah dokumen perencanaan industri yang dimanfaatkan / jumlah total dokumen perencanaan industri pada PPIK x 100%	100	100		
5.6	Persentase Peningkatan Industri	%	Jumlah Industri tahun n - tahun n-1 / jumlah industri tahun n-1) x 100%	100	46		

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan							
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
1.1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	Nilai	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	11	10,52	-	-
1.2	Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Berkategori sangat Baik	%	(Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah berkategori sangat baik / Jumlah Perangkat Daerah) X 100%	40	47,22	-	-
1.3	Nilai Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	Nilai EPPD atas LPPD tahun sebelumnya (N-1)	3,2 - 4,00	3,3348	-	-
1.4	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang-undangan	%	(Jumlah Produk Hukum yang Direvisi / Jumlah Produk Hukum yang harus direvisi) 100%	100	100	-	-
1.5	Indek Tata Kelola Barang dan Jasa	%	Hasil Evaluasi dari LKPP	40	52,86	-	-
1.6	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat	%	Capaian IKK Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mencapai target / Seluruh Jumlah IKK Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat X 100%	100	81,08	-	-
1.7	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik / Jumlah Kecamatan dan Kelurahan x 100%	100	100	-	-
1.8	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	Produk Hukum Daerah yang Diundangkan / Jumlah Target x 100%	100	74,14	-	-
1.9	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	Capaian IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mencapai target t / Seluruh Jumlah IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan X 100%	100	78,33	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.10	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	Perbandingan Target Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Fsik dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah	100	100	-	-
1.11	Indek Kematangan UKPBJ	Poin	Dihitung oleh LKPP	3	3	-	-
1.12	Indeks Reformasi Birokrasi General	Nilai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	66,58	76,63
1.13	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	66,58	76,63
1.14	Capaian Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	Nilai	Nilai Kualitas Layanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang Diperoleh Melalui Hasil Survey Terhadap Stakeholder	-	-	85	82,55
1.15	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	-	-	83	82,47
1.16	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik/ Jumlah Perangkat Daerah) x100%	-	-	100	
1.17	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja yang Dinilai Oleh Kemenpan-RB	-	-	10,55	10,58
1.18	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	(Nilai Total IKM Pemerintah Daerah yang menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik / Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	-	-	88,31	88,5

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.19	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%	(Jumlah Eviden IKK yang Terpenuhi / Jumlah Eviden IKK yang Harus Dipenuhi)X 100%	-	-	100	100
1.20	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	-	-	45	68,91
1.21	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	45	73,83
1.22	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Hukum Pemerintah Daerah dari Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-	-	86,88	97,78
1.23	Nilai Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM	Nilai	Hasil Penilaian Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM yang Dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	-	-	92,7	97,41
1.24	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	45	89,06
1.25	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	-	-	45	79,67
1.26	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangunan yang Dilaksanakan / Jumlah Saran Tindak Lanjut) x 100%	-	-	100	100
1.27	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	Hasil Penilaian dari LKPP	-	-	70,74	68,48
1.28	Persentase hasil pelaksanan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	%	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%	100	100	100	100
2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Perencanaan Pembangunan						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	25,20-25,30	23,85	23,95	23,82
1.2	Nilai Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	17,65 - 17, 85	19,94	20,04	19,52
1.3	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Daerah berpredikat minimal baik	%	Jumlah indikator kinerja daerah berpredikat minimal baik/jumlah indicator kinerja daerah x 100%	80	100	-	-
2	Keuangan						
2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Target x 100%	100	100	100	100
2.3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	%	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar/standar x 100%	100	100	100	100
2.4	Persentase peningkatan pajak daerah	%	(Pajak Daerah Tahun Berjalan - Pajak Daerah Tahun Dasar) /Pajak Daerah Tahun Dasar x 100%	2,31	3,86	3,19	4,82
2.5	Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	%	(PAD Bukan Pajak Daerah Tahun Berjalan - PAD Bukan Pajak Daerah Tahun Dasar) /Pajak Daerah Tahun Dasar x 100%	-1,24	3,98	-	-
2.6	Capaian Pajak Daerah	%	Realisasi Pajak Daerah/target Pajak Daerah x100%	100	101,66	-	-
2.7	Capaian PAD bukan pajak daerah	%	Realisasi PAD bukan Pajak Daerah/target PAD Bukan Pajak Daerah x100%	100	94,12	-	-
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	Realisasi Indeks Profesionalisme ASN	78	63.26	-	-
3.2	Kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatannya	%	Realisasi aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan terhadap total aparatur	78	78.01	-	-
3.3	Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah	%	Realisasi disiplin aparatur perangkat daerah terhadap total aparatur	99	99.84	-	-
3.4	Capaian implementasi SIMPEG	%	Realisasi implementasi teknologi informasi kepegawaian terhadap target (pelayanan online. E-presensi. E-kinerja)	70	80.37	-	-
3.5	Capaian pembinaan disiplin aparatur	%	Realisasi pembinaan disiplin seluruh aparatur terhadap target	100	100	-	-
3.6	Capaian pelayanan kepegawaian	%	Realisasi pelayanan kepegawaian terhadap target	100	114.37	-	-
3.7	Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	%	Realisasi jumlah peserta pendidikan dan pelatihan terhadap yang ditargetkan	100	100.54	-	-
3.8	Indeks Sistem Merit	Nilai/Kategori		-	-	350	371
3.9	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	Nilai/ Kategori	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Evaluasi Kinerja yang Sudah Diverifikasi	-	-	67,5	75
3.10	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	Nilai/ Kategori		-	-	38	40
3.11	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	Nilai/ Kategori	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas pengelolaan promosi dan mutasi yang sudah diverifikasi	-	-	35	37,5
3.12	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	Nilai/ Kategori	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta yang Sudah Diverifikasi	-	-	72,5	75

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.13	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai/Kategori	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin yang Sudah Diverifikasi	-	-	35	37,5
3.14	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai/ Kategori	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Perencanaan Kebutuhan ASN yang Sudah Diverifikasi	-	-	40	40
3.15	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai/ Kategori	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Perlindungan dan Pelayanan yang Sudah Diverifikasi	-	-	12	16
3.16	Nilai kriteria sistem informasi	Nilai/ Kategori	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas sistem informasi yang Sudah Diverifikasi	-	-	20	20
3.17	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	Nilai/ Kategori	Jumlah Nilai Kriteria Kualitas Pengembangan Karir Dimensi Pengembangan Kompetensi yang Sudah Diverifikasi	-	-	30	30
4	Penelitian dan Pengembangan						
4.1	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	Hasil kajian yang direkomendasikan/jumlah kajian yang dihasilkan dalam periode 1 tahun berjalan x 100%	85	100	-	-
4.2	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	Buah	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	10	18	-	-
4.3	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri	-	-	47,2	49,36
4.4	Persentase hasil kajian yang dijadikan dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	%	Hasil Kajian yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan / Total Seluruh Kajian) x 100%	-	-	30	100
5	Unsur Pengawasan Pemerintahan						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.1	Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	Level Kapabilitas pada Elemen Praktek Struktur Tata Kelola atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP	2	3	-	-
5.2	Tingkat Maturitas SPIP Kota	Level	Level Kapabilitas pada Elemen Praktek Peran Dan Layanan atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3	-	-
5.3	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	Level	Level Kapabilitas pada Elemen praktek Pengelolaan SDM atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP	2	3	-	-
5.4	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	Level	Level Kapabilitas pada Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP	2	3	-	-
5.5	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	Level	Level Kapabilitas pada Elemen Praktek Struktur Tata Kelola atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP	2	3	-	-
5.6	Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	Level	Nilai IEPK dihasilkan dari penilaian Maturitas SPIP terintegrasi tingkat kota yang dikeluarkan BPKP	2	3	-	-
5.7	Pemenuhan Elemen praktek Pengelolaan SDM	Level	Level Kapabilitas pada Elemen praktek Pengelolaan SDM atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP	2	3	-	-
5.8	Pemenuhan Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja	Level	Level Kapabilitas pada Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP	2	3	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.9	Persentase Penanganan kasus	%	Jumlah kasus yang selesai / Jumlah Total Kasus X 100%	100	100	-	-
5.10	Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	Nilai IEPK dihasilkan dari penilaian Maturitas SPIP terintegrasi tingkat kota yang dikeluarkan BPKP	3	2 -2,11	-	-
5.11	persentase pemenuhan laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	%	Jumlah Produk Kebijakan Teknis yang telah terbit / Jumlah Produk Kebijakan Teknis yang dibutuhkan X 100%	100	100	-	-
5.12	persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan	%	Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai / Jumlah total Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pada PKPT X 100%	100	100	-	-
5.13	Persentase TLHP yang diverifikasi	%	realisasi TLHP APIP dan BPK RI yang berhasil diverifikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh TLHP APIP dan BPK RI yang disusulkan untuk diverifikasi	-	-	100	100
5.14	Level Kapabilitas APIP	Level	Level Kapabilitas APIP yang telah dilakukan penilaian oleh BPKP	-	-	3	3
5.15	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai standar	%	Jumlah Kasus yang selesai / Jumlah Total Kasus x 100	-	-	100	100
5.16	Persentase kejadian kerugian keuangan yang diselesaikan sesuai standar	%	Jumlah Laporan penanganan kehilangan BMD yang telah terbit / Jumlah Total Kejadian kehilangan BMD x 100	-	-	100	100
5.17	Persentase perangkat daerah wilayah irban I yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	Jumlah rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah pada lingkup itban I /jumlah Total	-	-	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Rekomendasi evaluasi SAKIP yang diterbitkan itban I x 100				
5.18	Persentase perangkat daerah wilayah irban II yang menindaklanjuti LHE SAKIP	Level	Jumlah rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah pada lingkup itban II /jumlah Total Rekomendasi evaluasi SAKIP yang diterbitkan itban II x 100	-	-	3	3
5.19	Persentase perangkat daerah wilayah irban III yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	Jumlah rekomendasi TLHP yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah pada lingkup itban III /jumlah Total Rekomendasi evaluasi SAKIP yang diterbitkan itban III x 100	-	-	100	100
5.20	Level Kapabilitas APIP	Level	Level Kapabilitas APIP yang telah dilakukan penilaian oleh BPKP	-	-	3	3
5.21	level MRI	Level	Indeks Perhitungan Parameter Penilaian Pengelolaan Risiko yang dikeluarkan oleh BPKP	-	-	3	3
5.22	capaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level	Hasil Penjamianan kualitas atas penilaian mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat kota dan PD	-	-	3	3
5.23	capaian penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level	Hasil Penilaian mandiri atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kota Oleh Tim PM Tingkat Kota	-	-	3	3
5.24	persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	%	Perangkat Daerah yang diajukan untuk mendapat predikat WBK-WBBM / Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan Zona Integritas menuju WBK-WBBM x 100	-	-	50	50

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.25	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan RADPK	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan RADPK / Jumlah Perangkat Daerah x 100	-	-	100	100
5.26	persentase ASN yang melaporkan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan)	%	Jumlah Laporan Harta Kekayaan yang disampaikan / Jumlah wajib Lapor x100	-	-	100	100
5.27	Persentase evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kota	%	Jumlah item perencanaan dan pelaksanaan yang dievaluasi / jumlah total item perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi x 100	-	-	100	100
6 Unsur Kewilayahan							
6.1	Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	Tingkat Kinerja Kecamatan hasil penilaian Setda	Baik/Sedang	Baik/Sedang	Baik/Sedang	Baik/Sedang
6.2	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban UmumLingkungan	%	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani/jumlah gangguan x 100%	100	100	100	100
6.3	Persentase Kelurahan dengan kategori "Cepat Berkembang"	%	Jumlah kelurahan kategori "Cepat berkembang" / jumlah kelurahan x 100%	100	100	100	100
6.4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	%	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100	100	100	100
6.5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	Capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100
6.6	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	100	100	100
6.7	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	Capaian pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100	100
7	Urusan Pemerintahan umum						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
7.1	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang diselesaikan/jumlah potensi konflik x 100%	100	100	-	-
7.2	Persentase ormas yang aktif	%	Jumlah ormas aktif/jumlah ormas x 100%	65	58	65	65
7.3	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100	-	-
7.4	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100	-	-
7.5	Persentase penanganan konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang ditangani/jumlah potensi konflik x 100%	64	100	-	-
7.6	Persentase parpol yang dibina	%	Jumlah parpol yang dibina/jumlah parpol x 100%	100	100	-	-
7.7	Persentase ormas yang dibina	%	Jumlah ormas yang dibina/jumlah parpol x 100%	71	58	-	-
7.8	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	Jumlah masyarakat terbina bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan / Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya usia produktif x 100%	-	-	1	1,02
7.9	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik , pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	%	Jumlah masyarakat terbina di bidang pendidikan politik / Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya usia produktif x 100%	-	-	0,55	0,79
7.10	Persentase ormas terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	%	Jumlah ormas terbina / Jumlah ormas x 100%	-	-	65	65

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/	Satuan	Formulasi	Target Kinerja			
	Indikator Kinerja Daerah			2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
7.11	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	Jumlah masyarakat terbina bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya / Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya usia produktif x 100%	-	-	0,48	0,66
7.12	Persentase potensi ancaman dan gangguan yang terkendali	%	Jumlah potensi konflik yang ditindaklanjuti / Jumlah potensi konflik x 100%	-	-	70-80	100

Sumber : hasil Analisis Bappelitbangda, 2025



B. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang dimana pelaksanaannya harus memenuhi 4 (empat) tahapan perencanaan SPM sesuai amanat Permendagri Nomor 59 tahun 2021. Tahapan perencanaan SPM terdiri atas pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan penerapan SPM tersebut harus masuk kedalam dokumen perencanaan dan dilaksanakan karena menjadi salah satu poin dalam penilaian penerapan SPM oleh pemerintah pusat selain kepatuhan daerah dalam melaporkan pelaksanaan SPM pada setiap triwulannya. Berikut adalah capaian SPM Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.75.

Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Bidang Urusan /Jenis Layanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kota Tasikmalaya	61,21	49,01	84,48	98,50	99,46
1	BIDANG PENDIDIKAN					
	1 Pendidikan Dasar	89,13	88,94	68,03	97,9	97,54
	2 Pendidikan Kesetaraan	0,47	2,27	90,51	98,95	99,15
	3 Pendidikan Anak Usia Dini	57,29	58,14	95,04	90,35	98,69
	Jumlah Rata-rata	48,96	49,78	84,53	95,73	98,46
2	BIDANG KESEHATAN					
	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97,37	100	97,00	100	99,67
	2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,82	100	97,53	98,05	98,84
	3 Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	103,22	98,68	96,63	100	99,15
	4 Pelayanan Kesehatan Balita	51,34	82,29	87,6	100	98,00
	5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99,8	52,50	86,25	100	99,89
	6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	16,06	20,18	47,84	100	100
	7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	34,6	28,90	31,61	100	90,37
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32,87	51,37	79,25	100	100
	9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	48,82	45,12	80,74	100	100
	10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	77,26	84,49	98,58	100	100
	11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)	47	44,00	90,43	96,73	94,29
	12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	37	79,00	85,63	82,71	99,43
	Jumlah Rata-rata	62,01	65,54	81,59	98,12	98,30
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM					
	1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	55,58	56,23	100	97,32	100
	2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	60,54	61,20	100	99,12	100
	Jumlah Rata-rata	58,06	58,715	100	98,22	100

No.	Bidang Urusan /Jenis Layanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	100	98,57	100
	2 Fasilitasi penyediaan rumah rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	0	20	100	100
	Jumlah Rata-rata	0	0	60	99,29	100
5	BIDANG TRANTIBUM LINMAS					
	1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban UmumPelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	98,54	86,13	86,67	100	100
	2 Pelayanan Informasi rawan bencanaPelayanan Informasi rawan bencana	92,89	91,83	65	100	100
	3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencanaPelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100	98,86	67,27	100	100
	4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	97,33	100	100
	5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	100	100	96,53	99,01	100
	Jumlah Rata-rata	98,28	95,36	86,61	99,67	100
6	BIDANG SOSIAL					
	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti	100	14,3	96,00	100	100
	2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti	100	78,5	98,67	100	100
	3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Diluar Panti	100	0,73	98,67	100	100
	4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	100	16,4	98,67	100	100
	5 Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban bencana	100	13,6	78,88	100	100
	Jumlah Rata-rata	100	24,7	94,18	100	100

Sumber: Setda Kota Tasikmalaya, 2025.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pengelolaan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi sumber daya keuangan yang ada, dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan otonomi daerah yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pelaksanaan APBD dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Tasikmalaya secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan proyeksi rata-rata kemampuan keuangan daerah.

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Penilaian kinerja keuangan masa lalu (lima tahun terakhir) dilakukan melalui peninjauan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tasikmalaya disertai kondisi Neraca Daerah Kota Tasikmalaya. Tinjauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tasikmalaya dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sedangkan tinjauan terhadap Neraca Daerah Kota Tasikmalaya difokuskan pada perkembangan asset daerah, kewajiban, serta ekuitas dana yang didalamnya terdapat analisis Neraca Daerah yang meliputi perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja dan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 tahun yang lalu dapat tercermin dari realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.76.

Realisasi APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	1.760.907.421.698,25	2.031.399.322.745,92	1.902.443.766.699,29	1.698.776.143.136,64	1.792.496.242.472,06
	A. Pendapatan Asli Daerah	314.307.017.302,25	445.335.320.092,92	341.362.213.701,29	364.302.263.151,64	351.777.584.751,06
	B. Pendapatan Transfer	1.376.288.904.396,00	1.515.866.047.653,00	1.475.175.680.746,00	1.334.473.879.985,00	1.440.718.657.721,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.311.500.000,00	70.197.955.000,00	85.905.872.252,00	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.760.907.421.698,25	2.031.399.322.745,92	1.902.443.766.699,29	1.698.776.143.136,64	1.792.496.242.472,06
2	BELANJA	1.743.157.214.090,00	2.013.489.962.619,00	1.912.313.365.226,68	1.716.186.584.365,88	1.790.597.242.391,64
	A. Belanja Operasi	1.373.967.595.766,00	1.607.841.905.055,00	1.530.802.959.552,68	1.574.042.659.011,88	1.635.468.452.199,64
	B. Belanja Modal	321.922.174.799,00	381.030.698.046,00	378.644.240.783,00	137.927.625.828,00	152.907.959.308,00
	C. Belanja Tak Terduga	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	2.866.164.891,00	4.216.299.526,00	2.220.830.884,00
	D. Belanja Transfer					
	JUMLAH BELANJA	1.743.157.214.090,00	2.013.489.962.619,00	1.912.313.365.226,68	1.716.186.584.365,88	1.790.597.242.391,64
	SURPLUS/DEFISIT	17.750.207.608,25	17.909.360.126,92	-9.869.598.527,39	-17.410.441.229,24	1.899.000.080,42
3	PEMBIAYAAN	14.048.311.867,23	31.957.541.311,48	32.372.401.818,40	29.753.908.942,07	18.206.326.669,70
	A. Penerimaan Pembiayaan	77.418.838.521,23	75.943.417.801,48	57.934.408.438,40	48.729.670.617,07	29.097.595.804,70
	B. Pengeluaran Pembiayaan	63.370.526.654,00	43.985.876.490,00	25.562.006.620,00	18.975.761.675,00	10.891.269.135,00
	PEMBIAYAAN NETTO	14.048.311.867,23	31.957.541.311,48	32.372.401.818,40	29.753.908.942,07	18.206.326.669,70
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	31.798.519.475,48	49.866.901.438,40	22.502.803.291,01	12.343.467.712,83	20.105.326.750,12

Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

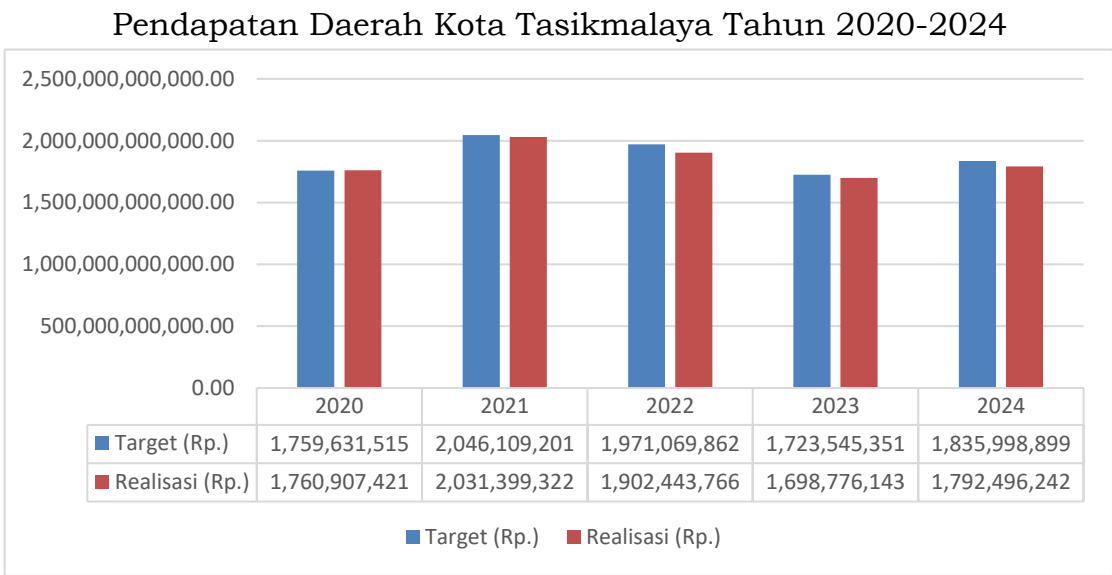
2.2.1.2. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU HKPD, pendapatan daerah terdiri dari:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2. Transfer ke Daerah (TKD) meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan;
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja keuangan dari sisi pendapatan daerah mengalami fluktuatif. Capaian realisasi terhadap target pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 100.07% ke angka 99.28% atau terjadi penurunan sekitar 0.79%. Kemudian pada tahun 2022, capaian realisasi terhadap target pendapatan mengalami penurunan sekitar 2.77% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski sempat mengalami kenaikan capaian pada tahun 2023, tapi mengalami penurunan kembali di tahun 2024, hingga mencapai angka 97.63%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.48.

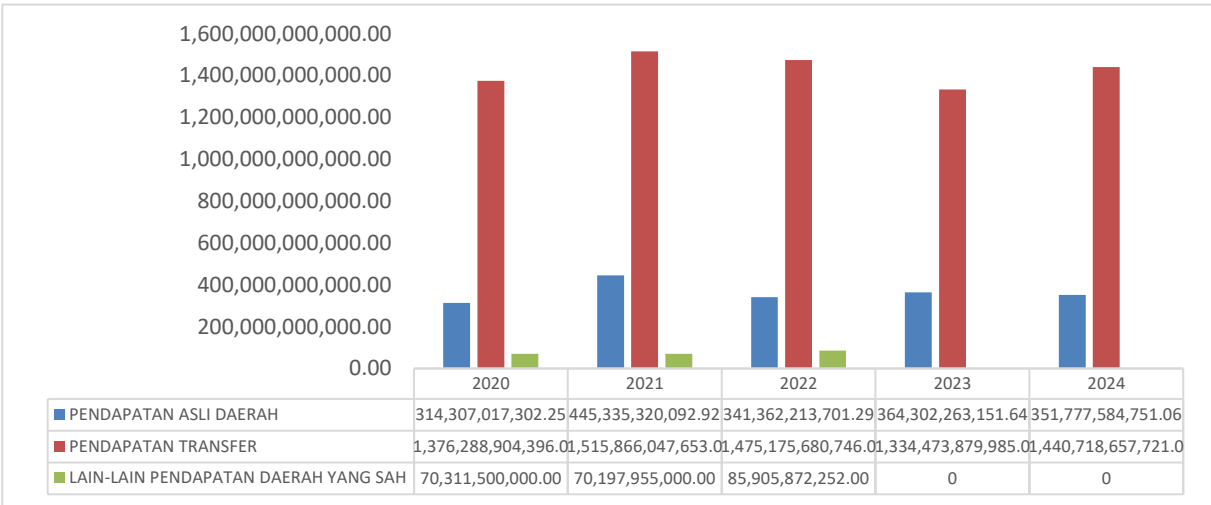


Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun proporsi pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.49.

Komponen Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

Tren peningkatan pendapatan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam konteks pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat perkembangan pendapatan Kota Tasikmalaya dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1.16 persen. Tren pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.77.

Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pendapatan	-9.62%	15.36%	-6.35%	-10.71%	5.52%	-1.16%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	8%	42%	-23%	7%	3.05	5.88%
1.2.	Pendapatan Transfer	-12.53%	10.14%	-2.68%	-9.54%	7.96	-1.33
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-6.69%	-0.16%	22.38%	-100%	0	-17.77

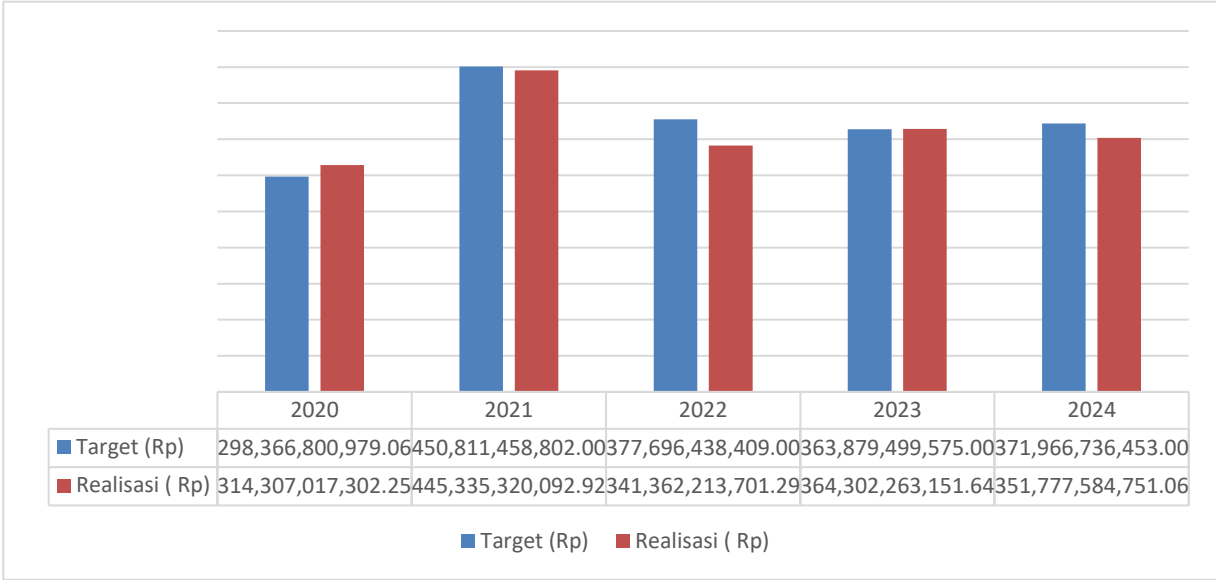
Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025.

1) Pendapatan Asli Daerah

Kinerja pendapatan asli daerah mengalami fluktuatif. Realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp.314.307 Milyar meningkat menjadi Rp.445.335 Milyar pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari Rp.341.362 Milyar dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 364.302 Milyar.

Gambar 2.50.

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024



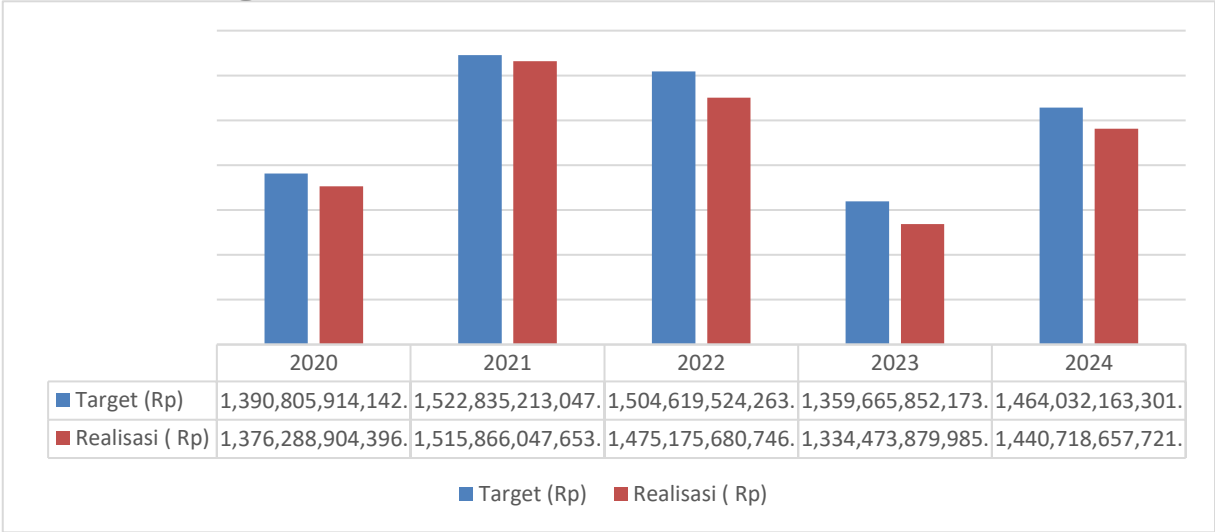
Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

2) Dana Transfer

Selama tahun 2020-2024 target dana transfer mengalami fluktuasi dikarenakan kebijakan pusat. pada tahun 2021 merupakan target dan realisasi terbesar yaitu sebesar 1.515 triyun dan terus menurun sampai tahun 2023 namun terdapat kenaikan pada target serta realisasi pada tahun 2024 jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.51.

Target dan Realisasi Dana Transfer Tahun 2020-2024



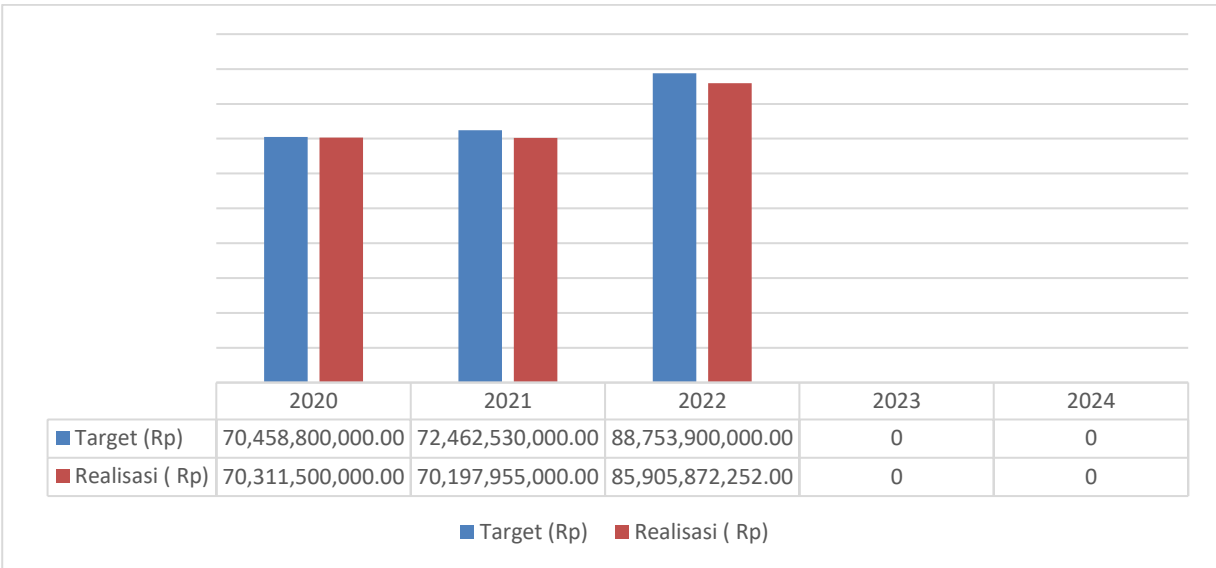
Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

3) Kinerja Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Selama 5 tahun (2020-2024) realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah persentase tertinggi pada tahun 2020 dimana targetnya 70.458 milyar dan realisasinya mencapai 99.79% sebesar 70.331 milyar. di tahun 2023 tidak ada realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. karena ada kebijakan perubahan koding. dimana pada tahun 2020-2022 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatat sebagai Lain-lain pendapatan yang sah. pada tahun 2023 dipindah dan dicatat sebagai pendapatan transfer untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.52.

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2020-2024



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

2.2.1.3. Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

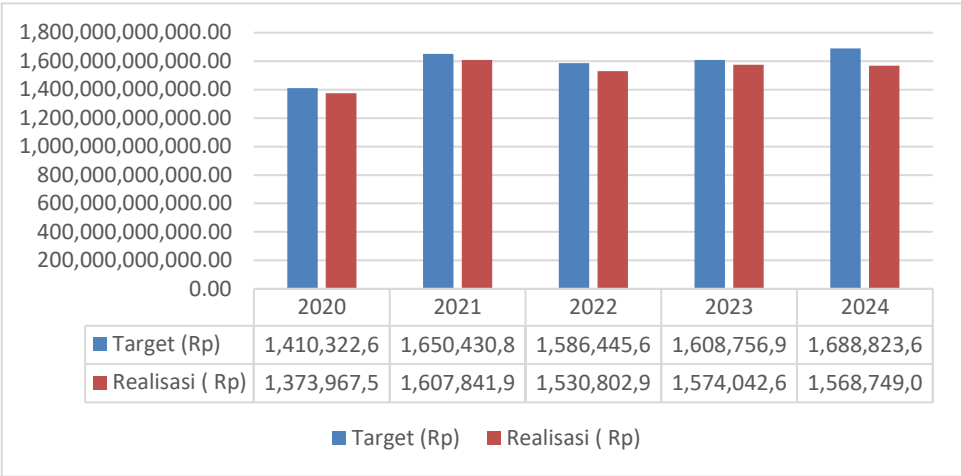
- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

1) Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Belanja operasi dirinci atas jenis: Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga. Belanja Subsidi. Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. Dari tahun 2020-2024. total akumulasi realisasi belanja operasi Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 7.655.404.214.831.20 dari anggaran Rp. 7.944.779.836.015.29 dengan persentase capaian sebesar 97.26 %. Perkembangan Realisasi Belanja semakin menaik setiap tahun nya. pada tahun 2021 target total belanja operasi yaitu Rp. 1.607.841.905.055.00 dari anggaran sebesar Rp. 1.650.430.837.883.00 dengan persentase capaian sebesar 97.41% meskipun mendapat penurunan di tahun berikutnya namun besaran belanja tetap lebih meningkat di tahun-tahun selanjutnya. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.53.

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

2) Belanja Modal

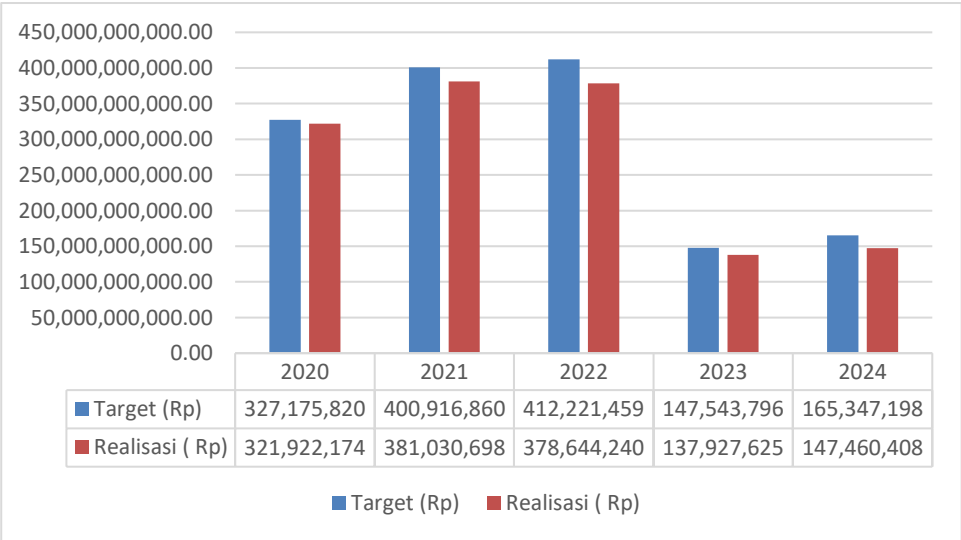
Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
- b. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu berwujud. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal. entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Total akumulasi realisasi belanja Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 1.366.985.147.629.00 dari anggaran Rp. 1.453.205.135.335.00 dengan persentase capaian sebesar 94.06%. Realiasasi tertinggi pada tahun 2020 sekitar 95.04% dari anggaran 400.916.860.781.00 dan realisasinya 381.030.698.046.00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.54.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

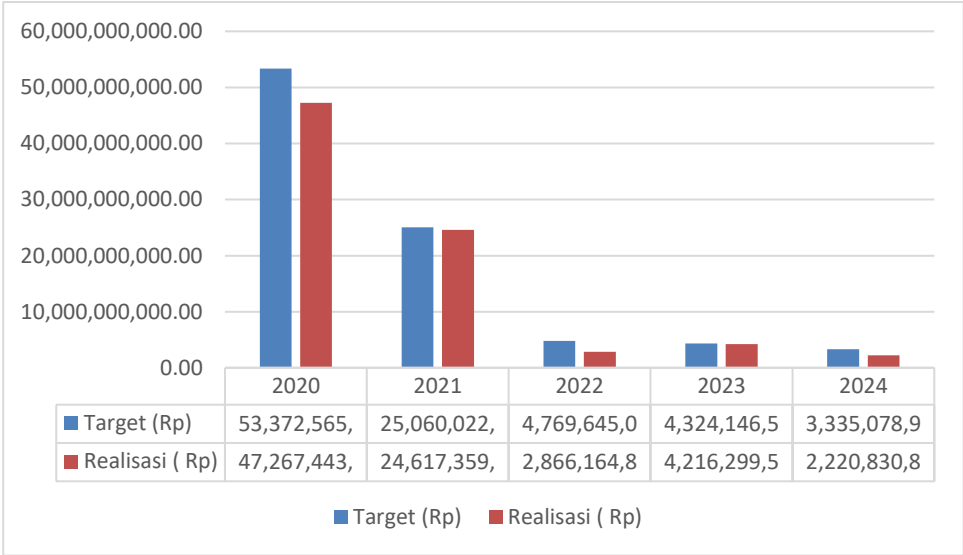
3) Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja tidak terduga Pemerintah kota Tasikmalaya lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.55.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2020-2024



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025. yang dikelola dalam SIPD.

2.2.1.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78.

Pembiayaan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PEMBIAYAAN DAERAH										
Penerimaan Pembiayaan	55.397.875.408,23	77.418.838.521,23	91.798.519.475,00	75.943.417.801,48	79.866.901.438,00	57.934.408.438,40	58.579.579.390,00	48.729.670.617,07	48.729.670.618,07	48.729.670.619,07
Pengeluaran Pembiayaan	24.158.320.000,00	63.370.526.654,00	61.500.000.000,00	43.985.876.490,00	47.500.000.000,00	25.562.006.620,00	21.500.000.000,00	18.975.761.675,00	15.000.000.000,00	10.891.269.135,00
Pembiayaan Netto	31.239.555.408,23	14.048.311.867,23	30.298.519.475,00	31.957.541.311,48	32.366.901.438,00	32.372.401.818,40	37.079.579.390,00	29.753.908.942,07	21.507.042.785,00	18.206.326.669,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	31.798.519.475,48	0,00	49.866.901.438,40	0,00	22.502.803.291,01	0,00	12.343.467.712,83	0,00	92.272.234.639,12

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

2.2.1.5. Rata-Rata Pertumbuhan APBD

Berdasarkan data-data yang tersaji pada tabel dan grafik perkembangan pendapatan. belanja dan pembiayaan daerah. maka secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.79.

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	Pertumbuhan	2022	Pertumbuhan	2023	Pertumbuhan	2024	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENDAPATAN	1.760.907.421.698,25	2.031.399.322.745,92	15,36%	1.902.443.766.699,29	-6,35%	1.698.776.143.136,64	-10,71%	1.792.496.242.472,06	5,52%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	314.307.017.302,25	445.335.320.092,92	41,69%	341.362.213.701,29	-23,35%	364.302.263.151,64	6,72%	351.777.584.751,06	-3,44%
PENDAPATAN TRANSFER	1.376.288.904.396,00	1.515.866.047.653,00	10,14%	1.475.175.680.746,00	-2,68%	1.334.473.879.985,00	-9,54%	1.440.718.657.721,00	7,96%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.311.500.000,00	70.197.955.000,00	-0,16%	85.905.872.252,00	22,38%	0,00	-100%	0,00	-

Uraian	2020	2021	Pertumbuhan	2022	Pertumbuhan	2023	Pertumbuhan	2024	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH PENDAPATAN	1.760.907.421.698,25	2.031.399.322.745,92	15,36%	1.902.443.766.699,29	-6,35%	1.698.776.143.136,64	-10,71%	1.792.496.242.472,06	5,52%
BELANJA	1.743.157.214.090,00	2.013.489.962.619,00	16%	1.912.313.365.226,68	-5%	1.716.186.584.365,88	-10%	1.718.430.334.502,64	0,13%
BELANJA OPERASI	1.373.967.595.766,00	1.607.841.905.055,00	17%	1.530.802.959.552,68	-5%	1.574.042.659.011,88	3%	1.568.749.095.445,64	-0,33%
BELANJA MODAL	321.922.174.799,00	381.030.698.046,00	18%	378.644.240.783,00	-0,62%	137.927.625.828,00	-64%	147.460.408.173,00	7%
BELANJA TIDAK TERDUGA	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	-48%	2.866.164.891,00	-88%	4.216.299.526,00	47%	2.220.830.884,00	-47%
TRANSFER	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA	1.743.157.214.090,00	2.013.489.962.619,00	16%	1.912.313.365.226,68	-5%	1.716.186.584.365,88	-10%	1.718.430.334.502,64	0,13%
Total Surplus/(Defisit)	17.750.207.608,25	17.909.360.126,92	0,90%	-9.869.598.527,39	-155%	-17.410.441.229,24	76%	74.065.907.969,42	-525%
PEMBIAYAAN	14.048.311.867,23	31.957.541.311,48	127%	32.372.401.818,40	1,29%	29.753.908.942,07	-8,09%	37.838.401.484,07	27%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.418.838.521,23	75.943.417.801,48	-2%	57.934.408.438,40	-24%	48.729.670.617,07	-16%	48.729.670.619,07	0,000004%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	63.370.526.654,00	43.985.876.490,00	-31%	25.562.006.620,00	-42%	18.975.761.675,00	-26%	10.891.269.135,00	-43%
PEMBIAYAAN NETTO	14.048.311.867,23	31.957.541.311,48	127%	32.372.401.818,40	1,29%	29.753.908.942,07	-8,08%	18.206.326.669,70	-39%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	31.798.519.475,48	49.866.901.438,40	57%	22.502.803.291,01	-55%	12.343.467.712,83	-45%	92.272.234.639,12	647%

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

2.2.1.6. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran. laporan arus kas. neraca. dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset. kewajiban (utang). dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset. kewajiban. dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan good government governance dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset. kewajiban. dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah. memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban. baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang. memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar. dan Dana Investasi. merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Untuk lebih mengetahui tentang perkembangan neraca daerah Kota Tasikmalaya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.80.

Neraca Pemerintah Kota Tasikmalaya Per 31 Desember Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
	A. Aset Lancar	98.046.772.631,08	125.295.318.407,18	146.859.382.282,84	212.475.713.405,59	272.410.136.484,12
	B. Investasi Jangka Panjang	34.953.987.143,02	34.859.850.972,03	42.852.775.978,57	44.885.407.185,87	44.247.578.344,51
	C. Aset Tetap	3.479.472.560.794,24	3.666.836.721.503,54	3.774.896.213.987,04	3.752.302.535.737,94	3.820.422.113.910,05
	D. Aset Lainnya	46.752.656.635,34	44.843.021.830,74	30.201.729.607,52	36.866.518.125,70	35.867.761.247,04
	JUMLAH ASET	3.659.225.977.203,68	3.871.834.912.713,49	4.005.012.781.075,97	4.048.347.794.308,10	4.172.947.589.985,72
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	81.576.043.736,00	35.377.114.505,00	115.476.835.511,83	96.390.637.511,00	126.298.539.523,00
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0
	JUMLAH	81.576.043.736,00	35.377.114.505,00	115.476.835.511,83	96.390.637.511,00	126.298.539.523,00
3	EKUITAS					
	Ekuitas	3.597.365.302.557,71	3.836.457.798.208,49	3.889.538.145.564,34	3.951.957.156.797,10	4.046.649.050.462,72
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN	3.678.941.346.293,71	3.871.834.912.713,49	4.005.012.781.075,97	4.048.347.794.333,10	4.172.947.589.985,72

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan aktiva atau aset Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 sebesar 3,34% yang menandakan bahwa jumlah aktiva/aset Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan di aset tetap dan aset lainnya.

Aset lancar yang terdiri atas kas, piutang, dan persediaan tetap selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 29,11%. Aset tetap yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan rata-rata peningkatannya mencapai 2,36%. Aset lainnya berupa tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tuntutan perbendaharaan dan aset lain-lain rata-rata penurunannya mencapai -6,41%. Kemudian Investasi jangka panjang berupa dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah daerah rata-rata meningkat sebesar 6,08%.

Prinsip neraca menunjukkan angka-angka yang secara keseluruhan menunjukkan keseimbangan prinsip dari tiga unsur yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam rumus persamaan ($\text{aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas dana}$) atau ($\text{aktiva} = \text{pasiva}$). Rata-rata pertumbuhan pasiva berupa kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024 sebesar 3,20%.

Rata-rata pertumbuhan kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 11,55% yang terdiri atas kewajiban/utang jangka pendek. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang terdiri atas ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi mencapai 2,99%.

Selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu $\text{aktiva lancar} / \text{kewajiban jangka pendek}$. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu $\text{aktiva lancar} - \text{persediaan} / \text{kewajiban jangka pendek}$. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya $\text{total hutang} / \text{total aset}$. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Rumusnya $\text{total hutang} / \text{total ekuitas}$. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.



Tabel 2.81.

Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Likuiditas					
	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	1,20	3,54	1,27	2,20	2,16
	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	1,63	4,53	1,64	2,67	2,51
2	Rasio Solvabilitas					
	Rasio total hutang terhadap total asset	2,23%	0,91%	2,88%	2,38%	3,03%
	Rasio hutang terhadap modal	2,27%	0,92%	2,97%	2,44%	3,12%

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya berfluktuasi. dari 1,20 pada tahun 2020 menjadi 2,16 pada tahun 2024. Pada tahun 2020. rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 1,20 artinya setiap Rp.1 kewajiban jangka pendek/hutang lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar Rp.1,20. Fluktuasi rasio cepat Pemerintah Kota Tasikmalaya polanya sama dengan rasio lancar. yang secara implisit berarti Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.

Sedangkan rasio solvabilitas terutama untuk rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2019 sampai dengan 2023 berkisar maksimal pada 0,04. Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2019. Untuk rasio hutang terhadap modal. memiliki rasio yang sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2019. rasio hutang terhadap modal sebesar 0.04 menunjukkan bahwa Rp 0.04 dari setiap Rp1.00 modal sendiri menjadi jaminan hutang. dengan kata lain menunjukkan tingginya modal sendiri dari Pemerintah Kota Tasikmalaya (dibelanjai pihak sendiri).

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah ini dapat diukur dari besar kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dengan keterbatasan kemampuan fiskal dan sumber-sumber pendapatan daerah. mengharuskan pemerintah daerah melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah. diantaranya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana-dana perimbangan dari pusat maupun provinsi. termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta aset daerah secara profesional guna menunjang pendapatan.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan

Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencakup Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat, dan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

1. Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) diantaranya melalui pemutakhiran data objek pajak;
2. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
3. Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan asli daerah antarlain melalui digitalisasi tata Kelola pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
5. Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
6. Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
2. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. dapat ditempuh melalui:
1. Penataan kelembagaan. penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 2. Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 4. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak. seperti pengembangan gerai/outlet. dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 6. Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 7. Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya. antara lain: pengelolaan PD secara profesional. peningkatan sarana/prasarana. kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah. serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
 8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 9. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah. terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 10. Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- b. Strategi pencapaian target Dana Transfer. dapat ditempuh melalui:
1. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya. serta bukan pajak lainnya;
 2. Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
 3. Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Transfer (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan mencakup Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat, dan Dana Insentif Daerah.

2.2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efisien. Efektif, proporsional, focus, transparan dan akuntabel, terutama belanja daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan dana kelurahan;
2. Alokasi belanja untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah yang sifatnya wajib diselenggarakan dalam 1 tahun penuh, diantaranya seperti biaya listrik, tenaga pengamanan dan kebersihan kantor, dan lain-lain;
3. Alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari: 6 bidang urusan yaitu bidang pendidikan. bidang kesehatan. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. bidang ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. dan bidang sosial;
4. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD melalui pendekatan Money Follow Programs, Holistik Tematik, Integratif dan Spasial;
5. Alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
6. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi.

2.2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja. sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan. arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik padatahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh RSUD dr. Soekardjo.

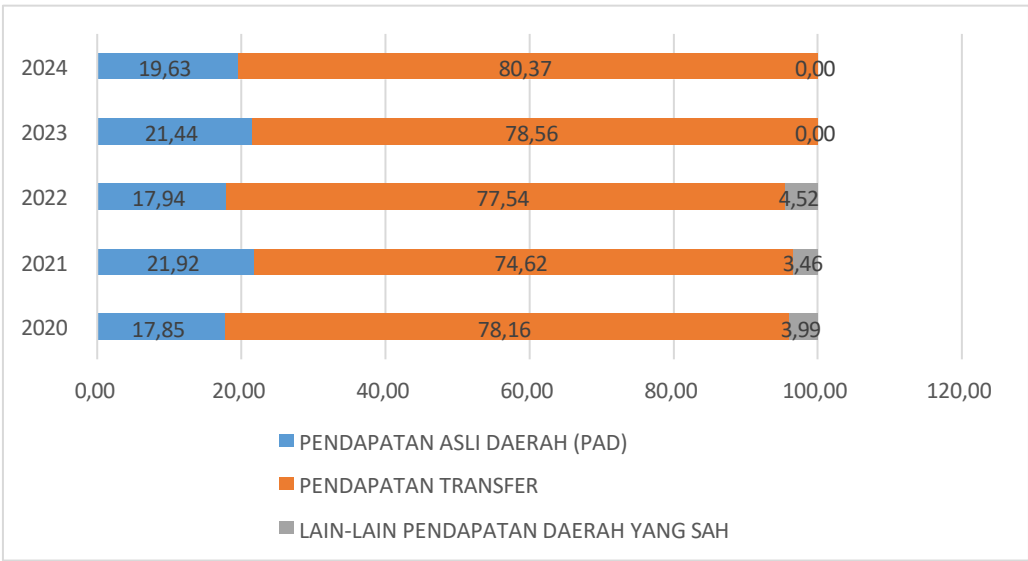
2.2.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan

Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2020-2024 Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Tasikmalaya. Ditinjau dari nilai atau besaran

perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya. pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.56.

Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

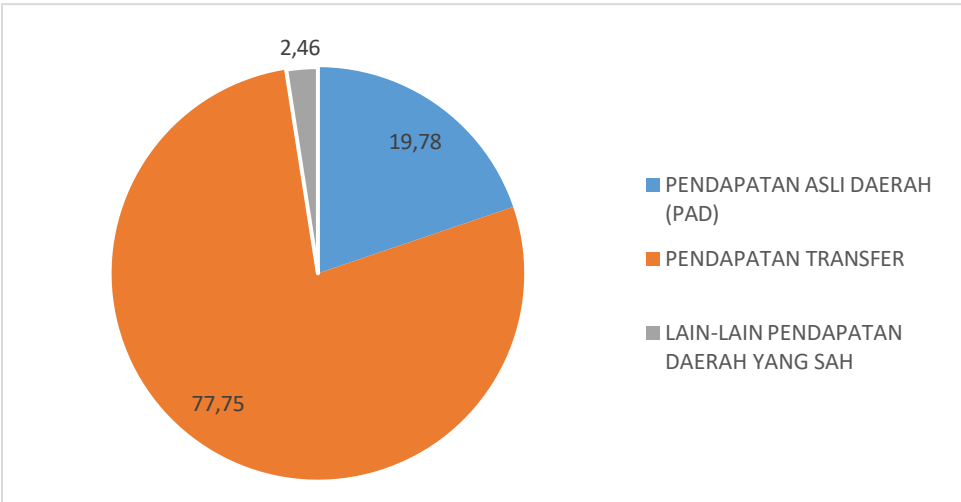


Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir. dari tahun 2020- 2024. Kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 19.78%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2.46%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Tasikmalaya yakni 77.75%. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.57.

Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2024



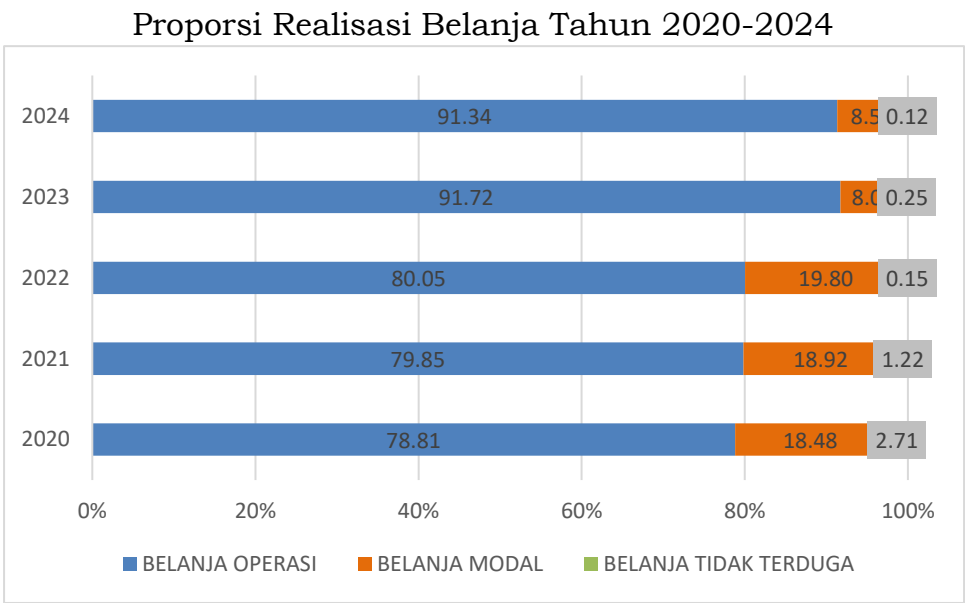
Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

2.2.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2020- 2024 terus mengalami peningkatan. hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Walaupun proporsi belanja modal dan belanja tidak terduga

besaran anggaran nya berfluktiatif dan anggaran lebih kecil dibanding Belanja Operasi dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.58.

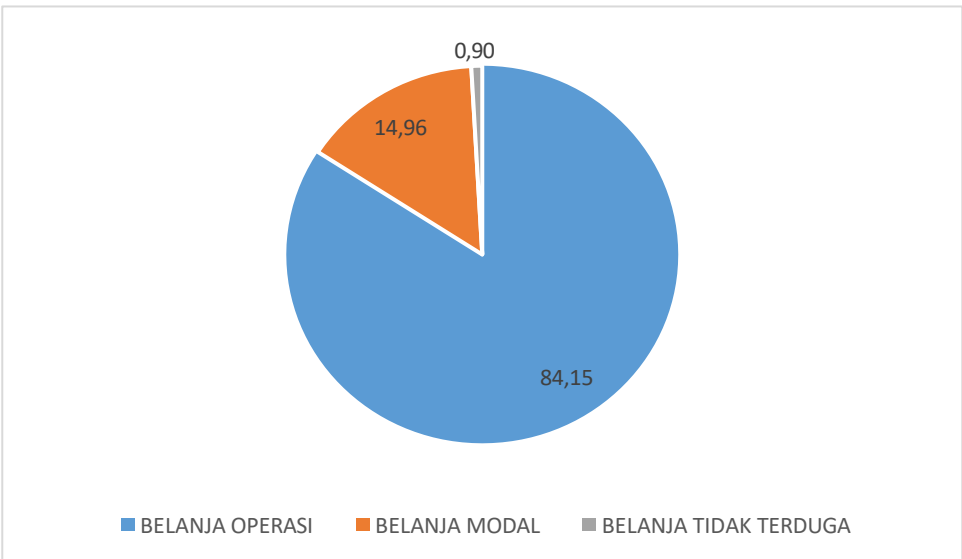


Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2020- 2024. Kontribusi keseluruhan Belanja Modal sebesar 14.96%; dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0.90%. Sementara itu Belanja Operasi memberi kontribusi terbesar yakni 84.15%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.59.

Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2020-2024



Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

2.2.2.6. Analisa Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2020 sampai 2024 dapat terbagi menjadi 3 fase yaitu:

- 1. Fase Stabil (2020-2021):
 - a. Keuangan daerah dalam kondisi cukup stabil dengan surplus yang meningkat sedikit.
 - b. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan relatif tinggi.
 - c. SILPA mengalami lonjakan signifikan.

2. Fase Krisis (2022-2023):

- a. Terjadi defisit besar, kemungkinan karena menurunnya penerimaan pembiayaan.
- b. Pengeluaran pembiayaan dikurangi drastis untuk menyesuaikan anggaran.
- c. SILPA turun drastis, menunjukkan keterbatasan anggaran daerah.

3. Fase Pemulihan (2024):

- a. Surplus mulai kembali, meskipun masih kecil.
- b. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan masih rendah, tetapi ada tanda pemulihan.
- c. SILPA meningkat, menunjukkan adanya cadangan keuangan yang mulai membaik.

Untuk lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.82.

Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Surplus/(Defisit)	17750207608,25	17.909.360.126,92	(9.869.598.527,39)	(17.410.441.229,24)	1.899.000.080,42
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.418.838.521,23	75.943.417.801,48	57.934.408.438,40	48.729.670.617,07	29.097.595.804,70
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.397.875.408,23	31.798.519.475,48	49.866.901.438,40	22.502.803.290,07	12.343.467.712,70
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	18.676.776.100,00	1.831.404.624,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	42.020.963.113,00	42.485.876.490,00	8.062.007.000,00	7.475.761.675,00	14.914.287.331,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		1.659.021.836,00	5.500.000,00	74.329.552,00	8.436.137,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	77.418.838.521,23	75.943.417.801,48	57.934.408.438,40	48.729.670.617,07	29.097.595.804,70
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	63.370.526.654,00	43.985.876.490,00	25.562.006.620,00	18.975.761.675,00	10.891.269.135,00
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	7.499.999.620,00	1.500.000.000,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	61.870.526.654,00	42.485.876.490,00	8.062.007.000,00	7.475.761.675,00	10.891.269.135,00
Pemberian pinjaman daerah					
Kegiatan lanjutan tahun lalu					
Pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu					
Jumlah Pengeluaran	63.370.526.654,00	43.985.876.490,00	25.562.006.620,00	18.975.761.675,00	10.891.269.135,00
Pembiayaan					
PEMBIAYAAN NETTO	14.048.311.867,23	31.957.541.311,48	32.372.401.818,40	29.753.908.942,07	18.206.326.669,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	31.798.519.475,48	49.866.901.438,40	22.502.803.291,01	12.343.467.712,83	20.105.326.750,12

Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya. 2025 yang dikelola dalam SIPD.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit. dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020-2021 Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai surplus riil yang stabil dengan sedikit peningkatan surplus sebesar 1%. Pada tahun 2022-2023 mengalami defisit yang cukup besar, akibat turunnya pendapatan dan meningkatnya belanja. Pada tahun 2024 keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai pulih dengan surplus sebesar Rp. 1,899,000,080.42.

2.2.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan. Optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 5 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan.

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk kepentingan perencanaan diperlukan perkiraan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2026-2030 sebagai berikut.

Tabel 2.83.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026-2030

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN	Rp 1.796.418.911.847,00	Rp 1.872.782.041.676,00	Rp 1.886.676.464.862,00	Rp 1.923.106.871.238,00	Rp 1.937.879.821.281,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 453.904.779.040,00	Rp 476.368.329.937,00	Rp 499.621.416.806,00	Rp 523.498.268.210,00	Rp 545.689.949.285,00
4.1.01.	Pajak Daerah	Rp 241.600.536.942,00	Rp 252.599.140.310,00	Rp 263.660.035.887,00	Rp 274.785.267.891,00	Rp 285.976.948.966,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	Rp 15.114.563.290,00	Rp 15.850.494.342,00	Rp 16.275.340.975,00	Rp 16.734.943.304,00	Rp 17.234.943.304,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 6.798.558.734,00	Rp 6.798.558.734,00	Rp 6.798.558.734,00	Rp 6.798.558.734,00	Rp 6.798.558.734,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 190.391.120.074,00	Rp 201.120.136.551,00	Rp 212.887.481.210,00	Rp 225.179.498.281,00	Rp 235.679.498.281,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1.342.514.132.807,00	Rp 1.396.413.711.739,00	Rp 1.387.055.048.056,00	Rp 1.399.608.603.028,00	Rp 1.392.189.871.996,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 1.171.597.874.000,00	Rp 1.200.997.874.000,00	Rp 1.213.597.874.000,00	Rp 1.224.597.874.000,00	Rp 1.215.597.874.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	Rp 1.171.597.874.000,00	Rp 1.200.997.874.000,00	Rp 1.213.597.874.000,00	Rp 1.224.597.874.000,00	Rp 1.215.597.874.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 76.515.266.000,00	Rp 81.515.266.000,00	Rp 86.515.266.000,00	Rp 91.515.266.000,00	Rp 96.515.266.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 810.415.621.000,00	Rp 816.415.621.000,00	Rp 822.415.621.000,00	Rp 828.415.621.000,00	Rp 834.415.621.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 28.123.089.000,00	Rp 46.523.089.000,00	Rp 48.123.089.000,00	Rp 48.123.089.000,00	Rp 28.123.089.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 256.543.898.000,00	Rp 256.543.898.000,00	Rp 256.543.898.000,00	Rp 256.543.898.000,00	Rp 256.543.898.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 170.916.258.807,00	Rp 195.415.837.739,00	Rp 173.457.174.056,00	Rp 175.010.729.028,00	Rp 176.591.997.996,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp 84.256.710.007,00	Rp 85.756.288.939,00	Rp 87.282.616.756,00	Rp 88.836.171.728,00	Rp 90.417.440.696,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	Rp 86.659.548.800,00	Rp 109.659.548.800,00	Rp 86.174.557.300,00	Rp 86.174.557.300,00	Rp 86.174.557.300,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -				
4.3.01.	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.796.418.911.847,00	Rp 1.872.782.041.676,00	Rp 1.886.676.464.862,00	Rp 1.923.106.871.238,00	Rp 1.937.879.821.281,00
5	BELANJA	Rp 1.812.159.519.609,60	Rp 1.885.458.484.409,60	Rp 1.897.636.442.909,60	Rp 1.934.021.392.909,60	Rp 1.949.697.242.909,60
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp 1.644.363.589.109,60	Rp 1.651.119.839.109,60	Rp 1.699.432.589.109,60	Rp 1.713.739.339.109,60	Rp 1.709.115.089.109,60
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp 796.866.225.283,00	Rp 796.866.225.283,00	Rp 796.866.225.283,00	Rp 796.866.225.283,00	Rp 796.866.225.283,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 777.318.463.826,60	Rp 783.074.713.826,60	Rp 811.327.463.826,60	Rp 814.634.213.826,60	Rp 820.009.963.826,60
5.1.03.	Belanja Bunga	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	Rp 1.314.700.000,00	Rp 1.314.700.000,00	Rp 1.314.700.000,00	Rp 1.314.700.000,00	Rp 1.314.700.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	Rp 64.624.200.000,00	Rp 64.624.200.000,00	Rp 84.624.200.000,00	Rp 94.624.200.000,00	Rp 84.624.200.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.940.000.000,00	Rp 4.940.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp 6.000.000.000,00	Rp 6.000.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	Rp 142.320.780.500,00	Rp 208.863.295.300,00	Rp 172.728.303.800,00	Rp 194.806.403.800,00	Rp 215.106.403.800,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 36.000.000.000,00	Rp 50.000.000.000,00	Rp 35.000.000.000,00	Rp 40.000.000.000,00	Rp 45.000.000.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 46.517.600.000,00	Rp 89.375.200.000,00	Rp 67.875.200.000,00	Rp 77.303.300.000,00	Rp 78.603.300.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 55.249.230.500,00	Rp 64.899.230.500,00	Rp 65.264.239.000,00	Rp 72.914.239.000,00	Rp 86.914.239.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 1.486.902.800,00	Rp 1.490.248.200,00	Rp 1.490.248.200,00	Rp 1.490.248.200,00	Rp 1.490.248.200,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 67.047.200,00	Rp 98.616.600,00	Rp 98.616.600,00	Rp 98.616.600,00	Rp 98.616.600,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 25.475.150.000,00	Rp 25.475.350.000,00	Rp 25.475.550.000,00	Rp 25.475.650.000,00	Rp 25.475.750.000,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	Rp 25.475.150.000,00	Rp 25.475.350.000,00	Rp 25.475.550.000,00	Rp 25.475.650.000,00	Rp 25.475.750.000,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					
	JUMLAH BELANJA	Rp 1.812.159.519.609,60	Rp 1.885.458.484.409,60	Rp 1.897.636.442.909,60	Rp 1.934.021.392.909,60	Rp 1.949.697.242.909,60
	Total Surplus/(Defisit)	-Rp 15.740.607.762,60	-Rp 12.676.442.733,60	-Rp 10.959.978.047,60	-Rp 10.914.521.671,60	-Rp 11.817.421.628,60
		0,87	0,67	0,58	0,56	0,61
6	PEMBIAYAAN					
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 32.240.607.762,60	Rp 44.176.442.733,60	Rp 42.459.978.047,60	Rp 27.414.521.671,60	Rp 28.317.421.628,60

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 17.240.607.762,60	Rp 29.176.442.733,60	Rp 27.459.978.047,60	Rp 12.414.521.671,60	Rp 13.317.421.628,60
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan					
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 32.240.607.762,60	Rp 44.176.442.733,60	Rp 42.459.978.047,60	Rp 27.414.521.671,60	Rp 28.317.421.628,60
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 16.500.000.000,00	Rp 31.500.000.000,00	Rp 31.500.000.000,00	Rp 16.500.000.000,00	Rp 16.500.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan		Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp -	Rp -
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 16.500.000.000,00	Rp 31.500.000.000,00	Rp 31.500.000.000,00	Rp 16.500.000.000,00	Rp 16.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 15.740.607.762,60	Rp 12.676.442.733,60	Rp 10.959.978.047,60	Rp 10.914.521.671,60	Rp 11.817.421.628,60
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Sumber: hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

2.2.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas. maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.84.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

No.	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Pendapatan	Rp1.796.418.911.847,00	Rp1.872.782.041.676,00	Rp1.886.676.464.862,00	Rp1.923.106.871.238,00	Rp1.937.879.821.281,00
2	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp17.240.607.762,60	Rp29.176.442.733,60	Rp27.459.978.047,60	Rp12.414.521.671,60	Rp13.317.421.628,60
	Total Penerimaan	Rp1.813.659.519.609,60	Rp1.901.958.484.409,60	Rp1.914.136.442.909,60	Rp1.935.521.392.909,60	Rp1.951.197.242.909,60
4	Belanja Pegawai	Rp796.866.225.283,00	Rp796.866.225.283,00	Rp796.866.225.283,00	Rp796.866.225.283,00	Rp796.866.225.283,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	Rp16.500.000.000,00	Rp31.500.000.000,00	Rp31.500.000.000,00	Rp16.500.000.000,00	Rp16.500.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	Rp1.000.293.294.326,60	Rp1.073.592.259.126,60	Rp1.085.770.217.626,60	Rp1.122.155.167.626,60	Rp1.137.831.017.626,60

Sumber: Bappelitbangda, 2025

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka memenuhi pelaksanaan urusan dan pelayanan perangkat daerah, memenuhi janji politik dan program unggulan kepala daerah serta pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Alokasi dana yang tersedia didistribusikan pada program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah masih bersifat indikatif dan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan.

2.2.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) diantaranya melalui pemutakhiran data objek pajak;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta POLRI dan Kejaksaan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;
- 7) Memperkuat promosi investasi guna mendorong investasi swasta yang berkelanjutan dengan memberikan fasilitas dan insentif yang memadai
- 8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak

- lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas. untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya antara lain:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. dapat ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan. penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - 2) Optimalisasi penyediaan data objek pajak melalui pemutakhiran objek pajak;
 - 3) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - 5) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 6) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak. seperti pengembangan gerai/outlet. dan kerjasama dengan pihak perbankan;
 - 7) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
 - 8) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya. antara lain: pengelolaan PD secara profesional. peningkatan sarana/prasarana,
 - 9) kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah. serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
 - 10) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 11) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah. terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
 - 12) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
- b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan. dapat ditempuh melalui:
 - 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya. serta bukan pajak lainnya
 - 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
 - 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk

mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. dapat ditempuh melalui:
 - 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak meteorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Pemenuhan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending);
5. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, Rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;;
6. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD.

2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Tasikmalaya dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Permasalahan Pembangunan Kota Tasikmalaya akan dijabarkan dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan Masyarakat, daya saing daerah, daya saing infrastruktur, daya saing investasi serta pelayanan publik.

2.3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Permasalahan pada aspek geografi antara lain:

1. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan rawan bencana;
3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan;
4. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
5. Daya tampung dan debit air danau/situ kurang optimal;
6. Peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang akibat pertumbuhan penduduk;
7. Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Aspek Demografi

Permasalahan pada aspek demografi antara lain:

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang perlu diantisipasi untuk persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup Masyarakat;
2. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang;
3. Urbanisasi penduduk ke Kawasan pusat perkotaan dapat meningkatkan kebutuhan akan sarana prasarana serta dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial;
4. Masih tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*).

2.3.1.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan pada kesejahteraan ekonomi antara lain:

1. Masih terdapat ketidakstabilan harga barang pokok dan penting;
2. Masih rendahnya daya beli Masyarakat;
3. Masih rendahnya indeks ketahanan pangan;
4. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap

guncangan eksternal;

5. Terbatasnya lapangan pekerjaan;
6. Belum optimalnya informasi ketenagakerjaan;
7. Masih terdapat kesenjangan ketersediaan peluang kerja dengan latar belakang pendidikan pencari kerja.

b. Kesejahteraan Sosial

Permasalahan pada kesejahteraan sosial antara lain:

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
2. Masih tingginya prevalensi stunting;
3. Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan belum optimal;
4. Belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas Kesehatan;
5. Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular;
6. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
7. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial;
8. Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PPKS;
9. Belum optimalnya pemberdayaan gender;
10. Masih rendahnya ketahanan keluarga;
11. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak.

c. Seni Budaya dan Olahraga

Permasalahan pada seni budaya dan olahraga antara lain:

1. Belum optimalnya upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian dan olahraga;
3. Masih kurangnya skala dan promosi event seni budaya dan olahraga;
4. Belum optimalnya pembangunan kepemudaan.

2.3.1.2. Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Permasalahan pada kemampuan ekonomi daerah antara lain:

1. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi;
3. Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro;
4. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
5. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro;
6. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro;
7. Rendahnya rasio wirausahaan (entrepreneurship);
8. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar rakyat;
9. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

10. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Belum optimalnya penataan pergudangan;
12. Belum optimalnya digitalisasi pasar rakyat;
13. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional;
14. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM);
15. Rendahnya akses pemasaran promosi dan daya saing IKM;
16. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM;
17. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan;
18. Rendahnya regenerasi pengrajin, petani dan pembudidaya muda;
19. Masih Rendahnya nilai tambah usaha pertanian dan perikanan;
20. Terdapat ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan banyak menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca ;
21. Belum optimalnya pengendalian harga produk pertanian dan perikanan;
22. Kurangnya akses dan implementasi terhadap teknologi informasi dan digitalisasi di sektor pertanian dan perikanan;
23. Rendahnya kualitas dan kontinuitas produk pertanian dan perikanan;
24. Belum optimalnya ketersediaan sumber air irigasi;
25. Kurangnya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian;
26. Belum optimalnya ketersediaan bahan pangan local;
27. Belum optimalnya akses pangan;
28. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;
29. Belum optimalnya pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan;
30. Perubahan fungsi lahan, terutama lahan hijau dan pertanian;
31. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang;
32. Masih rendahnya kolaborasi antar stakeholder pariwisata;
33. Belum optimalnya pengemasan industri kepariwisataan Kota Tasikmalaya;
34. Belum optimalnya/masih rendahnya penerapan pariwisata halal;
35. Masih minimnya informasi kepariwisataan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya.

2.3.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Permasalahan pada sumber daya manusia antara lain:

1. Belum optimalnya capaian rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah;
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan

maupun keahlian;

3. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja;
4. Belum optimalnya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja;
5. Masih rendahnya budaya literasi.

2.3.1.2.2. Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan pada Daya saing infrastruktur antara lain:

1. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses infrastruktur pelayanan dasar air minum;
2. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik;
3. Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh;
4. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
5. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber;
6. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah;
7. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan;
8. Belum optimalnya konektivitas dan kemantapan jalan;
9. Belum optimalnya pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase;
10. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran;
11. Belum tersedianya pelayanan transportasi massal yang terintegrasi.
12. Daya Saing Investasi
13. Permasalahan pada Daya saing investasi antara lain:
14. Belum optimalnya implementasi iklim investasi daerah;
15. Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi investasi daerah;
16. Belum optimalnya promosi investasi daerah;
17. Belum optimalnya pemanfaatan ruang untuk investasi daerah;
18. Belum optimalnya pelayanan dan pengendalian investasi daerah.

2.3.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pada pelayanan umum antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas;
2. Belum optimalnya pelayanan publik yang adaptif dan responsif;
3. belum optimalnya penggunaan TIK dalam layanan pemerintah;
4. Belum optimalnya sistem inovasi daerah;
5. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko;
6. SDM Aparatur belum sepenuhnya memenuhi kapasitas dan kapabilitas

sesuai dengan kebutuhan daerah;

7. Belum optimalnya penerapan manajemen talenta, reward and punishment dalam pengembangan karir ASN;
8. Belum optimalnya pemenuhan kualitas sarana dan prasarana serta kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
9. Belum optimalnya hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmalaya;
10. Belum kuatnya komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa;
11. Belum optimalnya sistem inovasi daerah;
12. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
13. Keamanan dan ketertiban umum belum sepenuhnya ditegakkan untuk seluruh masyarakat;
14. Belum optimalnya kehidupan demokrasi daerah;
15. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah.

2.3.2. Isu Strategis

2.3.2.1. Isu Global

Isu global yang berkembang akan mempengaruhi Pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa isu global tersebut antaralain :

1. Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.
2. Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo

– Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

3. Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.
4. Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.
5. Perdagangan internasional. Terjadinya perang dagang antara negara besar, terutama Amerika Serikat dan Cina membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan perdagangan AS yang lebih proteksionis membawa tantangan dan peluang bagi Indonesia. Tantangan tersebut ketidakpastian tarif, kehilangan Generalized System of Preferences (GSP), dan persaingan yang makin ketat. Namun, di lain pihak, Indonesia juga memiliki beberapa peluang, diantaranya: diversifikasi ekspor, masuknya relokasi investasi dari China, dan peningkatan daya saing industri nasional. Kondisi tersebut tentunya mempengaruhi perekonomian daerah (Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali), seperti penurunan ekspor dari sentra produksi daerah yang memiliki industri tekstil, furnitur, dan kerajinan yang diekspor ke AS, jika terjadi pembatasan perdagangan. Kebijakan AS terhadap China membuka peluang relokasi industri dari luar negeri ke daerah-daerah di Indonesia. Hal ini bisa menciptakan lapangan kerja baru dan pendapatan daerah meningkat, asalkan daerah siap dari segi infrastruktur dan SDM.
6. Urbanisasi dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan

baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

Selain isu-isu tersebut di atas, perlu diperhatikan juga isu *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang diadopsi oleh Indonesia sebagai komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan 17 tujuan dan 169 target, SDGs bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, hingga perlindungan lingkungan. Di Indonesia, implementasi SDGs telah tertuang dalam berbagai kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan strategi daerah yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan lokal. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil bekerjasama untuk memastikan setiap tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian SDGs di Indonesia sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan transparansi data, serta mempercepat investasi dalam sektor sosial dan lingkungan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai target SDGs secara lebih efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari SDGs dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan global dan mewujudkan visi negara yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Gambar 2.60.
Tujuan SDGs



Sumber : Bappelitbangda, Diolah 2025

SDGs dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu Tujuan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- 1) *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan): Menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia.
- 2) *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan): Mengakhiri kelaparan, mendukung pertanian, dan menyediakan pangan untuk semua.
- 3) *Good Health and Well-being* (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan):

- Menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi semua kelompok usia.
- 4) *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas): Menyediakan pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif.
 - 5) *Gender Equality* (Kesetaraan Gender): Menghapus diskriminasi berbasis gender dan memberdayakan perempuan.
 - 6) *Clean Water and Sanitation* (Air Bersih dan Sanitasi Layak): Menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang memadai.
 - 7) *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau): Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan modern.
 - 8) *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - 9) *Industry, Innovation, and Infrastructure* (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur): Mengembangkan infrastruktur yang tangguh serta mendorong inovasi.
 - 10) *Reduced Inequalities* (Mengurangi Kesenjangan): Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
 - 11) *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan): Mewujudkan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
 - 12) *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab): Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
 - 13) *Climate Action* (Aksi Iklim): Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
 - 14) *Life Below Water* (Kehidupan di Bawah Air): Melindungi dan mengelola ekosistem laut serta sumber daya kelautan.
 - 15) *Life on Land* (Kehidupan di Darat): Mengonservasi dan mendukung keberlanjutan ekosistem darat.
 - 16) *Peace, Justice, and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat): Mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif serta membangun kelembagaan yang efektif.
 - 17) *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan): Memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berupaya untuk membangun model pembangunan yang lebih berkelanjutan sejalan dengan Agenda 2030. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan berbagai mitra seperti PBB, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan sektor swasta, terus mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) melalui pendekatan terpadu dan berbasis inovasi. Salah satu arah kebijakan utama adalah transisi menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi dan semakin terintegrasi secara global. PBB, sebagai mitra strategis, memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pencapaian SDGs di tingkat nasional, regional, dan kabupaten, serta mendorong solusi pembangunan berbasis sains dan teknologi.

Komitmen global terhadap SDGs juga tercermin dalam janji untuk "tidak meninggalkan siapa pun" (*leave no one behind*), yang menempatkan perhatian utama pada kelompok masyarakat paling rentan, terpinggirkan, dan termiskin. Indonesia, dalam kerangka SDGs, berusaha memerangi diskriminasi, mengurangi ketimpangan sosial, serta mengatasi akar penyebab kemiskinan struktural. PBB berperan dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk membangun sistem tata kelola yang demokratis, inklusif, dan adil, di mana pembangunan ekonomi dan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

2.3.2.2.1. RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045 menargetkan pendapatan per kapita setara negara maju, yang berarti Indonesia harus mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan daya saing tinggi. Hal ini mengharuskan adanya reformasi struktural dalam berbagai sektor, khususnya dalam transformasi ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi. Selain itu, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi fokus utama, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan dalam distribusi pendapatan dan akses layanan dasar, khususnya di daerah tertinggal. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional menjadi aspek penting, di mana Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi, politik, dan sosial- budaya agar memiliki daya tawar lebih tinggi di tingkat global.

Daya saing sumber daya manusia (SDM) yang tinggi menjadi elemen kunci bagi keberhasilan transformasi ekonomi dan sosial Indonesia. Oleh karena itu, agenda peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, serta penguasaan teknologi digital menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan jangka panjang. Selain itu, menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Transformasi menuju ekonomi hijau dengan penerapan energi terbarukan dan praktik industri ramah lingkungan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

Terdapat tiga aspek transformasi utama sebagai pilar pembangunan jangka panjang, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial bertujuan membangun masyarakat yang inklusif dengan peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas. Transformasi ekonomi diarahkan pada percepatan industrialisasi, pengembangan ekonomi berbasis digital, dan peningkatan daya saing sektor manufaktur serta pertanian modern. Sedangkan transformasi tata kelola menekankan pada penguatan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Dalam landasan transformasi, supremasi hukum dan stabilitas nasional menjadi factor utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi juga menjadi fokus utama, di mana keberlanjutan lingkungan dan penguatan jati diri bangsa harus berjalan beriringan. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diarahkan pada pengurangan disparitas antarwilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sementara itu, peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan bertujuan memastikan efektivitas kebijakan lintas periode pemerintahan.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu menghadapi beberapa tantangan besar, seperti ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan, perlambatan produktivitas tenaga kerja, serta ketergantungan pada sektor berbasis komoditas. Oleh karena itu, strategi implementasi yang efektif harus mencakup percepatan digitalisasi ekonomi, penguatan SDM yang berorientasi pada industri kreatif dan teknologi tinggi, serta peningkatan daya saing sektor manufaktur berbasis inovasi.

Selain itu, perlu ada konsistensi dalam kebijakan pembangunan lintas pemerintahan agar setiap capaian dalam RPJPN 2025-2045 dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan fondasi yang kuat dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta ditopang oleh pembangunan infrastruktur berkualitas dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai status negara maju pada perayaan 100 tahun

kemerdekaan di tahun 2045.

2.3.2.2.2. RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN 2025-2029 menekankan lima sasaran utama pembangunan nasional, yaitu meningkatkan pendapatan per kapita menuju negara maju, meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission. Sasaran ini merupakan kelanjutan dari strategi jangka panjang RPJPN dan bertujuan untuk meletakkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam aspek ekonomi, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga 4,5-5,0 persen, serta kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026. Pencapaian ini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data, termasuk melalui metodologi penghitungan angka kemiskinan yang lebih akurat serta penerapan sistem perlindungan sosial adaptif. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan serta meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi kelompok rentan.

Dalam bidang sumber daya manusia, strategi peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama. Program wajib belajar 13 tahun, pengembangan sekolah unggul, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompetitif di era industri berbasis digital. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan serta akses terhadap pendidikan tinggi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing SDM nasional.

Pemerintah menetapkan empat strategi utama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, termasuk melalui Kartu Kesejahteraan yang mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial dan subsidi berbasis data tunggal sosial ekonomi. Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya melalui penguatan wirausaha dan penciptaan lapangan kerja dengan mekanisme Kartu Usaha untuk mendukung kemandirian ekonomi kelompok miskin.

Selanjutnya, strategi ketiga berfokus pada penguatan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah, dengan prioritas di 10 provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, serta lima provinsi di Papua yang masih menghadapi kesenjangan pembangunan. Intervensi dilakukan melalui peningkatan akses air minum, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta konektivitas infrastruktur untuk memastikan inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Strategi keempat melibatkan pendekatan lintas sektor dan optimalisasi pendampingan pembangunan serta kolaborasi multi-sektor, baik dengan sektor swasta maupun masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya komitmen keberpihakan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dalam memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif untuk pemberantasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama dalam mencapai pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Dalam RPJMN 2025-2029, strategi pertumbuhan ekonomi dirancang untuk menciptakan ekosistem yang mendukung investasi, inovasi,

dan keberlanjutan lingkungan. Sinergi antara peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang berorientasi pada inklusivitas menjadi faktor kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan.

Keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam strategi ini, dengan target menurunkan intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Pemerintah akan mempercepat transisi ke ekonomi hijau, termasuk dengan pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, kebijakan fiskal yang mendukung investasi hijau dan inovasi teknologi akan diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan mampu bersaing secara global.

2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu strategis Provinsi Jawa Barat yang dirumuskan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Green dan Blue Economy, Serta Pembangunan Inklusif. Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan green economy dan blue economy. Perekonomian yang bersih atau "clean economy" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "blue economy" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.
2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan,

pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

5. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.
6. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.
7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.
8. Keberlanjutan Penataan Ruang. Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarannya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

2.3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2025-2029, terdapat 7 Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis Kota Tasikmalaya, yaitu:

- 1) Adanya degradasi kualitas lingkungan serta tingginya intensitas bencana alam dan kebakaran;
- 2) Belum optimalnya sistem infrastruktur permukiman terutama pengolahan limbah dan pengurangan sampah;
- 3) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
- 4) Kurangnya daya saing lokal, pemanfaatan potensi wilayah, serta produktivitas ekonomi;

- 5) Belum meratanya upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- 6) Penyelenggaraan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan demokrasi belum berjalan optimal; serta
- 7) Penerapan Good Governance belum berjalan maksimal.

Secara keseluruhan, isu-isu strategis dalam dokumen KLHS menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya masih memiliki tantangan besar dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Pendekatan ini harus mencakup integrasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan inovasi. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang lebih efektif juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, sehingga Kota Tasikmalaya dapat tumbuh menjadi daerah yang lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

2.3.4. Isu Strategis Kota Tasikmalaya

Isu strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2024, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2029 yang meliputi isu global, nasional, dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, isu strategis Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029 dipetakan sebagai berikut.

Tabel 2.85.

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
Hutan Produksi; Pertanian; Sumber Daya Air	Aspek Geografi	Adanya degradasi kualitas lingkungan, serta tingginya intensitas bencana alam dan kebakaran	Aksi penanganan perubahan iklim (<i>Climate action</i>); Air bersih dan sanitasi layak (<i>Clean water and sanitation</i>); Kehidupan di Darat (<i>Life on Land</i>)	Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i> ; Peningkatan akses air minum dan sanitasi	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan; Keberlanjutan penataan ruang	Lingkungan hidup yang berkelanjutan
	1. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;					
	2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan rawan bencana;					
	3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan;					
	4. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;					
	5. Daya tampung dan debit air danau/situ kurang optimal;					
	6. Peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang akibat pertambahan penduduk;					
	7. Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH);					
	8. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber;					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	9. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah;					
	10. Kurang seimbangnya antara SDM pengangkut sampah dengan luas wilayah pengangkutan sampah dan jumlah penduduk;					
	11. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses infrastruktur pelayanan dasar air minum;					
	12. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik.					
Bonus Demografi; Pusat Pendidikan Priangan Timur; Pusat Pelayanan Kesehatan Priangan Timur	Aspek Demografi 1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang perlu diantisipasi untuk persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;	Belum meratanya upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan	Bonus Demografi	Daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, serta penguasaan teknologi digital	Daya saing sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas dan kesejahteraan sosial

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang; 3. Urbanisasi penduduk ke kawasan pusat perkotaan dapat meningkatkan kebutuhan akan sarana prasarana serta dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial; 4. Masih tingginya angka beban ketergantungan (<i>dependency ratio</i>).					
Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Timur-Pangandaran; Koperasi dan Usaha Mikro; Pusat Industri, Jasa dan Perdagangan	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Kesejahteraan Ekonomi)	Kurangnya daya saing lokal, pemanfaatan potensi wilayah, serta produktivitas ekonomi	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (<i>Decent work and economic growth</i>); Berkurangnya kesenjangan (<i>Reduced inequalities</i>); Kehidupan sehat dan sejahtera (<i>Good health and well-being</i>); Tanpa kemiskinan (<i>No poverty</i>); Tanpa kelaparan (<i>No hunger</i>)	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; Pengurangan kemiskinan; Ketimpangan; Percepatan industrialisasi; Pengembangan ekonomi berbasis digital.	ekonomi hijau dan ekonomi biru serta pembangunan inklusif	Produktivitas dan daya saing ekonomi daerah yang Inklusif dan berkeadilan
	1. Masih terdapat ketidakstabilan harga barang pokok dan penting;					
	2. Masih rendahnya daya beli masyarakat;					
	3. Masih rendahnya indeks ketahanan pangan;					
	4. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal;					
	5. Terbatasnya lapangan pekerjaan;					
	6. Belum optimalnya informasi ketenagakerjaan;					
	7. Masih terdapat kesenjangan ketersediaan peluang kerja					
	8. dengan latar belakang pendidikan pencari kerja.					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Sosial 1. Masih tingginya AKI/ AKB; 2. Masih tingginya prevalensi stunting; 3. Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan belum optimal; 4. Belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan; 5. Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular; 6. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 7. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; 8. Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS; 9. Belum optimalnya pemberdayaan gender; 10. Masih rendahnya ketahanan keluarga; 11. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak. Seni, Budaya dan Olahraga 12. Belum optimalnya upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan;	Belum meratanya upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan	Tanpa kelaparan (<i>No hunger</i>); Tanpa kemiskinan (<i>No poverty</i>); Kehidupan sehat dan sejahtera (<i>Good health and well-being</i>); Kesetaraan gender (<i>Gender equality</i>); Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (<i>Peace, justice, and strong institutions</i>); Kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>Partnerships for the goals</i>); Pendidikan Berkualitas (<i>Quality education</i>);	Daya saing SDM yang tinggi; Peningkatan akses dan layanan kesehatan berkualitas; Perlambatan produktivitas tenaga kerja	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia; SDM yang berkualitas dan inklusif	Sumber daya manusia yang berkualitas dan kesejahteraan sosial

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	13. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian dan olahraga;					
	14. Masih kurangnya skala dan promosi event seni budaya dan olahraga;					
	15. Belum optimalnya pembangunan kepemudaan;					
	Sumber Daya Manusia					
	16. Belum optimalnya capaian rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah;					
	17. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian;					
	18. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja;					
	19. Belum optimalnya <i>link and match</i> antara dunia Pendidikan dengan dunia kerja;					
KUMKM; Pusat Perdagangan dan Jasa di Priangan Timur.	20. Masih rendahnya budaya literasi.	Kurangnya daya saing lokal, pemanfaatan potensi wilayah, serta produktivitas ekonomi	Industri, inovasi dan infrastruktur (<i>Industry, innovation, and infrastructure</i>); Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (<i>Responsible consumption and production</i>)	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; Pengurangan kemiskinan; Percepatan industrialisasi; Pengembangan ekonomi berbasis digital; Peningkatan daya saing sektor manufaktur;	<i>Green</i> dan <i>blue economy</i> serta pembangunan inklusif	Produktivitas dan daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan
	Aspek Daya Saing Daerah (Kemampuan Ekonomi Daerah)					
	1. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;					
	2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi;					
	3. Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro;					
	4. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	5. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro; 6. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro; 7. Rendahnya rasio wirausahaan (enterpreneurship); 8. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar rakyat; 9. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 10. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 11. Belum optimalnya penataan pergudangan; 12. Belum optimalnya digitalisasi pasar rakyat; 13. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional; 14. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas IKM; 15. Rendahnya akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM; 16. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM; 17. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan; 18. Krisis regenerasi pengrajin, petani dan pembudidaya			Pertanian modern; Perlambatan produktivitas tenaga kerja; Ketergantungan pada sektor berbasis komoditas		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	muda;					
	19. Masih Rendahnya nilai tambah usaha pertanian dan perikanan;					
	20. Terdapat ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan banyak menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca (contoh: penggunaan pupuk dan pestisida anorganik);					
	21. Belum optimalnya pengendalian harga produk pertanian dan perikanan;					
	22. Kurangnya akses dan implementasi terhadap					
	23. Teknologi informasi dan digitalisasi di sektor pertanian dan perikanan;					
	24. Rendahnya kualitas dan kontinuitas produk pertanian dan perikanan;					
	25. Belum optimalnya ketersediaan sumber air irigasi;					
	26. Kurangnya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian;					
	27. Belum optimalnya ketersediaan bahan pangan lokal;					
	28. Belum optimalnya akses pangan;					
	29. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	30. Belum optimalnya pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan;					
	31. Perubahan Fungsi Lahan, terutama lahan hijau dan pertanian;					
	32. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang;					
	33. Masih rendahnya kolaborasi antar stakeholder pariwisata;					
	34. Belum optimalnya pengemasan industri kepariwisataan Kota Tasikmalaya;					
	35. Belum optimalnya/Masih rendahnya penerapan pariwisata halal;					
	36. Masih minimnya informasi kepariwisataan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya.					
Konektivitas Daerah; Sumber daya air dan irigasi.	Aspek Daya Saing Daerah (Daya Saing Infrastruktur)	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur	Kota dan pemukiman berkelanjutan (<i>Sustainable cities and communities</i>)	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan; Peningkatan konektivitas infrastruktur.	senjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata
	1. Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh;	perkotaan yang berkualitas;				
	2. Masih terdapat rumah tidak layak huni;	Belum optimalnya sistem infrastruktur permukiman,				
	3. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan;	terutama pengolahan limbah dan				

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	4. Belum optimalnya konektivitas dan kemantapan jalan;	pengurangan sampah.				
	5. Belum optimalnya pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase;					
	6. Belum optimalnya pengelolaan parkir;					
	7. Belum terpenuhinya penyediaan perlengkapan jalan;					
	8. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran;					
	9. Belum tersedianya pelayanan transportasi massal terintegrasi.					
	Aspek Daya Saing Daerah (Daya Saing Investasi)	Kurangnya daya saing lokal, pemanfaatan potensi wilayah, serta produktivitas ekonomi	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (<i>Industry, innovation, and infrastructure</i>)	1. Perlambatan produktivitas tenaga kerja; 2. Ketergantungan pada sektor berbasis komoditas.	Perekonomian kerakyatan yang kokoh, berdayasaing dan berkelanjutan	Produktivitas dan daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan
	1. Belum optimalnya implementasi iklim investasi daerah;					
	2. Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi investasi daerah;					
	3. Belum optimalnya promosi investasi daerah;					
	4. Belum optimalnya pemanfaatan ruang untuk investasi daerah;					
	5. Belum optimalnya pelayanan dan pengendalian investasi daerah.					
SDM	Aspek Pelayanan Umum	Penerapan <i>Good</i>	Perdamaian,	Penguatan birokrasi	Salitas tata kelola	Tata kelola

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
Aparatur; Pemanfaatan TIK.	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas;	<i>Governance</i> belum berjalan maksimal; Penyelenggaraan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan demokrasi belum berjalan optimal.	Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>Peace, justice, and strong institutions</i>); Kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>Partnerships for the goals</i>).	yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan global	pemerintahan	pemerintahan yang baik dan bersih
	2. Belum optimalnya pelayanan publik yang adaptif dan responsif;					
	3. Belum optimalnya penggunaan TIK dalam layanan pemerintah;					
	4. Belum optimalnya system inovasi daerah;					
	5. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko;					
	6. SDM Aparatur belum sepenuhnya memenuhi kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan daerah;					
	7. Belum optimalnya penerapan penerapan manajemen talenta, reward and punishment dalam pengembangan karir ASN;					
	8. Belum optimalnya pemenuhan kualitas sarana dan prasarana serta kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;					
	9. Belum optimalnya hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmlaya;					

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah Kota Tasikmalaya
			Global	Nasional	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
	10. Belum kuatnya komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa;					
	11. Belum optimalnya sistem inovasi daerah;					
	12. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);					
	13. Keamanan dan ketertiban umum belum sepenuhnya ditegakkan untuk seluruh masyarakat;					
	14. Belum optimalnya kehidupan demokrasi daerah;					
	15. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah.					

Sumber : Bappelitbangda, Diolah 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka Isu Strategis Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial

Pertambahan penduduk yang diproyeksikan akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Kota Tasikmalaya untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan sosial bagi penduduk untuk menyediakan pelayanan yang inklusif. Untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan diperlukan karakter sosial budaya yang terbuka, ramah dan saling menghargai, religius serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kota Tasikmalaya seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, energi, perumahan dan pemukiman serta infrastuktur informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk pemerataan pembangunan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar terutama di wilayah sub urban. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkeadilan

Produktifitas ekonomi dan daya saing daerah merupakan perekonomian daerah yang produktif berbasis industry, jasa dan perdagangan yang dapat bertahan dari hambatan dan tantangan ekonomi global dan nasional serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. Selain itu perekonomian harus memperhatikan keberkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih dan pengarusutamaan green economy. Perekonomian yang bersih atau "clean economy" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Sedangkan pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, atau yang sering disebut dengan good governance dan clean governance, merupakan konsep yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi karena tata kelola yang buruk dapat menyebabkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga pengawasan, maupun masyarakat. Hal ini juga membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kota Tasikmalaya seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, energi, perumahan dan

pemukiman serta infrastruktur informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk pemerataan pembangunan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar terutama di wilayah sub urban. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

5. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan wilayah dalam jangka panjang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan meningkatnya kebutuhan lahan akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pengendaliannya diantaranya pemanfaatan ruang menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045

3.1.1. Dasar Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah tersebut dirumuskan dalam misi Presiden Republik Indonesia atau Asta Cita yang dilaksanakan secara transformatif di berbagai bidang.

Transformasi Pembangunan bukan hanya pada level pusat, namun juga pada pembangunan daerah. Transformasi Pembangunan daerah juga menyasar seluruh aspek mulai Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola. Pembangunan daerah merupakan Pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan nasional.

Tema pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 “Penguatan Transformasi/Fondasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola” yang merupakan bentuk keselarasan dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan pembangunan merupakan seluruh upaya untuk mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya 2045 sebagai Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Dengan menggabungkan semua elemen di atas, visi Kota Tasikmalaya menggambarkan kota yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, moral, dan budaya untuk mencapai kota yang modern, tangguh dan inovatif, dengan kondisi masyarakat yang aman, sentosa, adil, dan makmur serta pembangunan yang memanfaatkan sumber daya secara bijak, pelestarian lingkungan, dan keseimbangan ekonomi-sosial yang ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.

3.1.2. Visi Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya terpilih, serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis. Visi Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi arah pembangunan sampai dengan lima tahun mendatang dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan transformasi/fondasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Visi Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah:

“Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan yang Religius, Inovatif, Maju dan Berkelanjutan”

Visi ini telah selaras dengan Visi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.1.

Keselarasan Visi Kota Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia



Sumber: RPJMN, Ranhir RPJMD Prov.Jawa Barat dan Ranhir RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan	: Tasikmalaya yang perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh sektor industri kecil dan menengah, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian.
Religius	: Masyarakat Kota Tasikmalaya terkondisikan secara psikologis dan sosiologis, dengan dasar nilai keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dalam pembangunan secara fisik yang terintegrasi dengan pembangunan kesehatan mental dan ketangguhan karakter.
Inovatif	: Masyarakat Kota Tasikmalaya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan orisinal, yang mencakup berbagai aspek meliputi produk, layanan, proses, atau metode kerja yang berbeda dari yang telah ada dari sebelumnya dan memberikan nilai tambah, berpikir di luar kebiasaan, menemukan solusi kreatif untuk memecahkan masalah dan terus mencari cara untuk meningkatkan sesuatu.
Maju	: Kota Tasikmalaya yang berdaya, modern, tangguh, dan adil dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, maupun kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta mampu bersaing dalam aspek- aspek tersebut dalam wilayah yang lebih luas dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya.
Berkelanjutan	: Kota Tasikmalaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, serta memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya secara bijak.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian dengan kondisi masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang inovatif, berdaya saing, modern, tangguh, adil dan seimbang dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, politik, sosial dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

3.1.3. Misi Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Visi Kota Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan yang Religius, Inovatif, Maju dan Berkelanjutan diterjemahkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan, sebagaimana berikut:

Misi Kesatu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya.

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan sosial yang religius, menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang luhur.

Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah Kota Tasikmalaya yang berkeadilan, kuat, berdaya saing, memperhatikan nilai-nilai religius dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan serapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing daerah di tingkat regional, nasional, dan global. Pembangunan ekonomi berbasis pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditunjang oleh lembaga koperasi, penerapan ekonomi syariah, peningkatan investasi daerah dan kerja sama serta kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu, dilakukan upaya mendorong kewirausahaan lokal untuk memantapkan posisi Kota Tasikmalaya sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Priangan Timur dengan berbasis pada industri, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian.

Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berkomitmen pada penegakan hukum, kesetaraan dan responsif yang ditunjang oleh peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur yang profesional, adaptif dan inovatif, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta didukung oleh sarana prasarana pemerintahan yang representatif dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi.



Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan disusun sebagai dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tasikmalaya, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta isu-isu strategis pembangunan. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya terpilih untuk menghasilkan rumusan pembangunan Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2029.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, dijabarkan ke dalam sasaran. Dimana sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome dan impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD merupakan terjemahan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya terpilih, serta sasaran pokok RPJPD Kota Tasikmalaya. Sehingga sasaran pembangunan jangka menengah ini mampu mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya.

3.2.1.2. Indikasi Perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2025-2029

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Tasikmalaya, ditandai dengan indikator berikut:

Tabel 3.1.
Indikator Sasaran Visi Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2030

No.	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	PDRB per Kapita (Rp. Juta/Kapita)	39,50-41,61	42,66-43,63	45,24-46,99	47,95-50,75	50,79-54,94	53,93-60,14
2.	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	13,03	12,95	12,87	12,78	12,70	12,60
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,20-10,16	8,67-9,47	7,52-8,49	6,12-7,33	4,50-6,07	3,99-5,46
4.	Rasio Gini (Poin)	0,348-0,405	0,347-0,404	0,346-0,403	0,345-0,402	0,344-0,401	0,343-0,400
5.	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,43-6,17	5,45-6,18	5,46-6,19	5,50-7,57	5,68-7,89	5,73-6,23
7.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	76,28	76,99	77,61	78,20	78,79	79,41
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ Eq/Miliar)	2,17	2,36	2,56	2,79	3,16	3,42
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	61,62	61,79	61,96	62,13	62,30	62,50

Sumber : RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045,Target Imperatif Indikator Makro Kab./ Kota di Jawa Barat.

3.2.1.3. Pendekatan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya menggunakan pendekatan holistik, tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan

keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategis yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang didukung oleh IKU Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil perumusan, diperoleh bahwa penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 terdiri 5 (lima) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator serta target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3.2.2. Uraian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Misi ke-1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya

Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan dan 5 sasaran, yaitu:

Tujuan 1 (T1): Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya, dengan sasaran:

- Sasaran 1 (S1) : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- Sasaran 2 (S2) : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata;
- Sasaran 3 (S3) : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- Sasaran 4 (S4) : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan Berbudaya
- Sasaran 5 (S5) : Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ke-2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan

Misi ke-2 mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran, yaitu:

Tujuan 2 (T2): Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan, dengan sasaran:

- Sasaran 6 (S6) : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing;
- Sasaran 7 (S7) : Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
- Sasaran 8 (S8) : Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja.

Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu:

Tujuan 3 (T3): Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif, dengan sasaran:

- Sasaran 9 (S9) : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih;

Sasaran 10 (S10) : Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik.

Misi ke-4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata

Misi ke-4 mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran, yaitu:

Tujuan 4 (T4): Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif, dengan sasaran:

Sasaran 11 (S11) : Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif.

Misi ke-5 : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu:

Tujuan 5 (T5): Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran:

Sasaran 12 (S12) : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Sasaran 13 (S13) : Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim.

Secara lebih rinci tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya lengkap dengan indikator kinerja tujuan/sasaran disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tasikmalaya

VISI : KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI KOTA INDUSTRI, JASA DAN PERDAGANGAN YANG RELIGIUS, INOVATIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target (Tahun)					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya		IT1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,03	76,28	76,99	77,61	78,20	78,79	79,41
			S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,03	76,28	76,99	77,61	78,20	78,79	79,41
				IS2. Umur Harapan Hidup	Tahun	75,31	75,44	75,63	75,81	75,99	76,18	76,36
				IS3. Prevalensi Stunting	%	19,60	18,31	17,02	15,73	14,44	13,15	11,86
				IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	102,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			S2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	IS5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,63	9,67	9,79	9,87	9,98	10,19	10,28
				IS6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50	13,52	13,56	13,60	13,64	13,68	13,72
			S.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	IS7. Tingkat Kemiskinan	%	11,10	9,20-10,16	8,67-9,47	7,52-8,49	6,12-7,33	4,50-6,07	3,99-5,46
			S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	96,53	97,73	97,84	97,96	98,07	98,18	98,30
				IS9. Indeks Kerukunan Beragama	Poin	N/A	70,00	70,37	70,74	71,11	71,48	71,85
				IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	30,00	32,05	34,17	38,33	42,50	44,57	46,67

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target (Tahun)					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IS11. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	60,51	61,21	61,91	62,61	63,31	64,01	64,71
				IS12. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,354	0,319	0,284	0,249	0,214	0,179	0,144
				IS13. Indeks Pembangunan Pemuda	%	29,01	29,02	29,11	29,15	29,22	29,28	29,35
2.	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan		IT2. Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,96	3,97	3,98	3,99	4,00	4,01	4,02
				IT3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,43-6,17	5,45-6,18	5,46-6,19	5,50-7,57	5,68-7,89	5,73-6,23
			S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,43-6,17	5,45-6,18	5,46-6,19	5,50-7,57	5,68-7,89	5,73-6,23
				IS15. Indeks Gini	Poin	0,359	0,348-0,405	0,347-0,404	0,346-0,403	0,345-0,402	0,344-0,401	0,343-0,400
				IS16. Inflasi	%	1,94	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00
				IS17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	32,43	32,61	35,23	36,65	38,39	40,22	42,13
				IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	79,35	79,40	79,45	79,50	79,55	79,59	79,64
				IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	35,46	36,15	36,84	37,54	38,23	38,92	39,61
			S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	IS20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5,31	4,61	4,44	4,24	4,01	3,75	3,42
			S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	30,65	32,79	32,85	32,92	33,00	33,10	33,21
				IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	5,97-6,49	5,76 - 6,34	5,49-5,89	5,45-5,93	5,40-5,96	5,32-5,69

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target (Tahun)					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif		IT4. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	85,16	86,53	87,88	89,09	90,18	91,16	92,04
			S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	IS23. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	85,16	86,53	87,88	89,09	90,18	91,16	92,04
				IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	5,80	5,81	5,82	5,82	5,83	5,83	5,84
			S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	IS25. Indeks Inovasi Daerah	Poin	49,36	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
4.	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif		IT5. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	59,05	60,40	61,19	62,02	62,91	63,86	64,83
			S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	IS26. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	59,05	60,40	61,19	62,02	62,91	63,86	64,83
5.	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan		IT6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	58,52	61,62	61,79	61,96	62,13	62,30	62,50
			S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	58,52	61,62	61,79	61,96	62,13	62,30	62,50
			S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar	1,05	2,17	2,36	2,56	2,79	3,16	3,42
				IS29. Indeks Risiko Bencana	Poin	97,13	93,61	90,10	86,58	83,06	79,54	76,03

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda berdasar Target Imperatif dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029

3.3.1.1. Arah Kebijakan Berdasarkan Kerangka Kerja Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama di Kota Tasikmalaya

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya dijabarkan ke dalam rencana komprehensif melalui strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya merupakan rumusan kerangka pikir isu strategi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045. Arah kebijakan selanjutnya diuraikan ke dalam strategis sebagai rencana tindakan komprehensif dan upaya dari pelaksanaan kebijakan, untuk kemudian diimplementasikan menjadi program prioritas pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045 Tahap Pertama (Tahun 2025-2029), sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.3.
Tema Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045.

Arah kebijakan pada tahap I RPJPD ini adalah Penguatan Transformasi/Fondasi merupakan penguatan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang. Penguatan tahap ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan transformasi ini meliputi:

1. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial;
2. Penguatan tata kelola sumber daya alam, pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten, serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif;
4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah;
5. Perlindungan kebudayaan lokal dan optimalisasi tata kelola perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara merata;
8. Penguatan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata Kelola

pemerintahan yang berkelanjutan.

Upaya Penguatan Transformasi/Fondasi dilaksanakan dengan mengacu pada pentahapan 8 (delapan) Misi RPJPD Kota Tasikmalaya tahap pertama sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial.
2. Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam, Pembentukan SDM Tenaga Kerja yang Kompeten, serta Penciptaan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.
4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah.
5. Perlindungan kebudayaan lokal dan optimalisasi tata kelola perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
6. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah.
7. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara merata.
8. Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

3.3.1.2. Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dengan berpedoman pada pentahapan pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (Tahun 2025-2029) serta mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya dalam rangka pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tasikmalaya

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya				
T.1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya	S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	Penguatan sistem kesehatan masyarakat	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
				2. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
				3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
				4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan
				5. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui deteksi dini/ <i>screening</i> , pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama
				6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan
	S.2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	Transformasi sistem pendidikan	1. Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui pendidikan formal maupun non formal dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya
				2. Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren
				3. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pendidikan formal maupun non formal yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai
				4. Pemerataan dan peningkatan sertifikasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
				5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter
				6. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital
	S.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
				2. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi
				3. Peningkatan konvergensi/intergrasi program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan
				4. Pengembangan sistem tata kelola basis data terpadu
	S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Perlindungan kebudayaan lokal dan optimalisasi tata kelola perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.	Peningkatan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila
				2. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam kelestarian serta pemajuan budaya
				3. Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
				4. Peningkatan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa
	S.5. Meningkatnya kualitas	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan	5. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan,

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
	keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		gender, perlindungan anak dan peningkatan partisipasi aktif pemuda	pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 6. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan; Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 7. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga 8. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan				
T.2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan	S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.	Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	1. Pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan industri kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan dan kewilayahan 2. Penguatan proses bisnis usaha mikro dan industri kecil melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna 4. Penataan dan penyiapan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, koperasi dan asuransi

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
				5. Penguatan tata kelola perdagangan serta dukungan terhadap produk unggulan, pusat inkubasi bisnis, pemasaran terpadu, dan perlindungan konsumen 6. Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri 7. Penguatan infrastruktur distribusi perdagangan dan logistik 8. Pengendalian perdagangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok 9. Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan melalui <i>e-commerce</i> dan digital marketing 10. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi regional 11. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri dan produk unggulan daerah 12. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan 13. Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan 14. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata olahraga (<i>sport tourism</i>) maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
				15.Peningkatan implementasi perekonomian dan keuangan syariah 16.Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan 17.Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian 18.Pengendalian inflasi daerah 19.Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global 20.Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD
	S.7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan daerah	1. Penyediaan benih, pupuk, instrumen pengendali hama, obat, pakan, alat dan mesin pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan 2. Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitasnya 3. Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, kualitas serta daya saing produk pertanian dan perikanan 4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
				5. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan regional 6. Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan
	S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Penguatan tata kelola sumber daya alam, pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten, serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan	Peningkatan penanaman modal serta perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan iklim investasi, kemudahan bekerja dan berusaha yang mempertimbangkan link and match Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 2. Penyediaan database dan roadmap investasi, fasilitasi promosi investasi dan kerjasama investasi berbasis digital 3. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling (<i>vocational</i>) 4. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih				
T.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif	S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.	Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 2. Peningkatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel 3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, serta kesejahteraan ASN daerah berdasarkan

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
				capaian kinerja
				4. Penataan dan peningkatan kualitas regulasi daerah
				5. Penguatan kelembagaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat
				6. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan nasional
				7. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan <i>blended finance</i>
				8. Peningkatan bangunan Gedung dan sarana pemerintahan
				9. Peningkatan kerja sama daerah, regional dan internasional
	S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan adaptif.	Peningkatan pemanfaaan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam pelayanan publik	10.Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital dalam rangka perwujudan <i>smart city</i>
				11.Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan
				12. Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata				
T.4. Terwujudnya	S.11. Meningkatnya	Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah.	Pemerataan dan peningkatan penyediaan	1. Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan RTRW Kota Tasikmalaya

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman secara merata	sarana dan prasarana infrastruktur	2. Peningkatan infrastruktur sumber daya air, meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota
				3. Penyediaan drainase perkotaan yang terintegrasi
				4. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik
				5. Peningkatan elektrifikasi dan telekomunikasi
				6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur
			Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau	1. Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, rintisan pembentukan BUMD PDAM, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air
				2. Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, perluasan IPLT, penyediaan sarana dan prasarana IPLT, penyediaan sarana pengangkut lumpur tinja, perencanaan pengelolaan air limbah terjadwal
				3. Peningkatan prasarana limbah domestik, industri dan medis serta penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga
				4. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat
				5. Penanganan kawasan kumuh
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan				
T.5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup
				2. Peningkatan pengelolaan sampah terpadu di hulu dan hilir berbasis teknologi yang ramah lingkungan

Tahun 2025-2029		Pentahapan Misi RPJPD Tahap I (2025-2029)	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran			
				3. Transformasi pengelolaan persampahan meliputi: pembangunan prasarana persampahan, penyediaan sarana persampahan dan kerja sama pengelolaan persampahan 4. Peningkatan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang 5. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan mengutamakan pemanfaatan secara efisien dan ramah lingkungan 6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
	S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Peningkatan mitigasi bencana dan resilience terhadap iklim	1. Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim 2. Pembangunan ekonomi hijau melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat energi dan berbasis pada energi terbarukan 3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air 4. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan diantaranya infrastruktur yang tahan iklim, <i>resilience</i> terhadap bencana, dan ramah lingkungan 5. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan Pembangunan nasional maka harus ada keselarasan termasuk keselarasan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Tasikmalaya dengan strategi dan arah kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4.
Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kota Tasikmalaya

RPJMN		RPJMD Provinsi Jawa Barat		RPJMD Kota Tasikmalaya	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan
Strategi penurunan tingkat kemiskinan	Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)	Menjamin pemenuhan dan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
	Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap kelompok rentan	Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	Menyediakan pelayanan kesehatan prima dan sarana/ prasarana layanan kesehatan bagi lansia dan kelompok rentan lainnya	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
Strategi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Layanan Dasar				
	Pelayanan Kesehatan	Peningkatkan penuntasan dan pencegahan stunting	Meningkatkan upaya penuntasan dan pencegahan stunting	Penguatan sistem kesehatan masyarakat	Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
		Peningkatan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan serta penyediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan pelayanan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan	Penguatan sistem kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Peningkatan jumlah, kualitas dan pemerataan tenaga medis serta tenaga kesehatan	a. Melaksanakan penataan dan redistribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk daerah-daerah sulit/ terpencil b. Menyediakan beasiswa bagi dokter spesialis	Penguatan sistem kesehatan masyarakat	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
		Pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui deteksi dini/ <i>scerening</i> pemberdayaan	Memfaatkan nilai - nilai budaya dan integrasi kearifan lokal dalam program kesehatan	Penguatan sistem kesehatan masyarakat	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui deteksi dini/ <i>screening</i> , pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan



RPJMN		RPJMD Provinsi Jawa Barat		RPJMD Kota Tasikmalaya	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya			pendekatan budaya dan agama
	Jaminan gizi	Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	Meningkatnya akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	Penguatan sistem kesehatan masyarakat	Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
	PAUDHI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif)	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 Tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA	Transformasi sistem pendidikan	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pendidikan formal maupun non formal yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai
	Pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA	Transformasi sistem pendidikan	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pendidikan formal maupun non formal yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai
	Perlindungan Sosial	Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	Menyediakan pelayanan kesehatan prima dan sarana/ prasarana layanan kesehatan bagi lansia dan kelompok rentan lainnya	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
	Perlindungan dan kekerasan dan perlakuan salah	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan dan pemuda melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan perlindungan dari kekerasan termasuk	a. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan dan pemuda b. Mengoptimalkan pengasuhan dan perawatan, pembentukan	Peningkatan ketahanan Keluarga, Pengarusutamaan gender, Perlindungan Anak dan peningkatan partisipasi aktif pemuda.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan



RPJMN		RPJMD Provinsi Jawa Barat		RPJMD Kota Tasikmalaya	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan
		perkawinan anak dan perdagangan orang	resiliensi dan perlindungagn dari kekerasan termasuk		perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
2. Modal Manusia					
Ilmu pengetahuan dan IPTEK dan teknologi		Peningkatan kapasitas SDM, pengembangan ekosistem berjenjang dan penyiapan spesifikasi keahlian unggulan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global	Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global
Literasi dan kecakapan hidup		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Meningkatkan minat baca dan literasi digital bagi seluruh masyarakat	Transformasi Sistem Pendidikan	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital
Pembudayaan dan prestasi olahraga				Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan peningkatan partisipasi aktif pemuda.	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga
3. Modal sosial Budaya					
Agama		Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama	Meningkatkan toleransi, kesetaraan,	Peningkatan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
Kebudayaan		Terbentuknya individu beragama beretika dan berbudaya	dan kerja sama antar etnis dan umat	Peningkatan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila
		Terbentuknya individu beragama beretika dan berbudaya	Melestarikan budaya lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Peningkatan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam kelestarian serta pemajuan budaya
Keluarga dan pengasuhan		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan dan pemuda melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan perlindungagn dari kekerasan termasuk	a. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan dan pemuda b. Mengoptimalkan pengasuhan dan perawatan, pembentukan	Peningkatan ketahanan Keluarga, Pengarusutamaan gender, Perlindungan Anak dan peningkatan partisipasi aktif pemuda.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan



RPJMN		RPJMD Provinsi Jawa Barat		RPJMD Kota Tasikmalaya	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan
		perkawinan anak dan perdagangan orang	resiliensi perkawinan anak dan perdagangan orang dan perlindungan dari kekerasan		perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan
Strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan	Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan	Penyediaan instrumen pengendalian hama, pupuk obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Meningkatkan penyediaan instrumen pengendalian hama, pupuk, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Penyediaan benih, pupuk, instrumen pengendali hama, obat, pakan, alat dan mesin pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing perikanan	Mengintegrasikan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, kualitas serta daya saing produk pertanian dan perikanan
		Penataan dan pengembangan sistem kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Meningkatkan kerja sama internasional dan ketahanan daerah	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan regional
		Pengelolaan susut dan sisa pangan untuk ketahanan pangan menuju swasembada pangan	Peningkatan kapasitas dan edukasi; Pengelolaan susut dan sisa pangan	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan
	Industrialisasi (Hilirisasi): Padat Karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan	Penyiapan dan penataan <i>government- induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah firmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i>	Menyiapkan dan melaksanakan <i>penataan government- induced activities</i> untuk peningkatan pergerakan orang dan barang di daerah afirmasi 3TP	Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri
	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual	Pengembangan dan penguatan SDM, kelembagaan, dan jejaring ekonomi kreatif lintas Kabupaten/ Kota dan Nasional	Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri



RPJMN		RPJMD Provinsi Jawa Barat		RPJMD Kota Tasikmalaya	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan
					pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif	Mengembangkan daya tarik wisata (wisata alam, kultur dan heritage) secara kolaboratif dan partisipatif	Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata olahraga (<i>sport tourism</i>) maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif
		Penguatan ekosistem industri berbasis rantai pasok dan sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	Penguatan pengarusutamaan penerapan industri hijau pada sektor industri	Peningkatan mitigasi bencana dan resilience terhadap iklim	Pembangunan ekonomi hijau melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat energi dan berbasis pada energi terbarukan
	Ekonomi biru dan ekonomi hijau	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah	Memanfaatkan sumber daya perairan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, dengan menjaga kesehatan ekosistem laut	Peningkatan mitigasi bencana dan resilience terhadap iklim	Pembangunan ekonomi hijau melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat energi dan berbasis pada energi terbarukan
Transformasi sektor publik sebagai pengungkit	Penguatan tata kelola pemerintah digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatnya literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan serta kemajuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi serta	Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital dalam rangka perwujudan <i>smart city</i>



RPJMN		RPJMD Provinsi Jawa Barat		RPJMD Kota Tasikmalaya	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan
		kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data			
		Penataan kelembagaan dan regulasi berdasrkan riset dan inovasi daerah	Meningkatnya peran aktif pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi daerah	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam pelayanan publik	Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah
	Penguatan teknologi pemerintah digital	Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah	Meningkatkan peran aktif pelaku pembangunan untuk melakukaninovasi daerah	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam pelayanan publik	Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah
	Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajmen talenta, <i>reward dan punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN dearah berdasrkan capaian kinerja	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN serta Penguatan Sistem Manajemen Talenta Mengembangkan Sistem Reward dan Punishment yang Transparan Meningkatkan Kesejahteraan ASN berbasis capaian	Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, serta kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
	Transformasi digital layanan publik prioritas	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilitas dan pemanfatatan TIK di berbagi sektor prioritas (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatnya literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan serta kemajuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan	Meningkatkan Inftastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam pelayanan publik	2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan



RPJMN		RPJMD Provinsi Jawa Barat		RPJMD Kota Tasikmalaya	
Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan
		talenta digital dasar, menengah, dan tinggi serta kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data			

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

3.3.1.3. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah merupakan salah satu instrument penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah. Sebagai Kota Industri, Jasa, dan Perdagangan serta menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW) di Priangan Timur-Pangandaran menjadikan Kota Tasikmalaya harus mampu mengelola ruang yang mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan dinamika pembangunan.

Merujuk pada rancangan rencana tata ruang wilayah Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045, pengembangan wilayah dan Rencana Pusat Kegiatan (RPK) di wilayah kota meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Pelayanan Kota melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi. SPK melayani sub-wilayah kota yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan utama dengan skala pelayanan seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dan wilayah Priangan Timur-Pangandaran (regional), yang diarahkan di pusat-pusat kegiatan kota strategis sesuai fungsi-fungsi yang ditetapkan dan mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga mudah dijangkau dari seluruh wilayah kota. Fungsi PPK meliputi pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, dan pendidikan yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

- 1) Pusat pelayanan pemerintahan Kota Tasikmalaya dengan skala pelayanan kota/regional. Pusat kegiatan Pemerintahan dan perkantoran ini pengembangannya diintegrasikan dengan kegiatan perkotaan lainnya yang dilengkapi dengan fasilitas *public space*, dan dialokasikan di pusat kegiatan pemerintahan kota saat ini, yaitu di Bale Kota Tasikmalaya (Jalan Letnan Harun) dan didukung oleh pelayanan pemerintahan di lokasi lainnya, selain Bale Kota Tasikmalaya.
- 2) Pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa, merupakan kegiatan perekonomian penduduk Kota Tasikmalaya dan difungsikan sebagai pusat orientasi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa guna melayani kebutuhan penduduk regional dan Kota Tasikmalaya dan sekitarnya (metropolitan), yang dilengkapi oleh fasilitas penunjang. Pusat pelayanan yang melayani penduduk metropolitan ini dikembangkan di kawasan pusat kota. Sedangkan pusat pelayanan yang melayani penduduk regional (Priangan Timur) dikembangkan di kawasan sekitar Terminal dan pada jalan lingkar dalam bagian Timur.

Subpusat Pelayanan Kota (SPK)

Subpusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan sekunder dengan jangkauan pelayanan bagian wilayah kota, yang dialokasikan tersebar merata

ke setiap kecamatan atau beberapa kecamatan yang memiliki karakteristik yang hampir sama.

- 1) Subpusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, perdagangan dan jasa, merupakan pusat orientasi yang memberikan pelayanan bagi penduduk yang ada di kecamatan tersebut dan dialokasikan di ibukota kecamatan sebagai pengikat lingkungan dan fasilitas bersosialisasi. Untuk merangsang pertumbuhan pusat pelayanan sekunder ini, maka pengalokasiannya diarahkan pada simpul-simpul jalan utama kawasan/kota yang mempunyai aksesibilitas baik, sehingga mudah dijangkau dari seluruh bagian wilayah kotanya.
- 2) Sub Pusat perdagangan dan jasa, serta fasilitas pelayanan umum di luar ibukota kecamatan dan berfungsi sebagai pusat orientasi yang memberikan pelayanan bagi penduduk dan sebagai pengikat lingkungan untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat. Pusat sekunder ini dialokasikan di sejumlah lokasi konsentrasi kegiatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum pada beberapa kecamatan.
- 3) Pusat pelayanan pendidikan, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi skala regional dan kota.
- 4) Pusat pelayanan pariwisata terutama yang berkaitan dengan wisata alam, wisata belanja dikombinasikan dengan wisata kuliner, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata olahraga dengan skala pelayanan kota regional/kota/nasional.
- 5) Pusat pelayanan kawasan peruntukan industri, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kegiatan industri dengan jenis komoditi yang berorientasi ekspor. Pusat pelayanan kawasan industri ini merupakan pusat orientasi yang melayani kegiatan perdagangan dan pengembangan produk-produk industri yang dihasilkan dengan dilengkapi penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum guna melayani kebutuhan penduduk yang berada di kawasan industri tersebut. Pusat pelayanan kawasan industri ini pengembangannya dialokasikan tersebar di beberapa tempat diantaranya industri kecil dan mikro di pusat-pusat sentra industri dan kawasan industri yang dikembangkan di Kecamatan Bungursari, Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi. Sedangkan industri besar dikembangkan di jalan lingkaran luar untuk industri nonpolutan dan di wilayah selatan yakni Kecamatan Kawalu untuk industri besar berorientasi bahan mentah.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) atau Pusat Tersier yaitu pusat orientasi pelayanan kebutuhan penduduk yang dialokasikan di pusat-pusat Sub-SWK, kelurahan, di setiap kelompok lingkungan permukiman/perumahan, yang mencakup fasilitas perdagangan (pasar dan atau pertokoan), yang dilengkapi dengan fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan serta fasilitas ruang terbuka hijau) untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, dengan jangkauan pelayanan lokal. Pengalokasian pusat pelayanan lingkungan ini diarahkan pada simpul-simpul jalan yang ada di pusat-pusat Sub-SWK yang mempunyai aksesibilitas baik, sehingga mudah dijangkau oleh penduduk yang tinggal di lingkungan kelurahan-kelurahan, di lingkungan permukiman. Pusat lingkungan permukiman (pusat tersier) ini berfungsi juga sebagai pengikat lingkungan untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat yang berada di lingkungan kelurahan dan di lingkungan permukiman tersebut serta untuk melayani kebutuhan penduduk sehari-hari.

Dalam rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044 Kota Tasikmalaya terbagi 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 5 (lima) SubPusat Pelayanan Kota (SPK) dan 15 (lima belas) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Adapun perincian masing-masing pusat pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kota Tasikmalaya berada di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang dengan nama PPK Tawang Sari.
2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) terdiri dari:
 - a. Sub pusat Pelayanan Kota Indihiang, terletak di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang;
 - b. Sub pusat Pelayanan Kota Tamansari, terletak di Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari;
 - c. Sub pusat Pelayanan Kota Cibeureum, terletak di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum;
 - d. Sub pusat Pelayanan Kota Kawalu, terletak di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu; dan
 - e. Sub pusat Pelayanan Kota Mangkubumi, terletak di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.
3. Pusat Lingkungan terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Kelurahan Cipedes, terletak di Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Kelurahan Kahuripan, terletak di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Argasari, terletak di Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Kelurahan Bungursari, terletak di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Kelurahan Sukamulya, terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Kelurahan Sukamaju Kidul, terletak di Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Kelurahan Mulyasari, terletak di Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Perbatasan Kota Kelurahan Setiawargi, terletak di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Kelurahan Purbaratu, terletak di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Setiajaya, terletak di Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Cibeuti, terletak di Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu;
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Perbatasan Kota Kelurahan Urug, terletak di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu;
 - m. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan Kelurahan Cigantang, terletak di Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi;



- n. Pusat Pelayanan Lingkungan Sentra Alas Kaki Kelurahan Sambongjaya, terletak di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi; dan
- o. Pusat Pelayanan Lingkungan Perbatasan Kota Kelurahan Cipawitra, terletak di Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi.

Rencana Pengembangan Wilayah Kota

Berdasarkan indikasi program dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044 rencana pengembangan wilayah Kota Tasikmalaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Rencana Pengembangan wilayah Kota Tasikmalaya

No	Pusat Pelayanan	Program Utama	Lokasi
A	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	1. Pengembangan pusat pemerintahan skala kota	Pusat Pelayanan Kota Tawangsari, di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang dengan cakupan pelayanan: 1. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Cipedes; 2. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Tawang; dan 3. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Cihideung
	PPK Tawangsari	2. Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)	
		3. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa	
		4. Pengembangan sistem angkutan umum	
		5. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan	
		6. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas pendidikan	
		7. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas peribadatan	
		8. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas olah raga	
		9. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air bersih	
		10. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air limbah	
		11. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan persampahan	
		12. Program penataan Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	
		13. Penyediaan, peningkatan, penataan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10%	
		14. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	
		15. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan	
		16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		17. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
		18. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Puskesmas	
		19. Pengembangan Pasar Induk Cikurubuk sebagai Pasar Induk Komoditi Regional	
B	SubPusat Pelayanan Kota (SPK)		
B.1	SPK Indihiang	1. Pengembangan pusat pemerintahan skala Kecamatan dan Kelurahan	Berpusat di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan

No	Pusat Pelayanan	Program Utama	Lokasi
		2. Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU) 3. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa 4. Pengembangan sistem angkutan umum 5. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan 6. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas pendidikan 7. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas peribadatan 8. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas olah raga 9. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air bersih 10. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air limbah 11. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan persampahan 12. Program penataan Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. 13. Penyediaan, peningkatan, penataan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10% 14. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan 15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 16. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 17. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Puskesmas 18. Pengembangan pasar agribisnis perikanan dan balai benih ikan regional	Indihiang, dengan cakupan pelayanan: 1. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Indihiang. 2. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Bungursari.
B.2	SPK Tamansari	1. Pengembangan pusat pemerintahan skala Kecamatan dan Kelurahan 2. Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU) 3. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa 4. Pengembangan sistem angkutan umum 5. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan 6. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas pendidikan 7. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas peribadatan 8. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas olah raga 9. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air bersih	Berpusat di Kelurahan Mugarsari, Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari dengan cakupan pelayanan seluruh Kecamatan Tamansari



No	Pusat Pelayanan	Program Utama	Lokasi
		10. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air limbah 11. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan persampahan 12. Program penataan Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. 13. Penyediaan, peningkatan, penataan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10% 14. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan 15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 16. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 17. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Puskesmas 18. Pengembangan TPA Ciangir	
B.3	SPK Cibeureum	1. Pengembangan pusat pemerintahan skala Kecamatan dan Kelurahan 2. Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU) 3. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa 4. Pengembangan sistem angkutan umum 5. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan 6. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas pendidikan 7. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas peribadatan 8. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas olah raga 9. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air bersih 10. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air limbah 11. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan persampahan 12. Program penataan Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. 13. Penyediaan, peningkatan, penataan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10% 14. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan 15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 16. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 17. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Puskesmas	Berpusat di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum dengan cakupan pelayanan: 1. Seluruh Kecamatan Cibeureum. 2. Seluruh Kecamatan Purbaratu.

No	Pusat Pelayanan	Program Utama	Lokasi
B.4	SPK Kawalu	1. Pengembangan pusat pemerintahan skala Kecamatan dan Kelurahan	Berpusat di Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu mencakup wilayah pelayanan seluruh Kecamatan Kawalu.
		2. Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)	
		3. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa	
		4. Pengembangan sistem angkutan umum	
		5. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan	
		6. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas pendidikan	
		7. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas peribadatan	
		8. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas olah raga	
		9. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air bersih	
		10. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air limbah	
		11. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan persampahan	
		12. Program penataan Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.	
		13. Penyediaan, peningkatan, penataan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10%	
		14. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan	
		15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		16. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
		17. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Puskesmas	
B.5	SPK Mangkubumi	1. Pengembangan pusat pemerintahan skala Kecamatan dan Kelurahan	Berpusat di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi dengan cakupan pelayanan seluruh Kecamatan Mangkubumi.
		2. Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)	
		3. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa	
		4. Pengembangan sistem angkutan umum	
		5. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan	
		6. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas pendidikan	
		7. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas peribadatan	
		8. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas olah raga	
		9. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air bersih	

No	Pusat Pelayanan	Program Utama	Lokasi
		10. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air limbah 11. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan persampahan 12. Program penataan Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. 13. Penyediaan, peningkatan, penataan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10% 14. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan 15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 16. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 17. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Puskesmas	
C	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Pengembangan pusat pemerintahan skala Kecamatan dan Kelurahan 2. Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU) 3. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa 4. Pengembangan sistem angkutan umum 5. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan 6. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas pendidikan 7. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas peribadatan 8. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan fasilitas olah raga 9. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air bersih 10. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan air limbah 11. Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pelayanan persampahan 12. Program penataan Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. 13. Penyediaan, peningkatan, penataan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10% 14. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan 15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 16. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 17. Pengembangan pusat pemerintahan skala Kecamatan dan Kelurahan	1. Pusat Lingkungan Kecamatan Kelurahan Cipedes, terletak di Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes; 2. Pusat Lingkungan Kecamatan Kelurahan Kahuripan, terletak di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang; 3. Pusat Lingkungan Kecamatan Argasari, terletak di Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung; 4. Pusat Lingkungan Kecamatan Kelurahan Bungursari, terletak di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari; 5. Pusat Lingkungan Kecamatan Kelurahan Sukamulya, terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari; 6. Pusat Lingkungan Kecamatan Kelurahan Sukamaju Kidul, terletak di Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang; 7. Pusat Lingkungan Kecamatan Kelurahan Mulyasari, terletak di Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari; 8. Pusat Lingkungan Perbatasan Kota Kelurahan Setiawargi, terletak di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari; 9. Pusat Lingkungan Kecamatan Kelurahan Purbaratu, terletak di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu; 10. Pusat Lingkungan Kecamatan Setiajaya, terletak di Kelurahan

No	Pusat Pelayanan	Program Utama	Lokasi
			Setiajaya Kecamatan Cibeureum;
			11. Pusat Lingkungan Kecamatan Cibeuti, terletak di Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu;
			12. Pusat Lingkungan Perbatasan Kota Kelurahan Urug, terletak di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu;
			13. Pusat Lingkungan Kecamatan Kelurahan Cigantang, terletak di Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi;
			14. Pusat Lingkungan Sentra Alas Kaki Kelurahan Sambongjaya, terletak di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi; dan
			15. Pusat Lingkungan Perbatasan Kota Kelurahan Cipawitra, terletak di Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi.

Sumber : Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2025 – 2045

3.3.2. Pentahapan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan dikemas ke dalam tema pembangunan tahunan yang secara simultan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang disajikan sebagaimana tabel berikut:

Gambar 3.4.
Arah Kebijakan Pembangunan (Tema Pembangunan)



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025.

Tabel 3.6.
Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya					
Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui deteksi dini/ <i>screening</i> , pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan
Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pendidikan formal maupun non formal yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai	Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui pendidikan formal maupun non formal dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya	Penguatan pendidikan kesetaraan dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren	Peningkatan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Penguatan kurikulum pendidikan muatan lokal berbasis pengembangan talenta dan karakter	Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi	Peningkatan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi	Peningkatan Konvergensi/Intergrasi Program dan sinergi stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan	Pengembangan sistem tata kelola basis data terpadu	Penguatan sistem tata kelola basis data terpadu
Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila	Perlindungan dan pengembangan dalam kelestarian serta pemajuan budaya	Pemanfaatan dan pembinaan dalam kelestarian serta pemajuan budaya	Pembinaan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Perwujudan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa
Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; Penguatan	Peningkatan akses dan fasilitas layanan konseling, edukasi keluarga, pelayanan kepemudaan, dan pembinaan olahraga	Penguatan kelembagaan, mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan prestasi olahraga, serta partisipasi pemuda dalam pembangunan	Pemantapan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Disabilitas, lansia, pemuda, dan Olahraga untuk mewujudkan masyarakat Tasikmalaya yang inklusif, berkeadilan gender, ramah anak, ramah disabilitas,	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang inklusif, adil gender, ramah anak, ramah disabilitas, ramah lansia, serta berdaya saing global melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda, dan olahraga

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
	kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			serta berdaya saing dalam prestasi	
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan					
Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi usaha mikro dan industri kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan dan kewilayahan	Penguatan proses bisnis usaha mikro dan industri kecil melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubasi bisnis	Penyiapan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, koperasi dan asuransi	Penataan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, koperasi dan asuransi	Penguatan dukungan terhadap produk unggulan, pusat inkubasi bisnis, pemasaran terpadu, dan perlindungan konsumen	Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri
Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi	Pengembangan kapasitas usaha koperasi	Rintisan adopsi teknologi tepat guna unit usaha koperasi	Penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi	Peningkatan skala usaha koperasi	Peningkatan peran koperasi terhadap perekonomian daerah
Penguatan tata kelola perdagangan, pemasaran terpadu, dan perlindungan konsumen	Penguatan infrastruktur distribusi perdagangan dan logistik	Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan melalui e- commerce dan digital marketing	Pengendalian perdagangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi regional	Pengendalian inflasi daerah
Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri dan produk unggulan daerah	Pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan	Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah yang halal dan ramah lingkungan	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	Penyiapan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia	Promosi dan pemasaran produk industri ekonomi daerah dan UMKM lokal ke pasar luar daerah dan luar negeri

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
	yang halal dan ramah lingkungan		yang halal dan ramah lingkungan	Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global	
Rintisan pengembangan kawasan strategis ekonomi (jasa) perkotaan	Pengembangan kawasan strategis ekonomi (jasa) perkotaan	Pengembangan kawasan strategis perkotaan sebagai pusat perekonomian dan keuangan syariah	Peningkatan tata kelola kawasan strategis dan sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian syariah	Implementasi perekonomian dan keuangan syariah	Peningkatan implementasi perekonomian dan keuangan syariah
Pembentukan dan restrukturisasi BUMD	Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD	Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD	Penataan dan restrukturisasi BUMD	Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD	Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD
Pemberdayaan sumber daya manusia pendukung usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam partisipasi penataan dan pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan ekonomi kreatif	Penataan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif secara kolaboratif dan partisipatif yang halal dan ramah lingkungan	Penguatan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif secara kolaboratif dan partisipatif yang halal dan ramah lingkungan	Promosi dan pemasaran produk wisata dan ekonomi kreatif daerah ke pasar luar daerah dan luar negeri
Penyediaan benih, pupuk, instrumen pengendali hama, obat, pakan, alat dan mesin pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan	Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitasnya	Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, kualitas serta daya saing produk pertanian dan perikanan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan	Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan regional	Peningkatan ketersediaan produk pangan

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Sosialisasi susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan	Pembinaan pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan	Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan	Peningkatan pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan		
Penyediaan peta potensi investasi dan peningkatan iklim investasi	Penyediaan database dan roadmap investasi	Peningkatan iklim investasi, kemudahan bekerja dan berusaha	Fasilitasi promosi investasi dan kerjasama investasi berbasis digital	Peningkatan fasilitasi promosi investasi dan kerjasama investasi berbasis digital	Peningkatan investasi, kemudahan bekerja dan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
Penyiapan dan pemetaan sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> (vocational)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> (vocational)	Peningkatan mutu dan kompetensi pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan mutu dan kompetensi kewirausahaan usia produktif dan angkatan kerja	Peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan keuangan/ permodalan bagi pelaku wirausaha	Peningkatan penempatan tenaga kerja, kewirausahaan dan perlindungan tenaga kerja
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih					
Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Peningkatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel	Penguatan kelembagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan kerja sama daerah, regional dan internasional	Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan <i>blended finance</i>

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, serta kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Peningkatan bangunan Gedung dan sarana pemerintahan	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan nasional	Persiapan pembiayaan inovatif termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan <i>blended finance</i>	Penataan dan peningkatan kualitas regulasi daerah	-
Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital dalam rangka perwujudan <i>smart city</i>	Percepatan penerapan pelayanan publik berbasis ekosistem digital yang terintegrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan untuk memperluas akses dan efisiensi layanan publik	Penguatan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan melalui integrasi data, interoperabilitas sistem, dan perluasan aplikasi layanan digital	Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah	Perwujudan tata kelola kelembagaan dan regulasi sistem riset serta inovasi daerah yang adaptif, berkelanjutan, dan mendukung good governance menuju <i>smart city</i>

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata					
Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan publik dan percepatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing	Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pemantapan daya saing	Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung perwujudan kota yang maju dan sejahtera
Peningkatan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pelayanan publik dan percepatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung peningkatan daya saing	Peningkatan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pemantapan daya saing	Peningkatan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung perwujudan kota yang maju dan sejahtera
Penyediaan Drainase Perkotaan untuk mendukung pelayanan publik dan percepatan pertumbuhan ekonomi	Penyediaan Drainase Perkotaan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Penyediaan Drainase Perkotaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Penyediaan Drainase Perkotaan untuk mendukung peningkatan daya saing	Penyediaan Drainase Perkotaan untuk mendukung pemantapan daya saing	Penyediaan Drainase Perkotaan untuk mendukung perwujudan kota yang maju dan sejahtera
-	-	-	Perencanaan sarana dan prasarana transportasi publik	-	Perwujudan sarana dan prasarana transportasi publik guna mendukung kota yang maju dan sejahtera
Peningkatan elektrifikasi dan telekomunikasi	Pemenuhan elektrifikasi dan telekomunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	-	-	-	-

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan percepatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya saing	Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemantapan daya saing	Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perwujudan kota yang maju dan sejahtera
Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan dan pembentukan kelembagaan air minum	Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan dan penguatan kapasitas kelembagaan air minum	Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, penguatan kapasitas kelembagaan air minum, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air	Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, studi kelayakan pemanfaatan air baku untuk SPAM, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air	Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, perencanaan pemanfaatan air baku untuk SPAM, rintisan pembentukan BUMD PDAM, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air	Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, proses perijinan pemanfaatan air baku, rintisan pembentukan BUMD PDAM, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air
Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL,	Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, perluasan cakupan layanan IPLT, dan perencanaan layanan lumpur tinja terjadwal	Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, implementasi layanan lumpur tinja terjadwal	Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, penyediaan sarana prasarana IPLT, implementasi layanan lumpur tinja terjadwal	Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, penyediaan sarana pengangkut lumpur tinja, implementasi layanan lumpur tinja terjadwal	Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, implementasi layanan lumpur tinja terjadwal

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing Daerah guna mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan Kota Tasikmalaya yang Maju dan Sejahtera
Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat	Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat	Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat	Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat	Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat	Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat
Penanganan kawasan kumuh	Penanganan kawasan kumuh	Penanganan kawasan kumuh	Penanganan kawasan kumuh	Penanganan kawasan kumuh	Penanganan kawasan kumuh
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan					
Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan sampah terpadu di hulu dan hilir berbasis teknologi yang ramah lingkungan	Transformasi pengelolaan persampahan meliputi: pembangunan prasarana persampahan, penyediaan sarana persampahan dan kerja sama pengelolaan persampahan	Peningkatan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan mengutamakan pemanfaatan secara efisien dan ramah lingkungan
Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Pembangunan ekonomi hijau melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat energi dan berbasis pada energi terbarukan	Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan diantaranya infrastruktur yang tahan iklim, resilience terhadap bencana, dan ramah lingkungan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025.

3.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan adalah program yang ditetapkan pemerintah dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan potensi daerah.

3.4.1. Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah didasarkan pada agenda pembangunan Kota Tasikmalaya untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD 2025-2029. Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan dengan mengacu pada hasil penjabaran strategi sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan (visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan) pada RPJMD 2025-2029.

Kota Tasikmalaya menetapkan 7 (tujuh) program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Program Tasik Gemas (Gerakan Masyarakat Sehat)

Program pembangunan daerah bidang kesehatan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya:

- a. Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil, balita, dan remaja putri, melalui:
 - 1) Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk, balita stunting, balita gizi kurang dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK);
 - 2) Pemberian tablet penambah darah/vitamin bagi ibu hamil dan remaja putri.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan anak dengan pemberian kartu anak sehat bagi anak balita;
- c. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, melalui:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;
 - 2) Pengembangan Puskesmas;
 - 3) Peningkatan alat kesehatan dan alat penunjang kesehatan lainnya.
- e. Pemenuhan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kegiatan dilaksanakan melalui:
 - 1) Verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS kesehatan;
 - 2) Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - 3) Koordinasi dengan BPJS kesehatan dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

2) Program Tasik Pintar

Program Tasik Pintar merupakan program pembangunan dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, diantaranya:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, melalui:
 - 1) Pembangunan ruang kelas baru;
 - 2) Rehabilitasi ruang kelas;
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan;
 - 4) Pembangunan/rehabilitasi laboratorium;
 - 5) Pembangunan/rehabilitasi utilitas sekolah;

- 6) Pengadaan sarana penunjang Pendidikan;
- 7) Peningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidikan.
- b. Bantuan Pendidikan, melalui:
 - 1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;
 - 2) Pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
- c. Peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olah raga, melalui:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemuda;
 - 3) Pembinaan organisasi keolahragaan dan kepemudaan;
 - 4) Pembinaan atlet.

3) Program Tasik Religius

Program Tasik Religius merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan karakter masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, diantaranya:

- a. Fasilitas pondok pesantren;
- b. One Kelurahan One Hafidz, melalui pemberian beasiswa bagi siswa/santri hafidz Al-Quran;
Program One Kelurahan One Hafidz (OHAN Hafidz) adalah program yang ditujukan untuk mencetak kader hafidz dan hafidzah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya melalui pemberian beasiswa bagi siswa/santri. Peserta OHAN Hafidz adalah masyarakat/penduduk Kota Tasikmalaya baik yang sedang belajar di sekolah formal maupun yang sudah tidak bersekolah, serta memiliki kemampuan dalam membaca al-Qur'an sesuai dengan standar LPTQ, memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program. Tahapan pelaksanaan program ini adalah:
 - 1) Pembentukan tim penyusun regulasi pelaksanaan program;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program;
 - 3) Perencanaan pelaksanaan program;
 - 4) Rekrutmen peserta program;
 - 5) Pelaksanaan program.
- c. Fasilitas pendidikan diniyah;
- d. Perbaikan sarana dan prasarana keagamaan;
- e. Optimalisasi tata kelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

4) Program Tasik Pelak (Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan)

Program Tasik PELAK adalah program prioritas untuk menumbuhkembangkan usaha mikro dan meningkatkan kesempatan bekerja serta berusaha pada sektor industri, perdagangan, jasa, koperasi, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan disetiap wilayah Kelurahan atau Kecamatan berbasis potensi dan kearifan lokal dengan melibatkan Pemerintah, Pengusaha, Perguruan Tinggi, Pers, Komunitas dan Masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tujuan dari program ini adalah :

- a. Menumbuhkembangkan ekonomi berbasis potensi lokal;
- b. Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Program Tasik Pelak diantaranya dilaksanakan dengan:

- a. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan koperasi, melalui:
 - 1) Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, pengawasan dan pendampingan;
 - 2) Fasilitasi legalitas;
 - 3) Fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran;
 - 4) Fasilitasi permodalan;
 - 5) Fasilitasi inkubasi bisnis;
 - 6) Optimalisasi sarana kegiatan ekonomi;
 - 7) Pengembangan komunitas kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal;
 - 8) Penyelenggaraan pekan ekonomi kreatif.
- b. Investasi dan penciptaan lapangan kerja, melalui:
 - 1) Pelatihan kompetensi tenaga kerja;
 - 2) Penyelenggaraan bursa kerja;
 - 3) Fasilitasi kerjasama perusahaan dengan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi;
 - 4) Peningkatan iklim dan promosi investasi daerah.

5) Program Tasik Melayani

Program Tasik Melayani merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berorientasi kepuasan masyarakat, diantaranya dilaksanakan melalui:

- a. Penguatan manajemen ASN, melalui penerapan merit sistem dan manajemen talenta;
- b. Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pelayanan publik, melalui:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor;
 - 2) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
 - 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Optimalisasi manajemen pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui teknologi informasi, dengan kegiatan utama antarlain:
 - 1) Pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Penyebarluasan informasi, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak serta retribusi daerah;
 - 3) Pengembangan sistem informasi PAD;
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD.

6) Program Tasik Nyaman

Program Tasik Nyaman merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Pemantapan infrastruktur di Kota Tasikmalaya diperlukan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan infrastruktur, dan menjawab tantangan isu strategis yang ada. Selain itu, pemantapan infrastruktur merupakan pendukung pengimplementasian rencana pengembangan wilayah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi dan sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan diantaranya:

- a. Peningkatan infrastruktur jalan, melalui:
 - 1) Pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan kelengkapannya;
 - 2) Peningkatan infrastruktur perhubungan.
- b. Peningkatan infrastruktur air minum dan air limbah domestik, melalui:



- 1) Pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- 3) Peningkatan pelayanan SPAM dan SPALD.

7) Program Tasik Resik

Program Tasik Resik dengan semangat untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang bersih, indah, hijau, dan layak huni, sehingga dapat menujung peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, maju dan kreatif, diantaranya:

- a. Peningkatan pengelolaan persampahan, melalui:
 - 1) Pengurangan sampah;
 - 2) Sosialisasi pengelolaan sampah;
 - 3) Optimalisasi dan pembentukan bank sampah;
 - 4) Pengadaan lahan untuk Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - 5) Pembangunan TPS3R dan TPST.
- b. Penanganan Sampah
 - 1) Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Ciangir;
 - 2) Penyediaan armada pengangkut sampah, alat berat, dan alat pengolahan sampah;
 - 3) Pengadaan lahan untuk TPST;
 - 4) Penyediaan TPS;
 - 5) Penanganan sampah di sungai;
 - 6) Kerjasama pengelolaan persampahan.
- c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, melalui:
 - 1) Pemeliharaan taman kota;
 - 2) Pemeliharaan dan pembangunan taman warga;
 - 3) Pembangunan taman keanekaragaman hayati.
- d. Peningkatan kualitas lingkungan, melalui:
 - 1) Pembebasan gunung atau lahan sumber air;
 - 2) Penanganan pencemaran lingkungan;
 - 3) Reboisasi/penanaman pohon;
 - 4) Pengendalian pemanfaatan ruang.

Progam prioritas daerah Kota Tasikmalaya disusun selain dalam rangka pencapaian Visi dan Misi daerah, namun juga untuk mendukung program prioritas provinsi Jawa Barat dan program prioritas nasional. Keselarasan program prioritas daerah dengan program provinsi Jawa Barat dan program prioritas nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Keselarasan Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Program Prioritas Nasional	Program Hasil Terbaik Cepat
Program Tasik Gemas (Gerakan Masyarakat Sehat)	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	- Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat - Pemberantasan kemiskinan	Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kota/kabupaten
	Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional		Memberi makan siang
	Program Pencegahan dan		

Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Program Prioritas Nasional	Program Hasil Terbaik Cepat
	Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup		dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
Program Tasik Pintar	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	• Penguatan Pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi • Pemberantasan kemiskinan	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kota/kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi
	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	• Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas • Pemberantasan kemiskinan	-
Program Tasik Religius	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah	-
		Pencegahan dan pemberantasan narkoba	-
	Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	-
Program Tasik Pelak (Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan)	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	• Menjamin pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya Karakteristik-Mandiri lainnya • Pemberantasan kemiskinan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Menjamin pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya Karakteristik-Mandiri lainnya	-
	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan	• Mencapai swasembada pangan, energi, dan air • Pemberantasan	-

Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Program Prioritas Nasional	Program Hasil Terbaik Cepat
	Pangan	kemiskinan	
	Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	- Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani - Pemberantasan kemiskinan	-
	Program Peningkatan dan Pemerataan Investasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	-
	Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberdayaan Kewirausahaan Daerah	- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. - Pemberantasan kemiskinan	-
	Program Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	-
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	- Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga - Pemberantasan kemiskinan	-
Program Tasik Melayani	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	-
	Program Transformasi Birokrasi Berbasis Digital dan Penguatan <i>Good Governance</i> , serta Kerjasama Daerah dan Internasional	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	-
Program Tasik Nyaman	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung



Program Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya	Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Program Prioritas Nasional	Program Hasil Terbaik Cepat
	Wilayah	bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan Pemberantasan kemiskinan	Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan		
	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok rentan (Lansia dan Penyandang Disabilitas)		
Program Tasik Resik	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
	Program Pengurangan Risiko Bencana		-

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

Program Prioritas Pembangunan daerah disusun untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Adapun keterkaitan tujuan, sasaran dan program prioritas Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah
RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas Daerah
1.	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya			IT1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	
			S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya prevalensi stunting dan meningkatnya gizi serta derajat kesehatan masyarakat	IS1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Program Tasik Gemas
					IS2. Umur Harapan Hidup	Tahun	
					IS3. Prevalensi Stunting	%	
					IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	
			S2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	IS5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Program Tasik Pintar
					IS6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	
			S.3. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	IS7. Tingkat Kemiskinan	%	Program Tasik Gemas Program Tasik Pintar Program Tasik Pelak Program Tasik Nyaman
			S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Meningkatnya masyarakat yang religius dan berbudaya	IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	Program Tasik Religius
					IS9. Indeks Kerukunan Beragama	Poin	
					IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	
			S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya ketahanan keluarga serta prestasi pemuda dan olahraga	IS11. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	Program Tasik Gemas dan Tasik Pintar
					IS12. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	
					IS.13 . Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	
2.	Mewujudkan perekonomian daerah	Terwujudnya perekonomian			IT2. Indeks Daya Saing Daerah	Poin	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas Daerah
	yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan	daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan			IT3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Program Tasik Pelak
			S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Meningkatnya pengembangan usaha para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif	IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	
					IS15. Indeks Gini	Poin	
					IS16. Inflasi	%	
					IS17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	
					IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	
					IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	
			S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	IS20. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	
			S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	
					IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif			IT4. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Program Tasik Melayani
			S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Meningkatnya pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berbasis digital	IS23. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	
					IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	
			S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya penerapan IPTEK , ekosistem Riset dan Inovasi daerah dalam pelayanan publik	IS25. Indeks Inovasi Daerah	Poin	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas Daerah
4.	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif			IT5. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	
			S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar daerah yang layak, aman dan nyaman	IS26. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Program Tasik Nyaman
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan			IT6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	
			S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu	IS27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	Program Tasik Resik
			S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	Meningkatnya keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO ₂ eq	
					IS29. Indeks Risiko Bencana	Poin	

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

Untuk mengimplementasikan program prioritas pembangunan daerah tersebut, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada perangkat daerah. Keterkaitan program pembangunan daerah dalam RPJMD dengan program operasional pada perangkat daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Keterkaitan Program Prioritas Daerah dengan Program Perangkat Daerah

No.	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana	Perangkat Daerah Pendukung
1.	Program Tasik Gemas	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	• Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kecamatan
2.	Program Tasik Pintar	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	• Dinas Pendidikan	• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah • Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Tasik Religius	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Sekretariat Daerah	• Dinas Pendidikan • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Kecamatan
4.	Program Tasik Pelak	• Program Pelayanan Izin usaha simpan pinjam • Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Pengembangan UMKM • Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan • Program Peningkatan sarana dan distribusi perdagangan • Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting • Program Pengembangan Ekspor	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Kecamatan

No.	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana	Perangkat Daerah Pendukung
		- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
		- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
		- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
		- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner - Program perizinan usaha tani	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
5.	Tasik Melayani	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Seluruh Perangkat Daerah

No.	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana	Perangkat Daerah Pendukung
		• Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Statistik Sektor • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Badan Pendapatan Daerah	
		• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	• Kecamatan	
6.	Program Tasik Nyaman	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Jalan	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Perhubungan • Kecamatan
7.	Program Tasik Resik	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	• Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

3.4.2. Program Prioritas

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas merupakan program yang terseleksi berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah, dengan 5 (lima) tujuan dan sasaran 13 (tiga belas) serta 134 (seratus tiga puluh empat) program prioritas pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.10.
Program Prioritas Kota Tasikmalaya
Tahun 2025-2029

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas
							(Permendagri 90/2019)
1.	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya			IT1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	
			S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya prevalensi stunting dan meningkatnya gizi serta derajat kesehatan masyarakat	IS1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					IS2. Umur Harapan Hidup	Tahun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					IS3. Prevalensi Stunting	%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
					IS4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			S2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	IS5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
							Program Pengembangan Kurikulum
							Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					IS6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
							Program Pembinaan Perpustakaan
			S.3. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	IS7. Tingkat Kemiskinan	%	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
							Program Pemberdayaan Sosial
							Program Rehabilitasi Sosial
			S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Meningkatnya masyarakat yang religius dan berbudaya	IS8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
							Program Penanganan Bencana
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
							Program Pengembangan Kebudayaan
							Program Pengembangan Kesenian Tradisional
							Program Pembinaan Sejarah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
					IS9. Indeks Kerukunan Beragama	Poin	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
					IS10. Indeks Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	Poin	Program Pengelolaan Permuseuman
			S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya ketahanan keluarga serta prestasi pemuda dan olahraga	IS11. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	Program Pengendalian Penduduk
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
							Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
					IS12. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
							Program Perlindungan Perempuan
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
							Program Perlindungan Khusus Anak
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
					IS.13. Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan			IT2. Indeks Daya Saing Daerah	Poin	
					IT3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	
			S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Meningkatnya pengembangan usaha para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif	IS14. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
					IS15. Indeks Gini	Poin	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
					IS16. Inflasi	%	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
					IS17. Indeks Ekonomi Hijau	Poin	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas
							(Permendagri 90/2019)
					Daerah (Pilar Ekonomi)		
					IS18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
					IS19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
							Program Pengembangan UMKM
							Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
							Program Pengembangan Ekspor
							Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
							Program Pemasaran Pariwisata
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
							Program Perekonomian dan Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
			S7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	IS20. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
							Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
							Program Penanganan Kerawanan Pangan
							Program Pengawasan Keamanan Pangan
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
							Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
							Program Perizinan Usaha Pertanian
							Program Penyuluhan Pertanian
			S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	IS21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	Program Perencanaan Tenaga Kerja
					IS22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
							Program Penempatan Tenaga Kerja
							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
							Program Hubungan Industrial
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
							Program Promosi Penanaman Modal

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
							Program Pelayan Penanaman Modal
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif	S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Meningkatnya pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berbasis digital	IT4. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	
					IS23. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
					IS24. Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
							Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika, serta Budaya Politik
							Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
							Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas
							(Permendagri 90/2019)
							Program Perekonomian dan Pembangunan
							Program Penyelenggaraan Pengawasan
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
							Program Kepegawaian Daerah
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
							Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
							Program Pengelolaan Arsip
							Program Perizinan Penggunaan Arsip
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
							S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				
			Program Pendaftaran Penduduk				
			Program Pencatatan Sipil				
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
Program Pengelolaan Profil Kependudukan							
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
4.	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	S.11. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar daerah yang layak, aman dan nyaman	IT5. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	
					IS26. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
							Program Penyelenggaraan Jalan
							Program Penataan Bangunan Gedung
							Program Pengembangan Jasa Konstruksi
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
							Program Penatagunaan Tanah
							Program Pengembangan Perumahan
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
							Program Kawasan Permukiman
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
							Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	S.12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu	IT6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	
					IS27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Program Prioritas (Permendagri 90/2019)
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
							Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
							Program Pengelolaan Persampahan
							Program Penanggulangan Bencana
			S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	Meningkatnya keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	IS28. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO ₂ eq	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
					IS29. Indeks Risiko Bencana	Poin	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

Selain program prioritas dan program perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terdapat program Pembangunan yang bersifat lintas sektoral (*cross cutting*). Beberapa program lintas sektoral antara lain sebagai berikut.

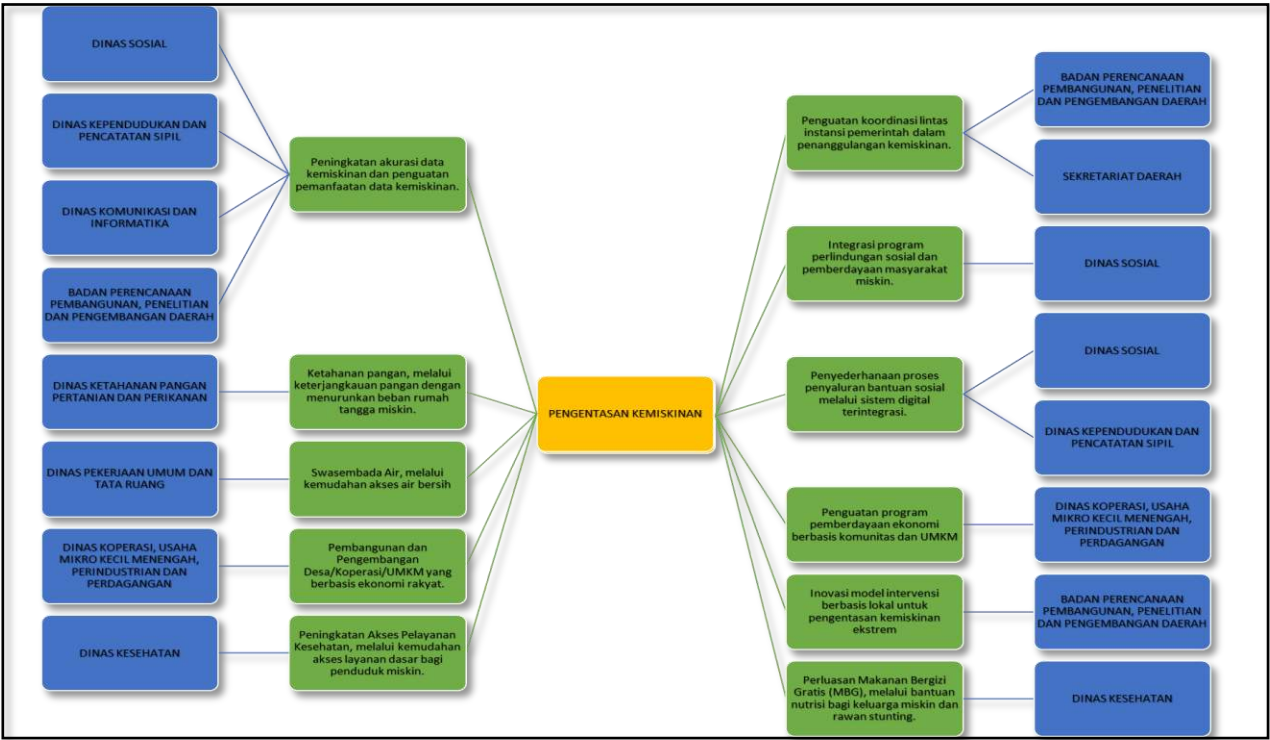
1. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Secara umum strategi pengentasan kemiskinan terdiri dari: pengurangan beban masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Salah satu prioritas utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah pengentasan kemiskinan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, dimana pada tahun 2029 Pemerintah menetapkan target yang cukup tinggi untuk menurunkan angka kemiskinan umum hingga 4,5 persen dan menghapus kemiskinan ekstrem sepenuhnya.

Pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan kolaborasi yang bersinergi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan merupakan program yang bersifat lintas sektor dan melibatkan beberapa perangkat daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5.
Cross Cutting Pengentasan Kemiskinan



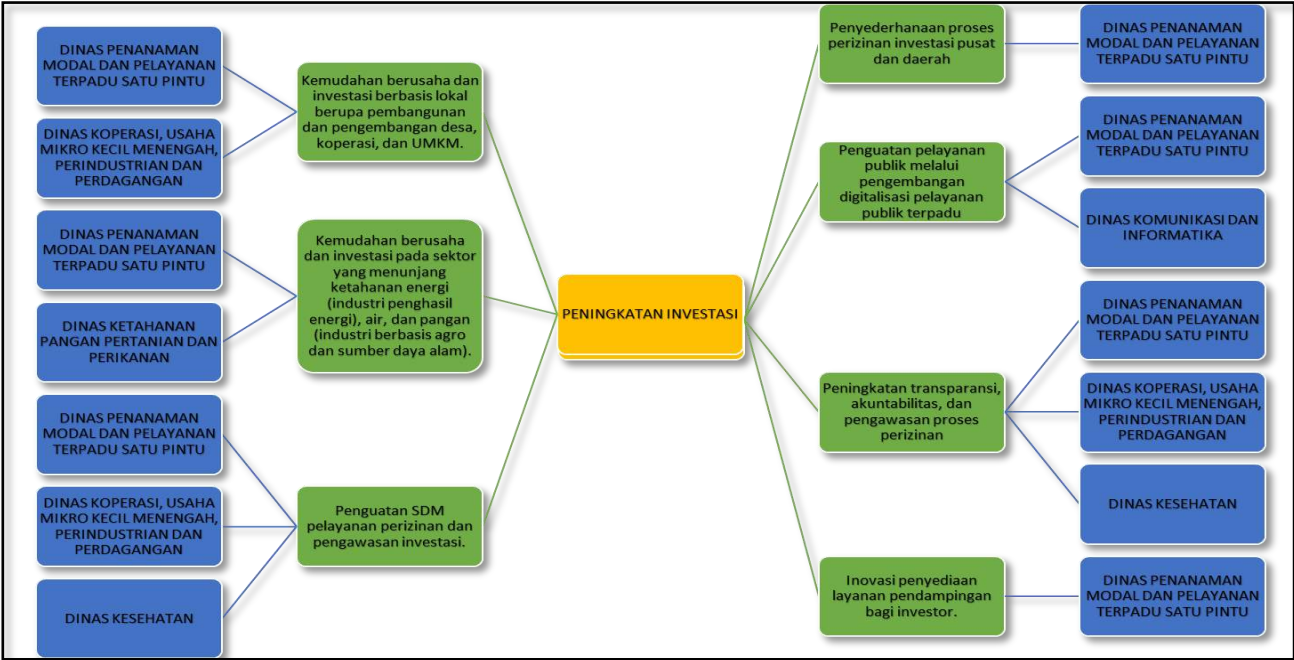
Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

2. Peningkatan Investasi

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, peningkatan investasi menjadi salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Investasi memiliki peran penting yang strategis dalam rangka mewujudkan visi Kota Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa dan perdagangan yang religius, inovatif, maju dan berkelanjutan. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan sektor produktif, meningkatkan daya saing ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi. Untuk mendukung peningkatan investasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Adapun secara lebih rinci, skema program lintas sektoral peningkatan investasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.6.
Cross Cutting Peningkatan Investasi



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

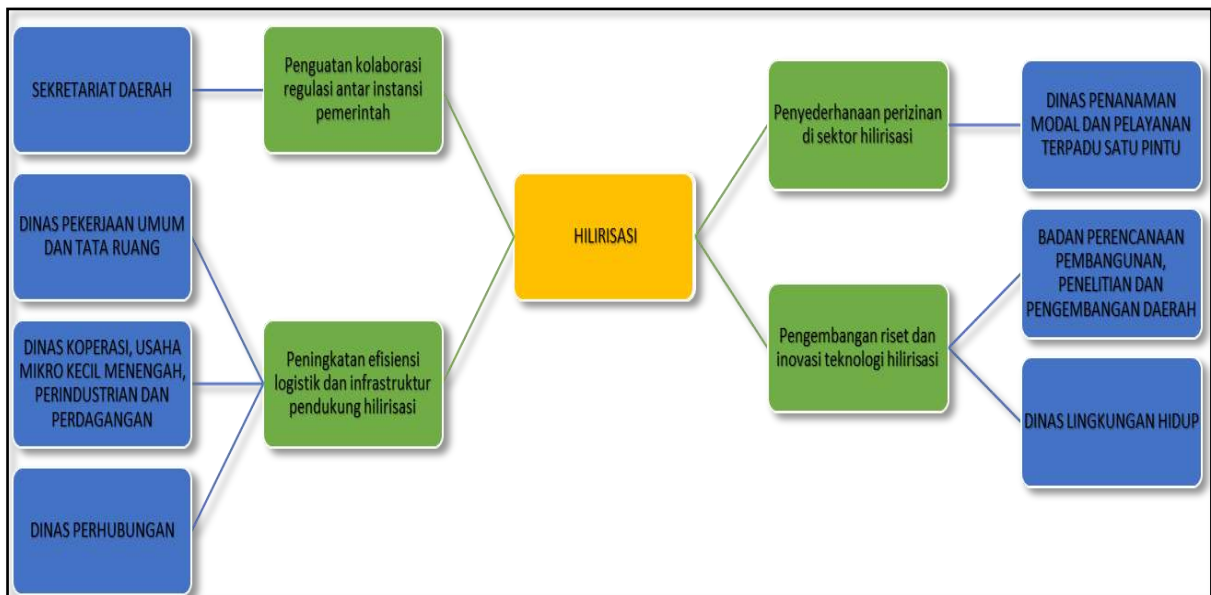
3. Hilirisasi

Hilirisasi dalam RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan salah satu strategi utama pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri dalam negeri, dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi.

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, hilirisasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor unggulan, seperti UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Dalam rangka mewujudkan hilirisasi melibatkan berbagai pihak yang terlibat sehingga terjadi sinergitas program guna mewujudkannya.

Program untuk mendukung Hilirisasi ini dapat dilihat dari gambar *cross cutting* berikut ini.

Gambar 3.7.
Cross Cutting Hilirisasi



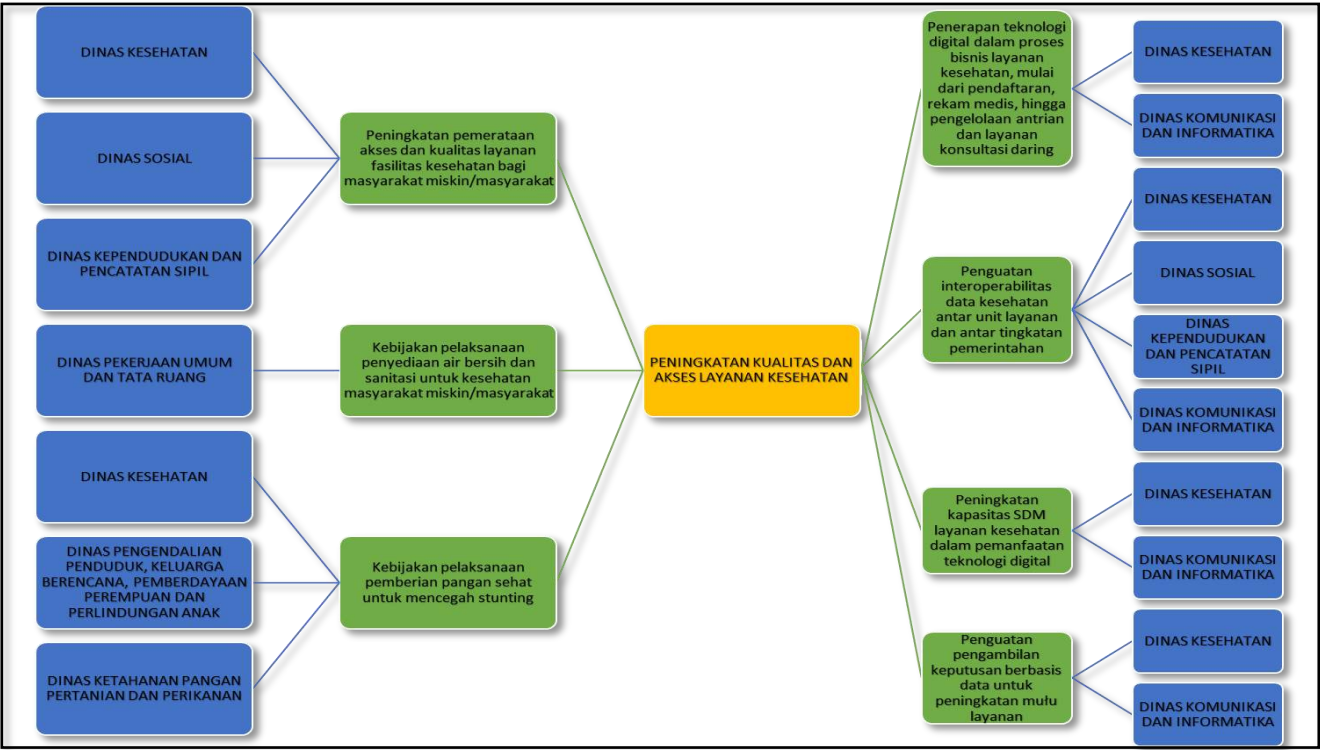
Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

4. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan misi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategis yang diambil pemerintah antara lain: pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan dan promosi kesehatan, integrasi layanan kesehatan jiwa dan lanjut usia, serta ketahanan sistem kesehatan.

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan di Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang religius, inovatif, maju, dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Pembangunan sektor kesehatan tidak dapat hanya dilaksanakan oleh satu perangkat daerah namun harus melibatkan beberapa perangkat daerah lainnya, bahkan keterlibatan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Berikut ini *cross cutting* peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.

Gambar 3.8.
Cross Cutting Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

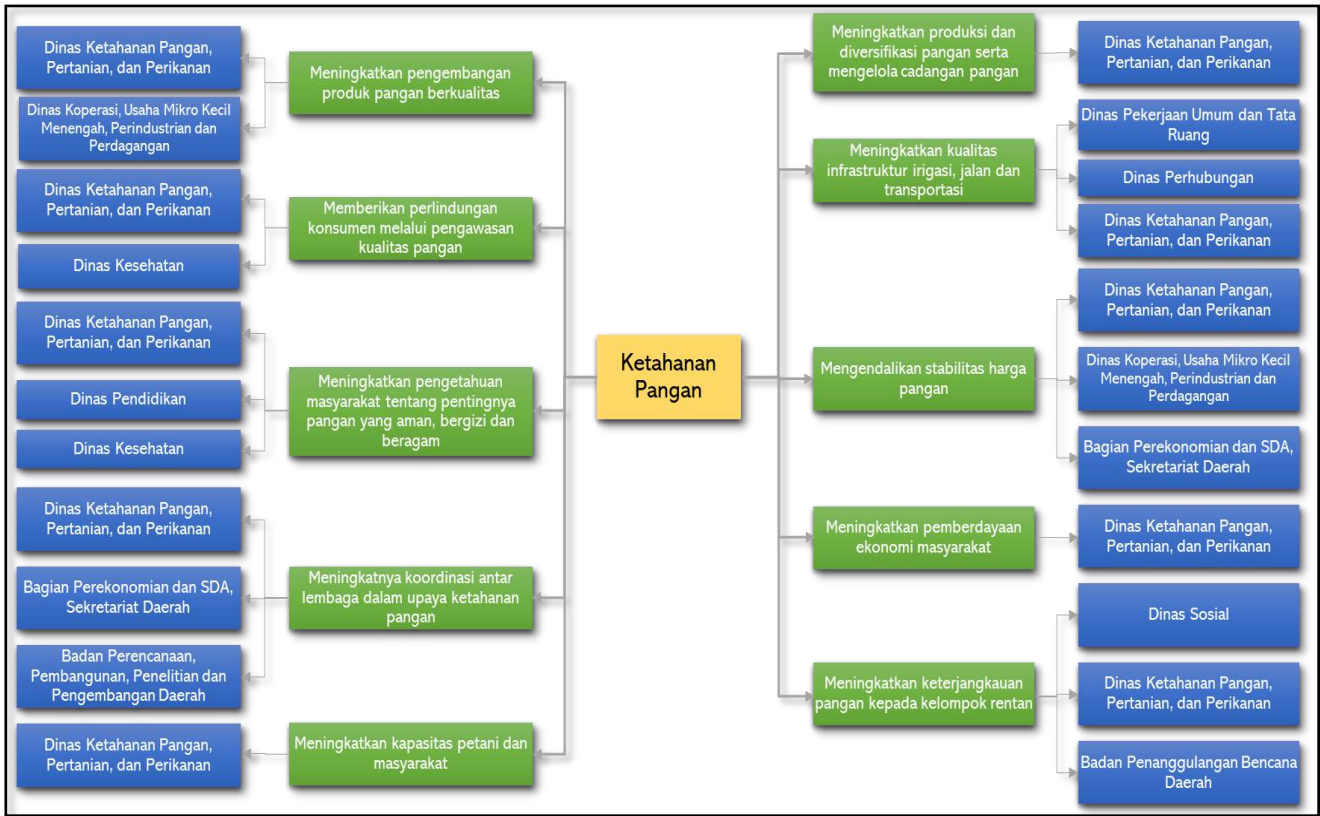
5. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan atau (keter)jaminan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (self-sufficiency) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko.

World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang Panjang.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan diperlukan program lintas sektor, berikut gambaran *cross cutting* ketahanan pangan.

Gambar 3.9
Cross Cutting Ketahanan Pangan



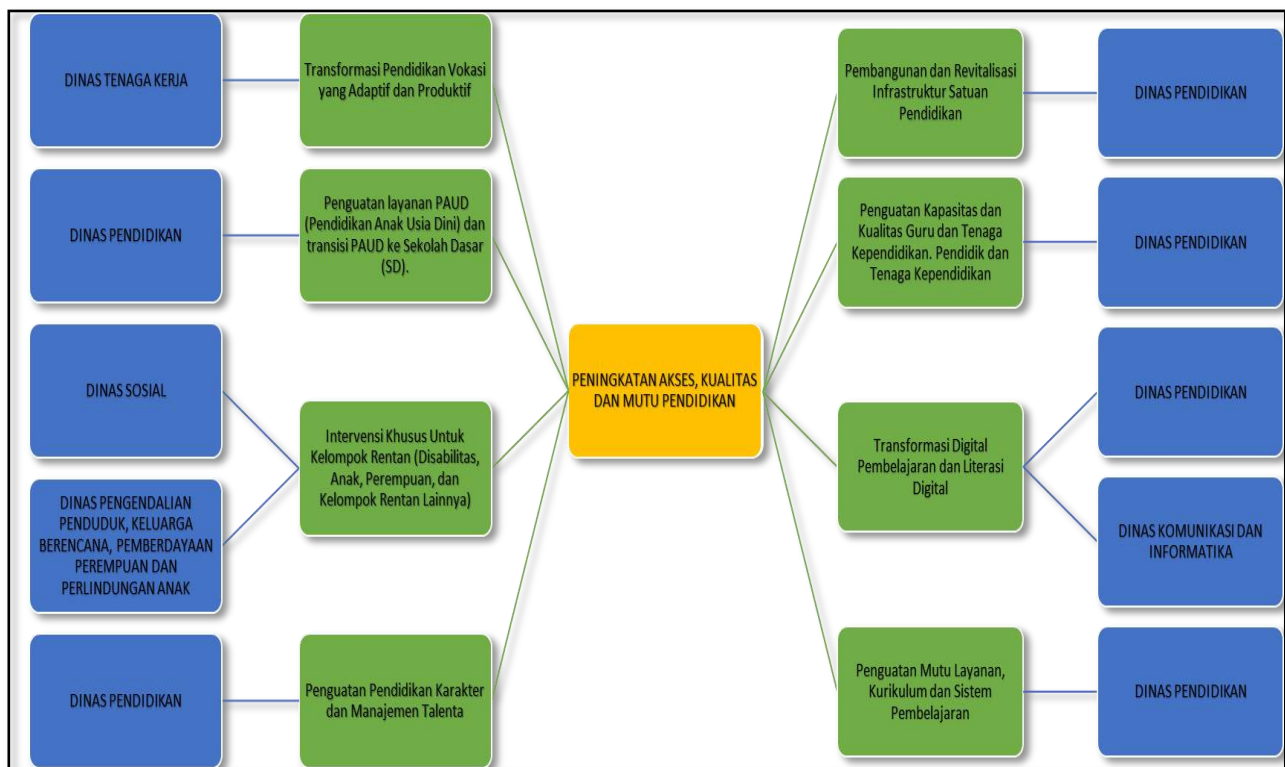
Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

6. Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia guna membangun generasi emas Indonesia tahun 2045. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah menekankan bahwa pendidikan yang inklusif dan berkualitas adalah fondasi bagi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. Kebijakan ini meliputi peningkatan akses yang merata, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan program peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan diperlukan program lintas sektor, sebagaimana gambaran berikut ini.

Gambar 3.10
Cross Cutting Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan



Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

3.5. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

Perencanaan daerah harus terintegrasi dengan perencanaan Pembangunan nasional, oleh karena itu RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 harus mendukung prioritas nasional yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029. Berikut ini program prioritas Nasional yang didukung oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), khususnya bagi anak-anak dan ibu.

Selain itu, Program MBG juga dapat menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, maupun nelayan dalam rantai pasokannya, sehingga dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Adapun dukungan Kota Tasikmalaya terhadap program ini dilakukan melalui:

- 1) Sektor ekonomi: Mendorong keterlibatan UMKM, petani dan nelayan dalam rantai pasok, sehingga melibatkan banyak pihak distribusi dan produksi pangan bergizi.
- 2) Sektor kesehatan: Mendorong upaya makan bergizi secara teratur kepada kelompok rentan serta keamanan pangan yang dikonsumsi.
- 3) Sektor pendidikan: Mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
- 4) Sektor ketahanan pangan: Memperkuat produksi pangan lokal untuk menghasilkan pangan yang berkualitas.

2. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat merupakan upaya strategis untuk menjawab tantangan kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan marjinal. Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang terintegrasi dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Materi Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya berisi kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*), namun dilengkapi dengan pendidikan karakter, keterampilan hidup (*life skills*), serta pengetahuan sosial dan budaya lokal. Sebagai *centre of excellence*, Sekolah Rakyat berkomitmen memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan menginspirasi dan mengembangkan intelektual, melalui keunggulan pemikiran dan karakter. Sekolah Rakyat diharapkan menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, mental yang tangguh dan karakter yang kuat.

Adapun dukungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap Sekolah Rakyat dilakukan melalui penyediaan lahan dan perizinan.

3. Koperasi Merah Putih

Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Inpres ini menetapkan bahwa percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kota Tasikmalaya ditargetkan membentuk 69 Koperasi Merah Putih, sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.

Koperasi Merah Putih ini dibentuk dengan tujuan untuk menjawab beberapa masalah yang terjadi di wilayah perdesaan/kelurahan, seperti halnya: pendapatan penduduk desa/kelurahan yang masih minim, kurangnya lapangan kerja, tidak stabilnya harga bahan pokok, dan maraknya masyarakat yang terjebak hutang pinjaman online maupun rentenir.

Pendirian Koperasi Merah Putih terdapat tiga mode pendirian, yaitu:

- 1) Membangun koperasi baru;
- 2) Mengembangkan koperasi yang sudah ada;
- 3) Revitalisasi koperasi yang tidak aktif.

Adapun dukungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih:

- 1) Penyediaan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
- 2) Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh kelurahan terkait program koperasi;
- 3) Melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih di kelurahan kepada Pemerintah Pusat.

Koperasi Merah Putih ini sejalan dengan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya yakni Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan (Pelak). Pelak adalah program prioritas daerah untuk menumbuhkembangkan usaha mikro dan meningkatkan kesempatan bekerja serta berusaha pada sektor industri, perdagangan, jasa, koperasi, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan di setiap wilayah Kelurahan atau Kecamatan berbasis potensi dan kearifan lokal dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, pers, komunitas dan masyarakat.

4. Program 3 (tiga) Juta Rumah

Program 3 (tiga) Juta Rumah merupakan program strategis nasional dalam sektor perumahan yang diluncurkan untuk menjawab tantangan backlog perumahan nasional yang tinggi serta untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasikan pembangunan rumah tapak dan hunian vertikal secara masif dan berkelanjutan, mencakup pembangunan hunian baru serta perbaikan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk mendukung Program 3 (tiga) Juta Rumah, melalui:

- 1) Penetapan dan implementasi Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.
- 2) Penetapan dan implementasi Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.
- 3) Penganggaran di Bidang Perumahan dalam APBD Kota Tasikmalaya, yaitu: perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.
- 4) Pemutakhiran data perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni.

5. Program Cek Kesehatan Gratis dan Penanganan Tuberkulosis

Program ini merupakan layanan kesehatan preventif yang diberikan pemerintah untuk memastikan masyarakat bisa memantau kondisi kesehatannya tanpa terbebani biaya. Adapun bentuk programnya berupa skrining rutin terhadap deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, serta edukasi Kesehatan. Secara umum tujuan dari Program Cek Kesehatan Gratis adalah mencegah penyakit sejak dini, mengurangi angka kesakitan, dan menekan biaya pengobatan jangka panjang.

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Program penanganan TB meliputi: skrining dan deteksi dini, pengobatan gratis, pendampingan pasien, penanganan TB Resistan Obat (TB-RO). Sedangkan untuk pencegahan TB dilakukan melalui: pemberian vaksin BCG pada bayi, serta edukasi tentang etika batuk, ventilasi rumah, dan gizi seimbang.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kedua program di atas, antara lain:

- 1) Mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan cek kesehatan gratis, penyediaan obat TB, alat tes, dan sarana prasarana.
- 2) Penyediaan layanan kesehatan dengan memperkuat puskesmas, posyandu, rumah sakit daerah, dan layanan keliling.
- 3) SDM kesehatan dengan menugaskan dokter, perawat, kader kesehatan, serta pelatihan tenaga medis dalam deteksi dan penanganan TB.
- 4) Kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama dengan sekolah, tempat kerja, organisasi masyarakat, dan media lokal untuk kampanye pencegahan TB dan ajakan cek kesehatan.
- 5) Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan target penemuan kasus TB tercapai, angka kesembuhan meningkat, dan kasus putus obat menurun serta pencapaian target cek kesehatan seluruh masyarakat.

6. Program Prioritas Presiden Lainnya

Selain program prioritas tersebut pemerintah daerah juga akan menyelaraskan kebijakan dan programnya dengan Program Prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RKP yang akan dijabarkan dalam RPJMD dan RKPD.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					490.875.704.604,00		494.853.454.604,00		498.796.954.604,00		503.864.204.604,00		511.239.204.604,00		511.239.204.604,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					342.564.478.002,00		342.564.478.002,00		342.564.478.002,00		342.564.478.002,00		342.564.478.002,00		342.564.478.002,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	71	72	73	342.564.478.002,00	74	342.564.478.002,00	75	342.564.478.002,00	76	342.564.478.002,00	77	342.564.478.002,00	77	342.564.478.002,00	Dinas Pendidikan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	78	79	80		81		82		83		84		84		Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					140.198.726.602,00		143.365.226.602,00		146.416.451.602,00		150.501.989.102,00		156.797.215.352,00		156.797.215.352,00	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD) (%)	80,39	80,45	80,51	140.198.726.602,00	80,58	143.365.226.602,00	80,64	146.416.451.602,00	81,00	150.501.989.102,00	81,06	156.797.215.352,00	81,06	156.797.215.352,00	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD) (%)	97,35	97,41	97,48		97,54		97,73		97,83		97,95		97,95		Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP) (%)	97,35	97,42	97,51		97,57		97,76		97,86		97,98		97,98		Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan) (%)	14,82	17,30	20,00		22,25		24,72		27,20		30,10		30,10		Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00		362.364.750,00		362.364.750,00	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	247.500.000,00	100	272.250.000,00	100	299.475.000,00	100	329.422.500,00	100	362.364.750,00	100	362.364.750,00	Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					7.755.000.000,00		8.530.500.000,00		9.383.550.000,00		10.321.905.000,00		11.354.095.500,00		11.354.095.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	47,40	47,41	47,42	7.755.000.000,00	47,43	8.530.500.000,00	47,44	9.383.550.000,00	47,45	10.321.905.000,00	47,46	11.354.095.500,00	47,46	11.354.095.500,00	Dinas Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					110.000.000,00		121.000.000,00		133.000.000,00		146.410.000,00		161.051.000,00		161.051.000,00	
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	25,03	25,15	25,20	110.000.000,00	25,25	121.000.000,00	25,30	133.000.000,00	25,35	146.410.000,00	25,40	161.051.000,00	25,40	161.051.000,00	Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					494.363.951.010,00		482.363.951.010,00		493.363.951.010,00		495.531.951.010,00		504.863.951.010,00		504.863.951.010,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					326.785.794.788,00		326.785.794.788,00		327.132.878.788,00		327.497.316.988,00		327.879.977.192,00		327.879.977.192,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	83	84	84	326.785.794.788,00	85	326.785.794.788,00	85	327.132.878.788,00	86	327.497.316.988,00	86	327.879.977.192,00	86	327.879.977.192,00	Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	78,91	79,41	79,91		80,41		80,91		81,41		81,91		81,91		Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					163.060.450.598,00		151.060.450.598,00		161.560.481.338,00		163.203.513.638,00		171.984.297.415,00		171.984.297.415,00	
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Masyarakat (%)	98,8	98,8	99,0	163.060.450.598,00	99,2	151.060.450.598,00	99,4	161.560.481.338,00	99,6	163.203.513.638,00	99,8	171.984.297.415,00	99,8	171.984.297.415,00	Dinas Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	85	90	90		91		92		93		94		94		Dinas Kesehatan
	Jumlah Kematian Bayi (per 100.000) (Kasus)	91	91	81		76		71		66		61		61		Dinas Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (per 1.000) (Kasus)	15	15	13		11		9		7		5		5		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	141	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)	98,1	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.460.000.000,00		1.460.000.000,00		1.460.000.000,00		1.460.000.000,00		1.460.000.000,00		1.460.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Ketersediaan SDM kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi (%)	65	70	75	1.460.000.000,00	80	1.460.000.000,00	85	1.460.000.000,00	90	1.460.000.000,00	95	1.460.000.000,00	95	1.460.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					961.313.193,00		961.313.193,00		1.009.378.853,00		1.059.847.753,00		1.112.840.140,00		1.112.840.140,00	
Terjaminnya Ketersediaan, Mutu, Keamanan, Khasiat/manfaat sediaan farmasi, Alat kesehatan, dan makanan-minuman	Persentase Sarana Kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar (%)	76	77	78	961.313.193,00	79	961.313.193,00	80	1.009.378.853,00	81	1.059.847.753,00	82	1.112.840.140,00	82	1.112.840.140,00	Dinas Kesehatan
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat (%)	44,2	50	75		80		85		90		95		95		Dinas Kesehatan
	Persentase Pangan Olahan Siap Saji (POSS) memenuhi syarat (%)	0	50	75		80		85		90		95		95		Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.096.392.431,00		2.096.392.431,00		2.201.212.031,00		2.311.272.631,00		2.426.836.263,00		2.426.836.263,00	
Meningkatnya Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Kesehatan	Persentase Peningkatan upaya promkes, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, persentase penumbuhan kesadaran dalam peningkatan derajat keluarga dan lingkungan dalam penerapan PHBS (%)	50	50	51	2.096.392.431,00	52	2.096.392.431,00	53	2.201.212.031,00	54	2.311.272.631,00	55	2.426.836.263,00	55	2.426.836.263,00	Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					104.892.784.786,00		107.829.906.966,00		121.005.218.171,00		129.573.218.171,00		140.905.218.171,00		140.905.218.171,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					13.312.154.286,00		13.312.154.286,00		13.312.154.286,00		13.312.154.286,00		13.312.154.286,00		13.312.154.286,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	81,67	82,86	82,18	13.312.154.286,00	82,20	13.312.154.286,00	82,22	13.312.154.286,00	82,24	13.312.154.286,00	82,26	13.312.154.286,00	82,26	13.312.154.286,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	85	85,85	86,20		86,50		86,70		86,90		87,00		87,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.442.000.000,00		7.960.722.180,00		9.896.024.885,00		11.964.024.885,00		13.746.024.885,00		13.746.024.885,00	
Meningkatnya Kinerja Irigasi	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik (%)	41,41	38,71	38,78	5.972.000.000,00	39,36	6.090.722.180,00	40,3	7.970.270.710,00	41,63	9.621.013.168,25	43,33	11.003.013.168,00	43,33	11.003.013.168,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya Proporsi Sarana Prasarana SDA Yang Berfungsi Optimal	Persentase Panjang Jaringan Sungai yang Berfungsi Optimal (%)	25,44	27,94	29,15	1.470.000.000,00	31,1	1.870.000.000,00	33,12	1.925.754.175,00	35,56	2.343.011.716,75	38,43	2.743.011.717,00	38,43	2.743.011.717,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					12.025.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota (%)	58,31	58,01	70,43	12.025.000.000,00	70,93	12.000.000.000,00	71,43	12.000.000.000,00	71,93	12.000.000.000,00	72,43	12.000.000.000,00	72,43	12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.594.400.000,00		1.532.800.000,00		1.532.800.000,00		1.532.800.000,00		1.532.800.000,00		1.532.800.000,00	
Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap SPALD Berupa Akses Layak, Dan Akses Aman	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap SPALD Berupa Akses Layak, Dan Akses Aman (%)	-	-	62,69	1.012.500.000,00	62,79	1.012.500.000,00	62,89	1.012.500.000,00	62,99	1.012.500.000,00	63,09	1.012.500.000,00	63,09	1.012.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan Air Limbah Domestik	IKM Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Nilai)	83,54	84	84	581.900.000,00	84	520.300.000,00	84	520.300.000,00	84	520.300.000,00	84	520.300.000,00	84	520.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					16.985.000.000,00		17.985.000.000,00		18.665.000.000,00		21.665.000.000,00		22.485.000.000,00		22.485.000.000,00	
Meningkatnya Infrastruktur Drainase Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik (%)	66,85	66,41	64,79	5.000.000.000,00	65,54	6.000.000.000,00	66,35	6.500.000.000,00	67,53	9.500.000.000,00	68,84	10.500.000.000,00	68,84	10.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya Jaringan Drainase Jalan Kota	Persentase peningkatan jaringan Drainase Jalan kota (%)	-	0,36	0,83	11.985.000.000,00	0,83	11.985.000.000,00	0,85	12.165.000.000,00	0,85	12.165.000.000,00	0,83	11.985.000.000,00	0,83	11.985.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					13.970.000.000,00		14.285.000.000,00		15.460.000.000,00		15.460.000.000,00		22.460.000.000,00		22.460.000.000,00	
Meningkatnya Proporsi Bangunan Gedung Kewenangan Pemda yang Sesuai Standar Teknis	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda Yang Sesuai Standar Teknis (%)	-	-	49,92	13.970.000.000,00	51,22	14.285.000.000,00	52,52	15.460.000.000,00	53,82	15.460.000.000,00	55,12	22.460.000.000,00	55,12	22.460.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					38.264.230.500,00		39.214.230.500,00		49.099.239.000,00		52.749.239.000,00		54.429.239.000,00		54.429.239.000,00	
Meningkatnya infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik (%)	67,19	60,88	51,88	10.000.000.000,00	54,93	11.100.000.000,00	59,27	15.800.000.000,00	64,71	19.800.000.000,00	70,56	21.300.000.000,00	70,56	21.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya jaringan jalan	Persentase Peningkatan Jaringan Jalan (%)	2,99	3,81	4,84	28.264.230.500,00	4,84	28.114.230.500,00	5,15	33.299.239.000,00	5,15	32.949.239.000,00	5,15	33.129.239.000,00	5,15	33.129.239.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					310.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00	
Meningkatnya Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat Jasa Konstruksi (%)	32,43	35,30	41,34	310.000.000,00	47,39	315.000.000,00	53,43	315.000.000,00	59,47	315.000.000,00	65,52	315.000.000,00	65,52	315.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					990.000.000,00		1.225.000.000,00		725.000.000,00		575.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00	
Meningkatnya Proporsi Luas Lahan Yang Dimanfaatkan Pemohon Sesuai KKPR Pasca KKPR Terbit	Persentase Luas Lahan Yang Dimanfaatkan Pemohon Pasca KKPR Terbit (%)	-	-	99	990.000.000,00	99	1.225.000.000,00	99	725.000.000,00	99	575.000.000,00	99	625.000.000,00	99	625.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN					12.899.820.931,00		13.699.820.931,00		14.599.820.931,00		15.717.820.931,00		19.217.820.931,00		19.217.820.931,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.076.755.495,00		5.076.755.495,00		5.076.755.495,00		5.076.755.495,00		5.076.755.495,00		5.076.755.495,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	81,50	81,50	81,60	5.076.755.495,00	81,75	5.076.755.495,00	82,00	5.076.755.495,00	82,25	5.076.755.495,00	82,50	5.076.755.495,00	82,50	5.076.755.495,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	86,28	86,50	86,60		86,75		87		87,25		87,50		87,50		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		850.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Terkendalinya Kualitas Perumahan	Persentase Perumahan yang Sesuai dengan Standar Bangunan dan Perumahan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	800.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.666.532.718,00		4.291.532.718,00		4.515.532.718,00		4.674.532.718,00		6.549.532.718,00		6.549.532.718,00	
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	Persentase Penanganan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha (%)	15,89	19,52	23,15	2.466.532.718,00	26,78	3.091.532.718,00	30,41	3.195.532.718,00	34,03	3.354.532.718,00	37,66	5.229.532.718,00	37,66	5.229.532.718,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kawasan Permukiman Kumuh (%)	42,53	42,33	42,12	1.200.000.000,00	41,91	1.200.000.000,00	41,70	1.320.000.000,00	41,49	1.320.000.000,00	41,28	1.320.000.000,00	41,28	1.320.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN					1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.322.000.000,00		1.322.000.000,00		1.322.000.000,00		1.322.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PERMUKIMAN KUMUH																
Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	57,47	57,36	57,26	1.200.000.000,00	57,15	1.200.000.000,00	57,05	1.322.000.000,00	56,94	1.322.000.000,00	56,84	1.322.000.000,00	56,84	1.322.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2.346.532.718,00		2.521.532.718,00		3.075.532.718,00		3.734.532.718,00		5.659.532.718,00		5.659.532.718,00	
Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	47,35	47,65	47,95	2.346.532.718,00	48,25	2.521.532.718,00	48,54	3.075.532.718,00	48,83	3.734.532.718,00	49,12	5.659.532.718,00	49,12	5.659.532.718,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	0	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.254.790.557,00		14.554.790.557,00		12.404.790.557,00		12.622.790.557,00		14.672.790.557,00		14.672.790.557,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.959.728.714,00		6.959.728.714,00		6.959.728.714,00		6.959.728.714,00		6.959.728.714,00		6.959.728.714,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	73,96	77,00	79,00	6.959.728.714,00	81,00	6.959.728.714,00	83,00	6.959.728.714,00	85,00	6.959.728.714,00	87	6.959.728.714,00	87	6.959.728.714,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	84,5	88,5	89		89,5		90		90,5		91		91		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.852.057.475,00		4.115.500.000,00		3.551.500.000,00		3.630.481.719,00		3.450.500.000,00		3.450.500.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Memahami Risiko Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (%)	0,41	0,46	0,51	2.852.057.475,00	0,56	4.115.500.000,00	0,61	3.551.500.000,00	0,66	3.630.481.719,00	0,71	3.450.500.000,00	0,71	3.450.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.443.004.368,00		3.479.561.843,00		1.893.561.843,00		2.032.580.124,00		4.262.561.843,00		4.262.561.843,00	
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100	1.443.004.368,00	100	3.479.561.843,00	100	1.893.561.843,00	100	2.032.580.124,00	100	4.262.561.843,00	100	4.262.561.843,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					16.338.384.758,00		16.638.384.758,00		16.888.384.758,00		17.106.384.758,00		18.156.384.758,00		18.156.384.758,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.058.115.208,00		11.058.115.208,00		11.058.115.208,00		11.058.115.208,00		11.058.115.208,00		11.058.115.208,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	77	77,3	79,4	11.058.115.208,00	77,5	11.058.115.208,00	77,6	11.058.115.208,00	77,7	11.058.115.208,00	77,8	11.058.115.208,00	77,8	11.058.115.208,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	90	80	81		81,5		82		82,5		83		83		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.280.269.550,00		5.580.269.550,00		5.830.269.550,00		6.048.269.550,00		7.098.269.550,00		7.098.269.550,00	
Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	4.019.780.000,00	100	4.084.395.000,00	100	4.294.395.000,00	100	4.412.395.000,00	100	5.142.569.550,00	100	5.142.569.550,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya partisipasi anggota linmas	Persentase Anggota Linmas Aktif (%)	0	50	50	281.523.550,00	51	281.523.550,00	52	321.523.550,00	53	321.523.550,00	54	400.000.000,00	54	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	978.966.000,00	100	1.214.351.000,00	100	1.214.351.000,00	100	1.314.351.000,00	100	1.555.700.000,00	100	1.555.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					27.593.175.315,00		31.193.175.315,00		29.293.175.315,00		29.729.175.315,00		32.829.175.315,00		32.829.175.315,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.017.843.922,00		18.017.843.922,00		18.017.843.922,00		18.017.843.922,00		18.017.843.922,00		18.017.843.922,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	73,96	77,00	79,00	6.959.728.714,00	81,00	6.959.728.714,00	83,00	6.959.728.714,00	85,00	6.959.728.714,00	87,00	6.959.728.714,00	87,00	6.959.728.714,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	84,5	88,5	89,0		89,5		90,0		90,5		91,0		91,0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	77,0	77,3	79,4	11.058.115.208,00	77,5	11.058.115.208,00	77,6	11.058.115.208,00	77,7	11.058.115.208,00	77,8	11.058.115.208,00	77,8	11.058.115.208,00	Satuan Polisi Pamong Praja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)																
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	90,00	80,00	81,00		81,50		82,00		82,50		83,00		83,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.280.269.550,00		5.580.269.550,00		5.830.269.550,00		6.048.269.550,00		7.098.269.550,00		7.098.269.550,00	
Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	4.019.780.000,00	100	4.084.395.000,00	100	4.294.395.000,00	100	4.412.395.000,00	100	5.142.569.550,00	100	5.142.569.550,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya partisipasi anggota linmas	Persentase Anggota Linmas Aktif (%)	0	50	50	281.523.550,00	51	281.523.550,00	52	321.523.550,00	53	321.523.550,00	54	400.000.000,00	54	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	978.966.000,00	100	1.214.351.000,00	100	1.214.351.000,00	100	1.314.351.000,00	100	1.555.700.000,00	100	1.555.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.852.057.475,00		4.115.500.000,00		3.551.500.000,00		3.630.481.719,00		3.450.500.000,00		3.450.500.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Memahami Risiko Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (%)	0,41	0,46	0,51	2.852.057.475,00	0,56	4.115.500.000,00	0,61	3.551.500.000,00	0,66	3.630.481.719,00	0,71	3.450.500.000,00	0,71	3.450.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.443.004.368,00		3.479.561.843,00		1.893.561.843,00		2.032.580.124,00		4.262.561.843,00		4.262.561.843,00	
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100	1.443.004.368,00	100	3.479.561.843,00	100	1.893.561.843,00	100	2.032.580.124,00	100	4.262.561.843,00	100	4.262.561.843,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.724.369.500,00		16.724.369.500,00		17.284.369.500,00		18.752.369.500,00		20.452.369.500,00		20.452.369.500,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.633.175.000,00		5.649.175.000,00		5.731.176.000,00		5.871.176.000,00		6.562.175.000,00		6.562.175.000,00	
Meningkatnya Pelayanan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,30	88,30	88,35	5.633.175.000,00	88,40	5.649.175.000,00	88,45	5.731.176.000,00	88,5	5.871.176.000,00	88,55	6.562.175.000,00	88,55	6.562.175.000,00	Dinas Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Perangkat Daerah (poin)															
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	74,61	74,65	76,72		76,73		76,73		76,75		76,77		76,77		Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					950.000.000,00		960.000.000,00		1.212.000.000,00		1.250.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas PSKS	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis (%)	100	100	100	950.000.000,00	100	960.000.000,00	100	1.212.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					7.456.194.500,00		8.415.194.500,00		8.565.194.500,00		9.585.194.500,00		9.685.194.500,00		9.685.194.500,00	
Meningkatnya PPKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS (%)	99,66	100	100	7.456.194.500,00	100	8.415.194.500,00	100	8.565.194.500,00	100	9.585.194.500,00	100	9.685.194.500,00	100	9.685.194.500,00	Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					650.000.000,00		665.000.000,00		720.999.000,00		980.999.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran (%)	98,59	100	100	650.000.000,00	100	665.000.000,00	100	720.999.000,00	100	980.999.000,00	100	1.350.000.000,00	100	1.350.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					980.000.000,00		980.000.000,00		990.000.000,00		995.000.000,00		1.280.000.000,00		1.280.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (%)	100	100	100	980.000.000,00	100	980.000.000,00	100	990.000.000,00	100	995.000.000,00	100	1.280.000.000,00	100	1.280.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					55.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar (%)	100	100	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.722.472.062,00		9.546.972.062,00		10.046.972.062,00		10.411.972.062,00		12.011.972.062,00		12.011.972.062,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.614.472.062,00		5.930.972.062,00		6.230.972.062,00		6.491.972.062,00		7.461.972.062,00		7.461.972.062,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	75,31	75,33	75,35	5.614.472.062,00	75,4	5.930.972.062,00	75,45	6.230.972.062,00	75,5	6.491.972.062,00	75,55	7.461.972.062,00	75,55	7.461.972.062,00	Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	89,79	89,8	89,99		90,00		90,10		90,20		90,30		90,30		Dinas Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		0		0		100.000.000,00		0		0	
Meningkatnya perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100.000.000,00	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.030.000.000,00		1.156.000.000,00		1.306.000.000,00		1.175.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00	
Meningkatnya profesionalisme Tenaga Kerja dan Pencari Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus pelatihan berbasis kompetensi (%)	-	-	100	1.030.000.000,00	100	1.156.000.000,00	100	1.306.000.000,00	100	1.175.000.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.450.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.243.000.000,00		1.510.000.000,00		1.545.000.000,00		1.625.000.000,00		1.910.000.000,00		1.910.000.000,00	
Meningkatnya pencari kerja yang bekerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (%)	40	40	40	1.243.000.000,00	40	1.510.000.000,00	40	1.545.000.000,00	40	1.625.000.000,00	40	1.910.000.000,00	40	1.910.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					835.000.000,00		950.000.000,00		965.000.000,00		1.020.000.000,00		1.190.000.000,00		1.190.000.000,00	
Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	10.000	10.000	10.500	835.000.000,00	11.000	950.000.000,00	11.500	965.000.000,00	12.000	1.020.000.000,00	12.000	1.190.000.000,00	12.000	1.190.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	27	27,29	32,29		37,29		42,29		47,29		52,29		52,29		Dinas Tenaga Kerja
	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	1	1	1		1		1		1		1		1		Dinas Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.595.000.000,00		1.889.840.000,00		2.263.840.000,00		2.263.840.000,00		2.669.785.148,00		2.669.785.148,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					70.000.000,00		111.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya komitmen dan kebijakan dalam pengarusutamaan gender	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG (%)	100	100	100	70.000.000,00	100	111.000.000,00	100	185.000.000,00	100	185.000.000,00	100	375.000.000,00	100	375.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					300.000.000,00		378.840.000,00		443.840.000,00		443.840.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	persentase kasus yang tertangani (%)	100	100	100	300.000.000,00	100	378.840.000,00	100	443.840.000,00	100	443.840.000,00	100	475.000.000,00	100	475.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					835.000.000,00		885.000.000,00		935.000.000,00		935.000.000,00		1.069.785.148,00		1.069.785.148,00	
Meningkatnya partisipasi Keluarga dalam pengarusutamaan gender	persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender (%)	100	100	100	835.000.000,00	100	885.000.000,00	100	935.000.000,00	100	935.000.000,00	100	1.069.785.148,00	100	1.069.785.148,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah dan Informasi Gender dan Anak	Persentase Data Terpilah yang Dimanfaatkan (%)	0	0	100	20.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Lenvedia	persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdavaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak																Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					270.000.000,00		365.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak	persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak (%)	100	100	100	270.000.000,00	100	365.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					21.737.963.500,00		22.232.163.500,00		22.062.587.855,00		21.530.587.855,00		21.530.587.855,00		21.530.587.855,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.812.963.500,00		18.707.163.500,00		18.787.587.855,00		18.505.587.855,00		18.505.587.855,00		18.505.587.855,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	79,85	79,9	79,9	18.812.963.500,00	80	18.707.163.500,00	80	18.787.587.855,00	80	18.505.587.855,00	80	18.505.587.855,00	80	18.505.587.855,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	85,11	85,15	85,15		85,20		85,25		85,30		85,35		85,35		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					50.000.000,00		550.000.000,00		300.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	550.000.000,00	100	300.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	95,1	95,2	95,2	1.700.000.000,00	95,3	1.800.000.000,00	95,4	1.800.000.000,00	95,5	1.800.000.000,00	95,6	1.800.000.000,00	95,6	1.800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	4,35	4,35	4,35	950.000.000,00	2,90	950.000.000,00	2,90	950.000.000,00	1,50	950.000.000,00	1,50	950.000.000,00	1,50	950.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu Keamanan Pangan(%) (%)	100	100	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					13.624.885,00		13.624.885,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					13.624.885,00		13.624.885,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penatagunaan Tanah	Persentase Kesesuaian Luas Tanah Yang Dimanfaatkan Untuk Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Dengan Rencana Tata Ruang (%)	100	100	100	13.624.885,00	100	13.624.885,00	100	16.200.000,00	100	16.200.000,00	100	16.200.000,00	100	16.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					49.832.278.979,00		67.732.278.979,00		68.532.278.979,00		70.700.278.979,00		52.500.278.979,00		52.500.278.979,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.765.708.245,00		20.891.188.245,00		21.089.188.245,00		21.201.188.245,00		21.416.629.445,00		21.416.629.445,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,2	80,25	80,27	20.765.708.245,00	80,30	20.891.188.245,00	80,34	21.089.188.245,00	80,39	21.201.188.245,00	80,45	21.416.629.445,00	80,45	21.416.629.445,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	88,62	88,63	88,64		88,66		88,69		88,73		88,78		88,78		Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					600.000.000,00		450.000.000,00		350.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	600.000.000,00	100	450.000.000,00	100	350.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					895.000.000,00		874.000.000,00		1.490.000.000,00		666.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pencemaran	Persentase Penurunan Pencemaran (%)	0,15	0,2	0,2	895.000.000,00	0,2	874.000.000,00	0,2	1.490.000.000,00	0,2	666.000.000,00	0,2	510.000.000,00	0,2	510.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					4.384.600.000,00		4.192.573.081,00		4.218.926.919,00		4.440.790.000,00		4.530.869.000,00		4.530.869.000,00	
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola (%)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola (%)	100	100	100	4.384.600.000,00	100	4.192.573.081,00	100	4.218.926.919,00	100	4.440.790.000,00	100	4.530.869.000,00	100	4.530.869.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian B3 dan LB3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	0	0	55	12.000.000,00	60	15.000.000,00	65	17.000.000,00	70	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					210.000.000,00		302.000.000,00		395.000.000,00		487.000.000,00		580.000.000,00		580.000.000,00	
Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Terhadap Ketentuan Lingkungan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH (%)	0	0	10	210.000.000,00	10	302.000.000,00	10	395.000.000,00	10	487.000.000,00	10	580.000.000,00	10	580.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00	
Meningkatnya Masyarakat yang Mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	265.000.000,00	100	265.000.000,00	100	265.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					225.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		480.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Terselesaikan (%)	100	100	100	225.000.000,00	100	240.000.000,00	100	260.000.000,00	100	480.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					22.499.970.734,00		40.527.517.653,00		40.472.163.815,00		42.930.300.734,00		24.367.780.534,00		24.367.780.534,00	
Terkendalnya Sampah	Persentase pengelolaan sampah (%)	86,13	100	100	22.499.970.734,00	100	40.527.517.653,00	100	40.472.163.815,00	100	42.930.300.734,00	100	24.367.780.534,00	100	24.367.780.534,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.343.229.748,00		11.343.229.748,00		11.443.229.748,00		11.711.229.748,00		13.311.229.748,00		13.311.229.748,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.868.134.118,00		9.812.247.786,00		9.877.520.287,00		10.087.978.931,00		11.269.288.738,00		11.269.288.738,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	86,76	87,00	87,00	9.868.134.118,00	87,50	9.812.247.786,00	88,00	9.877.520.287,00	88,00	10.087.978.931,00	88,50	11.269.288.738,00	88,50	11.269.288.738,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	76,26	77,00	77,50		78,00		78,50		79,00		79,00		79,00		Dinas Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					486.223.430,00		497.534.602,00		498.784.601,00		521.050.000,00		645.666.010,00		645.666.010,00	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	49,09	48,50	48,70	486.223.430,00	49,00	497.534.602,00	49,30	498.784.601,00	49,50	521.050.000,00	49,70	645.666.010,00	49,70	645.666.010,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	7,32	7,35	7,50		7,65		7,80		7,90		8,00		8,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					469.872.200,00		488.497.360,00		493.622.360,00		503.170.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun (%)	94,65	94,75	94,90	469.872.200,00	95,10	488.497.360,00	95,25	493.622.360,00	95,40	503.170.000,00	95,50	690.000.000,00	95,50	690.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah (%)	87,25	87,60	87,80		87,95		88,05		88,25		88,50		88,50		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai (%)	67,81	69,00	69,80		70,25		70,85		71,30		71,65		71,65		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					486.000.000,00		510.300.000,00		536.920.000,00		560.829.192,00		656.275.000,00		656.275.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	486.000.000,00	100	510.300.000,00	100	536.920.000,00	100	560.829.192,00	100	656.275.000,00	100	656.275.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					33.000.000,00		34.650.000,00		36.382.500,00		38.201.625,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	33.000.000,00	100	34.650.000,00	100	36.382.500,00	100	38.201.625,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN					14.475.772.878,00		14.980.932.878,00		15.156.932.878,00		15.474.932.878,00		16.550.987.730,00		16.550.987.730,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
KELUARGA BERENCANA																
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.085.987.730,00		5.085.987.730,00		5.085.987.730,00		5.085.987.730,00		5.085.987.730,00		5.085.987.730,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	90,70	90,75	90,80	5.085.987.730,00	90,83	5.085.987.730,00	90,85	5.085.987.730,00	90,87	5.085.987.730,00	90,90	5.085.987.730,00	90,90	5.085.987.730,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	79,11	79,12	79,13		79,14		79,15		79,16		79,17		79,17		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					477.000.000,00		590.000.000,00		630.000.000,00		700.000.000,00		890.000.000,00		890.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan (%)	100	100	100	477.000.000,00	100	590.000.000,00	100	630.000.000,00	100	700.000.000,00	100	890.000.000,00	100	890.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.300.000.000,00		4.692.160.000,00		4.749.745.148,00		4.962.345.148,00		5.818.400.000,00		5.818.400.000,00	
Meningkatnya Kepesertaan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	67,67	67,67	68,50	4.300.000.000,00	69,00	4.692.160.000,00	69,50	4.749.745.148,00	70,00	4.962.345.148,00	70,00	5.818.400.000,00	70,00	5.818.400.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,5	12,5	12,4		12,3		12,2		12,1		12,0		12,0		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluaara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.612.785.148,00		4.612.785.148,00		4.691.200.000,00		4.726.600.000,00		4.756.600.000,00		4.756.600.000,00	
Meningkatnya Fungsi Agama, Sosialisasi dan Pendidikan, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan	Persentase Keluarga yang Memenuhi 8 Fungsi Keluarga (%)	100	100	100	4.612.785.148,00	100	4.612.785.148,00	100	4.691.200.000,00	100	4.726.600.000,00	100	4.756.600.000,00	100	4.756.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					46.130.860.775,00		46.130.860.775,00		46.430.860.775,00		46.698.860.775,00		48.298.860.775,00		48.298.860.775,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.541.879.450,00		11.541.879.450,00		11.745.842.450,00		11.748.842.450,00		11.768.842.450,00		11.768.842.450,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	80,75	80,75	81,25	11.541.879.450,00	81,75	11.541.879.450,00	82,00	11.745.842.450,00	82,25	11.748.842.450,00	82,50	11.768.842.450,00	82,50	11.768.842.450,00	Dinas Perhubungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	70,16	70,75	70,75		71,00		71,50		71,75		72,00		72,00		Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					34.588.981.325,00		34.588.981.325,00		34.685.018.325,00		34.950.018.325,00		36.530.018.325,00		36.530.018.325,00	
Terselenggaranya pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	48	50,32	53,4	34.588.981.325,00	57,13	34.588.981.325,00	61,89	34.685.018.325,00	68,42	34.950.018.325,00	75,89	36.530.018.325,00	75,89	36.530.018.325,00	Dinas Perhubungan
	Konektivitas Darat (KM)	420	448	487		504		526		540		550		550		Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					17.249.218.711,00		17.549.218.711,00		17.749.218.711,00		18.117.218.711,00		18.708.893.711,00		18.708.893.711,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					6.993.718.711,00		7.093.718.711,00		7.093.718.711,00		7.461.718.711,00		7.351.228.000,00		7.351.228.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	90,27	90,50	91,00	6.993.718.711,00	91,50	7.093.718.711,00	92,00	7.093.718.711,00	92,50	7.461.718.711,00	92,50	7.351.228.000,00	92,50	7.351.228.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	82,01	82,00	82,50		83,00		83,50		84,00		84,00		84,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.838.000.000,00		1.938.000.000,00		2.038.000.000,00		2.038.000.000,00		2.556.165.711,00		2.556.165.711,00	
Meningkatnya kualitas informasi publik	Nilai Kualitas Informasi (%)	-	-	100	221.000.000,00	100	221.000.000,00	100	221.000.000,00	100	221.000.000,00	100	690.000.000,00	100	690.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Nilai Pelayanan Informasi (%)	-	-	100	1.617.000.000,00	100	1.717.000.000,00	100	1.817.000.000,00	100	1.817.000.000,00	100	1.866.165.711,00	100	1.866.165.711,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Poin)	94,08	94,1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					8.417.500.000,00		8.517.500.000,00		8.617.500.000,00		8.617.500.000,00		8.801.500.000,00		8.801.500.000,00	
Meningkatnya Implementasi Smart City	Peningkatan Implementasi Smart City (%)	-	-	1,6	285.000.000,00	1,6	285.000.000,00	1,6	285.000.000,00	1,6	285.000.000,00	1,6	285.000.000,00	1,6	285.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kematangan penerapan Pemerintah Digital	Peningkatan Kematangan Penerapan Pemerintah Digital (%)	-	-	1,2	8.132.500.000,00	1,2	8.232.500.000,00	1,2	8.332.500.000,00	1,2	8.332.500.000,00	1,2	8.516.500.000,00	1,2	8.516.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE	Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE (%)	100	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					17.171.056.396,00		17.956.184.203,00		18.661.056.396,00		19.631.056.396,00		20.011.056.396,00		20.011.056.396,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.541.934.896,00		13.589.562.703,00		13.661.934.896,00		14.001.934.896,00		13.741.934.896,00		13.741.934.896,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	79,56	80,56	81,56	13.541.934.896,00	82,56	13.589.562.703,00	83,56	13.661.934.896,00	84,56	14.001.934.896,00	85,56	13.741.934.896,00	85,56	13.741.934.896,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)																Perindustrian dan Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	85,06	85,26	85,46		85,66		85,86		86,00		86,20		86,20		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0,26	0,75	1	20.000.000,00	2	20.000.000,00	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	53,2	55,8	57,6	80.000.000,00	59,4	100.000.000,00	61,2	120.000.000,00	63	140.000.000,00	64,8	160.000.000,00	64,8	160.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	
Meningkatnya KSP/USP Koperasi berpredikat sehat	Persentase koperasi sehat (%)	26,17	27,27	28,33	100.000.000,00	29,23	120.000.000,00	30,00	140.000.000,00	31,00	160.000.000,00	34,00	180.000.000,00	34,00	180.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					225.000.000,00		262.500.000,00		300.000.000,00		337.500.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00	
Meningkatnya SDM Koperasi yang kompeten	Persentase koperasi yang bersertifikat uji kompetensi (%)	6,83	8,2	13,66	225.000.000,00	16,39	262.500.000,00	19,13	300.000.000,00	21,86	337.500.000,00	24,59	375.000.000,00	24,59	375.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					620.535.000,00		760.535.000,00		900.535.000,00		1.043.035.000,00		1.185.535.000,00		1.185.535.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas (%)	-	43,59	45,59	620.535.000,00	49,59	760.535.000,00	57,59	900.535.000,00	63,59	1.043.035.000,00	69,59	1.185.535.000,00	69,59	1.185.535.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.008.586.500,00		2.363.586.500,00		2.623.586.500,00		2.883.586.500,00		3.143.586.500,00		3.143.586.500,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	-	-	3,5	2.008.586.500,00	5,2	2.363.586.500,00	7,0	2.623.586.500,00	8,7	2.883.586.500,00	10,4	3.143.586.500,00	10,4	3.143.586.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					575.000.000,00		740.000.000,00		895.000.000,00		1.045.000.000,00		1.205.000.000,00		1.205.000.000,00	
Meningkatnya Akses Pemasaran Usaha Mikro	Pertumbuhan wirausaha (%)	8,93	9,82	11,08	575.000.000,00	12,17	740.000.000,00	13,08	895.000.000,00	13,81	1.045.000.000,00	14,36	1.205.000.000,00	14,36	1.205.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.933.256.547,00		7.533.256.547,00		7.383.256.547,00		7.501.256.547,00		8.551.256.547,00		8.551.256.547,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.615.139.057,00		6.833.256.547,00		6.748.256.547,00		6.756.256.547,00		7.261.256.547,00		7.261.256.547,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	88,32	87	90	6.615.139.057,00	90,5	6.833.256.547,00	91,1	6.748.256.547,00	91,8	6.756.256.547,00	92,5	7.261.256.547,00	92,5	7.261.256.547,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	79,91	79,75	80,05		80,15		80,17		80,2		80,25		80,25		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		180.000.000,00		135.000.000,00		125.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00	
Terealisasinya RUPM Kota Tasikmalaya	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya (%)	0	0	2	50.000.000,00	5	180.000.000,00	10	135.000.000,00	10	125.000.000,00	10	290.000.000,00	37	290.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelavanoan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		150.000.000,00		135.000.000,00		215.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00	
Meningkatnya Minat Investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	-	-	10	50.000.000,00	10	150.000.000,00	10	135.000.000,00	10	215.000.000,00	15	390.000.000,00	55	390.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					163.505.390,00		210.000.000,00		180.000.000,00		235.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00	
Tercapainya Penerbitan Perijinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	100	100	100	163.505.390,00	100	210.000.000,00	100	180.000.000,00	100	235.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					54.612.100,00		130.000.000,00		135.000.000,00		110.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal (%)	5	-	10	54.612.100,00	5	130.000.000,00	5	135.000.000,00	5	110.000.000,00	5	190.000.000,00	30	190.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0		30.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan data dan Informasi DPMTSP	Persentase data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan (%)	0	100	100	0	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					18.887.654.347,00		59.177.654.347,00		19.117.654.347,00		19.165.654.347,00		20.155.654.347,00		20.155.654.347,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.450.483.075,00		7.450.483.075,00		7.450.483.075,00		7.450.483.075,00		7.450.483.075,00		7.450.483.075,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kepemudaan,	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,66	80,72	80,74	7.450.483.075,00	80,76	7.450.483.075,00	80,78	7.450.483.075,00	80,8	7.450.483.075,00	80,82	7.450.483.075,00	80,82	7.450.483.075,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata)																
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	91,36	81,3	91,37		91,38		91,39		91,4		91,41		91,41		Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					707.000.000,00		1.522.000.000,00		945.000.000,00		645.000.000,00		645.000.000,00		645.000.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	33,17	38,43	38,65	417.000.000,00	38,76	415.000.000,00	38,87	415.000.000,00	38,98	415.000.000,00	39,09	415.000.000,00	39,09	415.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan (%)	67,64	76,55	76,69	290.000.000,00	76,81	1.107.000.000,00	76,93	530.000.000,00	77,05	230.000.000,00	77,17	230.000.000,00	77,17	230.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					10.730.171.272,00		50.205.171.272,00		10.722.171.272,00		11.070.171.272,00		12.060.171.272,00		12.060.171.272,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase cabang olahraga masyarakat yang dibina (%)	13,8	15,38	19,23	250.000.000,00	19,23	270.171.272,00	19,23	300.000.000,00	19,23	350.000.000,00	23,08	400.000.000,00	23,08	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya Pembinaan Cabang Olahraga	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga (%)	50	42,22	44,44	5.580.171.272,00	48,89	4.895.000.000,00	53,33	5.002.171.272,00	57,78	5.040.171.272,00	62,22	5.720.171.272,00	62,22	5.720.171.272,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Kondisi Baik	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik (%)	54,54	20	20	4.900.000.000,00	40	45.040.000.000,00	60	5.420.000.000,00	80	5.680.000.000,00	100	5.940.000.000,00	100	5.940.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					222.850.000,00		322.850.000,00		372.850.000,00		372.850.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					222.850.000,00		322.850.000,00		372.850.000,00		372.850.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	-	-	100	222.850.000,00	100	322.850.000,00	100	372.850.000,00	100	372.850.000,00	100	470.000.000,00	100	470.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (%)															
	Persentase Peningkatan Pengunjung Web Open Data (%)	25,81	25	-		-		-		-		-		-		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					208.825.000,00		308.825.000,00		358.825.000,00		358.825.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					208.825.000,00		308.825.000,00		358.825.000,00		358.825.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM)	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM) (Poin)	-	-	260	0	290	0	320	0	350	0	350	0	350	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya skor kelengkapan Pengamanan Informasi	Nilai Kelengkapan Pengamanan Informasi (Poin)	297	350	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi (Poin)	-	-	140	208.825.000,00	160	308.825.000,00	180	358.825.000,00	200	358.825.000,00	200	470.000.000,00	200	470.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					915.000.000,00		925.000.000,00		935.000.000,00		965.000.000,00		1.055.000.000,00		1.055.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					415.000.000,00		425.000.000,00		435.000.000,00		465.000.000,00		555.000.000,00		555.000.000,00	
Terlestarikannya Kebudayaan Daerah	Persentase Intervensi Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah (%)	19,56	30,77	53,47	415.000.000,00	37,67	425.000.000,00	38,54	435.000.000,00	39,4	465.000.000,00	40,27	555.000.000,00	40,27	555.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00	
Tersedianya SDM Seni dan Budaya Daerah Berkualitas	Persentase Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional (%)	25	5,71	6,67	205.000.000,00	13,33	205.000.000,00	17,65	205.000.000,00	15	205.000.000,00	17,39	205.000.000,00	17,39	205.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlestarikannya Sejarah Lokal	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan (%)	10	10	20	25.000.000,00	30	25.000.000,00	40	25.000.000,00	50	25.000.000,00	60	25.000.000,00	60	25.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlestarikannya Situs Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	20	20	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlestarikannya Museum Lokal	Persentase Museum yang Dilestarikan (%)	-	-	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					7.218.220.135,00		7.713.220.135,00		8.028.220.135,00		8.496.220.135,00		9.001.220.135,00		9.001.220.135,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.765.720.135,00		6.233.220.135,00		6.463.720.135,00		6.699.220.135,00		6.898.720.135,00		6.898.720.135,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,15	81	80,5	5.765.720.135,00	81	6.233.220.135,00	81,5	6.463.720.135,00	82	6.699.220.135,00	82,5	6.898.720.135,00	82,5	6.898.720.135,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	84	84	84,5		85		86		86,5		87		87		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.402.500.000,00		1.430.000.000,00		1.514.500.000,00		1.747.000.000,00		2.052.500.000,00		2.052.500.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	82,09	82,2	82,4	1.402.500.000,00	82,4	1.430.000.000,00	82,6	1.514.500.000,00	82,8	1.747.000.000,00	83	2.052.500.000,00	83	2.052.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	0	0	20	50.000.000,00	40	50.000.000,00	60	50.000.000,00	80	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					235.000.000,00		240.000.000,00		275.000.000,00		225.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	100	100	100	205.000.000,00	100	205.000.000,00	100	205.000.000,00	100	205.000.000,00	100	205.000.000,00	100	205.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					20.000.000,00		25.000.000,00		60.000.000,00		10.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	61,33	0	61,58	20.000.000,00	61,83	25.000.000,00	62,08	60.000.000,00	62,33	10.000.000,00	62,58	55.000.000,00	62,58	55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.224.624.355,00		5.430.424.355,00		5.200.000.000,00		5.200.000.000,00		5.700.000.000,00		5.700.000.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	101,06	102	102	150.000.000,00	103	150.000.000,00	104	150.000.000,00	105	150.000.000,00	106	150.000.000,00	106	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.300.000.000,00		4.300.000.000,00		4.300.000.000,00		4.300.000.000,00		4.800.000.000,00		4.800.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	9.989,71	10.000	10.000	3.300.000.000,00	10.050	4.300.000.000,00	10.100	4.300.000.000,00	10.150	4.300.000.000,00	10.200	4.800.000.000,00	10.200	4.800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					774.624.355,00		980.424.355,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,95	44	44	774.624.355,00	44,25	980.424.355,00	44,5	750.000.000,00	44,75	750.000.000,00	45	750.000.000,00	45	750.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.080.000.000,00		3.080.000.000,00		3.230.000.000,00		3.420.000.000,00		3.440.000.000,00		3.440.000.000,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					865.000.000,00		865.000.000,00		865.000.000,00		865.000.000,00		865.000.000,00		865.000.000,00	
Tersedianya Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Representatif	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan (%)	40,82	42,86	42,86	865.000.000,00	44,9	865.000.000,00	46,94	865.000.000,00	48,98	865.000.000,00	51,02	865.000.000,00	51,02	865.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.065.000.000,00		1.065.000.000,00		1.065.000.000,00		1.065.000.000,00		1.065.000.000,00		1.065.000.000,00	
Terpromosikannya Pariwisata Daerah	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daerah (%)	40	40	40	1.065.000.000,00	60	1.065.000.000,00	80	1.065.000.000,00	100	1.065.000.000,00	100	1.065.000.000,00	100	1.065.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					0		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Terselenggaranya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Jenis Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (%)	-	-	-	0	23,53	110.000.000,00	29,41	110.000.000,00	35,29	110.000.000,00	41,18	110.000.000,00	41,18	110.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.150.000.000,00		1.040.000.000,00		1.190.000.000,00		1.380.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00	
Tersedianya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkualitas	Persentase Usaha Pariwisata dan Subsektor ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (%)	20	23,33	23,33	1.150.000.000,00	26,67	1.040.000.000,00	30	1.190.000.000,00	33,33	1.380.000.000,00	36,67	1.400.000.000,00	36,67	1.400.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					13.900.000.000,00		13.750.000.000,00		14.150.000.000,00		15.050.000.000,00		16.150.000.000,00		16.150.000.000,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN					4.850.000.000,00		5.350.000.000,00		4.850.000.000,00		5.750.000.000,00		6.850.000.000,00		6.850.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	13.147,57	13.149	13.150	4.850.000.000,00	13.200	5.350.000.000,00	13.250	4.850.000.000,00	13.300	5.750.000.000,00	13.350	6.850.000.000,00	13.350	6.850.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	61.364,40	61.400	61.500		62.000		62.500		63.000		63.500		63.500		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Produksi Hortikultura dan perkebunan (Ton)	5.587,81	5.750	5.900		6.000		6.100		6.200		6.200		6.200		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					5.100.000.000,00		4.700.000.000,00		5.600.000.000,00		5.600.000.000,00		5.600.000.000,00		5.600.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	1.351	1.351	1.351	5.100.000.000,00	1.351	4.700.000.000,00	1.351	5.600.000.000,00	1.351	5.600.000.000,00	1.351	5.600.000.000,00	1.351	5.600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.370.000.000,00		1.370.000.000,00		1.370.000.000,00		1.370.000.000,00		1.370.000.000,00		1.370.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	100	100	100	1.370.000.000,00	100	1.370.000.000,00	100	1.370.000.000,00	100	1.370.000.000,00	100	1.370.000.000,00	100	1.370.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol veteriner) (%)	-	-	1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian (%)	100	75	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	75	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)	-	75	75		75		75		75		75		75		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perijinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	100	100	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.900.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan (%)	5,68	5,7	5,7	1.900.000.000,00	5,8	1.650.000.000,00	5,9	1.650.000.000,00	6	1.650.000.000,00	6	1.650.000.000,00	6	1.650.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Persentase kelembagaan tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	-	60	60		60		60		60		60		60		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					13.658.219.675,00		16.248.091.868,00		15.493.219.675,00		15.681.219.675,00		18.241.219.675,00		18.241.219.675,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi (%)	100	100	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					11.128.045.075,00		13.192.917.868,00		12.238.045.675,00		12.293.645.675,00		14.551.219.675,00		14.551.219.675,00	
Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (%)	-	50	60	11.128.045.075,00	70	13.192.917.868,00	80	12.238.045.675,00	90	12.293.645.675,00	100	14.551.219.675,00	100	14.551.219.675,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					685.000.000,00		685.000.000,00		685.000.000,00		685.000.000,00		685.000.000,00		685.000.000,00	
Terkendalinya Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	-	38,7	40,82	685.000.000,00	42,86	685.000.000,00	44,90	685.000.000,00	46,94	685.000.000,00	48,98	685.000.000,00	48,98	685.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.067.600.600,00		1.367.600.000,00		1.567.600.000,00		1.700.000.000,00		1.880.000.000,00		1.880.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Ekspor	Nilai ekspor barang (Juta USD)	19,8	20,8	21,8	1.067.600.600,00	22,8	1.367.600.000,00	23,8	1.567.600.000,00	24,8	1.700.000.000,00	25,8	1.880.000.000,00	25,8	1.880.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					252.574.000,00		277.574.000,00		277.574.000,00		277.574.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya Alat UTTP yang bertera sah	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	100	100	252.574.000,00	100	277.574.000,00	100	277.574.000,00	100	277.574.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					350.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosi (%)	-	35,57	36,57	350.000.000,00	37,57	550.000.000,00	38,57	550.000.000,00	39,57	550.000.000,00	40,57	550.000.000,00	40,57	550.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.716.871.933,00		2.841.871.933,00		2.891.871.933,00		2.901.871.933,00		2.961.871.933,00		2.961.871.933,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.616.871.933,00		2.721.871.933,00		2.771.871.933,00		2.771.871.933,00		2.821.871.933,00		2.821.871.933,00	
Meningkatnya implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK (%)	112,89	100	100	2.616.871.933,00	100	2.721.871.933,00	100	2.771.871.933,00	100	2.771.871.933,00	100	2.821.871.933,00	100	2.821.871.933,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri yang dikeluarkan (%)	7,72	16,9	17,6	20.000.000,00	18,3	40.000.000,00	19	40.000.000,00	19,7	50.000.000,00	20,4	60.000.000,00	20,4	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini (%)	100	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Informasi Industri Nasional																Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					159.500.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		238.000.000,00		238.000.000,00		238.000.000,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					159.500.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		238.000.000,00		238.000.000,00		238.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas calon transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	-	-	100	159.500.000,00	100	235.000.000,00	100	235.000.000,00	100	238.000.000,00	100	238.000.000,00	100	238.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					83.105.006.859,00		83.605.006.859,00		83.801.579.039,00		83.473.006.859,00		86.273.006.859,00		86.273.006.859,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.261.658.333,00		48.261.658.333,00		48.261.658.333,00		48.261.658.333,00		48.261.658.333,00		48.261.658.333,00	
Kelembagaan Tepat Fungsi, Tepat Ukuran	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur (Nilai)	43,67	43,75	44	192.202.400,00	44,25	192.202.400,00	44,5	192.202.400,00	44,75	192.202.400,00	45	192.202.400,00	45	192.202.400,00	Sekretariat Daerah
Kelembagaan Tepat Proses	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Proses (Nilai)	38,8	39	39,25	132.483.100,00	39,5	132.483.100,00	39,75	132.483.100,00	40	132.483.100,00	40,25	132.483.100,00	40,25	132.483.100,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Rata-rata Indeks pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	3,51	3,51	3,55	79.972.600,00	3,6	79.972.600,00	3,7	79.972.600,00	3,8	79.972.600,00	3,9	79.972.600,00	3,9	79.972.600,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM kategori "Sangat Baik" (88,31 - 100) (%)	44	44	47	0	50	0	52	0	55	0	58	0	58	0	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	83,7	83,72	83,74	47.577.210.733,00	83,76	47.577.210.733,00	83,78	47.577.210.733,00	83,8	47.577.210.733,00	83,82	47.577.210.733,00	83,82	47.577.210.733,00	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	82,55	82,6	82,65		82,7		82,75		82,8		82,85		82,85		Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi	71,86	71,86	75	279.789.500,00	78,5	279.789.500,00	81	279.789.500,00	83	279.789.500,00	85	279.789.500,00	85	279.789.500,00	Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perangkat Daerah (Nilai)															
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					32.729.761.001,00		32.980.094.335,00		33.078.047.092,00		32.913.761.002,00		35.517.761.001,00		35.517.761.001,00	
Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Berkualitas	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Nilai)	0	71,55	71,70	31.122.952.550,00	71,80	31.206.619.218,00	71,90	31.239.047.915,00	72,00	31.184.285.885,00	72,10	33.540.952.550,00	72,10	33.540.952.550,00	Sekretariat Daerah
Kebijakan Bidang Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan (Nilai)	0	71,55	71,70	855.924.550,00	71,80	939.257.883,00	71,90	972.019.913,00	72,00	917.257.883,00	72,10	1.045.924.550,00	72,10	1.045.924.550,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Rata-rata Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah (Nilai)	32,72	33	33,5	552.054.300,00	33,8	635.387.633,00	34	668.149.663,00	34,5	613.387.633,00	34,8	702.054.300,00	34,8	702.054.300,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Indeks Zakat Nasional	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0	0,61	0,63	0	0,65	0	0,67	0	0,69	0	0,71	0	0,71	0	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD (%)	100	100	100	198.829.601,00	100	198.829.601,00	100	198.829.601,00	100	198.829.601,00	100	228.829.601,00	100	228.829.601,00	Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.113.587.525,00		2.363.254.191,00		2.461.873.614,00		2.297.587.524,00		2.493.587.525,00		2.493.587.525,00	
Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan Berkualitas	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan (Nilai)	0	71,55	71,70	380.267.545,00	71,80	463.600.878,00	71,90	496.362.908,00	72,00	441.600.878,00	72,10	430.267.545,00	72,10	430.267.545,00	Sekretariat Daerah
Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Berkualitas	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Nilai)	0	71,55	71,70	598.439.040,00	71,80	681.439.040,00	71,90	714.534.403,00	72,00	659.772.373,00	72,10	678.439.040,00	72,10	678.439.040,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (%)	29,55	3,26	1,41	653.301.885,00	4,09	736.635.218,00	1,34	769.397.248,00	1,28	714.635.218,00	1,31	803.301.885,00	1,31	803.301.885,00	Sekretariat Daerah
Pengendalian Kinerja Pembangunan Berkualitas	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	481.579.055,00	100	481.579.055,00	100	481.579.055,00	100	481.579.055,00	100	581.579.055,00	100	581.579.055,00	Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					61.932.174.823,00		62.732.174.823,00		63.082.174.823,00		63.400.174.823,00		64.100.174.823,00		64.100.174.823,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.736.509.813,00		47.736.509.813,00		47.736.509.813,00		47.736.509.813,00		47.736.509.813,00		47.736.509.813,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	81,5	82	82,8	47.736.509.813,00	83	47.736.509.813,00	83,2	47.736.509.813,00	83,4	47.736.509.813,00	83,6	47.736.509.813,00	83,6	47.736.509.813,00	Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)																
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	85,06	86	87		88		89		90		91		91		Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14.195.665.010,00		14.995.665.010,00		15.345.665.010,00		15.663.665.010,00		16.363.665.010,00		16.363.665.010,00	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	-	100	100	10.012.783.675,00	100	10.519.139.611,00	100	10.802.062.857,00	100	10.995.718.571,00	100	11.465.099.335,00	100	11.465.099.335,00	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	-	100	100	4.182.881.335,00	100	4.476.525.399,00	100	4.543.602.153,00	100	4.667.946.439,00	100	4.898.565.675,00	100	4.898.565.675,00	Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					13.809.207.387,00		14.395.207.387,00		14.479.207.387,00		14.691.479.567,00		15.970.247.773,00		15.970.247.773,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.932.490.037,00		12.485.799.562,00		12.474.329.170,00		12.586.357.440,00		13.435.247.773,00		13.435.247.773,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	84,25	84,4	84,6	11.932.490.037,00	85,3	12.485.799.562,00	86	12.474.329.170,00	86,7	12.586.357.440,00	87,4	13.435.247.773,00	87,4	13.435.247.773,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	89,56	89,66	89,75		90		90,25		90,5		91		91		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.138.799.660,00		1.246.479.629,00		1.308.803.611,00		1.374.243.791,00		1.535.000.000,00		1.535.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	24,16	24,17	24,18	75.901.500,00	24,28	79.696.575,00	24,38	83.681.404,00	24,48	87.865.474,00	24,58	100.000.000,00	24,58	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	24,43	25,71	25,81	1.062.898.160,00	25,91	1.166.783.054,00	26,01	1.225.122.207,00	26,11	1.286.378.317,00	26,21	1.435.000.000,00	26,21	1.435.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					737.917.690,00		662.928.196,00		696.074.606,00		730.878.336,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkualitas	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Poin)	24,29	24,39	24,49	132.132.300,00	24,59	150.000.000,00	24,69	157.500.000,00	24,79	165.375.000,00	24,89	200.000.000,00	24,89	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan yang berkualitas	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan (Poin)	23,7	24,41	24,51	65.860.425,00	24,61	80.000.000,00	24,71	84.000.000,00	24,81	88.200.000,00	24,91	130.000.000,00	24,91	130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkualitas	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Poin)	24,51	25,63	25,73	259.406.565,00	25,83	217.928.196,00	25,93	228.824.606,00	26,03	240.265.836,00	26,13	350.000.000,00	26,13	350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan yang berkualitas	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan (Poin)	24,11	25,99	26,09	280.518.400,00	26,19	215.000.000,00	26,29	225.750.000,00	26,39	237.037.500,00	26,49	320.000.000,00	26,49	320.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02 - KEUANGAN					29.212.560.758,00		29.712.560.758,00		29.912.560.758,00		29.380.560.758,00		31.180.560.758,00		31.180.560.758,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.262.422.265,00		22.262.422.265,00		22.262.422.265,00		22.262.422.265,00		22.262.422.265,00		22.262.422.265,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	82,91	82,93	82,95	22.262.422.265,00	82,95	22.262.422.265,00	83	22.262.422.265,00	83	22.262.422.265,00	83	22.262.422.265,00	83	22.262.422.265,00	Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	88,31	88,31	88,31		88,31		88,31		88,31		88,31		88,31		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.950.138.493,00		7.450.138.493,00		7.650.138.493,00		7.118.138.493,00		8.918.138.493,00		8.918.138.493,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan	Persentase Pengelolaan Penerimaan Pajak yang Sesuai Standar (%)	100	100	100	2.211.301.266,00	100	2.211.301.266,00	100	2.211.301.266,00	100	2.211.301.266,00	100	2.689.301.266,00	100	2.689.301.266,00	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah (%)	100	100	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Layanan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi (%)	100	100	100	2.750.000.000,00	100	2.950.000.000,00	100	2.950.000.000,00	100	2.850.000.000,00	100	3.225.000.000,00	100	3.225.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Penerapan Kebijakan Teknis Pendapatan Daerah	Persentase Penerapan Kebijakan Teknis (%)	100	100	100	1.203.837.227,00	100	1.378.837.227,00	100	1.553.837.227,00	100	1.271.837.227,00	100	1.728.837.227,00	100	1.728.837.227,00	Badan Pendapatan Daerah
Terkendalnya Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendapatan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	750.000.000,00	100	875.000.000,00	100	900.000.000,00	100	750.000.000,00	100	1.225.000.000,00	100	1.225.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02 - KEUANGAN					34.905.516.314,00		35.405.516.314,00		35.705.516.314,00		36.073.516.314,00		37.773.516.314,00		37.773.516.314,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.157.020.117,00		18.157.020.117,00		18.157.020.117,00		18.160.020.117,00		18.160.020.117,00		18.160.020.117,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	89,08	89,18	89,33	18.157.020.117,00	89,53	18.157.020.117,00	89,78	18.157.020.117,00	90,08	18.160.020.117,00	90,43	18.160.020.117,00	90,43	18.160.020.117,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	85,85	85,95	86,1		86,3		86,55		86,85		87,2		87,2		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					7.995.657.597,00		8.295.657.597,00		8.595.657.597,00		8.960.657.597,00		10.260.657.597,00		10.260.657.597,00	
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tertib Sesuai Ketentuan	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar (%)	100	100	100	4.272.671.147,00	100	4.372.671.147,00	100	4.472.671.147,00	100	4.572.671.147,00	100	5.072.671.147,00	100	5.072.671.147,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar (%)	100	100	100	2.513.766.000,00	100	2.613.766.000,00	100	2.713.766.000,00	100	2.813.766.000,00	100	3.163.766.000,00	100	3.163.766.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.209.220.450,00	100	1.309.220.450,00	100	1.409.220.450,00	100	1.574.220.450,00	100	2.024.220.450,00	100	2.024.220.450,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					8.752.838.600,00		8.952.838.600,00		8.952.838.600,00		8.952.838.600,00		9.352.838.600,00		9.352.838.600,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar (%)	100	100	100	8.752.838.600,00	100	8.952.838.600,00	100	8.952.838.600,00	100	8.952.838.600,00	100	9.352.838.600,00	100	9.352.838.600,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					12.623.654.280,00		12.982.154.280,00		13.482.154.280,00		13.715.154.280,00		15.355.154.280,00		15.355.154.280,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.108.507.000,00		10.768.607.000,00		10.968.607.000,00		11.061.607.000,00		11.607.607.000,00		11.607.607.000,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	81,03	83	83,03	11.108.507.000,00	83,06	10.768.607.000,00	83,12	10.968.607.000,00	83,24	11.061.607.000,00	83,5	11.607.607.000,00	83,5	11.607.607.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,13	92	92,15		92,3		92,45		92,72		92,8		92,8		Badan Kepegawaian dan Pengembangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perangkat Daerah (poin)															Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.515.147.280,00		2.213.547.280,00		2.513.547.280,00		2.653.547.280,00		3.747.547.280,00		3.747.547.280,00	
Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja (Nilai)	75	67,5	67,5	50.000.000,00	67,5	65.000.000,00	67,5	80.000.000,00	67,5	80.000.000,00	70	160.000.000,00	70	160.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas pengadaan ASN	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN (Nilai)	40	36	38	108.147.280,00	38	220.000.000,00	38	234.000.000,00	38	210.000.000,00	38	285.000.000,00	38	285.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi (Nilai)	37,5	35	35	170.000.000,00	35	175.000.000,00	35	255.000.000,00	37,5	205.000.000,00	37,5	330.000.000,00	37,5	330.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta (Nilai)	75	60	60	465.000.000,00	60	822.000.000,00	63	874.000.000,00	62,5	1.165.000.000,00	62,5	1.235.000.000,00	62,5	1.235.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin (Nilai)	37,5	35	35	152.000.000,00	37,5	269.547.280,00	37,5	315.000.000,00	37,5	328.547.280,00	37,5	535.000.000,00	37,5	535.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN (Nilai)	40	37,5	37,5	15.000.000,00	40	25.000.000,00	40	30.000.000,00	40	50.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan (Nilai)	16	12	12	440.000.000,00	12	490.000.000,00	14	525.000.000,00	14	455.000.000,00	14	723.000.000,00	14	723.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas sistem informasi	Nilai kriteria kualitas sistem informasi (Nilai)	20	22	24	115.000.000,00	24	147.000.000,00	24	200.547.280,00	24	160.000.000,00	24	439.547.280,00	24	439.547.280,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.203.500.000,00		1.845.000.000,00		1.845.000.000,00		2.080.000.000,00		2.140.000.000,00		2.140.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.203.500.000,00		1.845.000.000,00		1.845.000.000,00		2.080.000.000,00		2.140.000.000,00		2.140.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengembangan karir	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir	26,98	30	30	1.203.500.000,00	32,5	1.845.000.000,00	32,5	1.845.000.000,00	35	2.080.000.000,00	37,5	2.140.000.000,00	37,5	2.140.000.000,00	Badan Kepegawaian dan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dimensi pengembangan kompetensi	dimensi pengembangan kompetensi (Nilai)															Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					781.000.000,00		995.000.000,00		961.000.000,00		981.000.000,00		1.238.508.544,00		1.238.508.544,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					781.000.000,00		995.000.000,00		961.000.000,00		981.000.000,00		1.238.508.544,00		1.238.508.544,00	
Meningkatnya Inovasi yang memenuhi standar	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang terverifikasi Nasional (%)	38,75	0	50	250.000.000,00	62,5	400.000.000,00	75	345.000.000,00	87,5	360.000.000,00	100	378.508.544,00	100	378.508.544,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Karya/Inovasi yang difasilitasi HAKI dan telah terdaftar	Persentase pencapaian fasilitasi HAKI (%)	0	0	17,65	6.000.000,00	17,65	10.000.000,00	17,65	6.000.000,00	23,53	6.000.000,00	23,53	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tersusunnya dokumen riset/kajian sesuai standar	Persentase hasil riset/kajian yang sesuai standar (%)	0	0	19,35	525.000.000,00	22,58	585.000.000,00	25,81	610.000.000,00	16,13	615.000.000,00	16,13	850.000.000,00	100	850.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					24.641.307.481,00		25.441.307.481,00		25.491.307.481,00		25.709.307.481,00		27.259.307.481,00		27.259.307.481,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.357.834.171,00		21.357.834.171,00		21.357.834.171,00		21.357.834.171,00		21.357.834.171,00		21.357.834.171,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	84,74	82	82	21.357.834.171,00	82,5	21.357.834.171,00	83	21.357.834.171,00	83,5	21.357.834.171,00	84	21.357.834.171,00	84	21.357.834.171,00	Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	83,66	83,7	83,75		83,8		83,85		83,9		84		84		Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.858.395.032,00		2.184.019.832,00		2.234.019.832,00		2.334.019.832,00		3.384.019.832,00		3.384.019.832,00	
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan SAKIP	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti LHE SAKIP (%)	100	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu (%)	100	100	100	967.135.000,00	100	1.012.135.000,00	100	1.062.135.000,00	100	1.162.135.000,00	100	1.562.135.000,00	100	1.562.135.000,00	Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Perundang undangan penyelesaian TLHP	Persentase capaian penyelesaian TLHP (%)	0	82	82,5	701.198.832,00	83	871.884.832,00	83,5	871.884.832,00	84	871.884.832,00	84,5	1.421.884.832,00	84,5	1.421.884.832,00	Inspektorat
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan hasil reviu atas LKPD yang sesuai SAP (%)	100	100	100	26.700.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Inspektorat
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian Indikator kinerja kunci Laporan kinerja Pemerintah Daerah (LPPD) (%)	100	100	100	26.700.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Inspektorat
Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja strategis	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja strategis pemerintah daerah yang sesuai dengan standar (%)	100	100	100	13.270.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Inspektorat
Meningkatnya penyelesaian kejadian kerugian keuangan negara	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	87,31	87,31	87,35	48.391.200,00	87,37	100.000.000,00	87,39	100.000.000,00	87,41	100.000.000,00	87,43	200.000.000,00	87,43	200.000.000,00	Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.425.078.278,00		1.899.453.478,00		1.899.453.478,00		2.017.453.478,00		2.517.453.478,00		2.517.453.478,00	
Meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) (Poin)	2,49	2,495	2,495	865.738.800,00	2,5	865.738.800,00	2,5	865.738.800,00	2,525	865.738.800,00	2,525	1.065.738.800,00	2,525	1.065.738.800,00	Inspektorat
Meningkatnya kesesuaian antara kebijakan terkait pengawasan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya	Persentase Kesesuaian antara Peraturan / Kebijakan Terkait Pengawasan dengan Peraturan Perundang-undangan di Atasnya (%)	0	100	100	14.900.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Inspektorat
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)	100	100	100	0	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Inspektorat
Meningkatnya Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Tasikmalaya	Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP hasil Penjaminan Kualitas (Nilai)	3,221	3,231	3,241	451.367.478,00	3,251	718.714.678,00	3,261	718.714.678,00	3,271	718.714.678,00	3,3	718.714.678,00	3,3	718.714.678,00	Inspektorat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terjaganya cakupan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase cakupan pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	100	100	100	53.072.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Inspektorat
Terpetakannya risiko-risiko korupsi di lingkungan pemerintah kota tasikmalaya	Predikat SPI (Predikat)	Rentan (0-72,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)	40.000.000,00	Waspada (73-77,9)	150.000.000,00	Waspada (73-77,9)	150.000.000,00	Waspada (73-77,9)	208.000.000,00	Waspada (73-77,9)	408.000.000,00	Waspada (73-77,9)	408.000.000,00	Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					11.534.662.493,00		11.584.662.493,00		11.684.662.493,00		11.734.662.493,00		11.784.662.493,00		11.784.662.493,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.125.129.773,00		7.125.129.773,00		7.125.129.773,00		7.125.129.773,00		7.125.129.773,00		7.125.129.773,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cihideung)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,45	80,45	80,6	7.125.129.773,00	80,75	7.125.129.773,00	80,9	7.125.129.773,00	81,05	7.125.129.773,00	81,2	7.125.129.773,00	81,2	7.125.129.773,00	Kecamatan Cihideung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	90,66	91,16	91,66		92,16		92,66		93,16		93,66		93,66		Kecamatan Cihideung
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					175.487.195,00		193.035.915,00		142.808.030,00		172.808.030,00		172.808.030,00		172.808.030,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Cihideung)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	100	100	100	20.500.000,00	100	22.550.000,00	100	24.805.000,00	100	24.805.000,00	100	24.805.000,00	100	24.805.000,00	Kecamatan Cihideung
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Cihideung)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	100	100	100	6.000.000,00	100	6.600.000,00	100	7.260.000,00	100	7.260.000,00	100	7.260.000,00	100	7.260.000,00	Kecamatan Cihideung
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Cihideung)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	148.987.195,00	100	163.885.915,00	100	110.743.030,00	100	140.743.030,00	100	140.743.030,00	100	140.743.030,00	Kecamatan Cihideung
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Cihideung)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cihideung
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar (Kecamatan Cihideung)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cihideung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.106.745.525,00		4.176.046.805,00		4.317.229.690,00		4.367.229.690,00		4.417.229.690,00		4.417.229.690,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Cihideung)	Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	396.000.000,00	100	396.000.000,00	100	396.000.000,00	100	396.000.000,00	100	396.000.000,00	100	396.000.000,00	Kecamatan Cihideung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang Ekbang (Kecamatan Cihideung)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	872.462.900,00	100	656.435.918,00	100	590.357.714,00	100	615.357.714,00	100	664.307.714,00	100	664.307.714,00	Kecamatan Cihideung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Cihideung)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	298.400.000,00	100	329.440.000,00	100	260.284.000,00	100	285.284.000,00	100	286.334.000,00	100	286.334.000,00	Kecamatan Cihideung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Cihideung)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.624.877.725,00	100	1.787.665.497,00	100	1.963.432.047,00	100	1.963.432.047,00	100	1.963.432.047,00	100	1.963.432.047,00	Kecamatan Cihideung
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Cihideung)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	915.004.900,00	100	1.006.505.390,00	100	1.107.155.929,00	100	1.107.155.929,00	100	1.107.155.929,00	100	1.107.155.929,00	Kecamatan Cihideung
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang sesuai Standar (Kecamatan Cihideung)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cihideung
Pelayanan Administratif Kelurahan sesuai Standar (Kecamatan Cihideung)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cihideung
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					127.300.000,00		90.450.000,00		99.495.000,00		69.495.000,00		69.495.000,00		69.495.000,00	
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Cihideung)	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	127.300.000,00	100	90.450.000,00	100	99.495.000,00	100	69.495.000,00	100	69.495.000,00	100	69.495.000,00	Kecamatan Cihideung
7.01 - KECAMATAN					8.674.998.045,00		8.824.998.045,00		8.924.998.045,00		8.974.998.045,00		9.024.998.045,00		9.024.998.045,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.938.391.125,00		5.938.391.125,00		5.938.391.125,00		5.938.391.125,00		5.938.391.125,00		5.938.391.125,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cipedes)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	76,95	77	77,1	5.938.391.125,00	77,5	5.938.391.125,00	78	5.938.391.125,00	79	5.938.391.125,00	80	5.938.391.125,00	80	5.938.391.125,00	Kecamatan Cipedes
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	80,58	81,25	81,3		81,5		82		83		84		84		Kecamatan Cipedes
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					64.924.300,00		64.924.300,00		90.924.300,00		120.924.300,00		124.924.300,00		124.924.300,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Cipedes)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	100	100	100	13.924.300,00	100	13.924.300,00	100	13.924.300,00	100	13.924.300,00	100	13.924.300,00	100	13.924.300,00	Kecamatan Cipedes
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Kecamatan (Kecamatan Cipedes)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	100	100	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	Kecamatan Cipedes
Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Kecamatan (Kecamatan Cipedes)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	76.000.000,00	100	106.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	Kecamatan Cipedes
Pelayanan Administratif Bidang Kesra Sesuai Standar (Kecamatan Cipedes)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cipedes
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan Sesuai Standar (Kecamatan Cipedes)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cipedes
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.651.182.620,00		2.776.182.620,00		2.850.182.620,00		2.870.182.620,00		2.916.182.620,00		2.916.182.620,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Ekbang (Kecamatan Cipedes)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	125.000.000,00	100	130.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	174.000.000,00	100	174.000.000,00	Kecamatan Cipedes
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam	100	100	100	53.000.000,00	100	106.000.000,00	100	116.000.000,00	100	124.000.000,00	100	124.000.000,00	100	124.000.000,00	Kecamatan Cipedes

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bidang Kesra (Kecamatan Cipedes)	Pemberdayaan Bidang Kesra (%)															
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Cipedes)	Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	217.162.800,00	100	240.000.000,00	100	260.000.000,00	100	260.000.000,00	100	280.000.000,00	100	280.000.000,00	Kecamatan Cipedes
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Cipedes)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.592.952.450,00	100	1.617.115.250,00	100	1.641.115.250,00	100	1.653.115.250,00	100	1.655.115.250,00	100	1.655.115.250,00	Kecamatan Cipedes
Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Kelurahan (Kecamatan Cipedes)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	663.067.370,00	100	683.067.370,00	100	683.067.370,00	100	683.067.370,00	100	683.067.370,00	100	683.067.370,00	Kecamatan Cipedes
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang Sesuai Standar (Kecamatan Cipedes)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cipedes
Pelayanan Administratif Kelurahan Sesuai Standar (Kecamatan Cipedes)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cipedes
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					20.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00	
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Cipedes)	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	20.500.000,00	100	45.500.000,00	100	45.500.000,00	100	45.500.000,00	100	45.500.000,00	100	45.500.000,00	Kecamatan Cipedes
7.01 - KECAMATAN					10.475.884.539,00		11.075.884.539,00		10.725.884.539,00		10.775.884.539,00		10.825.884.539,00		10.825.884.539,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.028.906.385,00		7.028.906.385,00		7.028.906.385,00		7.028.906.385,00		7.028.906.385,00		7.028.906.385,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Tawang)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	81,85	82	82,15	7.028.906.385,00	82,3	7.028.906.385,00	82,45	7.028.906.385,00	82,6	7.028.906.385,00	82,75	7.028.906.385,00	82,75	7.028.906.385,00	Kecamatan Tawang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	91,14	91,64	92,14		92,64		93,14		93,64		94,14		94,14		Kecamatan Tawang
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					66.061.154,00		225.511.154,00		76.011.154,00		76.511.154,00		77.011.154,00		77.011.154,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Tawang)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	100	100	100	11.511.154,00	100	20.511.154,00	100	20.511.154,00	100	20.511.154,00	100	20.511.154,00	100	20.511.154,00	Kecamatan Tawang
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Tawang)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	100	100	100	4.550.000,00	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.500.000,00	100	6.500.000,00	Kecamatan Tawang
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Tawang)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	200.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Kecamatan Tawang
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Tawang)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Tawang
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar (Kecamatan Tawang)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Tawang
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.361.117.000,00		3.799.467.000,00		3.596.467.000,00		3.643.967.000,00		3.690.967.000,00		3.690.967.000,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Tawang)	Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	275.262.000,00	100	300.000.000,00	100	325.000.000,00	100	350.000.000,00	100	375.000.000,00	100	375.000.000,00	Kecamatan Tawang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang Ekbang (Kecamatan Tawang)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	100.775.000,00	100	215.209.000,00	100	102.000.000,00	100	113.000.000,00	100	121.000.000,00	100	121.000.000,00	Kecamatan Tawang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Tawang)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	814.900.000,00	100	896.810.000,00	100	779.519.000,00	100	788.519.000,00	100	800.019.000,00	100	800.019.000,00	Kecamatan Tawang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Tawang)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.234.540.000,00	100	1.418.244.000,00	100	1.420.744.000,00	100	1.423.244.000,00	100	1.425.744.000,00	100	1.425.744.000,00	Kecamatan Tawang
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Tawang)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	935.640.000,00	100	969.204.000,00	100	969.204.000,00	100	969.204.000,00	100	969.204.000,00	100	969.204.000,00	Kecamatan Tawang
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang sesuai Standar (Kecamatan Tawang)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Tawang
Pelayanan Administratif Kelurahan sesuai Standar (Kecamatan Tawang)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Tawang
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.800.000,00		22.000.000,00		24.500.000,00		26.500.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00	
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Tawang)	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	19.800.000,00	100	22.000.000,00	100	24.500.000,00	100	26.500.000,00	100	29.000.000,00	100	29.000.000,00	Kecamatan Tawang
7.01 - KECAMATAN					10.772.981.334,00		10.922.981.334,00		11.022.981.334,00		11.072.981.334,00		11.122.981.334,00		11.122.981.334,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.450.623.605,00		7.450.623.605,00		7.450.623.605,00		7.450.623.605,00		7.450.623.605,00		7.450.623.605,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Indihiang)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,45	81	80,6	7.450.623.605,00	80,7	7.450.623.605,00	80,8	7.450.623.605,00	80,9	7.450.623.605,00	81	7.450.623.605,00	81	7.450.623.605,00	Kecamatan Indihiang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	90	90,25	90,25		90,5		90,75		91		91,25		91,25		Kecamatan Indihiang
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					139.467.850,00		197.000.000,00		152.467.850,00		172.000.000,00		139.467.850,00		139.467.850,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Indihiang)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	16.032.150,00	100	19.000.000,00	100	19.000.000,00	Kecamatan Indihiang
Meningkatnya Pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Indihiang)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	Kecamatan Indihiang
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Indihiang)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	119.467.850,00	100	177.000.000,00	100	132.467.850,00	100	150.467.850,00	100	114.467.850,00	100	114.467.850,00	Kecamatan Indihiang
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Indihiang)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Indihiang
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar (Kecamatan Indihiang)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Indihiang
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.083.889.879,00		3.170.357.729,00		3.289.889.879,00		3.295.357.729,00		3.388.912.838,00		3.388.912.838,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Ekbang (Kecamatan Indihiang)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	110.000.000,00	100	112.467.850,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	Kecamatan Indihiang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Indihiang)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	69.000.000,00	100	69.000.000,00	100	114.000.000,00	100	122.467.850,00	100	128.000.000,00	100	128.000.000,00	Kecamatan Indihiang
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Indihiang)	Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	336.000.000,00	100	420.000.000,00	100	426.000.000,00	100	432.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	Kecamatan Indihiang
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Indihiang)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.552.302.822,00	100	1.552.302.822,00	100	1.573.302.822,00	100	1.564.302.822,00	100	1.508.970.308,00	100	1.508.970.308,00	Kecamatan Indihiang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Indihiang)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.016.587.057,00	100	1.016.587.057,00	100	1.016.587.057,00	100	1.016.587.057,00	100	1.091.942.530,00	100	1.091.942.530,00	Kecamatan Indihiang
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang Sesuai Standar (Kecamatan Indihiang)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Indihiang
Pelayanan Administratif Kelurahan sesuai standar (Kecamatan Indihiang)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Indihiang
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					99.000.000,00		105.000.000,00		130.000.000,00		155.000.000,00		143.977.041,00		143.977.041,00	
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Indihiang)	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	99.000.000,00	100	105.000.000,00	100	130.000.000,00	100	155.000.000,00	100	143.977.041,00	100	143.977.041,00	Kecamatan Indihiang
7.01 - KECAMATAN					17.188.955.644,00		17.338.955.644,00		17.438.955.644,00		17.488.955.644,00		17.538.955.644,00		17.538.955.644,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.927.011.734,00		9.927.011.734,00		9.927.011.734,00		9.927.011.734,00		9.927.011.734,00		9.927.011.734,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Kawalu)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	89,02	87,02	90,02	9.927.011.734,00	91,02	9.927.011.734,00	92,02	9.927.011.734,00	93,02	9.927.011.734,00	94,02	9.927.011.734,00	94,02	9.927.011.734,00	Kecamatan Kawalu
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	76,25	76,01	77,25		78,25		79,25		80,25		81,25		81,25		Kecamatan Kawalu
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					193.134.310,00		193.134.310,00		193.134.310,00		193.134.310,00		193.134.310,00		193.134.310,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Kawalu)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Kecamatan Kawalu
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Kawalu)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	Kecamatan Kawalu
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Kawalu)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	169.791.510,00	100	169.791.510,00	100	169.791.510,00	100	169.791.510,00	100	169.791.510,00	100	169.791.510,00	Kecamatan Kawalu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Kawalu)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	100	3.342.800,00	100	3.342.800,00	100	3.342.800,00	100	3.342.800,00	100	3.342.800,00	100	3.342.800,00	Kecamatan Kawalu
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai standar (Kecamatan Kawalu)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Kawalu
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.045.809.600,00		7.195.809.600,00		7.295.809.600,00		7.345.809.600,00		7.395.809.600,00		7.395.809.600,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Kawalu)	Persentase bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar (%)	1.001	100	100	554.467.500,00	100	554.467.500,00	100	554.467.500,00	100	554.467.500,00	100	554.467.500,00	100	554.467.500,00	Kecamatan Kawalu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang Ekbang (Kecamatan Kawalu)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	1.943.566.100,00	100	1.943.566.100,00	100	1.943.566.100,00	100	1.943.566.100,00	100	1.943.566.100,00	100	1.943.566.100,00	Kecamatan Kawalu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Kawalu)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	174.206.100,00	100	174.206.100,00	100	174.206.100,00	100	174.206.100,00	100	174.206.100,00	100	174.206.100,00	Kecamatan Kawalu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Kawalu)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	2.252.743.266,00	100	2.402.743.266,00	100	2.502.743.266,00	100	2.552.743.266,00	100	2.602.743.266,00	100	2.602.743.266,00	Kecamatan Kawalu
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Kawalu)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	2.120.826.634,00	100	2.120.826.634,00	100	2.120.826.634,00	100	2.120.826.634,00	100	2.120.826.634,00	100	2.120.826.634,00	Kecamatan Kawalu
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang sesuai Standar (Kecamatan Kawalu)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Kawalu
Pelayanan Administratif Kelurahan sesuai	Persentase permohonan administratif Kelurahan	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Kawalu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Standar (Kecamatan Kawalu)	yang terlayani sesuai standar (%)															
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00	
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Kawalu)	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	Kecamatan Kawalu
7.01 - KECAMATAN					14.616.906.318,00		14.666.906.318,00		14.666.906.318,00		14.716.906.318,00		14.766.906.318,00		14.766.906.318,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.192.133.718,00		10.192.133.718,00		10.192.133.718,00		10.192.133.718,00		10.192.133.718,00		10.192.133.718,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cibeureum)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,15	80,2	80,25	10.192.133.718,00	80,4	10.192.133.718,00	80,55	10.192.133.718,00	80,7	10.192.133.718,00	80,85	10.192.133.718,00	80,85	10.192.133.718,00	Kecamatan Cibeureum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	88,33	91	91		91		91		91		91		91		Kecamatan Cibeureum
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					54.952.600,00		54.952.600,00		54.952.600,00		54.952.600,00		54.952.600,00		54.952.600,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Cibeureum)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	-	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Cibeureum)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	-	100	100	34.952.600,00	100	34.952.600,00	100	34.952.600,00	100	34.952.600,00	100	34.952.600,00	100	34.952.600,00	Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Cibeureum)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	-	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Kecamatan Cibeureum
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Cibeureum)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	-	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Kecamatan Cibeureum
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan	Persentase Permohonan	-	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cibeureum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
sesuai Standar (Kecamatan Cibeureum)	Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)															
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.319.820.000,00		4.369.820.000,00		4.369.820.000,00		4.419.820.000,00		4.469.820.000,00		4.469.820.000,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Cibeureum)	Persentase bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar (%)	-	100	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	100	504.000.000,00	Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang Ekbang (Kecamatan Cibeureum)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Cibeureum)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	75.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Cibeureum)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	-	100	100	2.406.747.910,00	100	2.426.747.910,00	100	2.426.747.910,00	100	2.456.747.910,00	100	2.481.747.910,00	100	2.481.747.910,00	Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Cibeureum)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	-	100	100	1.289.072.090,00	100	1.289.072.090,00	100	1.289.072.090,00	100	1.309.072.090,00	100	1.334.072.090,00	100	1.334.072.090,00	Kecamatan Cibeureum
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang sesuai Standar (Kecamatan Cibeureum)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	-	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cibeureum
Pelayanan Administratif Kelurahan Sesuai Standar (Kecamatan Cibeureum)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	-	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Cibeureum
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Cibeureum)	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Kecamatan Cibeureum
7.01 - KECAMATAN					13.197.887.961,00		13.247.887.961,00		13.347.887.961,00		13.397.887.961,00		13.447.887.961,00		13.447.887.961,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.423.583.661,00		8.423.583.661,00		8.423.583.661,00		8.423.583.661,00		8.423.583.661,00		8.423.583.661,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Tamansari)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,6	80,75	80,9	8.423.583.661,00	81,05	8.423.583.661,00	81,2	8.423.583.661,00	81,35	8.423.583.661,00	81,5	8.423.583.661,00	81,5	8.423.583.661,00	Kecamatan Tamansari
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	84,1	87	87,5		88		88,5		89		89,5		89,5		Kecamatan Tamansari
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					30.515.200,00		37.515.200,00		48.515.200,00		55.515.200,00		62.515.200,00		62.515.200,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Tamansari)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	23.978.000,00	100	30.000.000,00	100	33.978.000,00	100	37.478.000,00	100	37.478.000,00	Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Tamansari)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	100	100	100	5.478.000,00	100	6.500.000,00	100	7.478.000,00	100	8.500.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Kecamatan Tamansari
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Tamansari)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	5.037.200,00	100	7.037.200,00	100	11.037.200,00	100	13.037.200,00	100	15.037.200,00	100	15.037.200,00	Kecamatan Tamansari
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Tamansari)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Tamansari
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar (Kecamatan Tamansari)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Tamansari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlayani Sesuai Standar (%)															
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.715.789.100,00		4.751.789.100,00		4.826.789.100,00		4.862.789.100,00		4.898.789.100,00		4.898.789.100,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Ekbang (Kecamatan Tamansari)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	594.809.100,00	100	598.809.100,00	100	606.809.100,00	100	610.809.100,00	100	614.809.100,00	100	614.809.100,00	Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Tamansari)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	73.300.000,00	100	89.300.000,00	100	124.300.000,00	100	140.300.000,00	100	156.300.000,00	100	156.300.000,00	Kecamatan Tamansari
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Tamansari)	Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	464.000.000,00	100	468.000.000,00	100	476.000.000,00	100	480.000.000,00	100	484.000.000,00	100	484.000.000,00	Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Tamansari)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.897.522.933,00	100	1.905.522.933,00	100	1.921.522.933,00	100	1.929.522.933,00	100	1.937.522.933,00	100	1.937.522.933,00	Kecamatan Tamansari
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Tamansari)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.686.157.067,00	100	1.690.157.067,00	100	1.698.157.067,00	100	1.702.157.067,00	100	1.706.157.067,00	100	1.706.157.067,00	Kecamatan Tamansari
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang Sesuai Standar (Kecamatan Tamansari)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Tamansari
Pelayanan Administratif Kelurahan sesuai standar (Kecamatan Tamansari)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Tamansari
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					28.000.000,00		35.000.000,00		49.000.000,00		56.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Tamansari)	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	28.000.000,00	100	35.000.000,00	100	49.000.000,00	100	56.000.000,00	100	63.000.000,00	100	63.000.000,00	Kecamatan Tamansari
7.01 - KECAMATAN					13.039.381.238,00		13.189.381.238,00		13.289.381.238,00		13.339.381.238,00		13.389.381.238,00		13.389.381.238,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.468.722.388,00		8.468.722.388,00		8.468.722.388,00		8.468.722.388,00		8.468.722.388,00		8.468.722.388,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Mangkubumi)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	77,25	80	80	8.468.722.388,00	80,25	8.468.722.388,00	80,5	8.468.722.388,00	80,75	8.468.722.388,00	81	8.468.722.388,00	81	8.468.722.388,00	Kecamatan Mangkubumi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	91,45	91	91,5		91,55		91,6		91,65		91,7		91,7		Kecamatan Mangkubumi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					134.750.000,00		187.250.000,00		197.000.000,00		207.000.000,00		217.000.000,00		217.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	100	100	100	23.750.000,00	100	25.000.000,00	100	27.500.000,00	100	27.500.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Kecamatan Mangkubumi
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	100	100	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	Kecamatan Mangkubumi
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	148.750.000,00	100	155.000.000,00	100	162.500.000,00	100	170.000.000,00	100	170.000.000,00	Kecamatan Mangkubumi
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Kecamatan Mangkubumi
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Mangkubumi



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.365.908.850,00		4.463.408.850,00		4.543.658.850,00		4.583.658.850,00		4.623.658.850,00		4.623.658.850,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Ekbang (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	116.250.000,00	100	116.250.000,00	Kecamatan Mangkubumi
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	189.500.000,00	100	207.000.000,00	100	211.250.000,00	100	211.250.000,00	100	245.000.000,00	100	245.000.000,00	Kecamatan Mangkubumi
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Mangkubumi)	Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	400.000.000,00	100	480.000.000,00	100	520.000.000,00	100	560.000.000,00	100	560.000.000,00	100	560.000.000,00	Kecamatan Mangkubumi
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	2.141.307.032,00	100	2.141.307.032,00	100	2.157.307.032,00	100	2.157.307.032,00	100	2.157.307.032,00	100	2.157.307.032,00	Kecamatan Mangkubumi
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.545.101.818,00	100	1.545.101.818,00	100	1.545.101.818,00	100	1.545.101.818,00	100	1.545.101.818,00	100	1.545.101.818,00	Kecamatan Mangkubumi
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang Sesuai Standar (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Mangkubumi
Pelayanan Administratif Kelurahan sesuai Standar (Kecamatan Mangkubumi)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Mangkubumi
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan Keamanan	100	100	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	Kecamatan Mangkubumi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(Kecamatan Mangkubumi)	dan Ketertiban Umum (%)															
7.01 - KECAMATAN					13.039.465.140,00		13.189.465.140,00		13.289.465.140,00		13.339.465.140,00		13.389.465.140,00		13.389.465.140,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.290.104.594,00		8.290.104.594,00		8.290.104.594,00		8.290.104.594,00		8.290.104.594,00	80,65	8.290.104.594,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Bungursari)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,15	80	80,25	8.290.104.594,00	80,35	8.290.104.594,00	80,45	8.290.104.594,00	80,55	8.290.104.594,00	80,65	8.290.104.594,00	80,65	8.290.104.594,00	Kecamatan Bungursari
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	93,59	93,13	93,65		93,75		93,85		93,95		94,05		94,05		Kecamatan Bungursari
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					276.693.184,00		76.693.184,00		76.702.062,00		76.693.184,00		76.693.184,00		76.693.184,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Bungursari)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	0	100	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	Kecamatan Bungursari
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Bungursari)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	0	100	100	3.693.184,00	100	3.693.184,00	100	3.702.062,00	100	3.693.184,00	100	3.693.184,00	100	3.693.184,00	Kecamatan Bungursari
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Bungursari)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	0	100	100	250.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Kecamatan Bungursari
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Bungursari)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Bungursari
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar (Kecamatan Bungursari)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Bungursari
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.337.667.362,00		4.687.667.362,00		4.787.658.484,00		4.837.667.362,00		4.887.667.362,00		4.887.667.362,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Bungursari)	Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	420.000.000,00	100	455.000.000,00	100	490.000.000,00	100	525.000.000,00	100	525.000.000,00	100	525.000.000,00	Kecamatan Bungursari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang Ekbang (Kecamatan Bungursari)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	732.897.362,00	100	732.897.362,00	100	732.897.362,00	100	732.897.362,00	100	732.897.362,00	100	732.897.362,00	Kecamatan Bungursari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Bungursari)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	431.000.000,00	100	431.000.000,00	100	431.000.000,00	100	431.000.000,00	100	431.000.000,00	100	431.000.000,00	Kecamatan Bungursari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Bungursari)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.549.467.128,00	100	1.733.701.762,00	100	1.798.692.884,00	100	1.813.701.762,00	100	1.863.701.762,00	100	1.863.701.762,00	Kecamatan Bungursari
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Bungursari)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.204.302.872,00	100	1.335.068.238,00	100	1.335.068.238,00	100	1.335.068.238,00	100	1.335.068.238,00	100	1.335.068.238,00	Kecamatan Bungursari
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang sesuai Standar (Kecamatan Bungursari)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Bungursari
Pelayanan Administratif Kelurahan sesuai Standar (Kecamatan Bungursari)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Bungursari
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00	
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Bungursari)	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	Kecamatan Bungursari
7.01 - KECAMATAN					9.934.263.700,00		10.084.263.700,00		10.184.263.700,00		10.234.263.700,00		10.284.263.700,00		10.284.263.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.050.733.550,00		7.050.733.550,00		7.050.733.550,00		7.050.733.550,00		7.050.733.550,00		7.050.733.550,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Purbaratu)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,15	80,2	80,3	7.050.733.550,00	80,45	7.050.733.550,00	80,6	7.050.733.550,00	80,75	7.050.733.550,00	80,9	7.050.733.550,00	80,9	7.050.733.550,00	Kecamatan Purbaratu
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	85,46	85,5	85,75		86		86,3		87,3		88,31		88,31		Kecamatan Purbaratu
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					77.000.000,00		96.162.150,00		101.662.150,00		111.662.150,00		121.662.150,00		121.662.150,00	
Meningkatnya Kinerja Kelurahan (Kecamatan Purbaratu)	Persentase Peningkatan Kelurahan Berprestasi (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	47.000.000,00	100	47.000.000,00	Kecamatan Purbaratu
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan (Kecamatan Purbaratu)	Persentase Data dan Informasi Kecamatan yang Dilaporkan (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	7.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Kecamatan Purbaratu
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan (Kecamatan Purbaratu)	Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Kecamatan Purbaratu
Pelayanan Administratif Bidang Kesra sesuai Standar (Kecamatan Purbaratu)	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	Kecamatan Purbaratu
Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar (Kecamatan Purbaratu)	Persentase Permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	100	0	100	2.162.150,00	100	4.662.150,00	100	14.662.150,00	100	17.662.150,00	100	17.662.150,00	Kecamatan Purbaratu
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.778.530.150,00		2.879.368.000,00		2.973.868.000,00		3.013.868.000,00		3.053.868.000,00		3.053.868.000,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan Kelurahan (Kecamatan Purbaratu)	Presentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar (%)	100	100	100	300.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	Kecamatan Purbaratu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang Ekbang (Kecamatan Purbaratu)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang (%)	100	100	100	42.000.000,00	100	62.000.000,00	100	62.000.000,00	100	66.000.000,00	100	106.000.000,00	100	106.000.000,00	Kecamatan Purbaratu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesra (Kecamatan Purbaratu)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra (%)	100	100	100	108.162.150,00	100	129.000.000,00	100	133.500.000,00	100	133.500.000,00	100	133.500.000,00	100	133.500.000,00	Kecamatan Purbaratu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum Kelurahan (Kecamatan Purbaratu)	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	1.230.540.000,00	100	1.230.540.000,00	100	1.320.540.000,00	100	1.320.540.000,00	100	1.320.540.000,00	100	1.320.540.000,00	Kecamatan Purbaratu
Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur kelurahan (Kecamatan Purbaratu)	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.097.828.000,00	100	1.097.828.000,00	100	1.097.828.000,00	100	1.133.828.000,00	100	1.133.828.000,00	100	1.133.828.000,00	Kecamatan Purbaratu
Pelayanan Administratif Bidang Ekbang sesuai Standar (Kecamatan Purbaratu)	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Purbaratu
Pelayanan Administratif Kelurahan sesuai Standar (Kecamatan Purbaratu)	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Purbaratu
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					28.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00	
Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kecamatan Purbaratu)	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	28.000.000,00	100	58.000.000,00	100	58.000.000,00	100	58.000.000,00	100	58.000.000,00	100	58.000.000,00	Kecamatan Purbaratu
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					20.488.899.223,60		20.372.991.843,60		39.922.991.843,60		50.140.991.843,60		21.009.565.093,60		21.009.565.093,60	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.891.963.358,00		3.891.963.358,00		3.891.963.358,00		3.891.963.358,00		3.891.963.358,00		3.891.963.358,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	80,51	80,31	80,51	3.891.963.358,00	80,52	3.891.963.358,00	80,53	3.891.963.358,00	80,54	3.891.963.358,00	80,54	3.891.963.358,00	80,54	3.891.963.358,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)																
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (poin)	82,83	84	84,5		85		85,5		86		86,5		86,5		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.255.000.000,00		2.255.000.000,00		2.255.000.000,00		2.255.000.000,00		2.255.000.000,00		2.255.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	2.255.000.000,00	100	2.255.000.000,00	100	2.255.000.000,00	100	2.255.000.000,00	100	2.255.000.000,00	100	2.255.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.621.530.000,00		3.621.530.000,00		3.621.530.000,00		3.621.530.000,00		3.621.530.000,00		3.621.530.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%)	100	100	100	3.621.530.000,00	100	3.621.530.000,00	100	3.621.530.000,00	100	3.621.530.000,00	100	3.621.530.000,00	100	3.621.530.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tingkat Partisipasi Pemilih (%) (%)	81,49	-	-		-		-		86,08		-		-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					4.830.000.000,00		4.715.000.000,00		4.830.000.000,00		4.830.000.000,00		4.830.000.000,00		4.830.000.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	65	65	65	4.830.000.000,00	65	4.715.000.000,00	65	4.830.000.000,00	65	4.830.000.000,00	65	4.830.000.000,00	65	4.830.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.520.000.000,00		1.520.000.000,00		1.520.000.000,00		1.520.000.000,00		1.520.000.000,00		1.520.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan	0	100	100	1.520.000.000,00	100	1.520.000.000,00	100	1.520.000.000,00	100	1.520.000.000,00	100	1.520.000.000,00	100	1.520.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)															
	Persentase Intensitas Koordinasi antarumat Beragama (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					4.370.405.865,60		4.369.498.485,60		23.804.498.485,60		34.022.498.485,60		4.891.071.735,60		4.891.071.735,60	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100	100	100	4.370.405.865,60	100	4.369.498.485,60	100	23.804.498.485,60	100	34.022.498.485,60	100	4.891.071.735,60	100	4.891.071.735,60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.812.159.519.609,60		1.885.458.484.409,60		1.897.636.442.909,60		1.934.021.392.909,60		1.949.697.242.909,60		1.949.697.242.909,60	

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2025 - 2030.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikatot tujuan/sasaran yang terseleksi. IKD merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci (IKK). Sedangkan IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	76,03	76,28	76,99	77,61	78,20	78,79	79,41	79,41
2	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Umur Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	75,31	75,44	75,63	75,81	75,99	76,18	76,36	76,36
3	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100, Data Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	19,60	18,31	17,02	15,73	14,44	13,15	11,86	11,86
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	102,28	100	100	100	100	100	100	100
5	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	Rata-Rata lama sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,63	9,67	9,79	9,87	9,98	10,19	10,28	10,28
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,50	13,52	13,56	13,60	13,64	13,68	13,72	13,72
7	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase penduduk miskin yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	11,10	9,20-10,16	8,67-9,47	7,52-8,49	6,12-7,33	4,50-6,07	3,99-5,46	3,99-5,46
8	Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	Jumlah murid SD/SMP yang bisa membaca Al Quran/Jumlah seluruh murid SD/SMP yang beragama islam x 100	96,53	97,73	97,84	97,96	98,07	98,18	98,30	98,30
9	Indeks Kerukunan Beragama	Poin	Indeks Kerukunan beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI	N/A	70,00	70,37	70,74	71,11	71,48	71,85	71,85
10	Indeks pelestarian kebudayaan Kota Tasikmalaya	Indeks	Nilai Dimensi pelestarian kebudayaan	30,00	32,05	34,17	38,33	42,50	44,57	46,67	46,67
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	Indeks Pembangunan Keluarga yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	60,51	61,21	61,91	62,61	63,31	64,01	64,71	64,71
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	Indeks Ketimpangan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,354	0,319	0,284	0,249	0,214	0,179	0,144	0,144

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	Instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda, dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	29,01	29,02	29,11	29,15	29,22	29,28	29,35	29,35
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,22	5,43-6,17	5,45-6,18	5,46-6,19	5,50-7,57	5,68-7,89	5,73-6,23	5,73-6,23
15	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,359	0,348-0,405	0,347-0,404	0,346-0,403	0,345-0,402	0,344-0,401	0,343-0,400	0,343-0,400
16	Tingkat Inflasi	%	Persentase inflasi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	1,94	1,00 – 3,00	1,00 – 3,00	1,00 – 3,00	1,00 – 3,00	1,00 – 3,00	1,00 – 3,00	1,00 – 3,00
17	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada Pilar Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat	32,43	32,61	35,23	36,65	38,39	40,22	42,13	42,13
18	Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	Distribusi persentase PDRB kategori Industri, Jasa dan Perdagangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	79,35	79,40	79,45	79,50	79,55	79,59	79,64	79,64
19	Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	(Jumlah Lembaga Keuangan Syariah Per Jumlah Total Lembaga Keuangan Dikali 100%) ditambah (jumlah produk ikm bersertifikat halal per jumlah produk ikm dikali 100%) ditambah (jumlah hotel menerapkan prinsip Syariah per jumlah hotel dikali 100%)/3	35,46	36,15	36,84	37,54	38,23	38,92	39,61	39,61
20	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,31	4,61	4,44	4,24	4,01	3,75	3,42	3,42
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB Adhb)	%	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	30,65	32,79	32,85	32,92	33,00	33,10	33,21	33,21

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6,49	5,97-6,49	5,76-6,34	5,49-5,89	5,45-5,93	5,40-5,96	5,32-5,69	5,32-5,69
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	85,16	86,53	87,88	89,09	90,18	91,16	92,04	92,04
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	Hasil penilaian Kemendagri berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu	5,80	5,81	5,82	5,82	5,83	5,83	5,84	5,84
25	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah berdasarkan penilaian Kementrian Dalam Negeri	49,36	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00
26	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Hasil analisis Tim Penyusun Tingkat Daerah	59,05	60,40	61,19	62,02	62,91	63,86	64,83	64,83
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	Gambaran kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	58,52	61,62	61,79	61,96	62,13	62,30	62,50	62,50
28	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihitung melalui aplikasi Aksara Bappenas	1,05	2,17	2,36	2,56	2,79	3,16	3,42	3,42
29	Indeks Risiko Bencana	Nilai	Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunannya, yaitu bahaya, keterpaparan dan kapasitas pemerintah, serta komunitas dalam menghadapi bencana dan dikeluarkan oleh BNPB	97,13	93,61	90,10	86,58	83,06	79,54	76,03	76,03

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.



4.2.2. Indikator Makro

Tabel 4.3.

Penetapan Target Indikator Makro Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TAHUN						TARGET AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,03	76,28	76,99	77,61	78,20	78,79	79,41	79,41
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,63	9,67	9,79	9,87	9,98	10,19	10,28	10,28
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50	13,52	13,56	13,60	13,64	13,68	13,72	13,72
	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,31	75,44	75,63	75,81	75,99	76,18	76,36	76,36
	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	11,43	11,576	11,745	12,014	12,383	12,652	12,921	12,921
2.	PDRB Perkapita	Juta Rp	39,45	39,50-41,61	42,66-43,63	45,24-46,99	47,95-50,75	50,79-54,94	53,93-60,14	53,93-60,14
3.	PDRB ADH Berlaku	Triliyun Rp	29,61	31,21-31,43	32,91-33,23	34,61-35,13	36,31-37,03	38,11-38,93	40,11-41,03	40,11-41,03
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,43-6,17	5,45-6,18	5,46-6,19	5,50-7,57	5,68-7,89	5,73-6,23	5,73-6,23
5.	Inflasi	%	1,94	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00
6.	Indeks gini	Poin	0,359	0,348-0,405	0,347-0,404	0,346-0,403	0,345-0,402	0,344-0,401	0,343-0,400	0,343-0,400
7.	Tingkat Kemiskinan	%	11,10	9,20-10,16	8,67-9,47	7,52-8,49	6,12-7,33	4,50-6,07	3,99-5,46	3,99-5,46
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	5,97-6,49	5,76 - 6,34	5,49-5,89	5,45-5,93	5,40-5,96	5,32-5,69	5,32-5,69
9.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar	1,05	2,17	2,36	2,56	2,79	3,16	3,42	3,42

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda berdasar target Imperatif dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2030

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI											
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	Indeks Ketahanan Pangan Publikasi Bapanas	74,37	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00
2	Prevelensi Ketidacukupan konsumsi Pangan	%	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,31	4,61	4,44	4,24	4,01	3,75	3,42	3,42
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kwh/ Kapita	Pengukuran yang digunakan untuk mengukur penggunaan energi listrik oleh populasi	0,651	0,691	0,89	0,984	1,16	1,376	1,628	1,628
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	(Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum perpipaan dibagi total jumlah rumah tangga) x 100%	0	25,43	25,93	26,43	26,93	27,43	27,93	27,93
5	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah	Indeks	Gambaran kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	58,52	61,62	61,79	61,96	62,13	62,30	62,50	62,50

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	(Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap SPALD-T + Jumlah Rumah Tangga dengan Akses terhadap Tangki Septic yang disedot setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam IPLT) / (Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya) x 100%	0	8,67	14,05	19,42	24,80	30,17	35,55	35,55
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihitung melalui aplikasi Aksara Bappenas	1,05	2,17	2,36	2,56	2,79	3,16	3,42	3,42
8	Indeks Risiko Bencana	Nilai	Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunannya, yaitu bahaya, keterpaparan dan kapasitas pemerintah, serta komunitas dalam menghadapi bencana dan dikeluarkan oleh BNPB	97,13	93,61	90,10	86,58	83,06	79,54	76,03	76,03
9	Indeks Ketahanan daerah	%	Kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,64
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu	0,38	0,81	1,27	1,3	1,32	1,37	1,39	1,39
11	Rasio Penduduk	%	Perbandingan jumlah penduduk dalam kelompok tertentu, misalnya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan, atau perbandingan jumlah penduduk usia muda dengan penduduk usia tua	102,65	102,28	102,09	101,9	101,71	101,5	101,31	101,31

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Kepadatan Penduduk	Orang per Km ²	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah	4.209	4.256	4.299	4.348	4.393	4.436	4.479	4.479
13	Kapasitas Air Baku	(m ³ /detik)	Total Kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan domestik, perkotaan, industri dan lain lain disetiap sumber air (mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber lainnya)	0	1,06	1,08	1,09	1,11	1,12	1,14	1,14
14	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/ Hari	Sampah yang terkumpul dikurangi jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) ditambah residu dari fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari)	N/A	80,75	81,71	82,68	83,64	84,6	85,56	85,56
15	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	%	Jumlah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah / Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan x 100	N/A	72,77	73,73	74,70	75,66	76,62	77,58	77,58
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,22	5,43-6,17	5,45-6,18	5,46-6,19	5,50-7,57	5,68-7,89	5,73-6,23	5,73-6,23
2	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase penduduk miskin yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	11,10	9,20-10,16	8,67-9,47	7,52-8,49	6,12-7,33	4,50-6,07	3,99-5,46	3,99-5,46
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	PDRB Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	39,45	38,99- 39,35	42,66- 43,63	45,24- 46,99	47,95- 50,75	50,79- 54,94	53,93- 60,14	53,93- 60,14

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6,49	5,97-6,49	5,76-6,34	5,49-5,89	5,45-5,93	5,40-5,96	5,32-5,69	5,32-5,69
5	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,359	0,348-0,405	0,347-0,404	0,346-0,403	0,345-0,402	0,344-0,401	0,343-0,400	0,343-0,400
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	76,03	76,28	76,99	77,61	78,20	78,79	79,41	79,41
7	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Umur Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	75,31	75,44	75,63	75,81	75,99	76,18	76,36	76,36
8	Prevalensi Stunting	%	Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	19,60	18,31	17,02	15,73	14,44	13,15	11,86	11,86
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,63	9,67	9,79	9,87	9,98	10,19	10,28	10,28
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,50	13,52	13,56	13,60	13,64	13,68	13,72	13,72
11	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	Kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah	78,91	78,92	78,93	78,94	78,95	78,96	78,97	78,97
12	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk* (SD/SMP):										
	Literasi SD	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	65,2	67,7	70	72,7	75,2	77,7	77,7	77,7

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Numerasi SD	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	57,96	60,86	64,00	66,66	69,56	72,46	72,46	72,46
	Literasi SMP	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
	Numerasi SMP	Poin	Nilai yang diperoleh Rapor Pendidikan	68,69	68,69	68,69	68,69	68,69	68,69	68,69	68,69
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	Nilai yang diperoleh dari Perpustakaan RI/Swasta	72,84	76,55	77,01	77,5	77,85	78,05	78,5	78,5
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	102,28	100	100	100	100	100	100	100
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	Indeks Ketimpangan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,354	0,319	0,284	0,249	0,214	0,179	0,144	0,144
16	Indeks Pembangunan Gender	Poin	(Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) / (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki) * 100 Dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	92,96	92,98	93	93,03	93,05	93,07	93,09	93,09
Fokus Kesejahteraan Masyarakat											
1	Pendidikan										
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,63	9,67	9,79	9,87	9,98	10,19	10,28	10,28
2	Kesehatan										
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,32	6,87	5,32	4,97	4,20	3,53	2,95	2,95

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	139,96	110,28	84,83	63,10	44,62	28,97	15,80	15,80
2.3	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100, Data Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	19,60	18,31	17,02	15,73	14,44	13,15	11,86	11,86
2.5.	Penanganan Tuberkulosis:										
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	Jumlah kasus TB yang diobati (ditemukan dan memulai pengobatan) dibagi Estimasi jumlah seluruh kasus TB di populasi kali seratus	141	100	100	100	100	100	100	100
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	Jumlah pasien TB yang sembuh ditambah jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan terhadap seluruh pasien TB baru yang tercatat memulai pengobatan pada periode tertentu kali seratus	85	90	90	91	92	93	94	94
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Angka Ketergantungan	%	Angka Ketergantungan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	45,30	45,40	45,50	45,60	45,65	45,70	45,75	45,75

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Distribusi persentase PDRB kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,41	13,03	12,95	12,87	12,78	12,70	12,60	12,60
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Distribusi persentase PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	6,26	6,29	6,47	6,65	6,82	7,00	7,18	7,18
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	Σ PDRB 17 sektor ekonomi kreatif regional/PDRB x 100% yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,66	1,68	1,71	1,73	1,75	1,78	1,81	1,81
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	68,92	69,42	69,92	70,42	70,92	71,42	71,92	71,92
6	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri	49,36	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00
7	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Nilai	Indeks Ekonomi Hijau pilar ekonomi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi	32,43	32,61	35,23	36,65	38,39	40,22	42,13	42,13
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	Distribusi persentase PMTB berdasarkan PDRB pengeluaran hasil penghitungan dikeluarkan oleh BPS	30,66	32,79	32,85	32,92	33,00	33,1	33,25	33,25
9	Ekspor Barang dan Jasa	%	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) = total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB sisi pengeluaran (Milyar Rupiah) / PDRB ADHB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	-14,51	-14,11	-13,71	-13,31	-12,91	-12,51	-12,11	-11,71

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Penjumlahan dari (0,67 x Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ditambah (0,25 x Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan) ditambah (0,08 x Rasio Konektivitas)	59,05	60,40	61,19	62,02	62,91	63,86	64,83	64,83
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan berdasarkan hasil perhitungan dan dikeluarkan oleh BPS	45,01	51,83	53,04	54,25	55,46	56,65	59,35	59,35
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	Indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah (Penerimaan Pajak Daerah / PDRB) x 100%	0,57	0,60	0,61	0,62	0,64	0,65	0,67	0,67
13	Tingkat Inflasi	%	Tingkat Inflasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,94	1,00 -3,00	1,00 -3,00	1,00 -3,00	1,00 -3,00	1,00 -3,00	1,00 -3,00	1,00 -3,00
14	Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	Distribusi persentase PDRB kategori Pertanian dan Perikanan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	5,05	5	5	5	5	5	5	5
15	Rasio kewirausahaan	%	Berusaha dibantu buruh tetap daerah / total angkatan kerja daerah x 100%	4,94	5,10	5,26	5,42	5,58	5,74	5,90	5,90
16	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	691	717	723	729	734	740	746	746
17	Jumlah Kerjasama Internasional	Buah	Jumlah Kerjasama Internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum Republik Indonesia	97,78	97,83	97.88	97,93	97,98	98,03	98,04	98,04
2	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	3,96	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Indeks Pemerintah Digital	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Penilaian dari Menpan RB	N/A	N/A	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,40
4	Indek Pelayanan Publik	Nilai	IPP hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenpanRB	4,30	4,30	4,36	4,42	4,50	4,55	4,55	4,55
5	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi dikali 100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya yang menggunakan hak pilihnya/ Jumlah masyarakat yang terdaftar x 100%	81,49	N/A	N/A	N/A	N/A	86,08	N/A	86,08
7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	(T x Pn) T = Total jawaban Respon Pn = Pilihan angka Skor likert	67,79	68	69	70	71	72	73	73



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat kabupaten/kota untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah, dikeluarkan oleh BRIN	3,96	3,97	3,98	3,99	4,00	4,01	4,02	4,02
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	85,16	86,53	87,88	89,09	90,18	91,16	92,04	92,04
10	Indeks Masyarakat Digital	Poin	Penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI	45,77	47,82	48,08	48,34	48,61	48,87	49,13	49,13
INDIKATOR KINERJA KUNCI											
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1	Pendidikan										
1.1	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	Kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah	78,91	78,92	78,93	78,94	78,95	78,96	78,97	78,97
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	80,39	80,45	80,51	80,58	80,64	81,00	81,06	81,06
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	97,35	97,41	97,45	97,54	97,73	97,03	97,95	97,95
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	97,35	97,42	97,51	97,57	97,76	97,86	97,98	97,98

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	14,82	17,30	20,00	22,25	24,72	27,20	30,10	30,10
1.6	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	(Total Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / Total Satuan Pendidikan) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	(Total Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik / Total Guru) * 100%	47,40	47,41	47,42	47,43	47,44	47,45	47,46	47,46
1.8	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	(Total prestasi yang diraih dalam O2SN / Jumlah Peserta O2SN Tingkat Provinsi) * 100%	25,03	25,15	25,2	25,25	25,30	25,35	25,4	25,4
2	Kesehatan										
2.1	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	19,60	18,31	17,02	15,73	14,44	13,15	11,86	11,86
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,32	6,87	5,32	4,97	4,20	3,53	2,95	2,95
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	139,96	110,28	84,83	63,10	44,62	28,97	15,80	15,80
2.4	Persentase Masyarakat Miskin mendapat Jaminan Kesehatan	%	(Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat Jaminan Kesehatan / Jumlah Masyarakat Miskin) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.5	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Masyarakat	Poin	Rata-rata nilai capaian SPM Kesehatan masyarakat	98,8	98,8	99,0	99,2	99,4	99,6	99,8	99,8
2.6	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	91	91	81	76	71	66	61	61
2.7	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	15	15	13	11	9	7	5	5
2.8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	Jumlah pasien TB yang sembuh ditambah jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan terhadap seluruh pasien TB baru yang tercatat memulai pengobatan pada periode tertentu kali seratus	85	90	90	91	92	93	94	94
2.9	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	Jumlah kasus TB yang diobati (ditemukan dan memulai pengobatan) dibagi Estimasi jumlah seluruh kasus TB di populasi kali seratus	141	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah bayi usia < 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap terhadap Jumlah sasaran bayi (< 1 tahun) kali seratus	98,1	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi/registrasi terhadap Jumlah seluruh tenaga kesehatan kali seratus	65	70	75	80	85	90	95	95

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.12	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Persentase sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	76	77	78	79	80	81	82	82
2.13	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	Jumlah TPP yang memenuhi syarat higiene-sanitasi (hasil pemeriksaan) terhadap Jumlah TPP yang diperiksa pada periode laporan kali seratus	44,2	50	75	80	85	90	95	95
2.14	Persentase Pangan Olahan Siap Saji (POSS) memenuhi syarat	%	Jumlah sampel POSS yang memenuhi syarat uji mutu dan keamanan terhadap Jumlah sampel diperiksa kali seratus	0	50	75	80	85	90	95	95
2.15	Persentase Peningkatan upaya promkes, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, persentase penumbuhan kesadaran dalam peningkatan derajat keluarga dan lingkungan dalam penerapan PHBS	%	Jumlah kegiatan/promosi/advokasi/kemitraan yang terlaksana ditambah Jumlah rumah tangga/individu/lingkungan yang menerapkan PHBS terhadap Jumlah kegiatan yang direncanakan ditambah jumlah rumah tangga/individu/lingkungan yang menjadi sasaran kali seratus	50	50	51	52	53	54	55	55
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
3.1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	Dihitung dari Hasil Survey Parameter Kemantapan Jalan yang Sesuai dengan SNI	91,52	91,86	92,13	92,40	92,66	92,93	93,20	93,20

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terdampak Oleh Irigasi	%	(Luas Sawah yang Terdampak Irigasi (Ha)/Total Luas Sawah dalam Kewenangan Kota (1749 Ha))*100%	26,8	27,85	46,35	47,4	48,45	49,5	50,55	50,55
3.3	Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	Jumlah Infrastruktur yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Infrastruktur di Luar Kawasan Permukiman Kumuh) x 100%	67,02	71,97	58,34	60,23	62,81	66,12	69,7	69,7
3.4	Capaian Rumah Tangga Yang Terlayani Akses SPAM Dan SPALD	%	Target capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum tahun exsisting / target pertahun capaian RT yang berakses	N/A	N/A	66,56	66,86	67,16	67,46	67,76	67,76
3.5	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda yang Memenuhi Ketentuan Bangunan	%	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/Lingkungan yang Ditingkatkan sesuai dengan RTBL nya (10%) + Persentase Jumlah Penyedia Jasa yang Mendapatkan Pembinaan (20%)	N/A	N/A	22,47	26,75	31,03	35,32	39,6	39,6
3.6	Persentase Luas Lahan yang Sesuai dengan Rencana Pola Ruang	%	(Luas Lahan yang Dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Pola Ruang / Luas Lahan yang Diberikan KKPR)*100%	N/A	N/A	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
3.7	Persentase Peningkatan Jaringan Drainase Jalan Kota	%	Panjang jaringan drainase jalan kota yang dibangun + direhabilitasi + dipelihara/ total jalan kota *100	N/A	0,36	0,83	0,83	0,85	0,85	0,83	0,83

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.8	Persentase Panjang Jaringan Sungai Yang Berfungsi Optimal	%	Panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal / Panjang jaringan sungai*100%	25,44	27,94	29,15	31,1	33,12	35,56	38,43	38,43
3.9	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%)	41,41	38,71	38,78	39,36	40,3	41,63	43,33	43,33
3.10	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda Yang Sesuai Standar Teknis	%	(Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani PUTR yang memenuhi standar teknis / Jumlah bangunan gedung pemda yang ditangani PUTR) * 100%	N/A	N/A	49,92	51,22	52,52	53,82	55,12	55,12
3.11	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	(Panjang Jalan dalam Kondisi Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Luar Kawasan Permukiman Kumuh) x 100%	67,19	60,88	51,88	54,93	59,27	64,71	70,56	70,56
3.12	Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	(Jumlah Unit Drainase yang Berfungsi Baik / Total Jumlah Unit Drainase) x 100% atau (Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi Baik / Total Panjang Saluran Drainase) x 100%	66,85	66,41	64,79	65,54	66,35	67,53	68,84	68,84

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.13	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Tasikmalaya * 100%	58,31	58,01	70,43	70,93	71,43	71,93	72,43	72,43
3.14	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap SPALD Berupa Akses Layak, Dan Akses Aman	%	(Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Layanan SPALD Berupa Akses Layak dan Aman / Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya) x 100%	N/A	N/A	62,69	62,79	62,89	62,99	63,09	63,09
3.15	IKM Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Nilai	Nilai IKM UPTD SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik)	83,54	84	84	84	84	84	84	84
3.16	Persentase Peningkatan Jaringan Jalan	%	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara / Total panjang jalan kota *100%	2,99	3,81	4,84	4,84	5,15	5,15	5,15	5,15
3.17	Persentase Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat Jasa Konstruksi	%	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat / jumlah tenaga kerja jasa konstruksi keseluruhan*100%	32,43	35,3	41,34	47,39	53,43	59,47	65,52	65,52
3.18	Persentase Luas Lahan Yang Dimanfaatkan Pemohon Pasca KKPR Terbit	%	Luas area pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen KKPR terhadap seluruh luas lahan yang diberikan KKPR *100%	N/A	N/A	99	99	99	99	99	99

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Perumahan Dan Kawasan Permukiman										
4.1	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	(Total RTLH-Penanganan RTLH)/Total rumah di Kota Tasikmalaya x 100	43,28	43,05	42,82	42,6	42,37	42,15	41,92	41,92
4.2	Persentase Perumahan yang Layak dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	((30% x Target SPM)+(35% x Target penanganan kawasan kumuh)+(35% x Target pengelolaan PSU))	52,14	53,51	54,89	56,26	57,63	59	60,37	60,37
4.3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	Realisasi penyediaan rumah bagi korban bencana/Target penyediaan rumah bagi korban bencana x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	Realisasi penyediaan rumah bagi korban relokasi/Target penyediaan rumah x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.5	Persentase Perumahan yang Sesuai dengan Standar Bangunan dan Perumahan	%	Realisasi perumahan yang sesuai standar/Target perumahan yang sesuai standar x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.6	Persentase Penanganan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh kewenangan kota/Total kawasan kumuh kewenangan kota x 100	15,89	19,52	23,15	26,78	30,41	34,03	37,66	37,66
4.7	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kawasan Permukiman Kumuh	%	(Total RTLH di kawasan kumuh-Penanganan RTLH)/Total RTLH di Kota Tasikmalaya x 100	42,53	42,33	42,12	41,91	41,7	41,49	41,28	41,28

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.8	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	(Total RTLH di luar kawasan kumuh-Penanganan RTLH)/Total RTLH di Kota Tasikmalaya x 100	57,47	57,36	57,26	57,15	57,05	56,94	56,84	56,84
4.9	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah unit rumah di perumahan yang tersedia PSU/Total unit rumah di perumahan x 100	47,35	47,65	47,95	48,25	48,54	48,83	49,12	49,12
4.10	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	%	Realisasi Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU dibagi target pelayanan X 100	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
5.1	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikurangi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada Tahun n) dibagi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikali 100 %	3	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,0

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.2	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi	%	Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikurangi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n) dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikali 100%	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,0
5.3	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah Gangguan Trantibum yang diselesaikan dibagi jumlah Laporan Gangguan Trantibum dikali 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase Anggota Linmas aktif	%	Jumlah anggota linmas yang melaksanakan tugas dibagi jumlah anggota linmas aktif dikali 100%	N/A	50	50	51	52	53	54	54
5.6	Indeks Ketahanan Daerah	%	Kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,64
5.7	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time	%	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan x 100%	70,13	100	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan / Jumlah Layanan Pencegahan,	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran X 100%								
5.9	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	%	Jumlah (Si), untuk i =n 1 sampai 165 / 165	0,41	0,46	0,51	0,56	0,61	0,66	0,71	0,71
6	Sosial										
6.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	%	Jumlah Aduan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani / Jumlah Aduan PPKS Yang diterima X 100%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang terlayani/jumlah PPKS yg membutuhkan layanan rehabilitasi sosial x 100%	99,66	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	%	Jumlah Masarakat miskin penerima bantuan / Jumlah masyarakat miskin terdata x 100 %	98,59	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberi bantuan / jumlah korban bencana alam dan sosial yang diusulkan kelurahan X 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	%	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan & mendapat pembinaan / Jumlah PSKS Aktif dan Terdaftar X 100%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.6	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	%	Jumlah Makam yang terpelihara sesuai standar pada Taman Makam Pahlawan / Jumlah Makam di TMP Kusuma Bangsa X 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
7	Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
7.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta Rupiah/ Tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)/Jumlah penduduk yang bekerja	53,74	56,15	58,70	61,40	64,29	67,37	70,57	70,57
7.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perempuan/ Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas x 100%	48,25	53,05	58,35	64,15	70,55	77,55	85,05	85,05
7.3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD/ Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/Kota x 100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100
7.4	Persentase peserta pelatihan yang lulus pelatihan berbasis kompetensi	%	Lulusan pelatihan yang lulus uji kompetensi BNSP/ jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi x 100%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	Jumlah pencari kerja yang bekerja di dalam negeri/ jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100 %	40	40	40	40	40	40	40	40

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.6	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak dasar pekerja dan dialog social di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyusunan struktur dan skala upah, atau menjadi peserta pada program jaminan social ketenagakerjaan, atau pembentukan Lembaga Kerjasama bipartit. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online.	N/A	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000
7.7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	Jumlah pekerja yang memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja x 100%	27	27,29	32,29	37,29	42,29	47,29	52,29	52,29
7.8	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal/ Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas x 100%	N/A	1	1	1	1	1	1	1
7.9	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	Calon transmigran yang dibina dan diberdayakan dibagi calon transmigran yang mendaftar dikali 100%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	(Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) / (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki) * 100 Dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	92,96	92,98	93,00	93,03	93,05	93,07	93,09	93,09

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Persentase Keterlibatan di Parlemen + Perempuan sebagai Tenaga Profesional + Sumbangan Pendapatan Perempuan	69,84	69,88	70,00	70,02	70,04	70,06	70,08	70,08
8.3	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	%	(Total Kasus Kekerasan terhadap Perempuan / Total Penduduk Perempuan) * 100%	0,017	0,022	0,021	0,02	0,019	0,018	0,017	0,017
8.4	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	%	(Total Kasus Kekerasan terhadap Anak / Total Penduduk usia Anak) * 100%	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13
8.5	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	%	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan ARG/jumlah perangkat daerah X 100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.6	Persentase kasus yang tertangani	%	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti / jumlah laporan/pengaduan yang masuk X 100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.7	Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	%	Jumlah keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender/jumlah keluarga x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.8	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif	%	Jumlah lembaga yang melakukan melaksanakan pemenuhan hak anak/jumlah lembaga yg ada X 100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.9	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.10	Persentase Data Terpilah yang Dimanfaatkan	%	(Total Data Gender dan Anak Terpilah yang dimanfaatkan / Total Data Gender dan Anak) x 100%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
9	Ketahanan Pangan										
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	Indeks Ketahanan pangan yang diitung dan dikeluarkan oleh Bapanas	74,37	75	75	76	77	78	79	79
9.2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	Jumlah CPP kab/kota / jumlah target CPP kab/kota yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	100
9.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dikali dengan bobot setiap kelompok pangan yang telah ditetapkan. Hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan untuk setiap kelompok pangan	95,1	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	95,6	95,6
9.4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	Jumlah daerah rentan rawan pangan/Jumlah Kelurahan x 100%	4,35	4,35	4,35	2,90	2,90	1,5	1,5	1,5
9.5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Jumlah pangan yang disampel x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Pertanahan										
10.1	Persentase PKKPR tanah aset pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial	%	Jumlah tanah aset pemkot yang sesuai dengan peruntukan ruang / luas tanah aset pemkot yang diberikan PKKPR*100%	100	100	100	100	100	100	100	100
10.2	Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas sosial dengan rencana tata ruang	%	Luas tanah aset pemkot untuk pembangunan fasum fasos yang sesuai PKKPR / Luas tanah ases pemkot yang diperlukan untuk pembangunan fasum fasos	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Lingkungan Hidup										
11.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah, yang dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup	67,9	67,91	67,92	67,95	67,99	68,04	68,1	68,1
11.2	Indeks Kualitas Udara	Poin	$IKU = 100 - (50 / 0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$	86,64	63,64	63,84	64,04	64,24	64,44	64,64	64,64
11.3	Indeks Kualitas Air	Poin	$IKA = \sum_{i=1}^n (I_i)^{W_i} \times I_i$ W= Bobot Parameter i I = Nilai dari Parameter i	39,33	65,09	65,29	65,49	65,69	65,89	66,09	66,09
11.4	Indeks Kualitas Lahan	Poin	DKK = $\sum$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar IKL = $100 - ((84,3 - ((LTL / LW) - DKK) \times 100)) \times 50 / 54,3$	39,45	51,91	51,98	52,05	52,11	52,18	52,25	52,25
11.5	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah	86,13	100	100	100	100	100	100	100
11.6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi total rekomendasi kajian lingkungan hidup yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan dikali 100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.7	Persentase Penurunan Pencemaran	%	Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Berjalan dikurangi Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Sebelumnya (Persentase penurunan adalah Nilai Indeks Kualitas yang diperoleh dibagi dengan nilai indeks kualitas kategori baik(70) dikali 100)	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.8	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	%	Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola milik Pemerintah dibagi total luas Ruang Terbuka Hijau eksisting milik pemerintah dikali 100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	Jumlah LB3 yg dikelola pihak ketiga berizin pada tahun berjalan dibagi jumlah LB3 yang dihasilkan dan dilaporkan pada tahun berjalan dikali 100	N/A	N/A	55	60	65	70	75	75
11.10	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	%	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang taat Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH dibagi Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi pada tahun berjalan dikali 100	N/A	N/A	10	10	10	10	10	60
11.11	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	Jumlah penyuluh yang melaksanakan peningkatan kompetensi dibagi total penyuluh aktif dikali 100	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
11.12	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan hidup dibagi jumlah target partisipasi masyarakat dibagi 100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.13	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	%	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan pada tahun berjalan dibagi Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang teregistrasi pada tahun berjalan dikali 100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil										
12.1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Jumlah skor yang diperoleh/Jumlah maksimal skor x 100	N/A	84	85	86	87	88	89	89
12.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Jumlah Kepemilikan KIA/Jumlah penduduk yang wajib memiliki KIA x100	49,09	48,5	48,7	49	49,3	49,5	49,7	49,7
12.3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	Jumlah Pemanfaatn IKD/ Jumlah penduduk wajib KTP El yang sudah rekam x100 %	7,32	7,35	7,50	7,65	7,80	7,90	8,00	8,00
12.4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	%	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-4 thn)/Jumlah Penduduk Usia 0-4 thn x 100%	94,65	94,75	94,90	95,10	95,25	95,40	95,50	95,50
12.5	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	%	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan)/Jumlah Penduduk Berstatus Kawin x 100	87,25	87,60	87,80	87,95	88,05	88,25	88,50	88,50
12.6	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai	%	(Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian)/Jumlah Penduduk Berstatus Bercerai) x 100%	67,81	69,00	69,80	70,25	70,85	71,30	71,65	71,65
12.7	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	(Jumlah Kepemilikan Akta Kematian/Jumlah Pelaporan Akta Kematian) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
12.8	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan) /Jumlah target) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
12.9	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Yang Dicetak sesuai Permendagri / Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
13.1	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama tahun n dibagi jumlah	1,92	2	2	2	2	2	2	12

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			perempuan umur 15-49 tahun pada tahun n								
13.2	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	%	Laporan hasil pemutakhiran data keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100
13.3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	Jumlah perempuan usia 15an- 49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern / jumlah total perempuan usia 15an-49 tahun yang sudah menikah atau sedang berhubungan x 100	67,67	67,67	68,50	69,00	69,50	70,00	70,00	70,00
13.4	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (Un Met Need)	%	Jumlah perempuan usia 15an- 49 tahun yang ingin menunda atau tidak ingin ber-KB / jumlah total perempuan usia 15an-49 tahun yang menikah atau sedang berhubungan x 100	12,5	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0
13.5	Persentase keluarga yang memenuhi delapan fungsi keluarga	%	Jumlah keluarga yang dilatih orientasi ketahanan keluarga / jumlah keluarga x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Perhubungan										
14.1	Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	%	(Jumlah Trayek yg dilayani x Bobot Trayek)/jumlah Kebutuhan Trayek	62,09	64,29	66,48	68,13	70,33	72,53	74,73	74,73
14.2	V/C Rasio	poin	Volume Lalu Lintas / Kapasitas Jalan	0,354	0,345	0,340	0,334	0,328	0,322	0,315	0,315
14.3	Tingkat Keselamatan Transportasi	%	(Persentase Kendaraan Wajib Uji + Persentase Angkutan Umum Laik Jalan + Persentase Penyediaan Fasilitas)/3	63,02	64,76	66,72	68,82	71,45	74,78	78,21	78,21
14.4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia / Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dibutuhkan	48	50,32	53,40	57,13	61,89	68,42	75,89	75,89
14.5	Konektivitas Darat	km	Jumlah Trayek yang Tersedia + Rencana Trayek Yang Akan Dilayani	420	448	487	504	526	540	550	550

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Komunikasi dan Informatika										
15.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	3,96	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.2	Indeks Pemerintah Digital	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintah Digital berdasarkan Penilaian dari Menpan RB	N/A	N/A	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
15.3	Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE	%	Realisasi Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang terpenuhi/Jumlah Total Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang harus dipenuhi x 100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.4	Peningkatan Kematangan Penerapan Pemerintah Digital	%	Persentase Perbandingan Hasil pengurangan Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun berjalan dengan Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun sebelumnya terhadap Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun sebelumnya (Nilai Akhir - Nilai Awal)/Nilai Awal*100	N/A	N/A	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
15.5	Peningkatan Implementasi Smart City	%	Persentase Perbandingan Hasil pengurangan Nilai Implementasi Smart City tahun berjalan dengan Nilai Implementasi Smart City tahun sebelumnya terhadap Nilai Implementasi Smart City tahun sebelumnya (Nilai Akhir - Nilai Awal)/Nilai Awal*100	N/A	N/A	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
15.6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi	94,08	94,1	94,5	95,0	95,5	96,0	96,0	96,0

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.7	Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Poin	Nilai yang dihasilkan pada indikator penilaian indeks keterbukaan informasi publik	94,08	94,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.8	Nilai Kualitas Informasi	%	Hasil Nilai Kualitas Informasi pada LHE Capaian Keterbukaan Informasi	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
15.9	Nilai Pelayanan Informasi	%	Hasil Nilai Pelayanan Informasi pada LHE Capaian Keterbukaan Informasi	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
16	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah										
16.1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	Volume usaha koperasi /PDRB atas dasar harga berlaku x 100	1,37	1,40	1,47	1,57	1,67	1,77	1,87	1,87
16.2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	(Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan) x100%	N/A	82,26	82,76	83,26	83,76	84,26	84,76	84,76
16.3	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	Volume usaha koperasi tahun n - (n-1)/Volume Usaha Koperasi Tahun n	0,26	0,75	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00
16.4	Persentase Koperasi Aktif	%	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%	53,2	55,8	57,6	59,4	61,2	63,0	64,8	64,8
16.5	Persentase koperasi sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat dibagi Jumlah total KSP/USP x 100%	26,17	27,27	28,33	29,23	31,00	32,00	34,00	34,00
16.6	Persentase koperasi yang bersertifikat uji kompetensi	%	Jumlah koperasi yang bersertifikat kompetensi/ jumlah total koperasi x 100%	6,83	8,20	13,66	16,39	19,13	21,86	24,59	24,59
16.7	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (berdasarkan RAT, volume usaha dan aset) dibagi jumlah seluruh koperasi aktif	N/A	43,59	45,59	49,59	57,59	63,59	69,59	69,59
16.8	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	Jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal dibagi total usaha mikro	N/A	1,7	3,5	5,2	7,0	8,7	10,4	10,4

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.9	Pertumbuhan Wirausaha	%	(Jumlah wirausaha tahun n - jumlah wirausaha tahun n-1 dibagi jumlah wirausaha tahun n-1) x 100%	8,93	9,82	11,08	12,17	13,08	13,81	14,36	14,36
17	Penanaman Modal										
17.1	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	Jumlah investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	N/A	437	440	445	450	455	460	460
17.2	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian pelayanan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100	100	100	100	100	100	100	100
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	N/A	N/A	2	5	10	10	10	37
17.4	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	Jumlah investor tahun n - jumlah investor n-1 dibagi Jumlah jumlah investor n-1 x 100%	N/A	N/A	10	10	10	10	15	55
17.5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	(Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha) x100%	100	100	100	100	100	100	100	100
17.6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100%	5	N/A	10	5	5	5	5	30
17.7	Persentase data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	%	Jumlah Data dan Informasi yang dimanfaatkan / Jumlah Total Data dan Informasi yang tersedia x100	N/A	100	100	100	100	100	100	100
18	Kepemudaan dan Olahraga										
18.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	%	Rata-rata Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	N/A	57,55	57,67	57,78	57,90	58,01	58,13	58,13
18.2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	(Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi di Tingkat Provinsi / Jumlah Cabang Olahraga yang Berpartisipasi) x 100%	N/A	48,89	55,55	51,11	53,33	55,55	57,78	57,78

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18.3	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	(Jumlah pemuda berwirausaha/ jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	33,17	38,43	38,65	38,76	38,87	38,98	39,09	39,09
18.4	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	%	(Jumlah pemuda aktif di organisasi/ jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	67,64	76,55	76,69	76,81	76,93	77,05	77,17	77,17
18.5	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	(Jumlah intervensi sarpras olahraga/ Target intervensi terhadap sarpras olahraga) x 100	54,54	20	20	40	60	80	100	100
18.6	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	%	(Jumlah cabang olahraga yang dibina / jumlah cabang olahraga) x 100	50	42,22	44,44	48,89	53,33	57,78	62,22	62,22
18.7	Persentase cabang olahraga masyarakat yang dibina	%	(Jumlah induk olahraga masyarakat atau [INORGA] yang dibina / Jumlah INORGA) x 100	13,8	15,38	19,23	19,23	19,23	19,23	23,08	23,08
19	Statistik										
19.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Penilaian dari Badan Pusat Statistik	3,01	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
19.2	Persentase Peningkatan pengunjung web open data	%	Jumlah Pengunjung Tahun Sekarang-Jumlah Pengunjung Tahun Kemarin/Jumlah Pengunjung Tahun KemarinTahun Kemarin x 100	25,81	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
20	Persandian										
20.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	%	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001 (Nilai Hasil Indeks KAMI/Jumlah Total Nilai Indeks KAMI x 100)	45,74	45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20.2	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001	N/A	N/A	400	450	500	550	550	550
20.3	Nilai kelengkapan pengamanan informasi	Poin	Nilai yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	297	350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20.4	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Poin	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	N/A	N/A	140	160	180	200	200	200
20.5	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM)	Poin	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM) yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	N/A	N/A	260	290	320	350	350	350
21	Kebudayaan										
21.1	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan sejarah Daerah	%	Rata-rata persentase capaian program urusan kebudayaan	N/A	16,31	16,32	16,33	16,34	16,35	16,36	16,36
21.2	Persentase Intervensi Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	%	(Rata-rata Persentase Capaian Pengembangan Kebudayaan)	19,56	30,77	53,47	37,67	38,54	39,4	40,27	40,27
21.3	Persentase Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	(Jumlah Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N - Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N-1)/Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan tahun N-1) x 100%	25	5,71	6,67	13,33	17,65	15,00	17,39	17,39
21.4	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	(Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan / target pelestarian) x 100	10	20	20	30	40	50	60	60
21.5	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya) x 100	20	20	20	20	20	20	20	20
21.6	Persentase Museum yang Dilestarikan	%	(Jumlah Museum yang Dilestarikan / Jumlah Museum) x 100	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Perpustakaan										
22.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	Nilai yang diperoleh dari Perpustakaan RI/Swasta	72,84	76,55	77,01	77,5	77,85	78,05	78,5	78,5
22.2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	Ukuran perbandingan antara jumlah koleksi yang tergolong sebagai Koleksi Nasional dan/atau Naskah Kuno dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan yang tercatat	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100
22.3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah ukuran yang menunjukkan intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis aktivitas membaca yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui bahan bacaan cetak maupun digital, yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk perpustakaan, toko buku, maupun media daring	82,09	82,2	82,4	82,4	82,6	82,8	83,0	83,0
23	Kearsipan										
23.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	Nilai	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal dari Provinsi Jawa Barat, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	64,82	64,82	65,00	65,25	65,5	65,75	66,00	66,00



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23.2	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Nilai	Rata-rata Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	62,59	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,00
23.3	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	Persentase jumlah arsip dinamis, statis, dan sikh/jikh yang sudah dibuatkan daftar dibagi dengan jumlah keseluruhan arsip dinamis, statis, dan sikh/jikh	100	100	100	100	100	100	100	100
23.4	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	nilai capaian aspek PAS + PAI dibagi nilai standar dalam LAKE x 100 %	61,33	61,33	61,58	61,83	62,08	62,33	62,58	62,58
23.5	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup yang terselesaikan(dipenuhi)/ jumlah permohonan kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup	N/A	100	100	100	100	100	100	100
Unsur Pemerintahan Pilihan											
1	Kelautan dan Perikanan										
1.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Angka produksi perikanan budidaya	9.989,71	10.000	10.000	10.050	10.100	10.150	10.200	10.200
1.2	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tah un	Jumlah Ikan yang dikonsumsi dibagi jumlah penduduk	43,95	44,00	44,00	44,25	44,50	44,75	45,00	45,00
1.3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Angka produksi perikanan tangkap	101,06	102	102	103	104	105	106	106

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Pariwisata										
2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	643.609	643.721	644.357	645.105	645.853	646.600	647.348	647.348
2.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Distribusi persentase PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	6,26	6,29	6,47	6,65	6,82	7,00	7,18	7,18
2.3	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	%	(Jumlah destinasi pariwisata yang diintervensi / Jumlah destinasi pariwisata pada Ripparkot) x 100	40,82	42,86	42,86	44,9	46,94	48,98	51,02	51,02
2.4	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	%	(Jumlah pelaksanaan pemasaran dalam dan luar daerah / Jenis pemasaran) x 100	40	40	40	60	80	100	100	100
2.5	Persentase Jenis Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	(Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan / Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif) x 100	N/A	N/A	N/A	23,53	29,41	35,29	41,18	41,18
2.6	Persentase Usaha Pariwisata dan Subsektor ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	(Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekraf yang dikembangkan / jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekraf) x 100	20	23,33	23,33	26,67	30,00	33,33	36,67	36,67
3	Pertanian										
3.1	Produksi Komoditas Peternakan	Ton	Angka produksi Peternakan	13.147,57	13.149	13.150	13.200	13.250	13.300	13.350	13.350
3.2	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Angka produksi tanaman pangan	61.364,40	61.400	61.500	62.000	62.500	63.000	63.500	63.500
3.3	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Angka produksi hortikultura dan perkebunan	5.587,81	5.750	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
3.4	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	Perda LP2B	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
3.5	Tingkat Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	100	100	100	100	100	100	100	100
3.6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV	%	(Jumlah Unit Usaha dengan Sertifikat Pra NKV atau NKV / Total Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan) x 100%	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	atau NKV (Nomor Kontrol veteriner)										
3.7	Persentase penanganan bencana pertanian	%	Jumlah areal terdampak bencana yang ditanggulangi/Jumlah total areal terdampak bencana x 100	100	75	75	75	75	75	75	75
3.8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	(Jumlah Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim yang Dilakukan / Total Jumlah Kegiatan yang Direncanakan) x 100%	N/A	75	75	75	75	75	75	75
3.9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan perizinan	100	100	100	100	100	100	100	100
3.10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	Jumlah kelompok naik kelas / Jumlah kelompok x 100%	5,68	5,7	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0
3.11	Persentase kelembagaan tani yang dibentuk dan beroperasi	%	Persentase kelembagaan tani yang aktif beroperasi dari total kelembagaan tani yang terbentuk.	N/A	60	60	60	60	60	60	60
4	Perdagangan										
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Distribusi persentase PDRB kategori perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	21,24	21,00	20,75	20,51	20,27	20,02	19,78	19,78
4.2	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	(Jumlah Ijin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi / Total Jumlah Permohonan Ijin Usaha Perdagangan) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	(Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Sarana Perdagangan yang Direncanakan untuk Ditingkatkan) x 100%	N/A	50	60	70	80	90	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.4	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	Persentase = (Jumlah Hari dengan Harga Stabil / Total Jumlah Hari dalam Periode Tertentu) x 100%	N/A	38,70	40,82	42,86	44,9	46,94	48,98	48,98
4.5	Nilai ekspor barang	(Juta)US\$	Jumlah Barang yang Diekspor x Harga Barang per Unit atau Total Nilai FOB (Free On Board) dari Barang yang Diekspor	19,8	20,8	21,8	22,8	23,8	24,8	25,8	25,8
4.6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang	100	100	100	100	100	100	100	100
4.7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosi	%	((Omset Setelah Promosi - Omset Sebelum Promosi) / Omset Sebelum Promosi) x 100%	N/A	35,57	36,57	37,57	38,57	39,57	40,57	40,57
5	Perindustrian										
5.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Distribusi persentase PDRB kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,41	13,03	12,95	12,87	12,78	12,70	12,60	12,60
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	%	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	112,89	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri yang dikeluarkan	%	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan	7,72	16,90	17,60	18,30	19,00	19,70	20,40	20,40
5.4	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	1) Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%);	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (0%). 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)								
	Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan										
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
1.1	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	82,47	82,75	83,25	83,75	84,25	84,75	85,25	85,25
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	Nilai IKM pemerintah Daerah hasil penilaian Evaluator Tim Kota	88,10	88,10	8,15	88,35	88,45	88,50	88,50	88,50
1.3	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja yang Dinilai Oleh Kemenpan-RB	10,55	10,55	10,90	11,20	11,50	11,75	11,75	11,75
1.4	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum Republik Indonesia	97,78	97,83	97,88	97,93	97,98	98,03	98,04	98,04

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.5	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	IPP hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenpanRB	4,30	4,30	4,36	4,42	4,50	4,55	4,55	4,55
1.6	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Indeks Kualitas Kebijakan Hasil Penilaian Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)	71,44	71,55	71,70	71,80	71,90	72,00	72,10	72,10
1.7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	Indeks Tata Kelola Pengadaan Hasil Penilaian LKPP	68,48	70,71	71,71	74,64	75,64	76,61	77,61	77,61
1.8	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	43,67	43,75	44,00	44,25	44,50	44,75	45,00	45,00
1.9	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Proses	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Proses Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	38,8	39,00	39,25	39,50	39,75	40,00	40,25	40,25
1.10	Rata-rata Indeks pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah IPP Perangkat Daerah / Jumlah PD (hasil FEKPPP Mandiri)	3,51	3,51	3,55	3,60	3,70	3,80	3,90	3,90
1.11	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM kategori "Sangat Baik" (88,31 - 100)	%	(Jumlah PD dengan Nilai IKM "Sangat Baik" / Jumlah PD) x 100%	44	44	47	50	52	55	58	58
1.12	Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi seluruh Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	71,86	71,86	75,00	78,50	81,00	83,00	85,00	85,00
1.13	Rata-rata Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Nilai	Jumlah Nilai Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	32,72	33,00	33,50	33,80	34,00	34,50	34,80	34,80
1.14	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%	(Jumlah Eviden IKK yang Terpenuhi / Jumlah Eviden IKK yang Harus Dipenuhi) X 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.15	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	N/A	71,55	71,70	71,80	71,90	72,00	72,10	72,10

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.16	Indeks Zakat Nasional (IZN)	poin	Nilai Indeks Zakat Nasional yang dikeluarkan oleh BAZNAS Pusat	N/A	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71
1.17	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat	N/A	71,55	71,70	71,80	71,90	72,00	72,10	72,10
1.18	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	N/A	71,55	71,70	71,80	71,90	72,00	72,10	72,10
1.19	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai	Jumlah Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Administrasi Pembangunan / Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Administrasi Pembangunan	N/A	71,55	71,70	71,80	71,90	72,00	72,10	72,10
1.20	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangunan yang Dilaksanakan / Jumlah Saran Tindak Lanju) X 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.21	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	((Nilai ITKP Tahun n - Nilai ITKP Tahun n-1) / Nilai ITKP Tahun n-1) x 100%	29,55	3,26	1,41	4,09	1,34	1,28	1,31	1,31

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.22	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%	85,03	86	87	88	89	90	91	91
1.23	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	(Jumlah Hari Penetapan Perda APBD yang Tepat Waktu / Jumlah Hari yang Ditentukan) x 100%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
1.24	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	Jumlah Ranperda yang Ditetapkan / Jumlah Ranperda yang Direncanakan) x 100%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
1.25	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	(Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Efektif / Total Jumlah Kegiatan Pengawasan) x 100% atau (Jumlah Rekomendasi yang Dilaksanakan / Total Jumlah Rekomendasi) x 100%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
2.1	Perencanaan Pembangunan										
2.1.1	Nilai Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Poin Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	23,82	24,05	24,15	24,25	24,35	24,45	24,55	24,55
2.1.2	Nilai Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Poin Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	19,52	20,14	20,24	20,34	20,44	20,54	20,64	20,64
2.1.3	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah)	24,43	25,71	25,81	25,91	26,01	26,11	26,21	26,21
2.1.4	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	24,16	24,08	24,18	24,28	24,38	24,48	24,58	24,58

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.5	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM)	24,51	25,63	25,73	25,83	25,93	26,03	26,13	26,13
2.1.6	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	(Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM)	24,29	23,99	24,09	24,19	24,29	24,39	24,49	24,49
2.1.7	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK)	24,11	25,99	26,09	26,19	26,29	26,39	26,49	26,49
2.1.8	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilayahan	Poin	(Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK)	23,70	24,41	24,51	24,61	24,71	24,81	24,91	24,91
2.2	Keuangan										
2.2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	Opini dari BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.2	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.3	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2.4	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/Target Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.5	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar/Target Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.6	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	(Total PAD Tahun Ini - Total PAD Tahun Lalu) / (Total PAD Tahun Lalu) x 100%	5,13	12,47	14,60	17,82	21,16	24,59	28,03	28,03
2.2.7	Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang tersedia	%	(Jumlah Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang tersedia / Jumlah dokumen Target PAD) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.8	Persentase penerapan kebijakan teknis	%	(Jumlah kebijakan teknis yang diterapkan / Jumlah kebijakan teknis) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.9	Persentase pengelolaan penerimaan pajak yang sesuai standar	%	(Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan pajak yang sesuai ketentuan / Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan pajak) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.10	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pendapatan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendapatan) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.11	Persentase Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi	%	(Jumlah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi / Jumlah layanan) * 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
2.3.1	Indeks Sistem Merit	Nilai	Penilaian mandiri sistem merit yang diverifikasi dan ditetapkan oleh KASN, meliputi aspek: a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. pengembangan karier	371	335	339	344	351	356	361	361

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			d. promosi dan mutasi; e. manajemen kinerja; f. penggajian, penghargaan dan disiplin; g. perlindungan dan pelayanan; dan h. sistem informasi (Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah)								
2.3.2	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	40	37,5	37,5	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0
2.3.3	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	40	36	38	38	38	38	38	38
2.3.4	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	16	12	12	12	14	14	14	14
2.3.5	Nilai kriteria kualitas sistem informasi	Nilai	Nilai kriteria kualitas sistem informasi	20	22	24	24	24	24	24	24
2.3.6	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	Nilai	Nilai kriteria kualitas evaluasi	75	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	70,0	70,0
2.3.7	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	37,5	35,0	35,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
2.3.8	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	37,5	35,0	35,0	35,0	35,0	37,5	37,5	37,5
2.3.9	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	75	60,0	60,0	60,0	63,0	62,5	62,5	62,5
2.3.10	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	Nilai	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi	26,98	30,0	30,0	32,5	32,5	35,0	37,5	37,5
2.4	Penelitian dan Pengembangan										

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4.1	Persentase hasil riset/kajian yang dimanfaatkan	%	(Hasil riset/kajian yang dipublikasikan / Total target Seluruh Hasil Riset/Kajian) x 100%	N/A	N/A	13,04	21,74	26,09	21,74	17,39	100
2.4.2	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Perangkat Daerah minimal berkategori inovatif	%	(Jumlah PD yang IIPD minimal berkategori inovatif/Jumlah PD)X 100%	N/A	N/A	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	25,00
2.4.3	Persentase hasil riset/kajian yang sesuai standar	%	(Hasil riset/kajian yang disusun / Total target Seluruh Hasil Riset/Kajian) x 100%	N/A	N/A	19,35	22,58	25,81	16,13	16,13	100
2.4.4	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang terverifikasi nasional	%	((Total inovasi di IGA tahun ini) - (Total inovasi di IGA tahun sebelumnya)) / (Total inovasi di IGA tahun sebelumnya) x 100%	38,75	N/A	50,00	62,50	75,00	87,50	100	100
2.4.5	Persentase pencapaian fasilitasi HAKI	%	(Jumlah Karya/Inovasi yang difasilitasi HAKI dan telah terdaftar/ Jumlah Target Karya/Inovasi yang difasilitasi HAKI) x 100 %	N/A	N/A	17,65	17,65	17,65	23,53	23,53	100
3	Unsur Pengawasan Pemerintahan										
3.1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level (Poin)	Level Kapabilitas APIP yang telah dilakukan Penilaian oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				-3,06	-3,065	-3,1	-3,15	-3,175	-3,2	-3,225	-3,225
3.2	Nilai Komponen Evaluasi Internal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Nilai Unsur Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tingkat Kota yang dikeluarkan oleh evaluator PAN RB	17,22	17,25	17,50	17,55	17,75	18,00	18,25	18,25
3.3	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	Level Maturitas SPIP Tingkat Kota hasil evaluasi BPKP	3,144	3,154	3,164	3,174	3,184	3,194	3,200	3,200
3.4	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja strategis pemerintah daerah yang sesuai dengan standar	%	Jumlah Pengawasan kinerja Strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dibandingkan jumlah seluruh kinerja strategis pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
3.5	Persentase kesesuaian Indikator kinerja kunci Laporan kinerja Pemerintah Daerah (LPPD)	%	Jumlah Indikator Kinerja Kunci yang terverifikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Indikator Kinerja Kunci	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.6	Persentase Laporan hasil revidi atas LKPD yang sesuai SAP	%	kesesuaian laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan unsur laporan keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100
3.7	Persentase capaian penyelesaian TLHP	%	Akumulasi jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh rekomendasi yang di terbitkan	N/A	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0	84,5	84,5
3.8	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	%	jumlah pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dibandingkan dengan jumlah PDTT dalam PKPT	100	100	100	100	100	100	100	100
3.9	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	Capaian penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP terhadap total rekomendasi hasil pengawasan APIP yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100	100
3.10	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	87,31	87,31	87,35	87,37	87,39	87,41	87,43	87,43
3.11	Persentase kesesuaian antara peraturan / kebijakan terkait pengawasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	%	Jumlah kebijakan yang sesuai antara peraturan/kebijakan terkait pengawasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dibandingkan dengan jumlah aturan yang harus disesuaikan	N/A	100	100	100	100	100	100	100
3.12	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	%	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah rencana pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada PKPT	N/A	100	100	100	100	100	100	100
3.13	Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP hasil Penjaminan Kualitas	Skor	Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP hasil Penjaminan Kualitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pembantu IV	3,221	3,231	3,241	3,251	3,261	3,271	3,300	3,300

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.14	Persentase cakupan pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi	%	Persentase jumlah perangkat daerah yang terevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasinya dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah yang harus dievaluasi	100	100	100	100	100	100	100	100
3.15	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	%	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi adalah Indeks yang menggambarkan efektifitas pencegahan korupsi dalam kerangka maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi oleh BPKP	2,49	2,495	2,495	2,500	2,500	2,525	2,525	2,525
3.16	Predikat SPI	Predikat	Predikat yang didapat berdasarkan Skor SPI hasil survey yang dilakukan oleh KPK terhadap risiko-risiko korupsi di lingkungan pemerintah kota tasikmalaya	Rentan (0-72,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)	Waspada (73-77,9)
4	Unsur Kewilayahan										
4.1	Persentase permohonan administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Kesra yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Kesra yang terlayani) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	%	(Realisasi sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan/ Target sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	%	(Realisasi data dan informasi kecamatan yang dilaporkan/Target data dan informasi kecamatan yang dilaporkan) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.4	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Pemerintahan yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Pemerintahan yang terlayani) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.5	Persentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	%	(Realisasi Peningkatan Kelurahan berprestasi/Target Peningkatan Kelurahan berprestasi) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.6	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum/Target Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.7	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar/Target permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.8	Persentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	%	(Realisasi bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar/Target bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.9	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	%	(Realisasi infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan/Target infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.10	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Ekbang/Target Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Ekbang) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.11	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administrasi Bidang Ekbang yang terlayani/ Target permohonan administrasi Bidang Ekbang yang terlayani) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.12	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Kesra/Target Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Kesra) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.13	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	%	(Realisasi penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum/Target penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum) x 100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Urusan Pemerintahan Umum										
5.1	Persentase Masyarakat Terbina Kesatuan Bangsa dan Politik	%	Jumlah masyarakat terbina kesatuan bangsa dan politik / jumlah masyarakat kota tasikmalaya usia produktif x 100%	2,47	5,97	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	16,00
5.2	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	Jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya yang menggunakan hak pilihnya/ Jumlah masyarakat yang terdaftar x 100%	81,49	N/A	N/A	N/A	N/A	86,08	N/A	86,08
5.3	Persentase Penurunan Potensi Konflik	%	Jumlah potensi konflik (thn n-1) - jumlah potensi konflik (n)/ jumlah potensi konflik (thn n-1) x 100%	20	20	20	20	20	20	20	120

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG / URUSAN / INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA						PERIODE AKHIR RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah masyarakat terbina bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan / jml masyarakat terbina yang ditargetkan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	Jumlah masyarakat terbina di bidang Pendidikan Politik/ jml masyarakat yang ditargetkan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah Ormas yang aktif / Jumlah Ormas x 100%	65	65	65	65	65	65	65	65
5.7	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	Jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan / jumlah kebijakan yang ditargetkan x 100%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase Intensitas Koordinasi antarumat Beragama	%	Jumlah realisasi intensitas koordinasi antar umat beragama/ Jumlah intensitas koordinasi antar umat beragama yang ditargetkan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.9	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	Jumlah potensi konflik yang diselesaikan/ jumlah potensi konflik x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025



BAB V

PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2045. Dengan demikian RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam implementasi visi, misi, dan program prioritas RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya. Oleh karena itu, perlu manajemen risiko untuk pengendaliannya. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

5.1. Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
2. Wali Kota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Dalam rangka mencapai target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya secara optimal;
4. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 kepada Masyarakat;
5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota;
6. Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029;
7. Kepala Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.



5.2. Pedoman Transisi

RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029 berlaku sampai dengan tahun 2029. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan diperlukan adanya pedoman untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang dilaksanakan pada Tahun 2029. Penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2025-2045 dan selanjutnya RKPD tahun 2030 menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2030 dan RAPBD tahun 2030.

Pemerintah Kota Tasikmalaya melaksanakan penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2030 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan Tahun 2029, selain itu untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan lain-lain.

Semoga RPJMD ini menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Tasikmalaya, sehingga pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

 WALI KOTA TASIKMALAYA,
VIMAN ALFARIZI RAMADHAN